



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Buku IV

RPIW Provinsi Sumatera Barat



Recana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 2025-2034

Sumatera Barat





**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.
- KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. RPIW Provinsi Aceh;
 2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
 4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
 5. RPIW Provinsi Bengkulu;
 6. RPIW Provinsi Riau;
 7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
 8. RPIW Provinsi Jambi;
 9. RPIW Provinsi Lampung;
 10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
 11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
 12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
 13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
 16. RPIW Provinsi Banten;
 17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
 18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
 19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
 20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
 22. RPIW Provinsi Bali;
 23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 25. RPIW Provinsi Gorontalo;
 26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
 27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
 28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
 29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
 30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
 31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
 32. RPIW Provinsi Maluku;
 33. RPIW Provinsi Papua;
 34. RPIW Provinsi Papua Barat;
 35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
 36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
 37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
 38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
- disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

- 37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
- 38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono



M. BASUKI HADIMULJONO
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



YUDHA MEDIAWAN

Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Yudha Mediawan



Tim Pengarah

Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.
Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.
Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc.
Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc.
Benny Hermawan, S.T., M.Sc.
Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D.
Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM
Pranoto, S.T., M.Dev.Plg.
Dr. Ir. Hari Suko Setiono, M.Eng.Sc.
Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.Sci.
Ir. Kuswardono, MCP.
Dr. Ir. Manggas Rudy Siahaan, M.Sc.

Tim Penyusun

Hasna Widiastuti, S.T., M.Eng.Sc.
Tommy Aramanda, S.T., M.T.
Fransisco, S.T., M.T.
Ruth Isabella Simamora S.T., M.P.W.K., M.Eng.
Nikmah Rima Darajat, ST

Tim Peninjau

Sinta Nur Aini, ST, MT
Dedy Pratama, SE
Mochammad Ihsanuddin Karimullah, S.T., M.P.W.K.
Chintya Jasmine Gunarso, ST



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan dalam Kebijakan	3
1.3 Urgensi Penyusunan	5
1.4 Muatan RPIW	6
1.5 Manfaat RPIW	7
1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	7
BAB II ARAH KEBIJAKAN.....	11
2.1 Kebijakan Penataan Ruang.....	13
2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	13
2.1.2 Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera	14
2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.....	16
2.2 Kebijakan Sektor	17
2.2.1 Visi Indonesia 2045.....	17
2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025	18
2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	19
2.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	21
2.2.5 Proyek Strategis Nasional.....	27
2.2.6 Visium Kementerian PUPR 2030	27
2.2.7 Renstra Kementerian PUPR 2020-2024	30
2.2.8 Kebijakan Daerah Tertinggal	32
2.2.9 Kebijakan Sektor Pariwisata	33
2.2.10 Kebijakan Sektor Transportasi	36

2.3 Agenda Global	44
2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	53
BAB III PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH.....	61
3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan	63
3.2 Profil Demografi	81
3.3 Profil Ekonomi	87
3.3.1 Penentuan Kawasan Prioritas.....	105
3.3.2 Profil dan Potensi Fokus Perkotaan	111
3.3.3 Profil dan Potensi Fokus Pariwisata.....	111
3.3.4 Profil dan Potensi Fokus Pertanian	113
3.3.5 Profil dan Potensi Fokus Kawasan Daerah Tertinggal.....	114
3.4 Profil Sosial Budaya.....	115
3.5 Profil Interaksi Antar Kawasan.....	120
BAB IV PROFIL KINERJA INFRASTRUKTUR	127
4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air.....	129
4.1.1 Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Perkotaan	136
4.1.2 Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Pariwisata	136
4.1.3 Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Pertanian	137
4.1.4 Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Daerah Tertinggal	137
4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan	138
4.2.1 Infrastruktur Jalan Fokus Perkotaan.....	148
4.2.2 Infrastruktur Jalan Fokus Pariwisata	149
4.2.3 Infrastruktur Jalan Fokus Pertanian.....	151
4.2.4 Infrastruktur Jalan Fokus Kawasan Daerah Tertinggal	152
4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman	154
4.3.1 Infrastruktur Permukiman Fokus Perkotaan	164
4.3.2 Infrastruktur Permukiman Fokus Pariwisata	166
4.3.3 Infrastruktur Permukiman Fokus Pertanian	167
4.3.4 Infrastruktur Permukiman Fokus Daerah Tertinggal	168
4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan.....	169

4.5 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR	173
4.5.1 Infrastruktur Non PUPR Fokus Perkotaan	178
4.5.2 Infrastruktur Non PUPR Fokus Pariwisata	178
4.5.3 Infrastruktur Non PUPR Fokus Pertanian.....	179
4.5.4 Infrastruktur Non PUPR Fokus Daerah Tertinggal.....	180
BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	181
5.1 Isu Strategis Provinsi	183
5.2 Isu Strategis Fokus Perencanaan	185
5.2.1 Isu Strategis Fokus Perkotaan	185
5.2.2 Isu Strategis Fokus Pariwisata	190
5.2.3 Isu Strategis Fokus Pertanian.....	194
5.2.4 Isu Strategis Fokus Kawasan Daerah Tertinggal.....	198
BAB VI SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH.....	205
6.1 Proyeksi Pertumbuhan	207
6.2 Visi dan Strategi.....	214
6.3 Skenario Pengembangan.....	214
6.3.1 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Perkotaan	217
6.3.2 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Pariwisata	222
6.3.3 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Pertanian.....	228
6.3.4 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Kawasan Daerah Tertinggal.....	233
BAB VII ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	239
7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah	241
7.1.1 Analisis Kesenjangan Infrastuktur Fokus Perkotaan PALAPA	241
7.1.2 Analisis Kesenjangan Infrastuktur Fokus Pariwisata ..	253
7.1.3 Analisis Kesenjangan Infrastuktur Fokus Pertanian....	263
7.1.4 Analisis Kesenjangan Infrastuktur Fokus Kawasan Daerah Tertinggal.....	268

7.1.5 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)277

7.2 Analisis Keterpaduan Infrastruktur 295

**BAB VIII RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR 299**

8.1. Rencana Aksi Fokus Perencanaan..... 301

8.1.1 Fokus Perkotaan 301

8.1.2 Fokus Pariwisata..... 308

8.1.3 Fokus Pertanian 312

8.1.4 Fokus Kawasan Daerah Tertinggal 316

8.2. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR..... 320

8.2.1 Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sumber
Daya Air 320

8.2.2 Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan..... 324

8.2.3 Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Permukiman.326

8.2.4 Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Perumahan ..332

**BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW
..... 339**

9.1 Latar Belakang Pemantauan dan Evaluasi..... 341

9.2 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi 342

9.3 Jenis Pemantauan dan Evaluasi 342

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Pengembangan Wilayah Sumatera Barat	26
Tabel 2.2	Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Barat.	27
Tabel 2.3	Visium Kementerian PUPR 2030	28
Tabel 2.4	Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan	30
Tabel 2.5	Daftar Daerah Tertinggal di Pulau Sumatera.....	32
Tabel 2.6	Bandar Udara Eksisting di Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 2.7	Pengembangan Kawasan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Menurut Agenda Global	44
Tabel 2.8	Sintesa Kebijakan Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat	53
Tabel 2.9	Konteks Perencanaan dan Kawasan Strategis Sumatera Barat	58
Tabel 3.1	Luas Wilayah di Provinsi Sumatera Barat	64
Tabel 3.2	Kawasan Rawan Bencana Provinsi Sumatera Barat.....	71
Tabel 3.3	Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat	72
Tabel 3.4	Wilayah Sungai Nasional Provinsi Sumatera Barat.....	74
Tabel 3.5	Wilayah Sungai Non-Nasional/Daerah Provinsi Sumatera Barat	74
Tabel 3.6	Daftar DAS Provinsi Sumatera Barat.....	76
Tabel 3.7	Kondisi WS Indragiri-Akuaman	77
Tabel 3.8	WS Batanghari yang melintasi wilayah Provinsi Sumatera Barat	77
Tabel 3.9	Figur Daya Dukung Lahan (Berdasarkan <i>Multi Criteria Analysis</i> (MCA))	79
Tabel 3.10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Sumatera Barat (Juta Rupiah)	90
Tabel 3.11	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja	94
Tabel 3.12	Produksi Komoditas Cengkeh, Kelapa Sawit, dan Karet.....	98
Tabel 3.13	Penentuan Kawasan Prioritas Perkotaan	105
Tabel 3.14	Penentuan Kawasan Prioritas Pariwisata	107
Tabel 3.15	Penentuan Kawasan Prioritas Pertanian.....	109
Tabel 3.16	Penentuan Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal.....	110
Tabel 3.17	Kawasan Priortas Provinsi Sumatera Barat	110
Tabel 3.18	Daftar Nama Wilayah Adat Di Provinsi Sumatera Barat.....	117
Tabel 4.1	Daftar Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Barat	129
Tabel 4.2	Daftar Sistem Air Baku di Provinsi Sumatera Barat	131
Tabel 4.3	Daftar Daerah Irigasi Provinsi Sumatera Barat.....	132

Tabel 4.4	Daerah Irigasi Kewenangan TP-OP Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat	133
Tabel 4.5	Daftar Luas Bahaya Bencana Banjir Provinsi Sumatera Barat	133
Tabel 4.6	Daftar Pengendali Banjir Provinsi Sumatera Barat	134
Tabel 4.7	Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Perkotaan	136
Tabel 4.8	Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Pariwisata	137
Tabel 4.9	Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Pertanian	137
Tabel 4.10	Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Daerah Tertinggal	138
Tabel 4.11	Daftar Status Jalan di Provinsi Sumatera Barat	138
Tabel 4.12	Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2022	139
Tabel 4.13	Rekap Progres Ruas Konstruksi Jalan Tol di Pulau Sumatera	140
Tabel 4.14	Rekap Kemantapan Jalan di Sumatera Barat	142
Tabel 4.15	Profil Dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Perkotaan	148
Tabel 4.16	Tingkat Pelayanan Jalan Fokus Perkotaan Tahun 2020	149
Tabel 4.17	Profil Dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Pariwisata	150
Tabel 4.18	Tingkat Pelayanan Jalan Fokus Pariwisata Tahun 2020	150
Tabel 4.19	Profil Dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Pertanian	151
Tabel 4.20	Tingkat Pelayanan Jalan Fokus Pertanian Tahun 2020	152
Tabel 4.21	Tingkat Pelayanan Jalan Fokus Pertanian Tahun 2020	152
Tabel 4.22	Data SPAM Provinsi Sumatera Barat	154
Tabel 4.23	Daftar Lokasi SPAM di Provinsi Sumatera Barat	155
Tabel 4.24	Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	156
Tabel 4.25	Daftar IPAL dan IPLT	156
Tabel 4.26	Daftar TPA Provinsi Sumatera Barat	157
Tabel 4.27	Daftar Kawasan Kumuh Provinsi Sumatera Barat	159
Tabel 4.28	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Perkotaan	164
Tabel 4.29	Profil Infrastruktur Air Minum Fokus Perkotaan	164
Tabel 4.30	Profil Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Fokus Perkotaan	166
Tabel 4.31	Profil Infrastruktur Persampahan Fokus Perkotaan	166

Tabel 4.32	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Pariwisata	167
Tabel 4.33	Profil Infrastruktur Air Minum Fokus Pariwisata	167
Tabel 4.34	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Pertanian	167
Tabel 4.35	Profil Infrastruktur Air Minum Fokus Pertanian.....	168
Tabel 4.36	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Daerah Tertinggal.....	168
Tabel 4.37	Profil Infrastruktur Air Minum Fokus Daerah Tertinggal.....	169
Tabel 4.38	Jumlah RTLH di Provinsi Sumatera Barat	169
Tabel 4.39	Jumlah Kepemilikan Rumah dan Backlog Provinsi Sumatera Barat	171
Tabel 4.40	Jumlah Penumpang melalui Bandara Minangkabau.....	173
Tabel 4.41	Jumlah Barang melalui Bandara Minangkabau	173
Tabel 4.42	Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang	173
Tabel 4.43	Jumlah Barang melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang	174
Tabel 4.44	Jumlah Penumpang Kereta Api.....	174
Tabel 4.45	Jumlah Volume Angkutan Barang Kereta Api	174
Tabel 4.46	Profil dan Kinerja Infrastruktur Fokus Perkotaan	177
Tabel 4.47	Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Perkotaan	178
Tabel 4.48	Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Pariwisata	179
Tabel 4.49	Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Pertanian	179
Tabel 4.50	Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan Daerah Tertinggal.....	180
Tabel 5.1	Perumusan Isu Strategis Fokus Perkotaan	187
Tabel 5.2	Perumusan Isu Strategis Fokus Pariwisata	192
Tabel 5.3	Perumusan Isu Strategis Fokus Pertanian	196
Tabel 5.4	Perumusan Isu Strategis Fokus Kawasan Daerah Tertinggal.....	200
Tabel 6.1	Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Barat	210
Tabel 6.2	Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat.....	211
Tabel 6.3	Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Barat	212
Tabel 6.4	Analisis Pestle Fokus Perkotaan.....	217
Tabel 6.5	Analisis <i>Porter's Five Forces</i> Fokus Perkotaan	218
Tabel 6.6	Pembobotan IFAS Sektor Perkotaan	220
Tabel 6.7	Pembobotan EFAS Sektor Perkotaan	220

Tabel 6.8	Analisis Pestle Fokus Pariwisata	223
Tabel 6.9	Analisis <i>Porter's Five Forces</i> Fokus Pariwisata	223
Tabel 6.10	Pembobotan IFAS Sektor Pariwisata	225
Tabel 6.11	Pembobotan EFAS Sektor Pariwisata	226
Tabel 6.12	Analisis Pestle Fokus Pertanian	228
Tabel 6.13	Analisis <i>Porter's Five Forces</i> Fokus Pertanian	229
Tabel 6.14	Pembobotan IFAS Sektor Pertanian	230
Tabel 6.15	Pembobotan EFAS Sektor Pertanian	231
Tabel 6.16	Analisis Pestle Fokus Kawasan Daerah Tertinggal	233
Tabel 6.17	Analisis <i>Porter's Five Forces</i> Fokus Perkotaan	234
Tabel 6.18	Pembobotan IFAS Sektor Kawasan Daerah Tertinggal	235
Tabel 6.19	Pembobotan EFAS Sektor Kawasan Daerah Tertinggal	236
Tabel 7.1	Proyeksi Penduduk Perkotaan Palapa	241
Tabel 7.2	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Perkotaan	241
Tabel 7.3	Proyeksi Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Fokus Perkotaan PALAPA	246
Tabel 7.4	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kawasan Perkotaan	248
Tabel 7.5	Proyeksi Timbulan Persampahan Kawasan Perkotaan	249
Tabel 7.6	Proyeksi Air Limbah Kawasan Perkotaan	250
Tabel 7.7	Proyeksi Penduduk KSPN Bukittinggi	253
Tabel 7.8	Proyeksi Kebutuhan Air Baku di Kawasan Prioritas Pariwisata	253
Tabel 7.9	Proyeksi Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Fokus Pariwisata KSPN Bukittinggi	258
Tabel 7.10	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan Prioritas Pariwisata	260
Tabel 7.11	Proyeksi Timbulan Persampahan di Kawasan Prioritas Pariwisata	261
Tabel 7.12	Proyeksi Air Limbah Kawasan Prioritas Pariwisata	262
Tabel 7.13	Proyeksi Penduduk Kawasan Prioritas Pertanian - Kabupaten Agam	263
Tabel 7.14	Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Agam	264
Tabel 7.15	Proyeksi Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Agam	264
Tabel 7.16	Proyeksi Kebutuhan Air Baku di Kawasan Prioritas Pertanian	264
Tabel 7.17	Proyeksi Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Fokus Pertanian	267
Tabel 7.18	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan Prioritas Pertanian	268

Tabel 7.19	Proyeksi Penduduk Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai.....	268
Tabel 7.20	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai	269
Tabel 7.21	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai	269
Tabel 7.22	Proyeksi Timbulan Persampahan Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai	270
Tabel 7.23	Proyeksi Air Limbah Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai.....	270
Tabel 7.24	Proyeksi Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Fokus Kawasan Daerah Tertinggal.....	275
Tabel 7.25	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kota/Kab di Sumatera Barat.....	278
Tabel 7.26	Analisis Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan di Provinsi Sumatera Barat	279
Tabel 7.27	Kebutuhan Infrastruktur Sistem Pelayanan Air Minum Provinsi Sumatera Barat	284
Tabel 7.28	Presentase Kesenjangan Sistem Pelayanan Air Minum Provinsi Sumatera Barat	286
Tabel 7.29	Kebutuhan Infrastruktur Persampahan Provinsi Sumatera Barat	287
Tabel 7.30	Proyeksi Timbulan Persampahan Kota/Kab di Sumatera Barat	289
Tabel 7.31	Analisis Infrastruktur Sistem Pelayanan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat	290
Tabel 7.32	Proyeksi Timbulan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat.....	293
Tabel 7.33	Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Sumatera Barat	294
Tabel 7.34	Keterpaduan Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat...	296
Tabel 8.1	Rencana Aksi Fokus Perkotaan	301
Tabel 8.2	Rencana Aksi Fokus Pariwisata	308
Tabel 8.3	Rencana Aksi Fokus Pertanian	312
Tabel 8.4	Rencana Aksi Fokus Kawasan Daerah Tertinggal.....	316
Tabel 8.5	Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air.....	320
Tabel 8.6	Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	324
Tabel 8.7	Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Permukiman.....	326
Tabel 8.8	Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Perumahan.....	332

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	3
Gambar 1.2	Kedudukan Dokumen RPIW Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 1.3	Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	9
Gambar 2.1	Peta Sintesa Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	25
Gambar 2.2	Peta Sistem Kota dan Struktur Provinsi Sumatera ...	26
Gambar 2.3	Target Visium Tahun 2020-2024 dan 2030	29
Gambar 2.4	Destinasi Wisata Provinsi Sumatera Barat	35
Gambar 2.5	Peta Pengembangan Wilayah Sumatera Barat.....	38
Gambar 2.6	Peta Jaringan Kebandarudaraan.....	39
Gambar 2.7	Peta Jaringan Kepelabuhan.....	40
Gambar 2.8	Peta Jaringan Kereta Api.....	41
Gambar 2.9	Peta Kawasan Tambang Ombilin.....	42
Gambar 2.10	Peta Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat	43
Gambar 2.11	Tujuan <i>New Urban Agenda</i>	49
Gambar 2.12	Agenda <i>Paris Agreement</i>	50
Gambar 2.13	Agenda Sendai <i>Framework</i>	51
Gambar 2.14	Agenda SDGs.....	53
Gambar 2.15	Peta Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	59
Gambar 3.1	Peta Lokasi Wilayah dan Batas Administrasi Provinsi Sumatera	65
Gambar 3.2	Peta Topografi dan Geologi Provinsi Sumatera Barat	67
Gambar 3.3	Peta Curah Hujan Provinsi Sumatera Barat.....	68
Gambar 3.4	Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat	69
Gambar 3.5	Peta Tutupan Lahan Tahun 2020	70
Gambar 3.6	Peta Kawasan Rawan Bencana Provinsi Sumatera Barat	73
Gambar 3.7	Peta Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Barat	75
Gambar 3.8	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Provinsi Sumatera Barat	80
Gambar 3.9	Grafik Jumlah Penduduk.....	81
Gambar 3.10	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	82
Gambar 3.11	Peta Kepadatan Penduduk	83
Gambar 3.12	Peta Jumlah Angkatan Kerja	84

Gambar 3.13	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat	85
Gambar 3.14	Peta Indeks Pembangunan Manusia	86
Gambar 3.15	Diagram Persentase Distribusi PDRB Sektor Unggulan Sumatera Barat Terhadap PDRB Nasional	87
Gambar 3.16	Pertumbuhan PDRB dan PDB ADHK.....	88
Gambar 3.17	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Sumatera Triwulan 1 2022	88
Gambar 3.18	Pertumbuhan PDRB Per Lapangan Usaha Semua Sumatera Barat	89
Gambar 3.19	Peta PDRB dan Pendapatan Perkapita Wilayah.....	93
Gambar 3.20	Diagram Komoditas Unggulan.....	96
Gambar 3.21	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sumatera Barat	97
Gambar 3.22	Nilai Ekspor berdasarkan Komoditi.....	99
Gambar 3.23	Peta Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Barat.....	100
Gambar 3.24	Kunjungan Wisatawan Nusantara tahun 2021.....	101
Gambar 3.25	Jumlah Akomodasi di Pulau Sumatera Barat	102
Gambar 3.26	Rata-Rata Lama Menginap.....	102
Gambar 3.27	Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara	103
Gambar 3.28	Peta <i>Origin Destination</i>	104
Gambar 3.29	Istana Pagaruyung	116
Gambar 3.30	Rumah Gadang.....	117
Gambar 3.31	Peta Kawasan Perdesaan Nasional di Provinsi Sumatera Barat	119
Gambar 3.32	Peta Pola Interaksi Kawasan Provinsi Sumatera Barat	125
Gambar 3.33	Peta Konstelasi Wilayah	126
Gambar 4.1	Peta Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat	135
Gambar 4.2	Kondisi Permukaan Jalan dan Jenis Permukaan Jalan.....	138
Gambar 4.3	Tingkat Aksesibilitas Jalan Tahun 2022	139
Gambar 4.4	Peta Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	147
Gambar 4.5	Peta Kawasan Kumuh	160
Gambar 4.6	Peta Sebaran IPAL/IPLT	161
Gambar 4.7	Peta Sebaran TPS/TPA	162
Gambar 4.8	Peta Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Barat	163
Gambar 4.9	Simpul transportasi di Provinsi Sumatera Barat.....	173

Gambar 4.10	Peta Infrastruktur Non PUPR Provinsi Sumatera Barat	175
Gambar 4.11	Peta Jaringan Transportasi Regional Provinsi Sumatera Barat	176
Gambar 5.1	Peta Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat	184
Gambar 5.2	Peta Konektivitas Intra dan antar Pulau dalam rangka Pemerataan Pembangunan	203
Gambar 5.3	Peta Pembangunan, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.....	204
Gambar 6.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023, 2025, 2029 dan 2034	207
Gambar 6.2	Grafik Kepadatan Penduduk tahun 2034	208
Gambar 6.3	Peta Kepadatan Penduduk Bruto dan Netto Provinsi Sumatera Barat	209
Gambar 6.4	Peta Skenario Pengembangan Sumatera Barat	215
Gambar 6.5	Peta Penataan Kawasan Provinsi Sumatera Barat...	216
Gambar 6.6	Analisis SWOT Kawasan Perkotaan.....	221
Gambar 6.7	Analisis SWOT Kawasan Pariwisata.....	227
Gambar 6.8	Analisis SWOT Kawasan Pertanian	232
Gambar 6.9	Analisis SWOT Kawasan Daerah Tertinggal	237
Gambar 7.1	Peta Kondisi Eksisting Rawan Bencana Banjir	244
Gambar 7.2	Peta Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Tahun 2020..	247
Gambar 7.3	Proyeksi Sistem Penyediaan Air Minum	248
Gambar 7.4	Proyeksi Kebutuhan Penanganan Persampahan ...	250
Gambar 7.5	Proyeksi Kebutuhan Penanganan Air Limbah-Grey Water	251
Gambar 7.6	Proyeksi Kebutuhan Penanganan Air Limbah-Black Water	251
Gambar 7.7	Isu Permasalahan Tiap Sektor di Kawasan Perkotaan PALAPA	252
Gambar 7.8	Peta Rawan Bencana Klaster Wisata Koridor Bukittinggi-Solok.....	255
Gambar 7.9	Peta Tingkat Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	259
Gambar 7.10	Proyeksi Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum.....	260
Gambar 7.11	Proyeksi Kebutuhan Penanganan Persampahan.....	261
Gambar 7.12	Proyeksi Kebutuhan Penanganan Air Limbah-Black Water	262
Gambar 7.13	Proyeksi Kebutuhan Penanganan Air Limbah-Grey Water	262
Gambar 7.14	Total Kebutuhan Air Bersih, Kapasitas Produksi dan Terpasang, GAP Terpasang-Kebutuhan	269

Gambar 7.15	Peta Potensi Ketersediaan Air Mentawai dsb.....	272
Gambar 7.16	Peta Sebaran Lokasi Rawan Bencana Banjir Kepulauan Mentawai	273
Gambar 7.17	Peta Jaringan Jalan Kepulauan Mentawai	276
Gambar 8.1	Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Fokus Perkotaan.....	307
Gambar 8.2	Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Fokus Pariwisata	311
Gambar 8.3	Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Fokus Pertanian.....	315
Gambar 8.4	Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Fokus Daerah Tertinggal.....	319
Gambar 8.5	Peta <i>Ultimate</i> Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan Palapa	333
Gambar 8.6	Peta <i>Ultimate</i> Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR KSPN Bukittinggi.....	334
Gambar 8.7	Peta <i>Ultimate</i> Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR KPPN Agam	335
Gambar 8.8	Peta <i>Ultimate</i> Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai	336
Gambar 8.9	Peta <i>Ultimate</i> Infrastruktur Antar Kawasan Provinsi Sumatera Barat	337



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis dalam memasuki periode ke 4 RPJPN. Perpres No. 18 tahun 2018 tentang RPJMN Nasional 2020-2024 menetapkan sasaran pokok pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Salah satu pendekatan dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan tersebut diantaranya melalui pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah (*regional development*) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat dibutuhkan untuk mengkaji kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan geografis secara terpadu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi nyata wilayah masing-masing. Pada periode RPJMN ini, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau, termasuk Pulau Sumatera.

Pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan sektor unggulan yang menjadi komoditas unggulan Provinsi Sumatera Barat yaitu di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; serta transportasi dan pergudangan.

Pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

Pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan sektor unggulan dimana yang menjadi komoditas unggulan Provinsi Sumatera Barat yaitu kelapa sawit, karet, kakao, dan kelapa dalam. Selain itu, pembangunan wilayah dilakukan melalui pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi, serta melalui penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan kekuatan ekonomi yang bertumpu pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,71%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,77%) dan Transportasi dan Pergudangan (10,30%). Luas Wilayah 42.012,89 km², terluas ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mencapai 6.011,35 km² atau 14,31% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.580.232 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat per tahun sebesar 1,1%. Terdapat beberapa isu yang menjadi permasalahan pengembangan Provinsi Sumatera Barat antara lain ketimpangan wilayah, kebencanaan, dan konektivitas. Kondisi geografis di Provinsi Sumatera Barat mempunyai aneka ragam limitasi dan merupakan kawasan rawan bencana, yaitu di sepanjang timur merupakan deretan pegunungan yaitu bukit barisan, secara perhitungan 37,49% luas wilayah di Sumatera Barat adalah lokasi rawan bencana. Oleh karena itu, setiap kegiatan berbasis pembangunan harus memperhatikan hal tersebut.

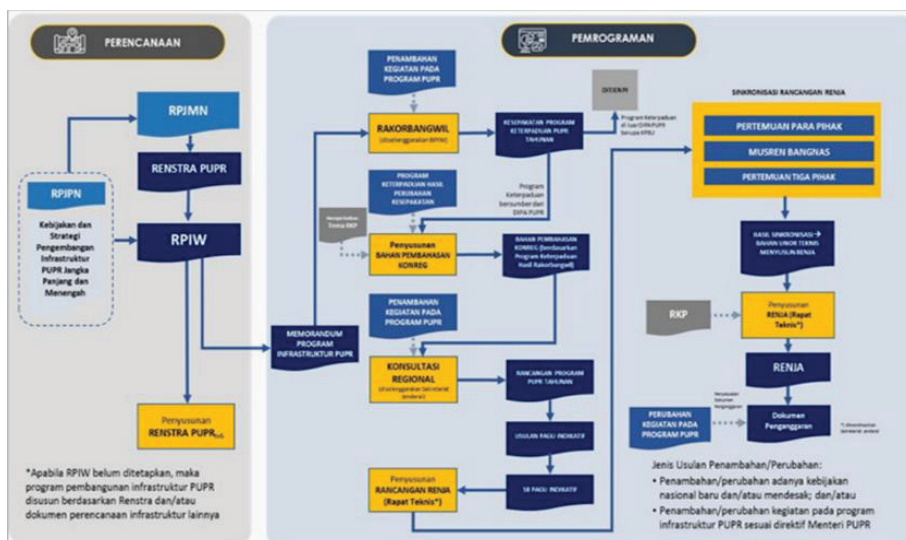
Pembangunan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan di Provinsi Sumatera Barat mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pada berbagai tingkatan kementerian/lembaga. Salah satu dokumen yang dijadikan panduan adalah Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pulau Sumatera. Pendekatan pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan Arahana Nasional dan Prioritas Nasional 2020-2024 di Provinsi Sumatera Barat, yang antara lain mendukung kawasan metropolitan, perkotaan, kawasan ekonomi/kawasan industri, destinasi pariwisata prioritas, kawasan perdesaan prioritas nasional, konektivitas multimoda, pusat kegiatan strategis nasional, Daerah Tertinggal, serta Pulau 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).

Provinsi Sumatera Barat mempunyai kekhasan baik dari sosial budaya maupun karakter geografis alamnya. Untuk mengembangkan potensi daerah serta meminimalisir kendala dan permasalahan dari kondisi yang ada, maka diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang terarah, terpadu, dan menyeluruh

dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Merujuk pada berbagai informasi di atas, maka diperlukan Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi masukan informasi dalam penyusunan RPJMN, Renstra PUPR dan dokumen perencanaan PUPR lainnya serta sebagai acuan pemrograman dalam penyusunan Renja Kementerian PUPR.

1.2 Kedudukan dalam Kebijakan

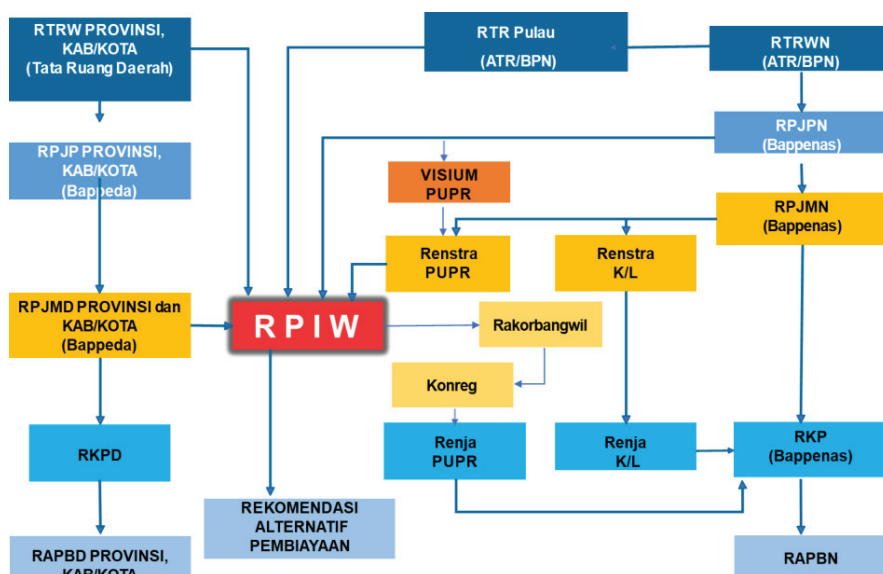
Kedudukan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau RPIW merupakan paduan dari beberapa kebijakan lain, di antaranya. Renstra PUPR, RPJMD Provinsi/ Kab dan Kota, RTRW Provinsi, RTR Pulau Visium PUPR, RPJMN dll. RPIW Provinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai pendetailan dari Rencana Strategis PUPR serta telaahan strategis lanjutan dari dokumen perencanaan skala nasional. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dalam kebijakan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR
Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021

Berdasarkan Gambar 1.1., Penyusunan RPIW merujuk pada arah kebijakan RPJPN yang diturunkan menjadi RPJMN 5 tahunan sebagai dasar penyusunan Renstra. Posisi RPIW secara ideal merupakan

dasar bagi penyusunan Renstra PUPR selanjutnya. Namun apabila RPIW belum ditetapkan, maka program pembangunan infrastruktur PUPR disusun berdasarkan Renstra dan/atau dokumen perencanaan infrastruktur lainnya. Materi dalam RPIW juga akan menjadi dasar dalam memorandum program bidang PUPR yang akan dibawa ke Rakorbangwil dengan hasil akhir di PUPR berupa kesepakatan Konsultasi Regional. Hasil kesepakatan konsultasi regional akan menjadi dasar Kementerian dalam menyusun Renja dan RKP bersama Bappenas. Kemudian kedudukan RPIW di antara dokumen perencanaan lainnya di luar kementerian PUPR terdapat pada Gambar 1.2, bahwa RPIW juga mempertimbangkan dokumen perencanaan di daerah yaitu RTR dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu isi RPIW juga mempertimbangkan renstra yang dimiliki oleh K/L terkait khususnya berkaitan dengan dukungan kebutuhan infrastruktur PUPR dalam penyelenggaraan kawasan tematik di wilayah.



Gambar 1.2 Kedudukan Dokumen RPIW Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Petunjuk Teknis RPIW

1.3 Urgensi Penyusunan

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai upaya untuk keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah/kawasan sebagaimana diamanatkan terutama dalam RPJMN 2020 -2024. Upaya ini sekaligus untuk menjabarkan Visium PUPR 2030 yang memperhatikan Visi Indonesia 2045. Infrastruktur PUPR yang diintegrasikan pada skala wilayah provinsi meliputi infrastruktur sektor jalan, sumber daya air, permukiman dan perumahan.

Adapun urgensi penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumatera Barat adalah:

1. Sebagai upaya peningkatan keterpaduan, agar dapat sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah serta sejalan dengan Visium PUPR 2030 yang memfokuskan pada keterpaduan infrastruktur sektor jalan, sumber daya air, permukiman, dan perumahan.
2. Sebagai upaya penyelarasan kebijakan kewilayahan (RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RPJP Provinsi /Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RTR Pulau, dan RTRWN) untuk menjadi salah satu dasar pembahasan dalam Rakorbangwil guna menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR.
3. Sebagai dasar upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional melalui tiga kerangka utama yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan.

Kerangka waktu yang digunakan dalam RPIW adalah jangka waktu sepuluh tahun. Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW memiliki tugas dan fungsi menyusun rencana induk pulau/kepulauan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019, penyusunan rencana induk infrastruktur PUPR menjadi salah satu sasaran kegiatan utama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam menjalankan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur akan dilakukan berdasarkan arahan nasional dan prioritas nasional 2020-2024, maka RPIW Provinsi Sumatera Barat disusun untuk mendukung perwujudan arah pengembangan wilayah yang termuat pada RPIW Pulau Sumatera.

1.4 Muatan RPIW

Bagian Muatan RPIW menguraikan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Pendahuluan, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW
2. Arah Kebijakan, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;
3. Profil Wilayah dan Potensi Daerah, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. Profil dan Kinerja Infrastruktur, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR;
5. Permasalahan dan Isu Strategis, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. Skenario Pengembangan Wilayah, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritas);
7. Analisis Kebutuhan Infrastruktur, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
9. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5 Manfaat RPIW

Tujuan Penyusunan RPIW adalah menyusun dokumen kebijakan teknis program keterpaduan dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR untuk pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Penyusunan RPIW meliputi tersusunnya *baseline* data/profil, kendala dan potensi, skenario pengembangan, analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur PUPR, dan tersusunnya Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Manfaat penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yaitu:

- a. Manfaat RPIW sebagai dasar memadukan kebijakan nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) ke dalam rencana pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- b. Manfaat RPIW sebagai acuan pemrograman dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR melalui mekanisme perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR; dan
- c. Manfaat RPIW sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan PUPR lainnya.

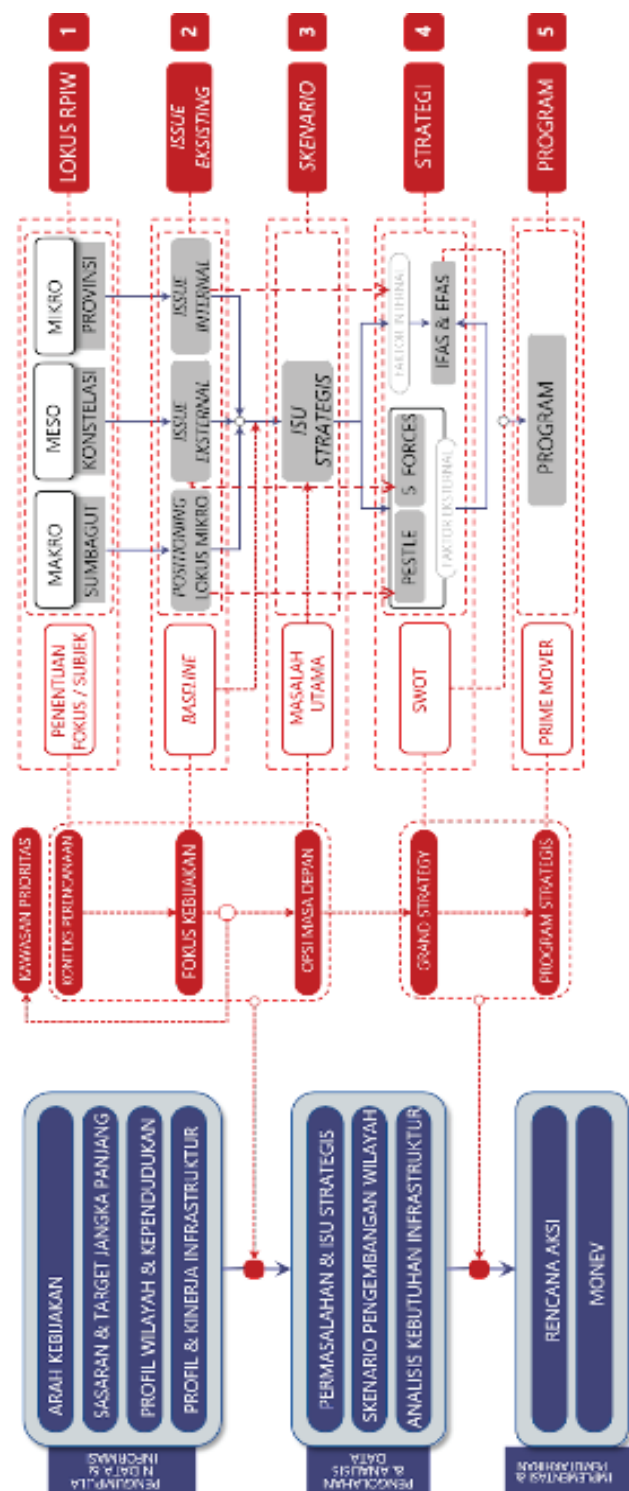
1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Proses penyusunan RPIW melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data & Informasi
 - Arah kebijakan (penataan ruang, sektor, dan agenda global) akan menentukan **fokus perencanaan dan kawasan prioritas**.
 - Sasaran & target jangka panjang memuat **kondisi di masa depan** sesuai fokus perencanaan dan strategi Unit Organisasi PUPR.
 - Profil wilayah & kependudukan akan menggambarkan **kondisi eksisting wilayah yang berkaitan fisik kebencanaan, kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya**.

- Profil & kinerja infrastruktur yang bermanfaat untuk mengetahui **kondisi eksisting infrastruktur**.
- b. Perumusan Isu Strategis
- **Penentuan konteks perencanaan** meliputi fokus dan lokus makro, meso, dan mikro pada wilayah pengembangan.
 - Perumusan **sintesa fokus kebijakan** untuk mengelaborasi kondisi eksisting wilayah yang meliputi isu lokus mikro di tingkat makro, isu eksternal di tingkat meso, dan isu internal di tingkat mikro.
 - Identifikasi fokus kebijakan dan kondisi eksisting wilayah akan digunakan dalam **menentukan kawasan prioritas pengembangan wilayah**.
 - Selanjutnya untuk **menentukan isu strategis** melalui keterpaduan isu wilayah, masalah utama dan opsi masa depan Kawasan prioritas sesuai fokus perencanaan.
- c. Pengolahan & Analisis Data:
- Permasalahan & isu strategis akan menggambarkan **kondisi yang ingin diselesaikan di wilayah pengembangan**
 - Skenario pengembangan wilayah akan menghasilkan **grand strategy** per fokus perencanaan pada wilayah pengembangan
 - Analisis kebutuhan infrastruktur akan menghitung **gap kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan infrastruktur** di masa depan
 - Setelah pengolahan dan analisis data, dilakukan penyusunan grand strategy dirumuskan melalui analisis eksternal (PESTLE & 5 FORCES) dan analisis internal SWOT. Selanjutnya, grand strategy akan digunakan untuk penyusunan program perencanaan.
- d. Implementasi & Pemutakhiran:
- **Rencana aksi** akan mengasilkan daftar kegiatan dan rencana aksi pembangunan infrastruktur secara spesifik pada setiap unit organisasi atau instansi penanggungjawab lain.
 - **Monitoring & Evaluasi** akan memantau keberlangsungan kegiatan pembangunan infrastruktur dan menilai kebermanfaatan dari pembangunan.

Bagan Kerangka Pikir Alur Penyusunan RPIW memuat tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, sampai implementasi dan pemutakhiran sebagai berikut.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW
Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2023



BAB 2

ARAH KEBIJAKAN



2.1 Kebijakan Penataan Ruang

Pada subbab ini membahas arahan dan kebijakan penataan ruang antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dikembangkan sesuai daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*). Keterpaduan infrastruktur yang diharapkan yakni dapat menjaga daya dukung dan mengakomodir daya tampung yang ada pada setiap entitas ruang-ruang wilayah di Indonesia. menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Untuk mencapai kebijakan tersebut dibutuhkan strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kebijakan pengembangan struktur ruang dalam RTRWN, meliputi:

- Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKN) Padang - Lubuk Alung - Pariaman (Palapa), dan 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Pariaman, Sawahlunto, Muara Siberut, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh dan Tuapejat.

PKN Padang ditetapkan dengan fungsi pelayanan atas sektor industri, perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Selain itu, PKN Padang diharapkan dapat saling terkait dengan PKN Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN

Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang. Dengan memperhatikan perkembangan PKN Padang yang menjalar (urban sprawl), mengembangkan /meningkatkan fungsi PKN Padang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, serta mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Padang sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Kawasan Danau Maninjau, Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci - Seblat, dan Kawasan Perbatasan Negara Laut Lepas. Wilayah Sungai (WS) terdiri dari WS Batang Natal-Batang Batahan, WS Rokan, WS Kampar, Indragiri-Akuaman, yang seluruhnya merupakan sungai lintas provinsi.

2.1.2 Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata. Pulau Sumatera diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global. Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat - pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antar moda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan strategis Pulau Sumatera berdasarkan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera yang tertuang di dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2012, terdiri dari:

1. Pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan;
2. Swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
3. Kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
4. Pusat Industri yang berdaya saing;
5. Pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bagari, cagar budaya, dan ilmu pengetahuan serta MICE;

6. Kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
7. Kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah;
8. Kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
9. Pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur;
10. Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah;
11. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertanahan, dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional RTRWN. Strategi operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Provinsi Sumatera Barat:

- Mengembangkan PKN Padang, PKW Sawahlunto, PKW Bukittinggi, PKW Solok sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan;
- Mengembangkan PKN Padang, PKW Sawahlunto, dan PKW Solo sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
- Mengembangkan PKN Padang dan PKW Bukittinggi untuk kegiatan industri kreatif;
- Mengendalikan perkembangan PKN, PKW, dan PKSN di kawasan rawan bencana:
 - kawasan rawan bencana tsunami di wilayah pesisir: PKN Padang, PKW Pariaman, PKW Muara Siberut
 - kawasan rawan bencana longsor: PKN Padang, PKW Bukittinggi, PKW Solok
 - kawasan rawan gempa bumi: PKN Padang, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Pariaman
- Meningkatkan keterkaitan antar PKN dan antar KW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata.

2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012, Sistem perkotaan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada RTRW Nasional Wilayah (PKW) terdiri atas PKW Bukittinggi, PKW Pariaman menetapkan:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu PKN Padang
- Pusat Kegiatan, PKW Sawahlunto, PKW Solok, PKW Muara Siberut,
- Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi (PKWp) terdiri atas: PKWp Payakumbuh, PKWp Pulau Punjung, PKWp Tapan, dan PKWp Simpang Empat.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan Painan, Kawasan Perkotaan Padang Panjang, Kawasan Perkotaan Lubuk Basung, Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung, Kawasan Perkotaan Parit Malintang, Kawasan Perkotaan Pulau Punjung, Kawasan Perkotaan Tapan, Kawasan Perkotaan Simpang Empat, Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping dan Kawasan Perkotaan Batu.

RTRW Provinsi Sumatera Barat menetapkan kawasan strategis dari menurut sudut kepentingannya, sebagai berikut:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
 - Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Poros Barat-Timur, meliputi: koridor jalan nasional dari Kota Padang sampai batas Provinsi Riau yang berada di wilayah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Palapa meliputi: Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman;
 - Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang;
 - Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Silaping di Kabupaten Pasaman Barat;
 - Kawasan Pertumbuhan Ekonomi untuk pengolahan/pemurnian minyak bumi di Kecamatan Sei Beremas dan sekitarnya di Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - Kawasan pertumbuhan ekonomi Khusus Mentawai.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

- Kawasan Batusangkar dan sekitarnya di Kabupaten Tanah Datar;
 - Kawasan Silokek di Kabupaten Sijunjung;
 - Kawasan Seribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan; dan
 - Kawasan Mande Rubiah di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi;
- Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar;
 - Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok; dan
 - Waduk Koto Panjang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah, melalui:

- perwujudan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
- peningkatan akses wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan jalan kolektor primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai;
- pengembangan sistem transportasi kereta api di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera;
- peningkatan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi Sumatera Barat untuk angkutan barang dan penumpang.

2.2 Kebijakan Sektor

2.2.1 Visi Indonesia 2045

Pemerintah menargetkan Indonesia menuju negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045. Terkait hal tersebut, Pulau Sumatera diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% per tahun hingga tahun 2045. Pulau Sumatera juga diarahkan menjadi basis industri baru dan gerbang kawasan Asia pada tahun 2045. Pada aspek pembangunan dan pemerataan infrastruktur, akan dibangun konektivitas darat berupa Jalan Tol di Pulau Sumatera.

Terkait pembangunan infrastruktur, infrastruktur PUPR diharapkan untuk (1) meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, (2) mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, (3) memenuhi prasarana dasar, (4) mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta (5) antisipasi terhadap perubahan iklim.

Adapun Sasaran Utama Pembangunan Infrastruktur 2045 yaitu:

1. Penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau; jalan tol Jawa dan Sumatera; jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua; serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untuk mengantisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa.
2. Pembangunan dan peningkatan akses prasarana dasar (kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim).
3. Penurunan biaya logistik terhadap PDB menjadi 8%.
4. Peningkatan kemampuan konektivitas *broadband* mencapai 100 GBPS.
5. Pembangunan pelabuhan hub internasional di 7 lokasi prioritas.
6. Pasokan listrik per kapita mencapai 7000 Kwh .
7. Pembangunan dan peningkatan sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi sampai dengan 30% dari sumber energi total di Indonesia.
8. Perwujudan 4 kota aerotropolis di Indonesia.

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan berdasarkan RPJPNasional Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka Panjang nasional.

2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Kebijakan strategis Pulau Sumatera berdasarkan RPJMN 2020 - 2024 yang tertuang di dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020, terdiri dari:

1. Transformasi ekonomi mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan, dan tambang;
2. Optimalisasi manfaat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara, dan Pelabuhan;
3. Pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera;
4. Hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Arah pengembangan Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung

energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia- Malaysia-Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 salah satunya melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan Investasi di sektor riil dan industrialisasi dengan pengembangan destinasi wisata diantaranya Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bukittinggi-Padang dengan meningkatkan jumlah desa wisata yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata tersebut. Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; konektivitas melalui Tol Trans Sumatera, Penanganan Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, Pembangunan KA Trans Sumatera, Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru), dan lainnya. Pengembangan kota Padang, Bukittinggi, Kota Solok.

Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan dilakukan dengan Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dari 7 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatera, 6 kabupaten termasuk dalam koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain:

Pesisir Barat di Provinsi Lampung, PPKT Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat; Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKN) dan koperasi salahsatunya dengan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Agam. Dalam hal revitalisasi kawasan transmigrasi melalui Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2021, Strategi pengembangan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan;
- Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi;
- Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan;
- Permasalahan pembangunan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut:
 - Belum meratanya konektivitas jalan antar daerah kabupaten/kota, provinsi tetangga, jalan mitigasi bencana, jalan menuju kawasan strategis, dan akses jalan pesisir pantai barat Pulau Sumatera.
 - Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak akibat muatan lebih, kejadian bencana alam, dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan jalan
 - Belum optimalnya pelayanan air minum disebabkan keterbatasan sumber air baku untuk SPAM Regional dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - Keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA regional dan IPLT di beberapa kabupaten/kota.
 - Masih belum tuntasnya pembangunan beberapa bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi dan bangunan

evakuasi sementara (shelter) pada daerah kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera.

- Kurang fokusnya pembangunan terhadap penataan bangunan dan lingkungannya pada Kawasan Strategis
- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran (RTRW yang belum dibuat dan dilegalisasi).
- Belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh tidak terintegrasinya RTRW dengan rencana pembangunan.
- Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:
- Belum optimalnya penanganan penanggulangan banjir dan bencana alam akibat daya rusak air sungai yang berdampak kepada pemukiman dan lahan pertanian.
- Belum optimalnya penanganan dan perbaikan jaringan irigasi yang berakibat kepada kurangnya produksi pertanian dan juga banyak lahan irigasi yang beralih fungsi.
- Belum optimalnya pengendalian abrasi pantai pada daerah yang berada pada kawasan pantai
- Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung air (embung) untuk kebutuhan penduduk.
- Program Prioritas yang juga tertuang di RPJMD terkait dengan isu utama Ketimpangan wilayah yang cenderung meningkat: karena penyediaan infrastruktur yang belum merata dan berkelanjutan sehingga mengakibatkan tidak optimalnya konektivitas dan aksesibilitas dalam wilayah.
- Peningkatan Konektivitas/Aksesibilitas jalan dan jembatan antar kabupaten kota dan provinsi tetangga.
- Peningkatan jalan dan jembatan lintas pantai barat Sumatera dari Kabupaten Pasaman Barat sampai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Peningkatan jalan dan jembatan Padang Koto Gadang-Palembayan-Matur Agam.
- Peningkatan ruas jalan dan jembatan Palupuh-Pua gadih-Koto Tinggi.

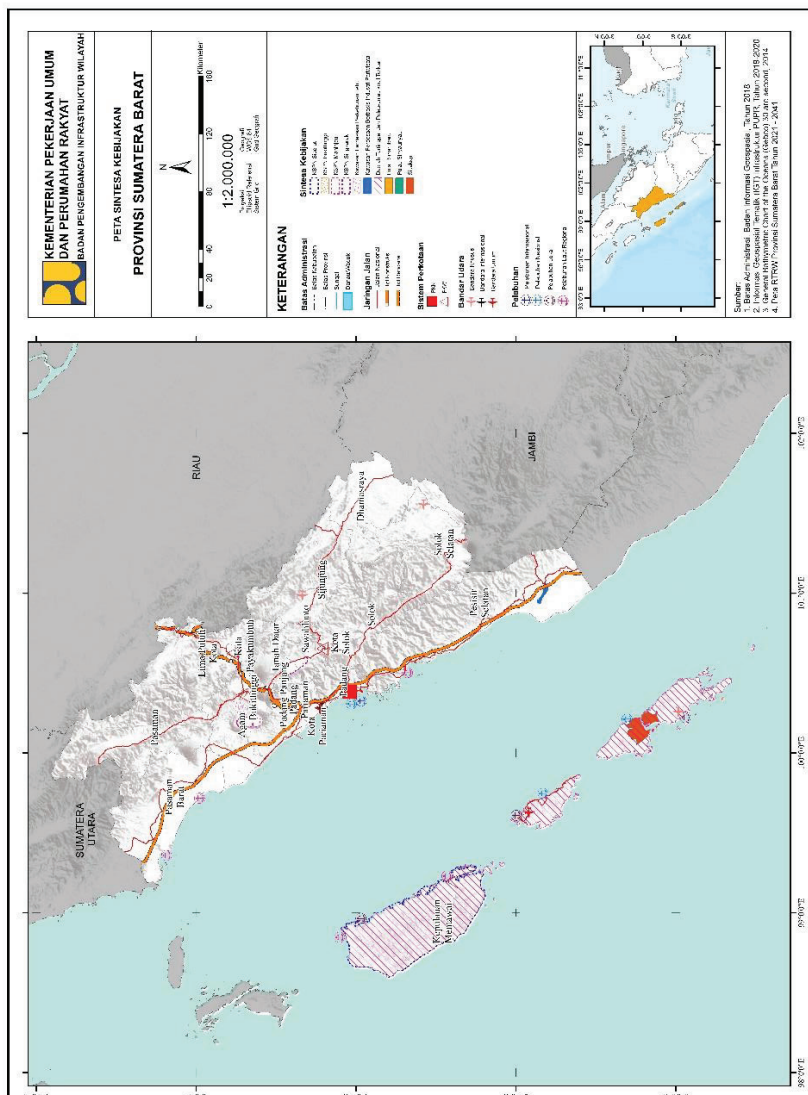
- Peningkatan Jalan dan jembatan Teluk Bayur-Nipah Purus & Purus BIM yang menghubungkan dua simpul transportasi yaitu pelabuhan teluk Bayur dan BIM.
- Peningkatan jalan dan jembatan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman sebagai jalan alternatif dari Padang menuju Padang Pariaman/ Agam/ Pasaman/ Pasaman Barat.
- Peningkatan Jalan dan jembatan Pasar Baru - Alahan Panjang - Tigo Lurah (Gerabak Data) - Kiliran Jao yang menghubungkan daerah Kab Pessel, Solok, Sijunjung.
- Pembangunan jalan dan jembatan Kambang - Muara Labuh yang menghubungkan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan => (ctt: perlu dibicarakan pada rapat pansus dan pemda dikarenakan tidak sesuai RTRW dan melewati zona inti TNKS).
- Peningkatan Jalan dan jembatan Padang Simpang Aro-Lubuk Malako, Lubuk Malako-Abai Sangir dan Abai Sangir-Sungai Dareh.
- Peningkatan jalan dan jembatan Tapus - Muaro Sungai Lolo - Gelugur yang menghubungkan Kabupaten Pasaman menuju Kabupaten 50 Kota
- Rekonstruksi Jalan dan jembatan Batas Kota Payakumbuh-Sitangkai (melewati Lintau, Kabupaten Tanah Datar).

Pengembangan Wilayah Sumatera Barat, terdapat beberapa wilayah yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa kawasan prioritas. Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 didapati bahwa Kepulauan Mentawai menjadi Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dilakukan pula penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) menjadi 2 koridor yakni Koridor 1 (di Kabupaten Agam) yang menjadi Kawasan Perdesaan Perkebunan Tebu dan Koridor 2 (di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan) yang menjadi Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata. Terakhir, dilakukan pula Penetapan Pulau Kecil Terluar (PPKT) yaitu sebagai berikut:

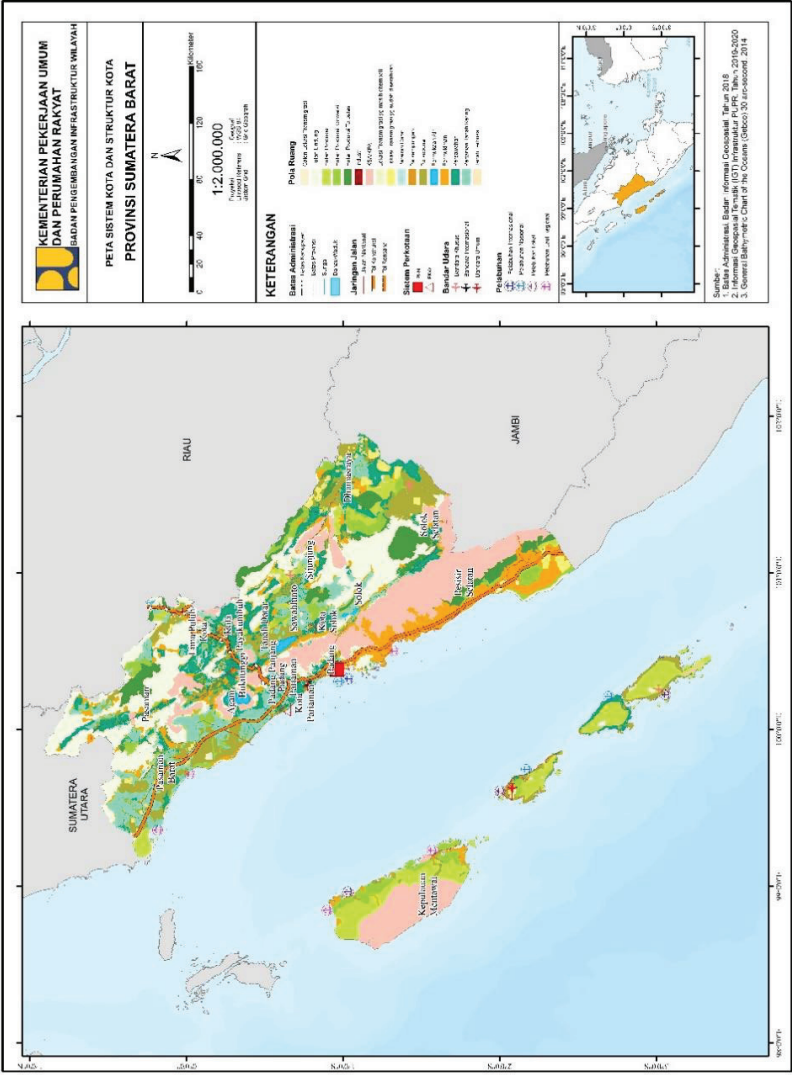
Tabel 2.2 Tabel Pengembangan Wilayah Sumatera Barat

Koridor 1 (Pulau Sibarubaru)	Potensi Pengembangan: Salah satu destinasi wisata dengan karakteristik kepulauan eksotis berombak tinggi. Kendala Pengembangan: Rentan terhadap abrasi, diperlukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup	Posisi Geografis Samudera Hindia 03° 17' 48" S 100° 19' 47" T
Koridor 2 (Pulau Sinyaunyu)	Potensi Pengembangan: Bertopografi datar-landai, berpasir putih, tidak terlalu terisolasi dari pusat ibu kota Kepulauan Mentawai.	Posisi Geografis Samudera Hindia 01° 51' 58" S 99° 04' 34" T

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 2.1 Peta Sintesa Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 2.2 Peta Sistem Kota dan Struktur Provinsi Sumatera
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

2.2.5 Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan melalui beberapa peraturan pemerintahan yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. PSN di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari sektor jalan dan jembatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Barat

A. Sektor Jalan dan Jembatan			
1	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - Bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Barat	Sumatera
2	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Barat dan Riau	Sumatera

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

2.2.6 Visium Kementerian PUPR 2030

Visium Kementerian PUPR 2030 Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Visium Kementerian PUPR 2030

Tahun	Sumber Daya Air	Bina Marga	Cipta Karya	Perumahan
2020-2024	Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m ³ /kapita/tahun	- Kondisi jalan mantap 97% - Pembangunan jalan tol 1.500 Km - Pembangunan jalan baru 2.500 Km - Pembangunan jembatan baru/fly over 60.000 m	88% Pelayanan Air Minum - Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha) 85% Pelayanan Sanitasi.	Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit.
2025-2030	Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m ³ /kapita/tahun.	- Kondisi Jalan Mantap 99% Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km - Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km - Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m	100% Pelayanan Air Minum - Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi	Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit.
Target 2030	Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m ³ /kapita/tahun	Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle	100% SMART LIVING (Hunian Cerdas)	

Sumber: Visium Kementerian PUPR, 2017

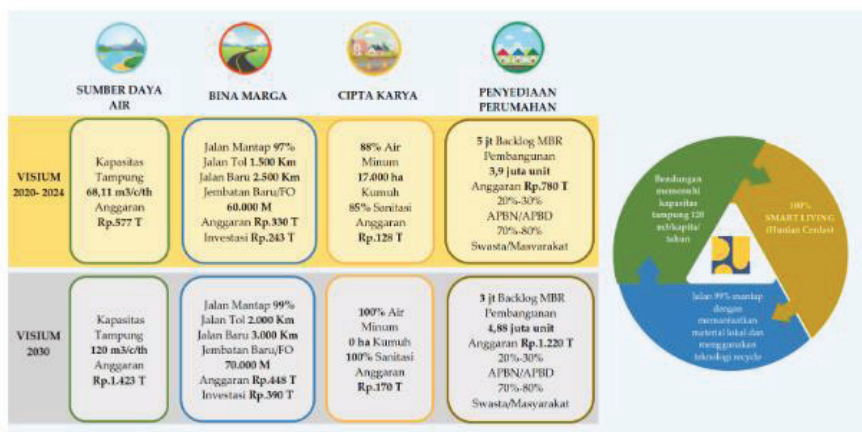
Visium PUPR tahun 2030 Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

- Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun;
- Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle;
- 100% Smart living (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan, yaitu tahun 2017-2019, 2020-2024, dan 2025-2030.

Tahun 2020 – 2024:

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 577 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 97%; Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km; Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 330 Triliun (ditambah Rp 243 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
- 4) Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.



Gambar 2.3 Target Visium Tahun 2020-2024 dan 2030

2.2.7 Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam Renstra Kementerian PUPR, ditetapkan target pengembangan infrastruktur PUPR hingga tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m ³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol	100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan	51.340 Unit Rumah Susun
61 Unit Bendungan	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman	10.000 Unit Rumah Khusus
500 Unit Pembangunan Embung	38.328 m Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh	813.660 Unit Rumah Swadaya
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass	100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	262.345 Unit PSU Perumahan
2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar	
50 m ³ /detik Ketersediaan Air Baku			
2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai			
			

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Rencana Strategis PUPR juga menjelaskan mengenai rencana strategi pada masing-masing pulau. Adapun kebijakan pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan

otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antar moda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

1. Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN dan PKSN;
 - c. Pengembangan sentra produksi perikanan SKPT Sabang, Natuna, dan SKPT Mentawai.
2. Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api - Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai, KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galan Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam - Bintan - Karimun dan KPBPB Sabang;
 - b. Pengembangan pariwisata daerah sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP Baru Padang - Bukittinggi, DPP Baru Batam - Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antar moda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penanganan Lalu Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Trans Pulau Simeulue, Jalan Akses DPP Danau Toba.
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Peningkatan kualitas transportasi perkotaan

- multimoda di WM Medan (Mebidangro) serta penguatan keterkaitan desa - kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKS N Sabang, Bengkalis, dan PKS N Ranai, KPPN Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuasin, Muaro Jambi, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintan Kepulauan, Karimun, Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji.

2.2.8 Kebijakan Daerah Tertinggal

Penetapan daerah tertinggal ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, Daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Daerah tertinggal di Sumatera Barat terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.4 Daftar Daerah Tertinggal di Pulau Sumatera

No.	Provinsi	Kabupaten
1	Sumatera Utara	Nias
2	Sumatera Utara	Nias Selatan
3	Sumatera Utara	Nias Utara
4	Sumatera Utara	Nias Barat
5	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai
6	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara
7	Lampung	Pesisir Barat

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

2.2.9 Kebijakan Sektor Pariwisata

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 menetapkan bahwa perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi diantaranya meliputi:

- a. DPP Padang dan Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan destinasi pantai dan pulau (*Marine Tourism*);
- b. DPP Padang Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
- c. DPP Tanah Data dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau tempo dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*);
- d. DPP Sawahlunto dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan wisata warisan budaya tambang batu bara (*Coal Mining Heritage Tourism*); dan
- e. DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan tema utama sebagai Kawasan pengembangan destinasi selancar dan ombak (*White Sand Tourism*).

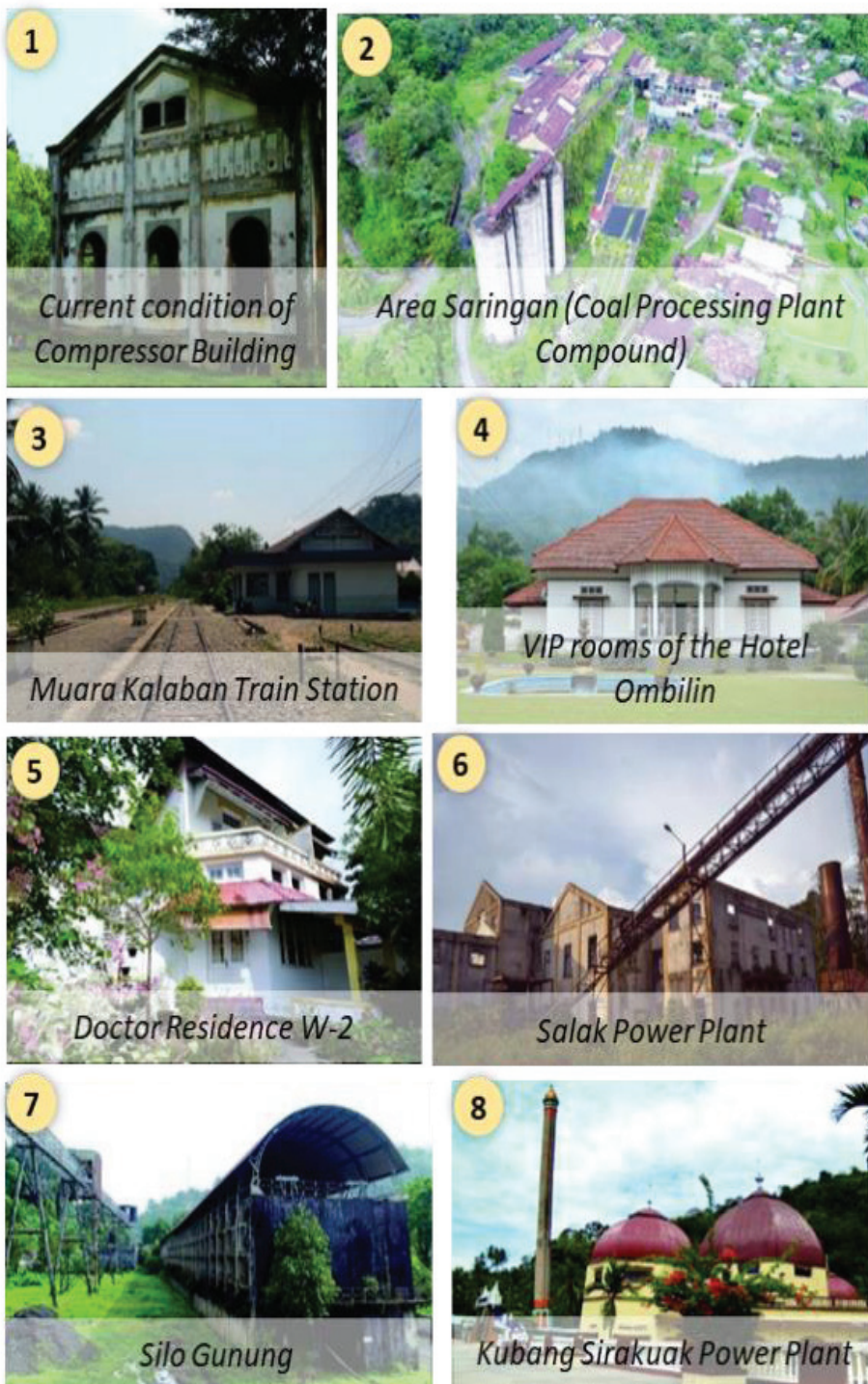
Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing. Pengembangan Pariwisata diwujudkan dengan arah kebijakan pengembangan citra pariwisata dengan peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan baik citra pariwisata nasional maupun citra pariwisata destinasi dan

peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Sektor Kawasan Heritage (Situs Pusaka) di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

A. Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto

Kota sawahlunto yang dahulunya merupakan lembah dengan berbagai persawahan menjelma menjadi kota Tambang dengan konsep desa. Kota Sawahlunto adalah hulu dari dari eksploitasi tambang batu bara di Sumatera barat setelah Pemerintah Kolonial Belanda tidak begitu bergairah lagi melakukan perdagangan kopi. Kota Tambang Sawahlunto ditetapkan menjadi Warisan Dunia oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tanggal 6 Juli 2019 di kota Baku, Azerbaijan. Penetapan itu adalah salah satu bagian dari acara tahunan UNESCO bertajuk 43rd session of the World Heritage Committee yang dilaksanakan 30 Juni-10 Juli 2019. Lewat pergelaran itulah UNESCO memutuskan situs mana yang layak diangkat menjadi Warisan Dunia berdasar dari keputusan komite khususnya yang beranggotakan dua puluh satu anggota. Tambang Sawahlunto terdaftar dengan nama Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto, satu dari total 36 situs yang dinominasikan menjadi Daftar Warisan Dunia. Sawahlunto dianggap memenuhi kriteria internasional untuk dijadikan warisan dunia.



Gambar 2.4 Destinasi Wisata Provinsi Sumatera Barat

2.2.10 Kebijakan Sektor Transportasi

Kebijakan Sektor Kebandarudaraan, berdasarkan Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2019) terdapat beberapa bandar udara baik eksisting maupun yang sedang dalam perencanaan dan pembangunan. Salah satu bandar udara di Sumatera Barat yang menjadi bandara primer yaitu Bandara Internasional Minangkabau. Jumlah penerbangan yang melayani rute dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau seperti menghubungkan Padang dengan Jakarta, Medan, Batam dan Pekanbaru untuk domestik, sedangkan untuk pelayanan transportasi udara ke luar negeri (internasional) yaitu Singapura dan Kuala Lumpur.

Tabel 2.5 Bandar Udara Eksisting di Provinsi Sumatera Barat

Bandar Udara	Kabupaten/Kota	Peran Bandara
Minangkabau	Padang Pariaman	Simpul, Gerbang Ekonomi, Alih Moda Transportasi, Perindag/Pariwisata, Rawan Bencana, Wawasan Nusantara
Rokot	Kepulauan Mentawai	Simpul, Gerbang Ekonomi, Alih Moda Transportasi, Perindag/Pariwisata, Daerah Terisolir, Rawan Bencana, Daerah Perbatasan, Wawasan Nusantara
Pasaman Barat	Pasaman Barat	Simpul, Gerbang Ekonomi, Alih Moda Transportasi, Wawasan Nusantara

Sumber: Kepmen 166 tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Kebijakan Sektor Kepelabuhan, berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017) sebagai perencanaan dan pengembangan pelabuhan, termasuk identifikasi lokasi pelabuhan yang strategis, penentuan kapasitas pelabuhan, serta perancangan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, kebutuhan transportasi, dan aspek lingkungan. Keputusan ini juga menetapkan standar dan kriteria yang harus dipenuhi dalam perancangan, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti dermaga, terminal, fasilitas bongkar muat,

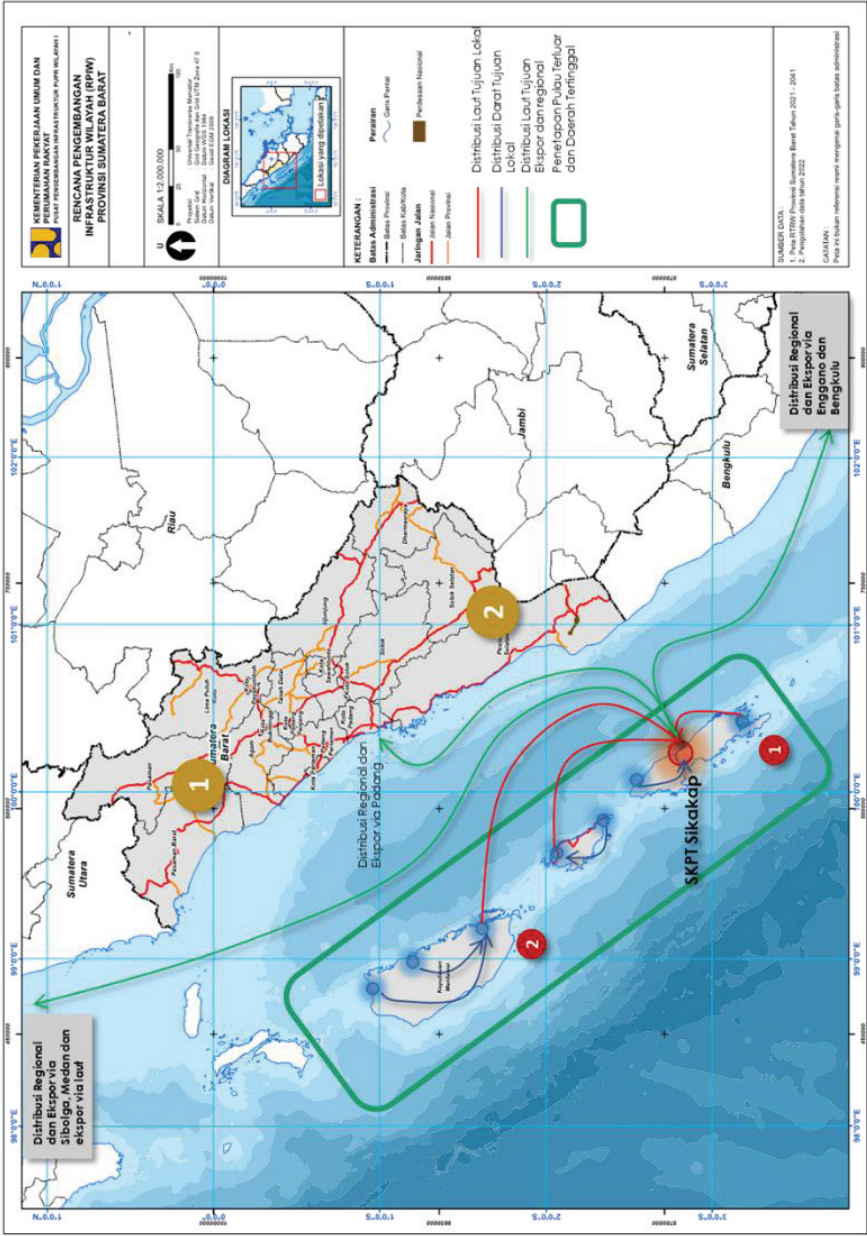
navigasi, keamanan, dan keselamatan pelabuhan. Terdapat 11 pelabuhan di Provinsi Sumatera Barat :

1. Pelabuhan Utama (PU) dengan skala pelayanan dalam dan luar negeri yaitu Pelabuhan Teluk Bayur.
2. Pelabuhan Pengumpul (PP) skala pelayanan antar provinsi yaitu Pelabuhan Sikakap di Kep Mentawai, Pelabuhan Teluk Tapang di Kab Pasaman Barat, dan Pelabuhan Pesisir Selatan di Carocok Painan.
3. Pelabuhan lainnya termasuk Pelabuhan Pengumpan (PP) skala pelayanan dalam provinsi (regional/PR) dan skala pelayanan dalam kabupaten (PL).

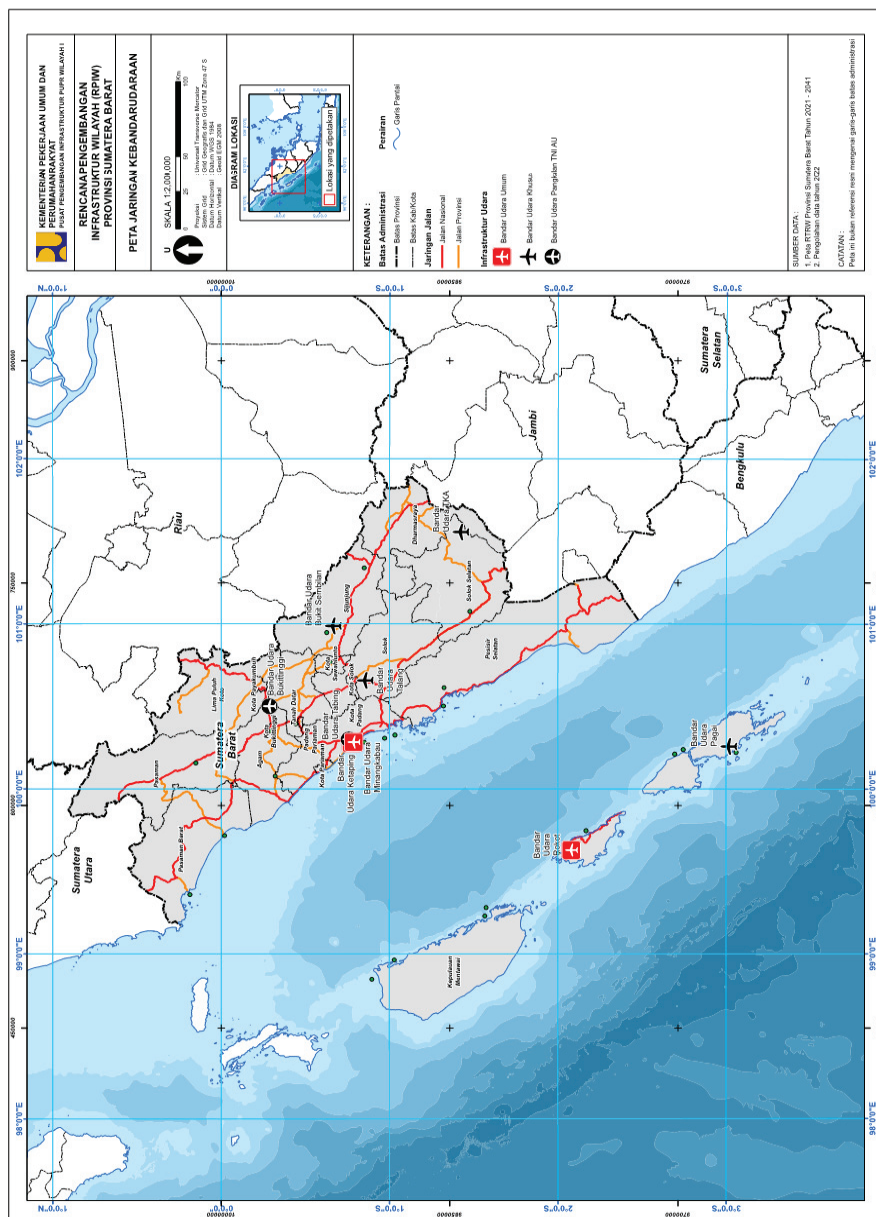
Kebijakan Sektor Perkeretaapian, Transportasi perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding moda transportasi lainnya, antara lain: kapasitas angkut besar (massal), cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif sedikit. Kementerian Perhubungan menyadari pentingnya Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang akan menjadi acuan dalam menata kembali penyelenggaraan perkeretaapian nasional secara menyeluruh sehingga tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, dapat terlaksana dengan baik.

Adapun berikut beberapa kebijakan dalam pengembangan perkeretaapian di Sumatera Barat.

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota pada lintas utama: Reaktivasi Naras - Sungai Limau
2. Pengembangan dan layanan kereta api perkotaan: Kawasan Perkotaan Padang
3. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan pusat kota dengan bandara: Minangkabau
4. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan Pelabuhan: Teluk Bayur
5. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan Pulau Pulau Sumatera (interkoneksi).



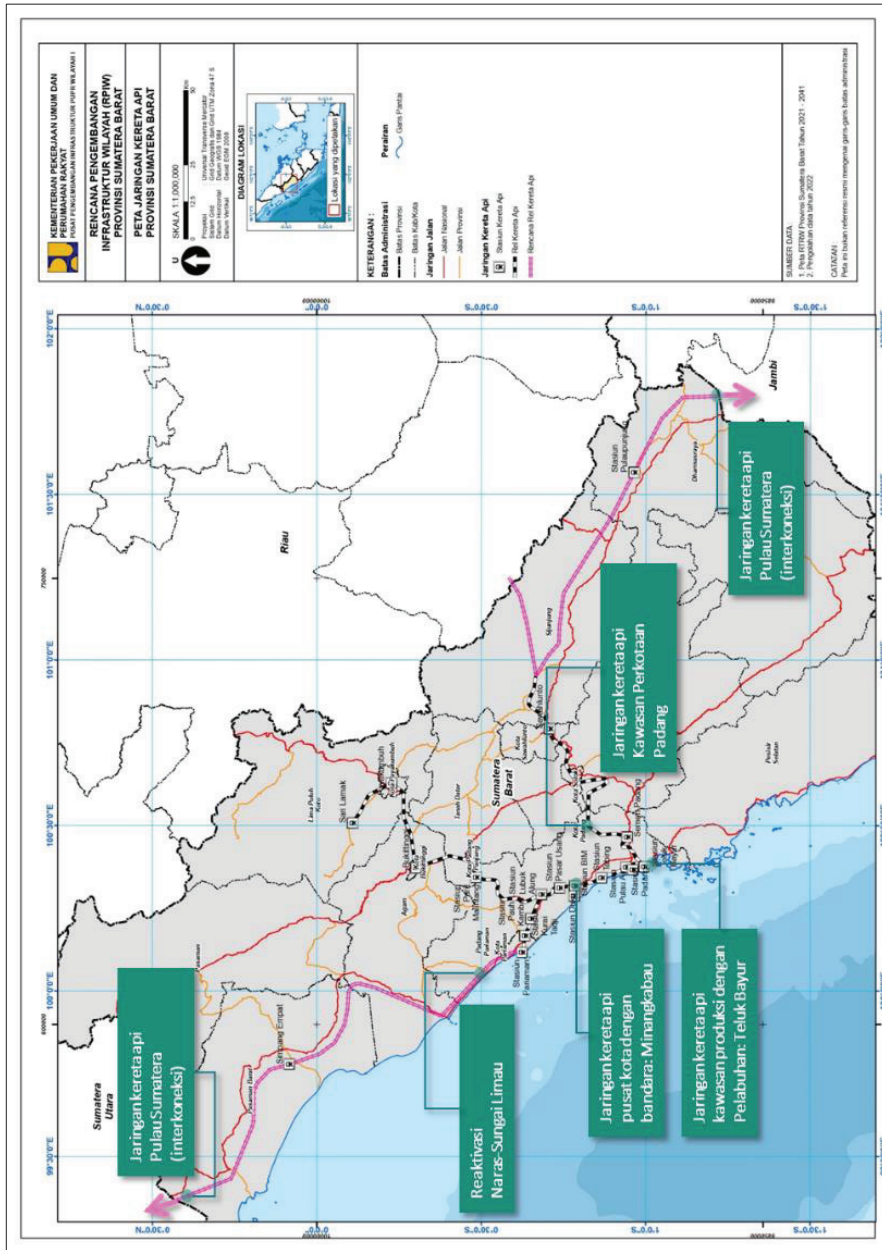
Gambar 2.5 Peta Pengembangan Wilayah Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPW, 2023



Gambar 2.6 Peta Jaringan Kebandarudaraan
Sumber: Hasil Analisis Tim BPiW, 2023

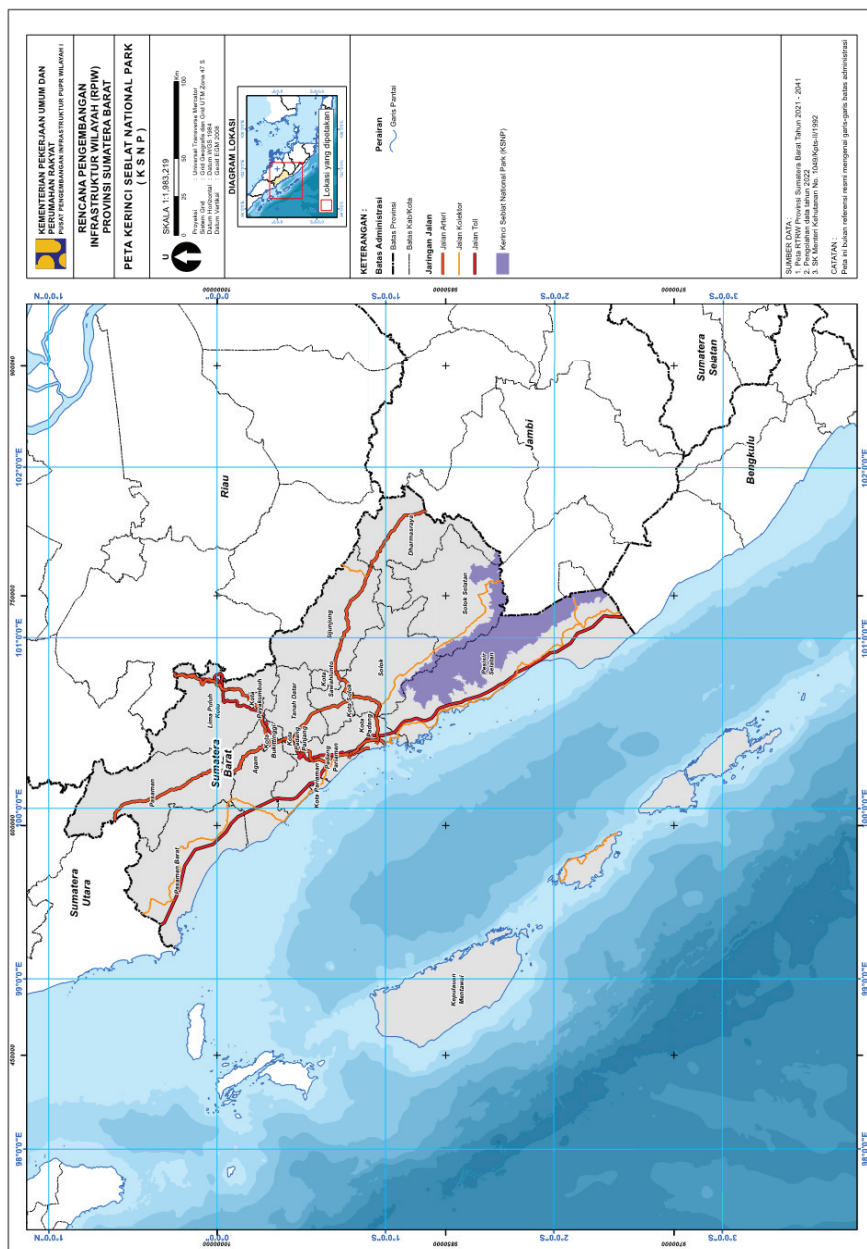


Gambar 2.7 Peta Jaringan Kepelabuhan
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 2.8 Peta Jaringan Kereta Api
Sumber: Hasil Analisis Tim RPIW, 2023





Gambar 2.10 Peta Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

2.3 Agenda Global

Pada Agenda global, menguraikan berbagai arah pembangunan global antara lain *Sustainable Development Goals* (SDGs), *New Urban Agenda* (NUA), *Paris Agreement*, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* dan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra*. Pembahasan agenda global berfokus pada prinsip, aturan dan arahan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dan pengembangan infrastruktur.

Tabel 2.6 Pengembangan Kawasan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Menurut Agenda Global

No	Kebijakan Global	Arahan
1	<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	SDGs adalah 17 (tujuh belas) tujuan bersama global dan nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur PUPR mendukung terwujudnya SDGs pada tujuan: 1. Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 2. Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Selain itu, secara tidak langsung implikasi SDGs terhadap arahan pengembangan infrastruktur PUPR antara lain. 1. Dukungan terhadap Tujuan 1 melalui pengentasan kemiskinan ekstrem. 2. Dukungan terhadap Tujuan 2 melalui peningkatan kapasitas air baku baik untuk irigasi dalam rangka kedaulatan pangan. 3. Dukungan terhadap Tujuan 3 dan 4 melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. 4. Dukungan terhadap Tujuan 5 melalui pengarusutamaan gender.

No	Kebijakan Global	Arahan
		5. Dukungan infrastruktur PUPR untuk mendorong perkembangan wilayah melalui pengembangan seluruh kawasan strategis.
2	New Urban Agenda (NUA)	NUA adalah komitmen global, 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Komitmen ini membawa semangat inklusif, kolaboratif, dan partisipatif dalam pembangunan perkotaan. Pembangunan infrastruktur PUPR turut mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui penyediaan perumahan dan akses pelayanan dasar seperti: 1. Pembangunan perumahan yang terjangkau 2. Penanganan kawasan permukiman kumuh 3. Akses universal air minum dan sanitasi perkotaan 2. Sarana prasarana sosial perkotaan
3	Paris Agreement	<i>Paris Agreement</i> adalah kesepakatan 196 negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia meratifikasi <i>Paris Agreement</i> melalui UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario <i>baseline</i> tidak ada intervensi (<i>Business as Usual</i>/BAU) pada tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional.
4	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)	SFDRR adalah kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang disepakati 187 negara untuk membangun ketahanan negara dan masyarakat terhadap bencana. Terdapat 7 (tujuh) target global SFDRR seperti (1) mengurangi kematian, (2) mengurangi

No	Kebijakan Global	Arahan
		jumlah orang terdampak, (3) mengurangi kerugian ekonomi, (4) mengurangi kerusakan akibat bencana terhadap infrastruktur kritis dan layanan dasar, (5) meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana lokal dan nasional, (6) meningkatkan kerja sama internasional, (7) meningkatkan ketersediaan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan infrastruktur PUPR dapat mendukung melalui 2 (dua) aksi prioritas yaitu (1) Berinvestasi pada pengurangan risiko bencana untuk ketahanan melalui pengurangan dan pencegahan risiko bencana secara struktural, non struktural dan fungsional pada fasilitas kritis, khususnya sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur fisik dan (2) Meningkatkan kesiapan kebencanaan dan “Membangun Kembali Lebih Baik” melalui peningkatan ketangguhan infrastruktur kritis baru maupun eksisting termasuk infrastruktur air, transportasi, dan telekomunikasi, fasilitas pendidikan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan operasional selama dan setelah bencana.
5.	UNESCO	Perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam Sumatera Barat world heritage Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang selanjutnya dituangkan di dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 tujuan global dan sasaran global serta sasaran nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan yang terdiri dari:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,

- menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, dan 11 dari SDGs merupakan tujuan yang berkaitan langsung dengan arahan pengembangan infrastruktur PUPR dan memiliki implikasi sebagai berikut:

- Mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan termasuk peningkatan kapasitas air baku baik untuk irigasi maupun air bersih;
- Mendukung pengelolaan sumber daya air;
- Dukungan infrastruktur PUPR untuk mendorong perkembangan wilayah melalui pengembangan seluruh kawasan strategis;
- Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan hunian layak;
- Peningkatan kinerja infrastruktur permukiman agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau sehingga terwujud kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- Pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata untuk mengurangi disparitas antar wilayah; dan
- Adaptasi Rencana Aksi Nasional-Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-MAPI).

New Urban Agenda (NUA), adalah hasil kesepakatan pada *Habitat III Cities Conference* di Quito, Ecuador pada bulan Oktober 2016. NUA secara spesifik menjawab tujuan 11 (sebelas) SDGs dengan menyusun poin-poin komprehensif tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. NUA mengakui adanya keragaman budaya dan dampak negatif perubahan iklim dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Indonesia New Urban Agenda dirumuskan sebagai respon dari NUA untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Agenda perkotaan yang dibahas adalah: Kependudukan, Pertanahan dan Perencanaan Kota, Lingkungan dan Urbanisasi, Tata Kelola Pemerintah dan Legislatif, Ekonomi Perkotaan, Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar.



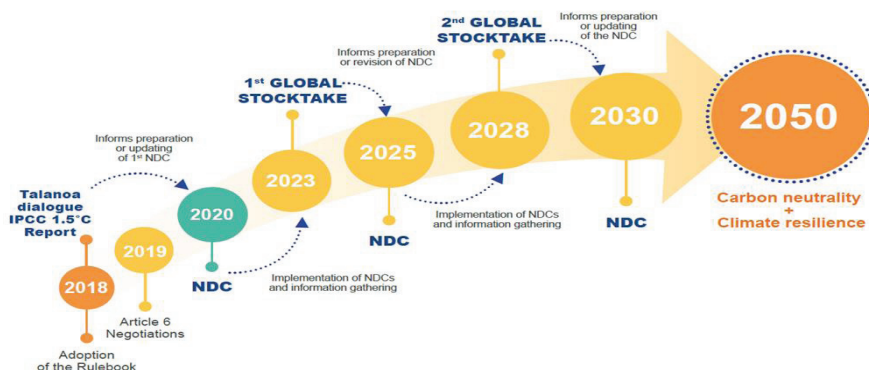
Gambar 2.11 Tujuan New Urban Agenda

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Terdapat 5 (lima) elemen kunci NUA yang terkait dengan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan yang inklusif serta penghapusan kemiskinan;
- Meningkatkan kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif;
- Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang perkotaan;
- Membangun tata kelola pemerintahan perkotaan yang terstruktur; dan
- Pembangunan kota yang berkelanjutan lingkungan dan berketahanan.

Paris Agreement atau Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain itu, persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* melalui UU Nomor 16 Tahun 2016.



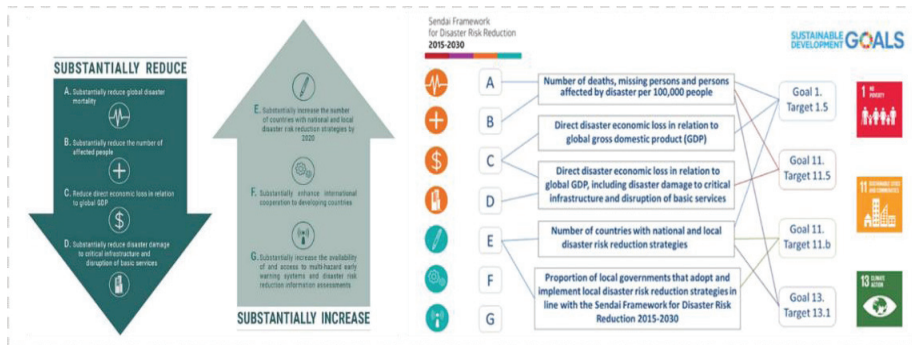
Gambar 2.12 Agenda *Paris Agreement*

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Indonesia memiliki komitmen dalam *Paris Agreement* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario *baseline business as usual* pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan internasional. *Paris Agreement* sendiri merupakan pengganti kesepakatan *Protocol Kyoto* dan memiliki poin penting penetapan batas aman kenaikan suhu bumi di bawah 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5°C di atas suhu bumi pada masa pra-industri. Dengan adanya *Paris Agreement*, Indonesia akan mendapatkan manfaat antara lain: (i) Peningkatan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan, (ii) Peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia, (iii) Menjadi Para Pihak yang dapat berperan serta (memiliki hak suara) dalam pengambilan keputusan terkait persetujuan paris, termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris, (iv) Memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sendai Framework. Pada sektor penanggulangan bencana, Indonesia tergabung dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* atau Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030 adalah hasil konsultasi dari para pemangku kepentingan yang dimulai sejak bulan Maret 2012 serta negosiasi antar-pemerintah sejak bulan Juli 2014 hingga Maret 2015. Rumusan SFDRR ini telah diadopsi pada agenda Konferensi Ketiga

Dunia PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (3rd WCDRR) di Sendai, Jepang, pada 18 Maret 2015. Perumusan Kerangka Sendai Pengurangan Risiko Bencana ini menggantikan *Hyogo Framework for Action* (HFA) 2005-2015. Dengan disahkannya *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030, maka masyarakat internasional telah memiliki kerangka aksi baru terkait pengurangan risiko bencana yang akan menjadi panduan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana hingga tahun 2030.



Gambar 2.13 Agenda Sendai *Framework*

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Indonesia, sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Kerangka Aksi Hyogo juga telah melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, maka Indonesia juga turut berperan aktif dalam proses adopsi Kerangka Sendai untuk PRB ini hingga implementasi kebijakan menjadi kegiatan dan program dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hasil yang diharapkan dari *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030 adalah terdapat pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana hingga 15 (lima belas) tahun setelah ditetapkannya kerangka kerja ini.

Tujuan:

1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko
2. Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan
3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan

Tindakan Prioritas:

1. Memahami risiko bencana
2. Penguatan tata Kelola risiko
3. Investasi PRB untuk resiliensi
4. Meningkatkan manajemen risiko

Target:

1. Mengurangi kematian rata-rata per-100K
2. Mengurangi orang terdampak rata-rata per-100K
3. Mengurangi kerugian ekonomi/ GDP
4. Mengurangi kerusakan infrastruktur kunci
5. Meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB
6. Meningkatkan Kerjasama internasional
7. Meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS

UNESCO Global Geopark. Danau Toba merupakan kawasan *geopark* nasional yang masuk ke dalam UNESCO *Global Geopark*. Dengan diakuinya Geopark Danau Toba sebagai bagian dari UNESCO *Global Geopark*, diharapkan masyarakat dunia akan melihat Danau Toba sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Hal tersebut akan memperkuat sektor Geopolitik Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Selain itu, hal tersebut akan menguntungkan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah perbatasan dengan Malaysia, dan berpeluang dalam meningkatkan potensi sektor pariwisata internasional.





Gambar 2.14 Agenda SDGs

2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Sumatera Barat diarahkan untuk Pengembangan Kawasan perkotaan dan pusat kegiatan wilayah yang berada di pesisir barat Wilayah Sumbang dengan sangat terbatas dengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana. Berdasarkan rangkuman arah kebijakan wilayah dan kawasan prioritas, didapatkan sintesa kebijakan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memuat peta sebaran kawasan strategis dan arah pengembangan wilayah sebagaimana berikut:

Tabel 2.7 Sintesa Kebijakan Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus
Kebijakan Penataan Ruang	RTRW Nasional (PP No.13 tahun 2017) RTRW Nasional	1. Sistem perkotaan nasional terdiri dari PKN Palapa dan beberapa PKW Solok, Pariaman, Bukittinggi, Sawahlunto, Muara Siberut, Payakumbuh, Tuapejat. 2. Pola ruang di Sumatera Barat mencakup Kawasan Lindung kawasan suaka alam, cagar alam/budaya, Taman Nasional, Tahura, Taman Wisata Alam dan Kawasan Andalan (Kawasan Padang Pariaman (Industri), Kawasan Agam-Bukittinggi (perkebunan, pertanian, & panas bumi), Kawasan Mentawai (pariwisata dan perikanan), Kawasan Solok (pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, panas bumi), dan Kawasan Andalan Laut Mentawai-Siberut (perikanan dan pariwisata).	Pengembangan Kawasan perkotaan dan pusat kegiatan wilayah yang berada di pesisir barat Wilayah Sumbang dengan sangat terbatas dengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus
	RTR Pulau Sumatera (Perpres No.13 Tahun 2012)	- Arahan pengembangan sistem perkotaan PKN Padang (industri dan pertambangan), PKW Pariaman (industri, pertanian, & pariwisata), PKW Sawahlunto (industri, pertambangan, pariwisata), Muara Siberut (perikanan, pariwisata), Bukittinggi (pariwisata), dan Solok (perkebunan & pertanian) - Pengembangan kawasan perkotaan yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana	
	RTRW Provinsi Sumatera Barat (Perda No.13 Tahun 2012)	- Pemantapan pengembangan PKN Kota Padang menuju Metropolitan Padang dan PKW terdiri dari Bukittinggi, Pariaman, Sawahlunto, Solok, dan Muara Siberut. - Penetapan PKW Promosi Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan dan Simpang Empat dan PKL - Peningkatan akses jaringan transportasi wilayah ke daerah terisolir di Pantai Barat dan Kep. Mentawai - Menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu - Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah - Kawasan rawan bencana: tanah longsor, kawasan gelombang pasang, dan banjir	
Kebijakan Sektoral	Visi Indonesia 2045	Dalam hal pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan, untuk Pulau Sumatera arah pengembangan daerah berbasis industri baru dan gerbang Kawasan Asia. Kemudian dalam hal pembangunan dan pemerataan infrastruktur diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di jalan tol Jawa dan Sumatera.	Sektor perdagangan dan jasa, industri, Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) & KSPN, Ketahanan Pangan, Pemerataan dan Pertumbuhan koridor utara dan selatan
	RPJMN 2020-2024 (Perpres No.18 Tahun 2020)	- Pengembangan DPP Padang-Bukittinggi, PPKT Mentawai, penguatan konektivitas antar moda laut dan udara melalui Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, pengembangan Kota Padang, Bukittinggi, Solok; pengembangan KPPN Agam; dan revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut (Pesisir Selatan). - Persebaran Destinasi Pariwisata: KSPN Bukittinggi dskt, KSPN Maninjau dskt, KSPN Singkarak, dskt, KPPN Padang dskt, KSPN Siberut dskt, DPP Baru Bukittinggi-Padang, dan KPPN Sawahlunto dskt. - Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi.	

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus
	Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) 2015-2035	Sumatera Barat tidak memiliki WPPI; Industri diarahkan pada Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.	
	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 (PP No.50 Tahun 2011)	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Sumatera Barat: - KSPN Siberut - KSPN Bukittinggi - KSPN Singkarak - KSPN Maninjau	
	Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024	Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan Daftar Daerah Tertinggal di Sumatera Barat yaitu Kepulauan Mentawai	
	Visium PUPR 2030	• SDA: Peningkatan Kapasitas Tampung Konservasi dan pengendalian air baku dalam mendukung PKN dan kawasan strategis di Provinsi Sumatera Barat, telah terselenggara sejumlah kegiatan seperti: tujuh bangunan pengendali banjir, 1 pompa banjir yang terletak di Kota Padang (0,25 l/dt, jenis submersible), dan 33 infrastruktur pengaman pantai. • BM: peningkatan konektivitas (Panjang Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Barat adalah sepanjang 1.448,8 km (6%) dari total Panjang jalan di Provinsi Sumatera Barat) dengan kemandirian jalan sekitar 94,6%) • CK: Memenuhi pelayanan infrastruktur dasar air minum aman dan perpipaan, sanitasi layak dan aman, penanganan persampahan dan pengurangan persampahan (Sumatera Barat : Persentase air minum layak telah terakses sekitar 83,37%, akses sanitasi layak 68,6%, akses persampahan 51,03%) • Perumahan: Menyediakan rumah susun, rumah khusus, swadaya, dan PSU (Backlog rumah di Prov. Sumatera Barat masih tinggi, mencapai 351.808	

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus
		unit Tertinggi di Kota Padang, mencapai 59.736 unit (16,98%)	
	Renstra PUPR 2020-2024	• Strategi SDA: pemenuhan pelayanan dasar perkotaan melalui penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta pengurangan resiko bencana • Strategi BM: Meningkatkan konektivitas wilayah • Strategi CK: Memenuhi pelayanan infrastruktur dasar air minum aman dan perpipaan, sanitasi layak dan aman, penanganan persampahan dan pengurangan sampah • Strategi Perumahan: Menyediakan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan PSU Perumahan	
	Tatanan Kebandarudaraan Nasional (KM 166 Tahun 2019)	1. Bandara Minangkabau di Padang Pariaman (Pengumpul Sekunder) mendukung PKN Palapa 2. Bandara Rokot (Pengumpan) di Kep. Mentawai untuk mendukung konektivitas antar pulau 3. Bandara Pasaman Barat	
	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (KP 432 Tahun 2017)	1. Pelabuhan Teluk Bayur status Pelabuhan Utama (PU) dengan skala pelayanan dalam dan luar negeri berada di Kota Padang 2. Pelabuhan Pengumpul (PP) skala pelayanan antar provinsi yaitu Pelabuhan Sikakap di Kep Mentawai, 3. Pelabuhan Teluk Tapang di Kab Pasaman Barat, dan Pelabuhan Pesisir Selatan di Carocok Painan.	
Agenda Global	SDG's	Dukungan terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan hunian layak	Perlindungan lingkungan dan kerawanan bencana
	New Urban Agenda	Meningkatkan kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif	
	Sendai Framework	Penguatan tata kelola risiko bencana, termasuk platform nasional	
	UNESCO	Perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam Sumatera Barat <i>world heritage Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto</i>	

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah memuat sintesis dari berbagai kebijakan yang telah diuraikan pada subbab 2.1 sampai dengan subbab 2.4 berupa rumusan sasaran dan target jangka panjang. Berdasarkan hasil review terhadap dokumen kebijakan penataan ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka disandingkan serta ditarik sintesa kebijakan penataan ruang wilayah

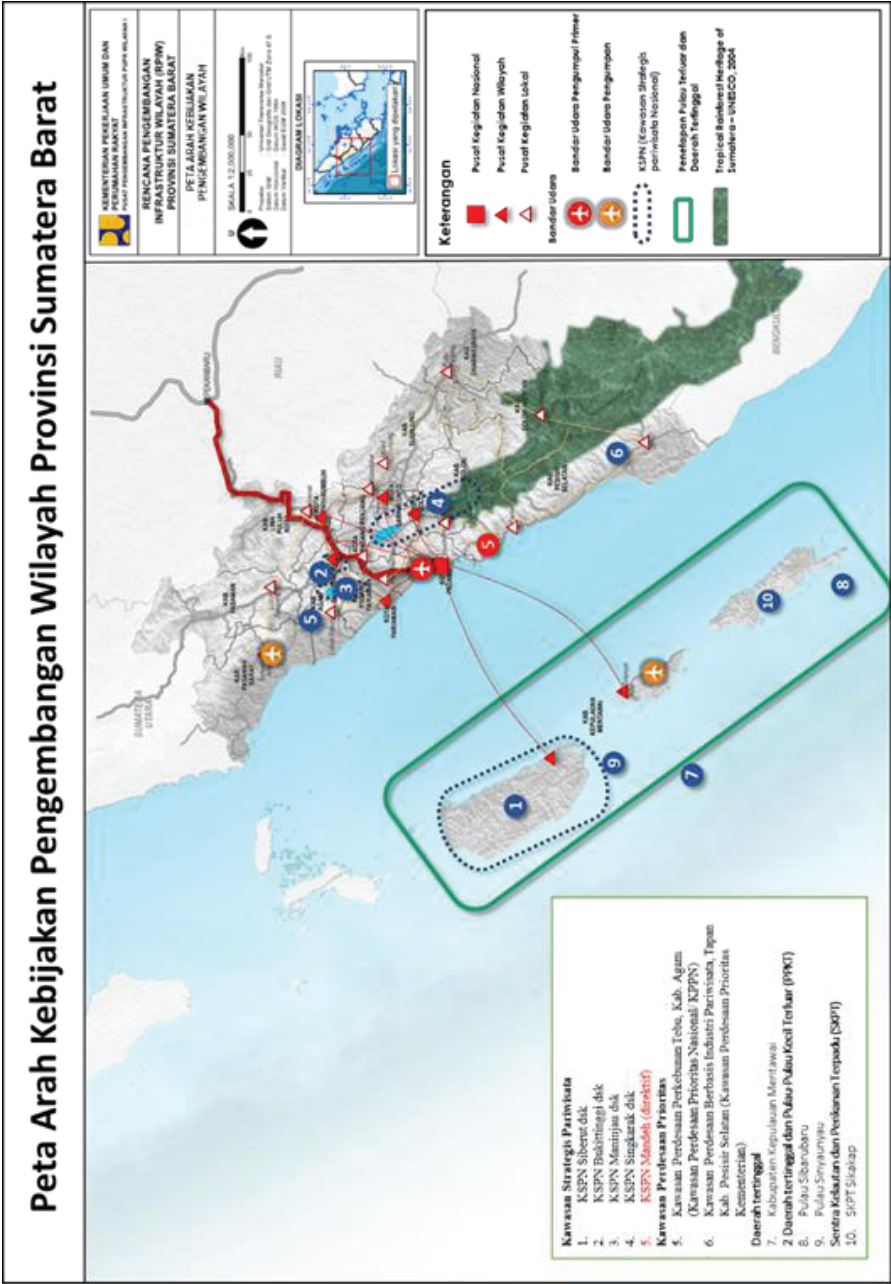
Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi terhadap pengembangan infrastruktur wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam serta sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Berikut merupakan tiga konteks perencanaan di Sumatera Barat:

Tabel 2.8 Konteks Perencanaan dan Kawasan Strategis Sumatera Barat

Konteks Perencanaan (Fokus)	Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
Kawasan Perkotaan	PKN Palapa (Padang-Lubuk Agung-Pariaman) PKW Solok PKW Pariaman PKW Bukittinggi PKW Sawahlunto PKW Muarasiberut PKW Payakumbuh PKW Tuapejat	Target fokus perkotaan di Sumatera Barat: 1. Peningkatan Level Of Service Jalan sepanjang 42,81 km pada tahun 2030 2. Pemenuhan kebutuhan air minum 1682,28 liter/detik hingga tahun 2030 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan sebesar 5.408.219 m3/tahun hingga tahun 2030 4. Pemenuhan pengelolaan air limbah sebesar 1,37 m3/detik hingga tahun 2030 5. Pemenuhan kebutuhan rumah sebesar 155.532 unit sampai dengan tahun 2030
Pariwisata	KSPN Bukittinggi KSPN Maninjau KSPN Singkarak KSPN Siberut d	Target Fokus Pariwisata: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata; 2. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung
Pertanian	KPPN Agam KPPN Tapan KPPN Mandeh	Target Fokus Pertanian: Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, dengan Produksi padi 1,2 juta ton GKG per tahun pada tahun 2029
Daerah Tertinggal	Kepulauan Mentawai	Target Fokus Daerah Tertinggal: 1. Pemenuhan infrastruktur dasar 2. Meningkatkan konektivitas wilayah

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 2.15 Peta Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Sumber: Hasil Analisis Tim BPW, 2023

Berdasarkan sintesa kebijakan, dirumuskan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang akan berfokus pada pengembangan: 1) Perkotaan; 2) Pariwisata; 3) Pertanian; dan 4) Daerah Tertinggal. Fokus pengembangan wilayah tersebut akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 3 Potensi Daerah.

Pada Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah akan dijabarkan penentuan kawasan prioritas dengan fokus arah kebijakan pengembangan kawasan prioritas. Proses penentuan kawasan prioritas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan daftar panjang (longlist) kawasan prioritas yang sesuai atau mendukung 3 (tiga) fokus di atas; dan
- b. Penapisan longlist berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk didapatkan daftar pendek (shortlist) atau kawasan prioritas terpilih. Kriteria yang digunakan pada masing-masing fokus pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:
 - i. Fokus Perkotaan, kriteria yang digunakan adalah apakah kawasan telah ditetapkan dalam RPJMN atau RTRWN, memiliki infrastruktur perhubungan utama seperti bandara atau pelabuhan, dan apakah telah sesuai dengan arahan pengembangan provinsi.
 - ii. Fokus Pariwisata, kriteria yang digunakan adalah apakah telah ditetapkan dalam RPJMN/RIPARNAS, memiliki infrastruktur perhubungan, dan apakah telah sesuai dengan arahan pengembangan provinsi.
 - iii. Fokus Pertanian, kriteria yang digunakan adalah apakah kawasan berpotensi untuk dikembangkan, memiliki kesiapan infrastruktur pendukung, dan meenyumbang pendapatan daerah dalam lingkup yang lebih luas.
 - iv. Fokus Daerah Tertinggal, kriteria yang digunakan adalah amanat Perpres no. 63 tahun 2020, nilai indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk miskin

Setelah penentuan kawasan prioritas terpilih, akan dijabarkan profil dan potensi setiap kawasan prioritas berdasarkan fokus perencanaan. Adapun pembahasan mengenai profil infrastruktur baik di dalam fokus perencanaan maupun di luar fokus perencanaan, akan dibahas pada Bab 4 Profil dan Kinerja Infrastruktur.



BAB 3

PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH



Pada bab ini akan dibahas secara komprehensif profil wilayah dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Bab ini menguraikan berbagai aspek yang membentuk identitas provinsi ini, meliputi profil fisik dan kebencanaan, profil demografi, profil ekonomi, profil sosial budaya, serta interaksi antar kawasannya.

3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan

Letak Administratif dan Geografis Wilayah, secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' LU - 3°30' LS serta 98°36' BT - 101°53' BT dan dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat/garis equator). Wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Dengan letak tersebut menjadikan provinsi ini sebagai gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), maupun Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Secara Administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 Kabupaten dan 2 Kota yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing wilayah tersebut adalah : 1) Kota Padang, 2) Kota Pariaman, 3) Kabupaten Pesisir Selatan, 4) Kabupaten Agam, 5) Kabupaten Pasaman Barat, 6) Kabupaten Padang Pariaman, dan 7) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

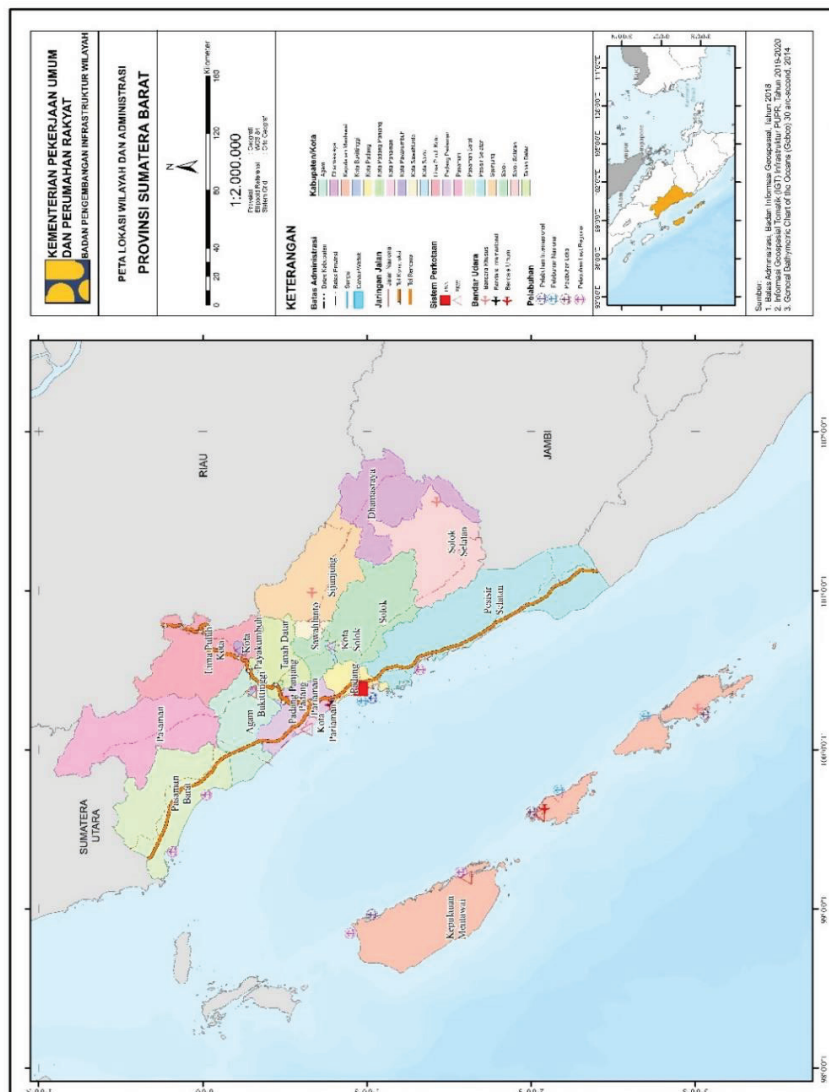
Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2022, Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.012,89 km², dengan luas perairan (laut) 352.882,42 km² dengan total garis pantai keseluruhan 31.637 km. Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pemekaran wilayah administrasinya hingga tahun 2015, namun tidak merubah luas daratan keseluruhan Provinsi Sumatera Barat. Pemekaran wilayah tersebut terjadi dalam periode tahun 2012-

2015, dengan jumlah pemekaran sebanyak 13 kecamatan. Jumlah pemekaran tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2016. Luas wilayah provinsi adalah seluas 42.012,89 Km², terluas ada di Kab. Kepulauan Mentawai, mencapai 6.011,35 km² atau 14,31% dari luas wilayah Prov. Sumbar. Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.580.232 jiwa pada tahun 2021. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat per tahun adalah sebesar 1,1%.

Tabel 3.1 Luas Wilayah di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
Kab. Kepulauan Mentawai	Tua Pejat	10	5983.222
Kab. Pesisir Selatan	Painan	15	6045.649
Kab. Solok	Arosuka	14	3590.404
Kab. Sijunjung	Muaro	8	3150.580
Kab. Tanah Datar	Batusangkar	14	1377.186
Kab. Padang Pariaman	Nagari Parit Malintang	17	1342.266
Kab. Agam	Lubuk Basung	16	2226.270
Kab. Lima Puluh Kota	Sarilamak	13	3273.405
Kab. Pasaman	Lubuk Sikaping	12	3902.444
Kab. Solok Selatan	Padang Aro	7	3282.144
Kab. Dharmasraya	Pulau Punjung	11	2920.925
Kab. Pasaman Barat	Simpang Empat	11	3852.993
Kota Padang	Koto Tengah	11	694.337
Kota Solok	Solok	2	58.720
Kota Sawahlunto	Sawahlunto	4	231.945
Kota Padang Panjang	Padang Panjang	2	23.560
Kota Bukittinggi	Bukittinggi	3	24.173
Kota Payakumbuh	Payakumbuh	5	74.552
Kota Pariaman	Pariaman	4	64.767
Provinsi Sumatera Barat	Padang	179	42119.542

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

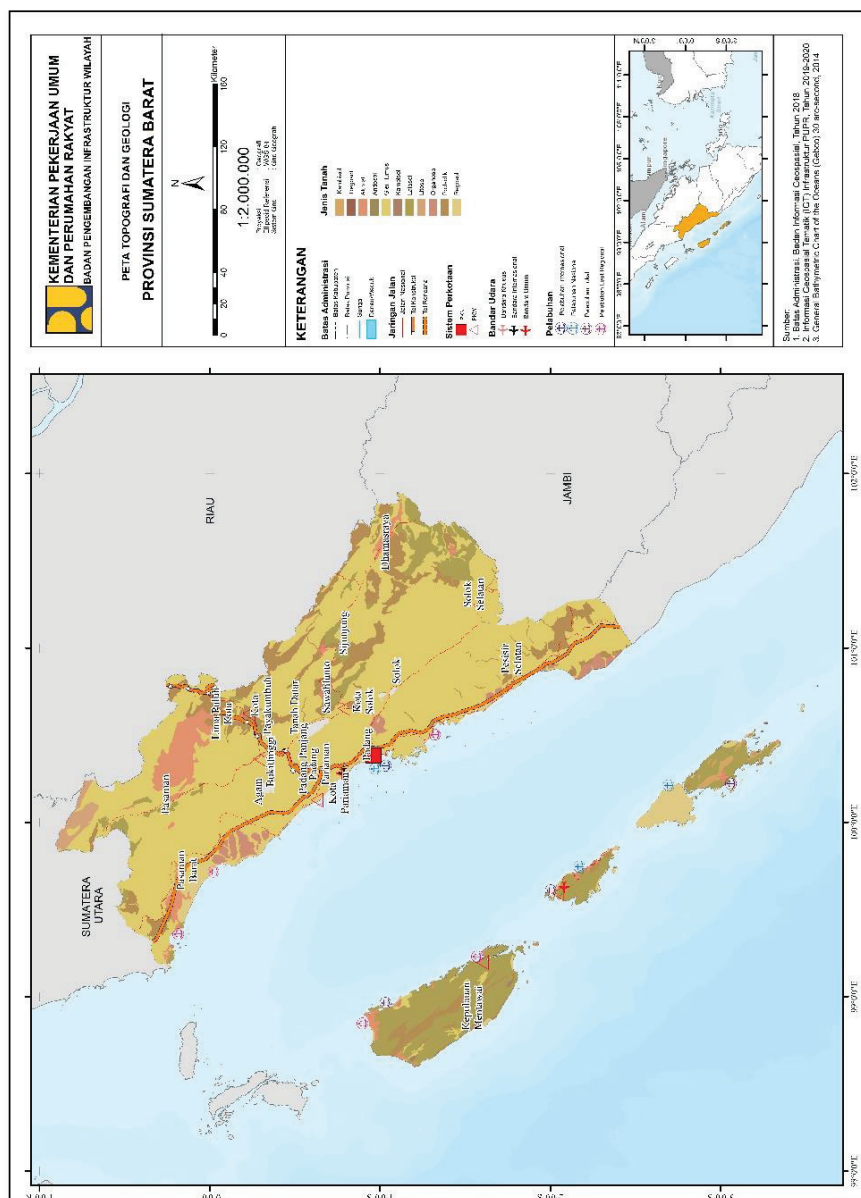


Gambar 3.1 Peta Lokasi Wilayah dan Batas Administrasi Provinsi Sumatera

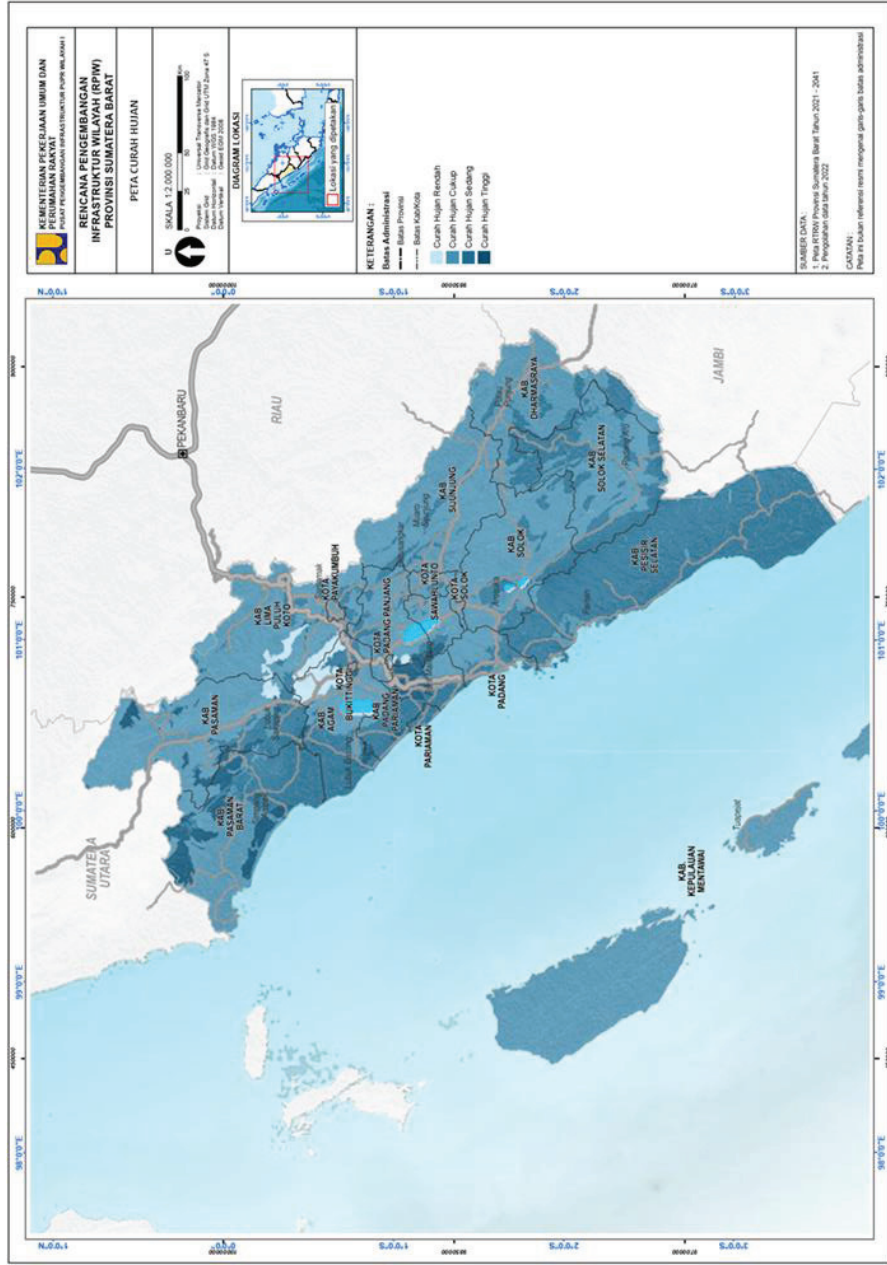
Kondisi Topografi dan Kelerengan Wilayah, Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah daratan dengan topografi landai dan berbukit, yang berada pada ketinggian 0-3.805 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng 0%->40%. Topografi wilayah Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah (0-500 mdpl), sampai dengan dataran tinggi (sampai dengan 3.805 mdpl). Kemudian, terkait dengan kondisi kelerengan wilayah yakni Provinsi Sumatera Barat didominasi kemiringan lereng curam, mencapai 40,46% dari luas wilayah provinsi dengan tingkat kemiringan lereng di atas 40% yang berada di hampir di seluruh kabupaten.

Selain itu, Struktur Geologi yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat terdiri berbagai macam jenis batuan yang bermanfaat dalam hal pertambangan, namun didominasi batuan alluvium yang rentan terhadap longsor/penurunan muka tanah, sehingga pembangunan infrastruktur perlu diantisipasi. Jenis tanah di Provinsi Sumatera Barat berupa rawa-rawa dengan dominasi jenis tanah *Glei Humus*. Kondisi ini akan mempengaruhi alokasi jenis penggunaan lahan, dimana perlu dianalisis lebih lanjut dengan variabel lain seperti kelerengan, dan lainnya. Didominasi oleh jenis batuan berupa *alluvial* dan jenis tanah *glei humus* mengindikasikan bahwa sebagian wilayah sangat rentan terhadap bencana longsor yang perlu diantisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

Jumlah curah hujan yang didominasi oleh kategori cukup hingga tinggi dengan jenis batuan berupa alluvial dan jenis tanah glei humus mengindikasikan bahwa sebagian wilayah sangat rentan terhadap bencana longsor yang perlu diantisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

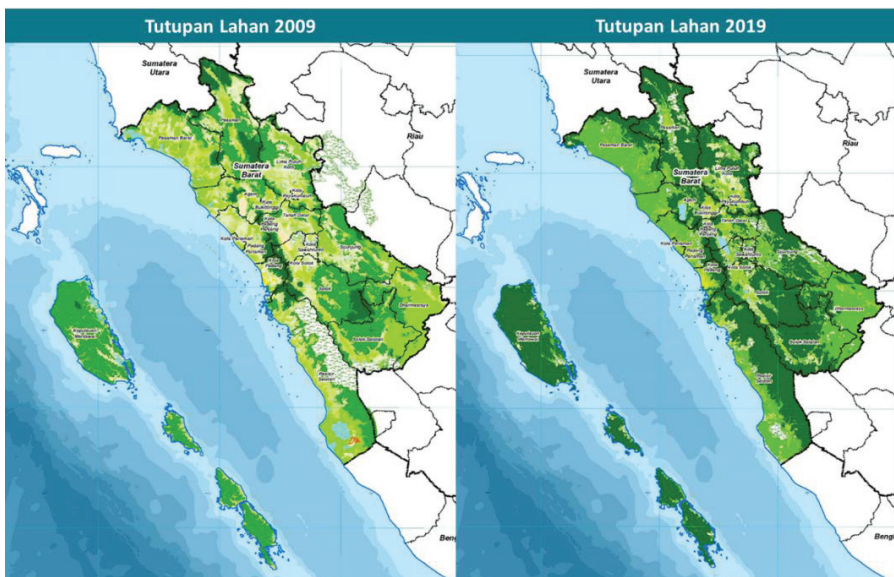


Gambar 3.2 Peta Topografi dan Geologi Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BP/W, 2023



Gambar 3.3 Peta Curah Hujan Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kondisi Tutupan Lahan, jumlah lahan terbangun di Sumatera Barat adalah sekitar 56.134,65 ha atau hanya 1,33% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat, dominasi penggunaan lahan berupa Hutan Rimba mencapai 2.269.753,83 ha atau 53,87% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Selama kurun waktu 10 tahun tutupan lahan terbangun tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Luas kawasan terbangun tahun 2009 seluas 26.776,62 ha bertambah 29.358,03 ha, menjadi 56.134,65 ha. Perubahan tutupan lahan berupa hutan cukup signifikan, yaitu sebesar 403.733,36 Ha, yang awalnya 1.875.282,96 Ha di tahun 2009 menjadi 2.279.016,32 Ha di tahun 2019, hal ini dikarenakan kemungkinan tutupan hutan pada tahun 2009 masih diklasifikasikan ke dalam tutupan lainnya, sementara pada tahun 2019 area tersebut diklasifikasikan menjadi tutupan hutan. Berikut merupakan hasil perhitungan dan analisis terkait dengan Perubahan Tutupan Lahan yang terjadi di Sumatera Barat.



Gambar 3.4 Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 3.5 Peta Tutupan Lahan Tahun 2020
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kawasan Rawan Bencana, letak geografis Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi bencana alam yang cukup besar karena berada pada gugus Bukit Barisan dan gunung berapi aktif serta terletak pada jalur patahan Sumatera dan lempeng benua yang rawan terhadap gempa bumi serta berpotensi tsunami. Berdasarkan hasil analisis, didapati bahwa terdapat 37,49% yang termasuk kedalam Kawasan rawan bencana di Sumatera Barat. Kawasan tersebut meliputi 5 jenis bencana yaitu Bencana Gunung Api, Gempa Bumi, Longsor, Tsunami, dan Banjir. Berikut adalah hasil perhitungan rawan bencana pada masing-masing jenis bencana:

Tabel 3.2 Kawasan Rawan Bencana Provinsi Sumatera Barat

No	Kawasan Bencana	Luas (ha)	%
1	Rawan Bencana Gunung Api	94.234,68	2,22%
2	Rawan Bencana Gempa Bumi	1.076.552,05	25,40%
3	Rawan Bencana Longsor	190.282,75	4,49%
4	Rawan Bencana Tsunami	176.638,30	4,17%
5	Rawan Bencana Banjir	51.146,01	1,21%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Terdapat beberapa kabupaten/kota terdampak bencana dengan indeks bahaya kategori tinggi pada setiap jenis bencana alam yang terjadi dengan jumlah nilai indeks risiko bencana Provinsi Sumatera Barat sebesar 147,36, yang meliputi:

- Bencana banjir yang terjadi di sepuluh kabupaten dan empat kota dengan Indeks Bahaya Tinggi di Kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan.
- Bencana longsor yang terjadi di enam kabupaten dan empat kota.
- Bahaya bencana gempa bumi yang terjadi dan mendominasi di hampir seluruh wilayah provinsi dengan Indeks Bahaya Tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bencana Gunung Api yang terjadi di Kawasan sekitar Gunung Marapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci.

Bencana Tsunami yang terjadi di Seluruh kawasan pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat termasuk Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya.

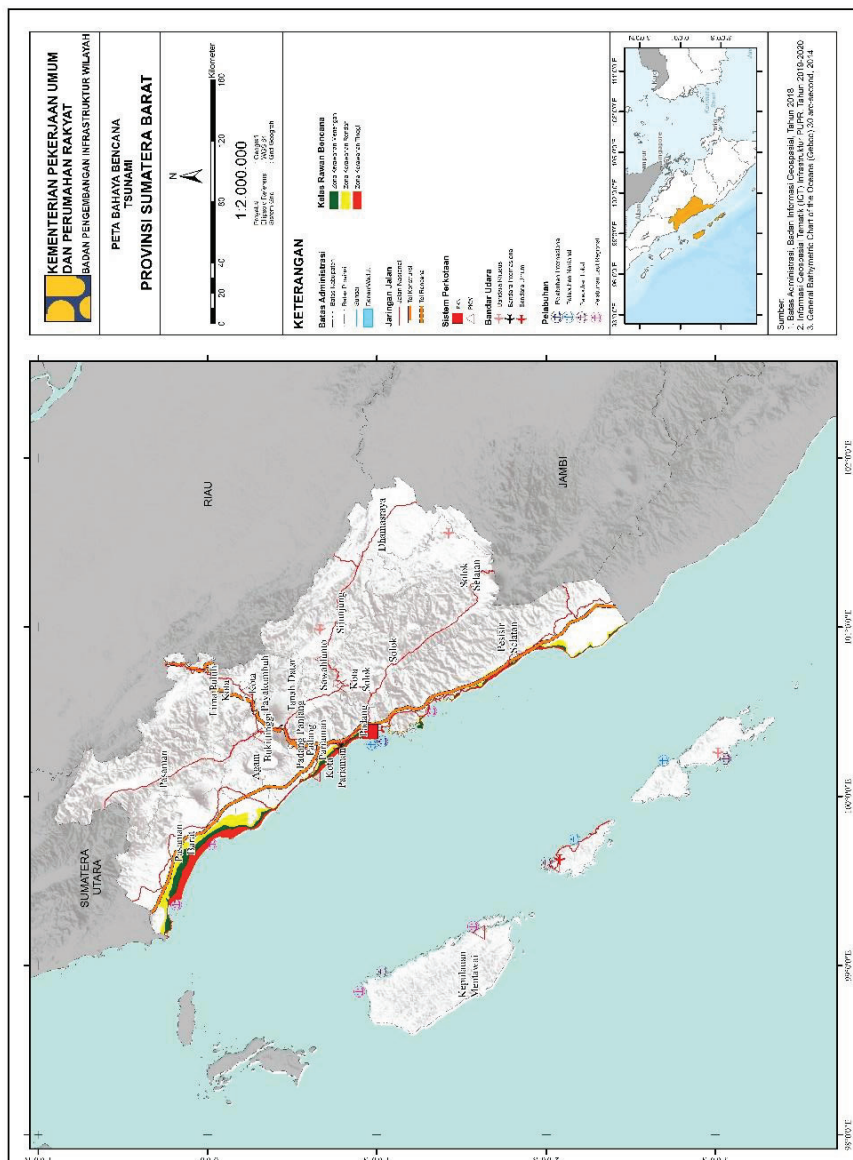
Provinsi Sumatera Barat tatanan geologi kompleks karena letaknya berada di daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan Lempeng Eurasia di bagian utara yang menyebabkan munculnya gejala tektonik yaitu rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung api dan

sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2022, bencana yang dominan terjadi di Provinsi Sumatera Barat adalah bencana cuaca ekstrim, banjir, dan tanah longsor. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 144,39.

Tabel 3.3 Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Indeks	Kelas Risiko
1	Pasaman Barat	203.20	Tinggi
2	Kepulauan Mentawai	197.20	Tinggi
3	Agam	193.52	Tinggi
4	Kota Padang	179.03	Tinggi
5	Pasaman	176.80	Tinggi
6	Kota Pariaman	157.28	Tinggi
7	Padang Pariaman	156.73	Tinggi
8	Pesisir Selatan	152.96	Tinggi
9	Dharmasraya	137.69	Sedang
10	Solok	137.29	Sedang
11	Solok Selatan	137.20	Sedang
12	Kota Bukittinggi	128.01	Sedang
13	Tanah Datar	125.20	Sedang
14	Lima Puluh Kota	119.20	Sedang
15	Kota Solok	115.82	Sedang
16	Kota Padang Panjang	113.20	Sedang
17	Sijunjung	107.20	Sedang
18	Kota Payakumbuh	104.80	Sedang
19	Kota Sawahlunto	101.08	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana, 2022



Gambar 3.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kondisi Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Sumatera Barat berada pada wilayah Sungai Akuaman, Batanghari, Indragiri, Kampar, Masang - Pasaman, Natal Batahan, Rokan, Siberut - Pagai - Sipora, Silaut - Tarusan. Wilayah sungai terbesar yaitu WS Batanghari, dengan luas 46.504 km². Lingkup bahasan Dokumen RPIW Sumatera Barat akan berfokus pada WS dalam lingkup kewenangan nasional. Berikut merupakan luasan wilayah sungai nasional yang ada di Sumatera Barat:

Tabel 3.4 Wilayah Sungai Nasional Provinsi Sumatera Barat

WS Akuaman	luas	295.300	ha
WS Sungai Batang Hari	luas	826.400	ha
WS Indragiri	luas	759.200	ha
WS Kampar	luas	259.100	ha
WS Natal-Batahan	luas	38.000	ha
WS Rokan	luas	219.000	ha

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

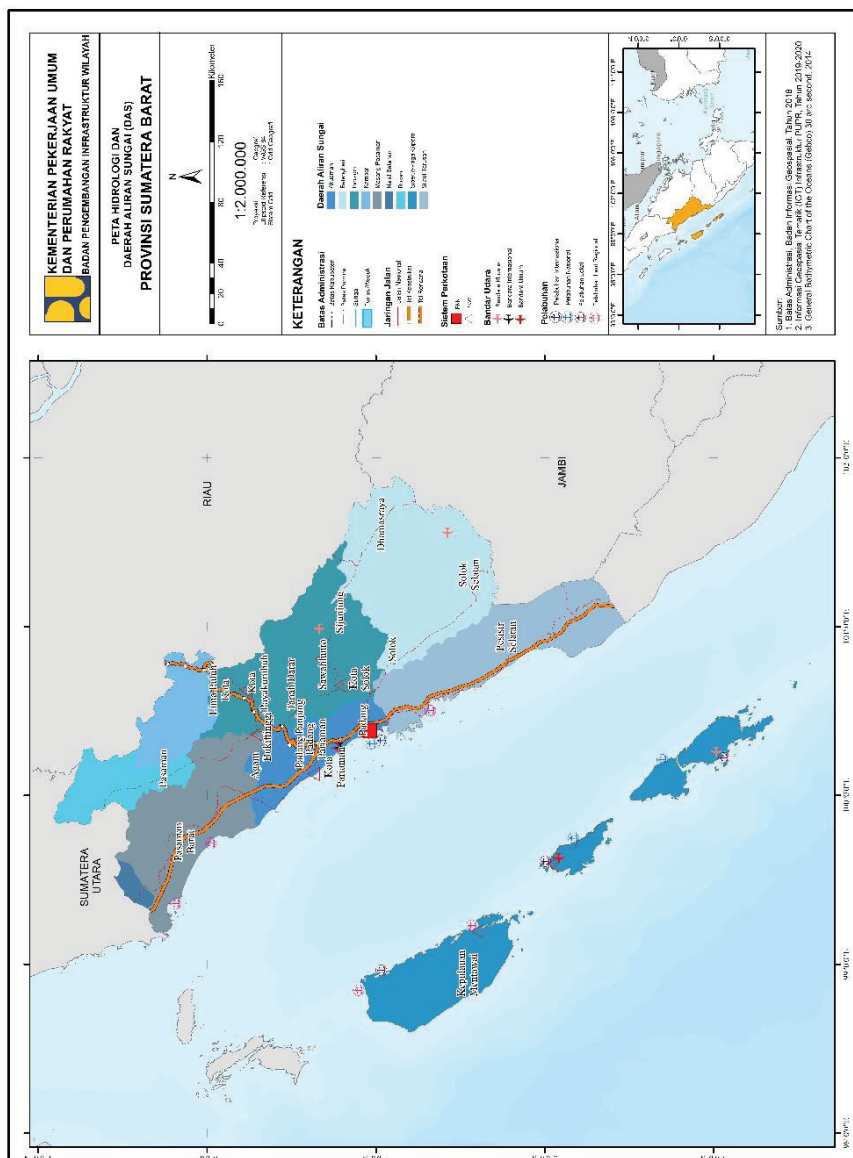
Wilayah Sungai Kewenangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Wilayah Sungai Non-Nasional/Daerah Provinsi Sumatera Barat

WS Masang-Pasaman	luas	565.300	ha
WS Siberut-Pagai-Sipora	luas	733.800	ha
WS Silaut-Tarusan	luas	707.400	ha

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

- WS Rokan, dengan sungai utama Sungai Rokan, memiliki 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas WS 22.453,89 km² yang melintas di 3 provinsi yaitu Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
- WS Kampar adalah Wilayah Sungai lintas provinsi (Riau dan Sumatera Barat) dengan luas 26.038 km² dengan 7 (tujuh) DAS.
- WS Indragiri - Akuaman merupakan wilayah sungai lintas provinsi (Riau, Sumatera Barat, dan Jambi) dengan luas 25.270 km² dengan 19 DAS.
- WS Batanghari merupakan wilayah sungai lintas provinsi (Jambi dan Sumatera Barat), merupakan Wilayah Sungai terbesar dengan luas 46.504 km².



Gambar 3.7 Peta Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kondisi Wilayah Sungai (WS) Rokan, yang secara geografis melintas di 3 (tiga) provinsi yakni Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kabupaten/kota yang dilalui oleh WS Rokan di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman dengan luas wilayah sungai 2.179,43 km² (9,7% dari luasan total WS).

Tabel 3.6 Daftar DAS Provinsi Sumatera Barat

No	Nama DAS	Luas	
		Km ²	(%)
1	DAS Rokan	19.149,89	85,29
2	DAS Parit Aman	194,81	0,87
3	DAS Rajab	209,48	0,93
4	DAS Bagian Timur	239,17	1,07
5	DAS Tanjung Penyebal	166,40	0,74
6	DAS Setaluhu	204,40	0,91
7	DAS Geniyut	124,17	0,55
8	DAS Buluhala	22,23	0,1
9	DAS Teras	237,75	1,06
10	DAS Mampu	65,55	0,29
11	DAS Masigit	235,78	1,05
12	DAS Dumai	483,30	2,15
13	DAS Guntung	480,84	2,14
14	DAS Senaboi	428,36	1,91
15	DAS Pelintung	211,76	0,94

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kondisi Wilayah Sungai (WS) Kampar, dengan luas Total WS Kampar mencapai 26.038 Km². Sebagian berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 2.632,5 km² atau 10,11%, dan sebagian besar berada di Provinsi Riau seluas 23.405,5 km² atau 89,89%. WS Kampar terdiri dari 7 DAS dengan DAS terbesar yaitu DAS Kampar (98,67 % dari luas WS Kampar) yang terletak di dataran Pulau Sumatera dan melintasi 3 Kabupaten di Prov. Sumatera Barat.

- Kab. Lima Puluh Kota, dengan luas 1,979.5 Km² (7,6%)
- Kab. Pasaman, dengan luas 553,8 Km² (2,13%)

Kab. Sijunjung, dengan luas 99,3 Km² (0,38%)

Kondisi Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, dengan luas Total WS Indragiri-akuaman mencapai 25.270 km² terdiri atas 24 DAS, yang tersebar di 3 provinsi (Riau, Sumatera Barat, dan Jambi) dan 22 kabupaten/kota. Luas WS Indragiri-akuaman yang ada di Provinsi

Sumatera Barat seluas 10.138,8 km² atau 40,12%, melintasi 16 kabupaten/kota.

Tabel 3.7 Kondisi WS Indragiri-Akuaman

No	Kabupaten/Kota	Luas dalam WS (km ²)	Persentase dari Luas WS
1	Kabupaten Sijunjung	2.143,20	8,48%
2	Kabupaten Padang Pariaman	1.319,80	5,22%
3	Kabupaten Tanah Datar	1.378,70	5,46%
4	Kabupaten Limapuluh Kota	1.285,70	5,09%
5	Kabupaten Agam	885,8	3,51%
6	Kota Padang	643,1	2,54%
7	Kota Sawahlunto	237,8	0,94%
8	Kota Pariaman	102,7	0,41%
9	Kota Payakumbuh	75,8	0,30%
10	Kabupaten Solok	1.851,00	7,32%
11	Kota Solok	58,9	0,23%
12	Kota Padang Panjang	20,7	0,08%
13	Kota Bukittinggi	16,5	0,07%
14	Kabupaten Dharmasraya	114,4	0,45%
15	Kabupaten Pasaman	2,7	0,01%
16	Kabupaten Pesisir Selatan	2	0,01%
	Jumlah	10.138,80	40,12%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kondisi Wilayah Sungai (WS) Batanghari, dengan luas seluruh Wilayah Sungai Batanghari adalah 46.504 km². Daerah Aliran Sungai (DAS) yang termasuk dalam Wilayah Sungai Batanghari adalah DAS Batanghari (44.555 km² atau 96%) dan Daerah Aliran Sungai Air Hitam (DAS Air Hitam (1.949 km² atau 4%). Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia yang meliputi sebagian besar wilayah Provinsi Jambi dan sebagian Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.8 WS Batanghari yang melintasi wilayah Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota (Provinsi Sumatera Barat)	Luas Area (km ²)			
	DAS Batanghari	DAS Air Hitam	Total Wilayah Sungai	
			(km ²)	(%)
Kab. Solok	1165	-	1165	2,50 %
Kab. Solok Selatan	3589	-	3589	7,72 %
Kab. Dharmasraya	3067	-	3067	6,60 %
Kab. Sijunjung	790	-	790	1,70 %

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

- **Jasa Penyediaan Pangan**
Di provinsi Sumatera Barat wilayah jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas tinggi sampai sangat tinggi seluas 718.001,04 ha (17,04%) terutama berada di Kabupaten Solok yang juga mempunyai komoditas hasil pertanian dan perkebunan yang cukup tinggi, Sedangkan wilayah untuk jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas rendah di Sumatera Barat seluas 2.884.520,56 ha sekitar 68,45%.
- **Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih**
Wilayah jasa ekosistem penyediaan air bersih yang paling pada kelas tinggi adalah seluas 618.615,65 ha atau sebesar 20,95% dari luas wilayah se Provinsi Sumatera Barat, sedangkan wilayah yang menyediakan air pada kelas rendah sebesar 35,25% kurang lebih seluas 1.485.269,06 ha.
- **Jasa Ekosistem Penyediaan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup**
Wilayah dengan jasa ekosistem penyedia Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Provinsi Sumatera Barat pada kelas tinggi adalah sebesar 17,20% yaitu seluas 724.612,41 ha dari luas wilayah se provinsi Sumatera Barat, sedangkan wilayah dengan jasa ekosistem penyedia Tempat Tinggal dan Ruang Hidup pada kelas rendah sebesar 66,60% kurang lebih seluas 2.806.307,70 ha.
- **Jasa Ekosistem Penyediaan Tata Air dan Banjir**
Di Provinsi Sumatera Barat wilayah jasa ekosistem penyedia Tata Air dan Banjir pada kelas tertinggi seluas 74,27% kurang lebih seluas 3.129.600,04 ha. Sedangkan untuk jasa ekosistem penyedia Tata Air dan Banjir pada kelas rendah adalah seluas 113.056,20 sekitar 2,68%.
- **Jasa Ekosistem Penyediaan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana**
Wilayah dengan jasa ekosistem penyediaan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana pada kelas tinggi adalah sebesar 28,91% yaitu seluas 1.218.324,88 ha dari luas wilayah se provinsi Sumatera Barat, sedangkan wilayah dengan jasa ekosistem penyediaan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana pada kelas rendah sebesar 27,95% kurang lebih seluas 1.177.860,75 ha.
- **Jasa Ekosistem Penyediaan Rekreasi dan Ekoturisme**

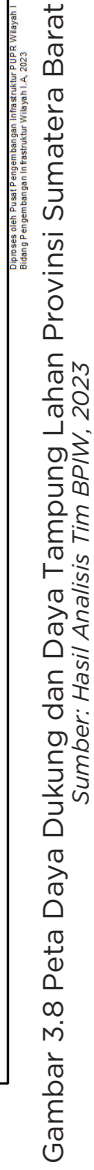
Wilayah dengan jasa ekosistem penyedia Rekreasi dan *Ecotourism* pada kelas tinggi adalah sebesar 35,16% yaitu seluas 1.481.478,34 ha dari luas wilayah se-provinsi Sumatera Barat, sedangkan wilayah dengan jasa ekosistem penyedia Rekreasi dan *Ecotourism* pada kelas rendah sebesar 35,18% kurang lebih seluas 1.482.406,79 ha.

Tabel 3.9 Figur Daya Dukung Lahan
(Berdasarkan *Multi Criteria Analysis* (MCA))

	Kemiringan Lereng	Kawasan Hutan	KRB Banjir	KRB Gempabumi	KRB Gerakan Tanah	KRB Gunung Api	KRB Liqifikasi	Potensi Erosi
ZPK 1 Lahan Sesuai (Zona Prioritas Pengembangan Perkotaan)	Kemiringan lereng 0 - 15 %	Terdapat pada Kawasan Areal Penggunaan Lain	Tidak berada pada zona Limpasan Banjir	Berada pada Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Rendah	Berada Pada Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah	Tidak Berada Pada KRB Gunung Api	Tidak Berada Pada KRB Liqifikasi	Berada Pada Potensi Erosi Rendah
ZPK 2 Lahan Cukup Sesuai (Zona Pengembangan Perkotaan Bersyarat)	Kemiringan lereng 15 - 25 %			Berada pada Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Sedang	Berada Pada Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah		Berada Pada KRB Liqifikasi Rendah	Berada Pada Potensi Erosi Sedang
ZPK 3 Lahan Kurang Sesuai (Zona Pengembangan Perkotaan Terbatas)	Kemiringan lereng 25 - 40 %	Terdapat pada Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas	Berada pada zona Limpasan Banjir	Berada pada Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Tinggi	Berada Pada Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah	Berada Pada KRB Gunung Api I dan II	Berada Pada KRB Liqifikasi Sedang	Berada Pada Potensi Erosi Tinggi
ZPK 4 Lahan Tidak Sesuai (Zona Lindung dan Penyanga Perkotaan)	Kemiringan lereng > 40%	Terdapat pada Kawasan Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Wisata, Taman Hutan Raya, Taman Nasional, Taman Nasional Alam/Hutan Wisata Laut, Taman Nasional Laut			Berada Pada Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi	Berada Pada KRB Gunung Api III	Berada Pada KRB Liqifikasi Tinggi	Daya Dukung Lahan dihitung berdasarkan kemampuan lahan dengan menggunakan metode Multi Criteria Analysis (MCA)

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

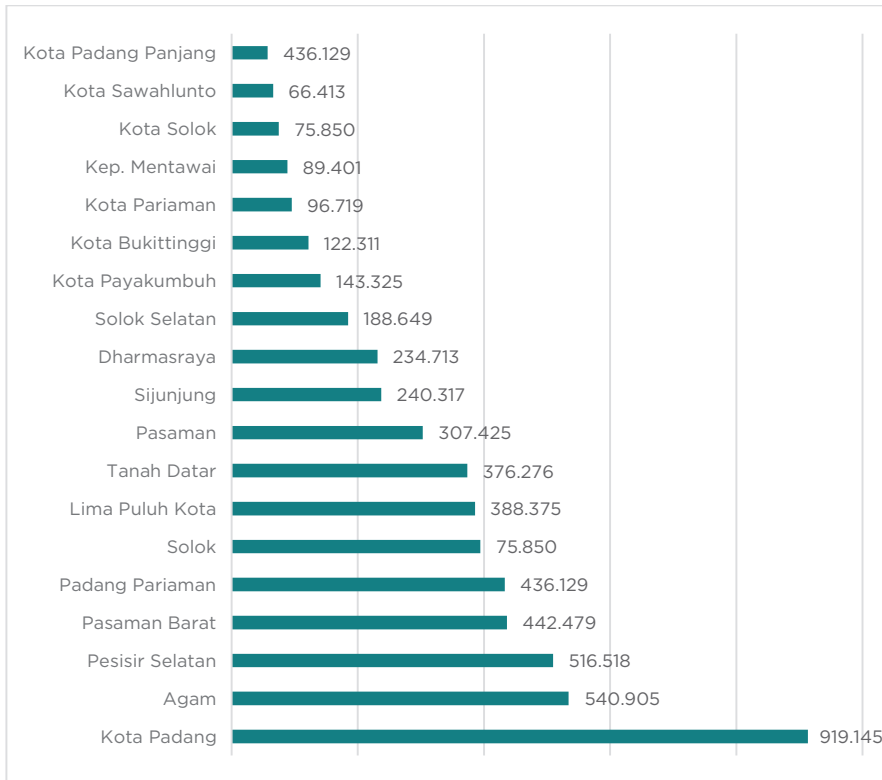
Wilayah yang memiliki daya dukung lahan limitasi (ZPK 4) tidak diperbolehkan untuk dikembangkan dan lebih diarahkan untuk menjadi kawasan lindung sebagian besar berada di bagian tengah wilayah Sumatera Barat dan Sebagian wilayah di Pulau Siberut yang memang merupakan lahan Kawasan hutan lindung dengan potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Sementara lahan yang prioritas dikembangkan sebagai area pengembangan perkotaan berada pada kelas ZPK 1 berada di sepanjang pesisir Sumatera Barat dan Sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya.



Gambar 3.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPW, 2023

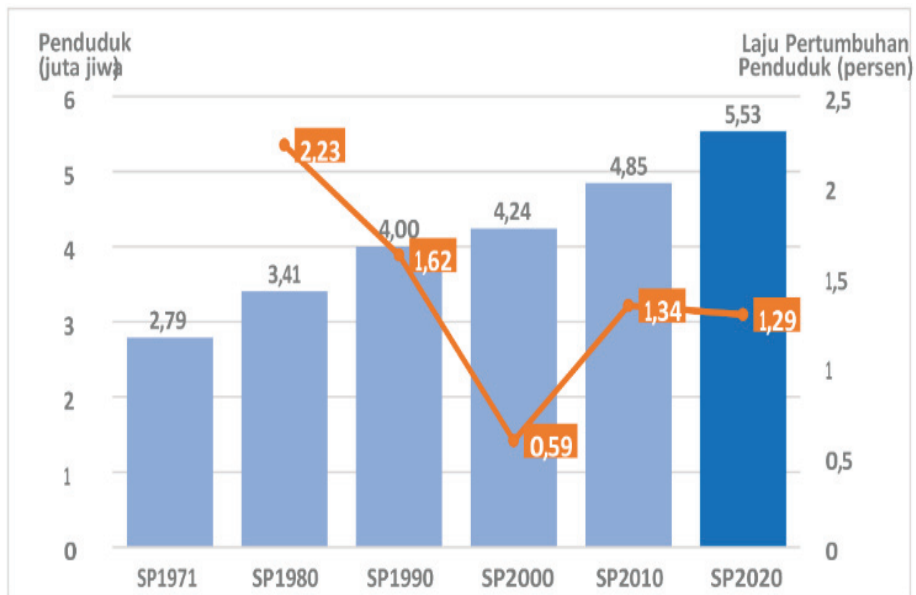
3.2 Profil Demografi

Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah sejumlah 5.640.629 jiwa dengan kepadatan penduduk per km² dan sebesar 133 jiwa per km². Jumlah penduduk tertinggi berada di Kota Padang dengan 919.145 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kota Padang Panjang dengan 57.850 jiwa. Berikut merupakan Jumlah Penduduk di Sumatera Barat:



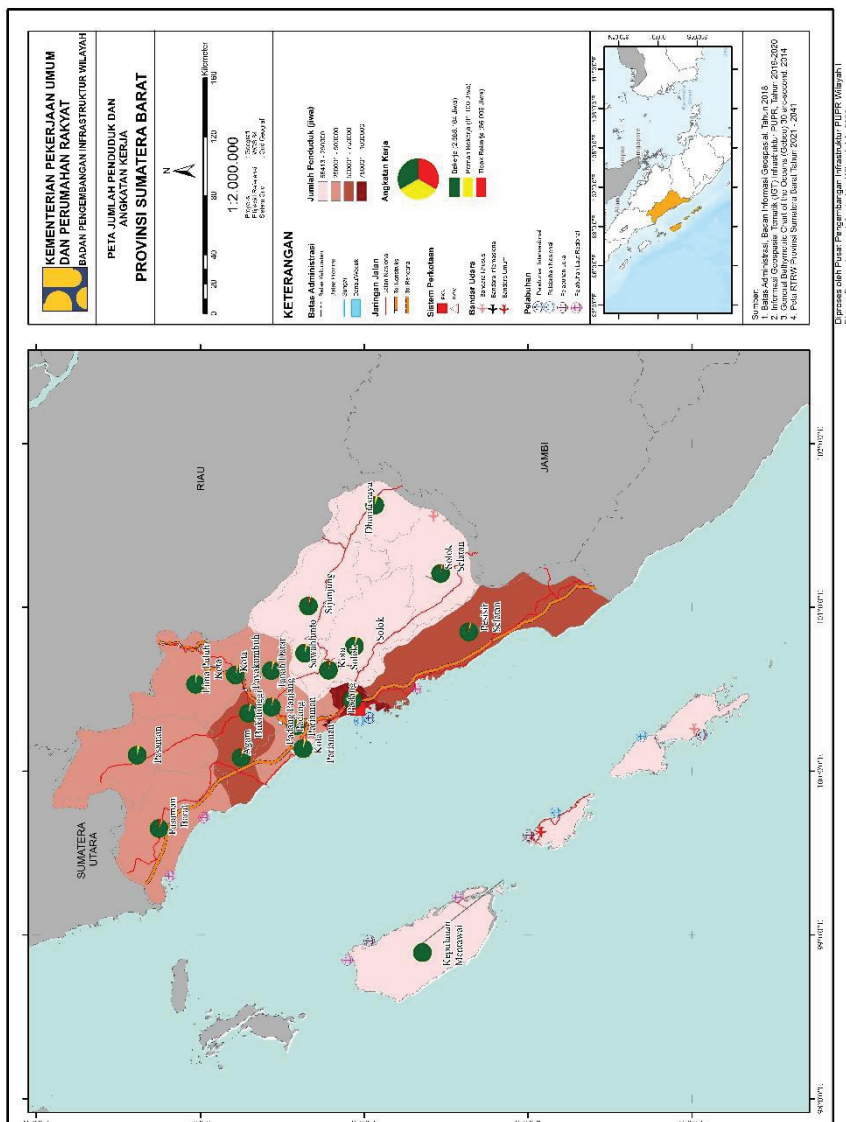
Gambar 3.9 Grafik Jumlah Penduduk
Sumber: Sumatera Barat dalam Angka dan Hasil Analisis, 2023

Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk, seiring dengan jumlah penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan yang mana dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Sumatera Barat meningkat sekitar 687.563 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat sebesar 1,29% per tahun. Terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk hampir satu persen jika dibandingkan dengan periode 1971-1980 yang sebesar 2,23%.

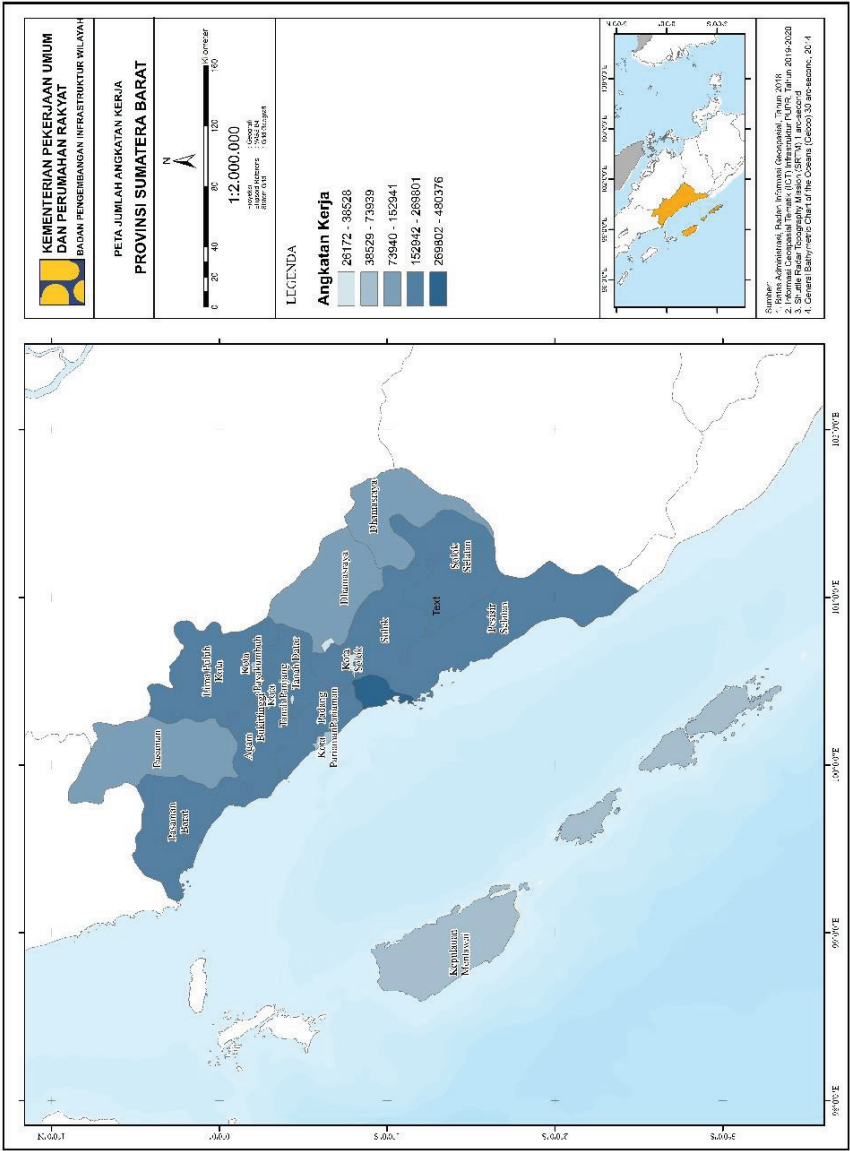


Gambar 3.10 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Sumber: Sumatera Barat dalam Angka dan Hasil Analisis, 2023

Dengan luas daratan Sumatera Barat sebesar 42.000 m², maka kepadatan penduduk Sumatera Barat sebanyak 132 jiwa/km². Angka ini meningkat dari hasil SP 2000 yang mencatat kepadatan penduduk Sumatera Barat sebanyak 100 jiwa/km² dan hasil SP2010 yang mencapai 115 jiwa/km². Penduduk Sumatera Barat menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan distribusi penduduk terendah adalah di Kota Padang Panjang sebesar 1,02% hingga yang tertinggi adalah di Kota Padang sebesar 16,43%. Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat, memiliki penduduk terbanyak yaitu 909.000 jiwa, menempati 1,65% luas Sumatera Barat.



Gambar 3.11 Peta Kepadatan Penduduk
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



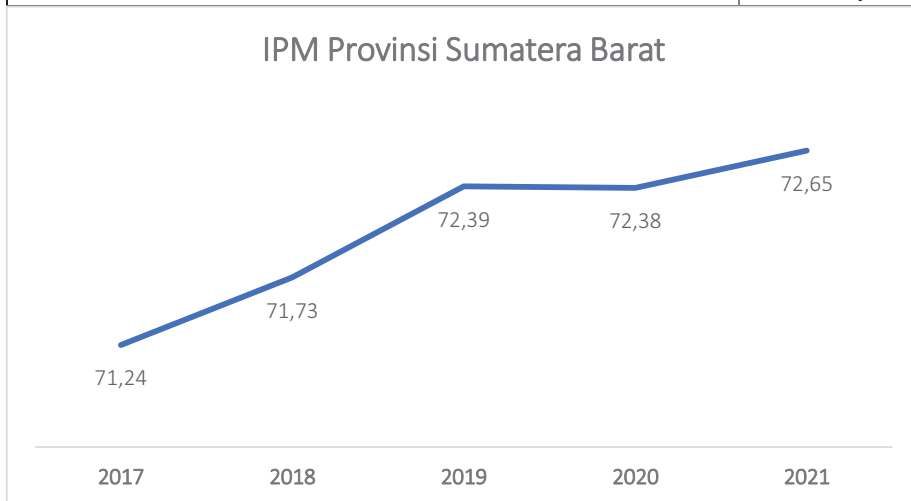
Diproses oleh Badan Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPW, 2021

Gambar 3.12 Peta Jumlah Angkatan Kerja
Sumber: Hasil Analisis Tim BPW, 2023

Indeks Pembangunan Manusia Wilayah, sejak tahun 2016, status IPM Sumatera Barat meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010-2021 IPM Provinsi Sumatera Barat rata-rata meningkat sebesar 0,76% per tahun, dari 67,25 pada tahun 2010 menjadi 72,65 pada tahun 2021 (urutan ke 9 tertinggi nasional).

IPM tertinggi berada di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh, sedangkan IPM rendah terkonsentrasi di wilayah Selatan dan sebagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat, yakni berada di Kab. Kepulauan Mentawai (61,09), Kab, Pesisir Selatan (69,90), Kab. Solok Selatan (69,04).

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	69,59
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,09
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,07
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	10,79
IPM	72,65



Gambar 3.13 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat
Sumber: Sumatera Barat dalam Angka dan Hasil Analisis, 2023

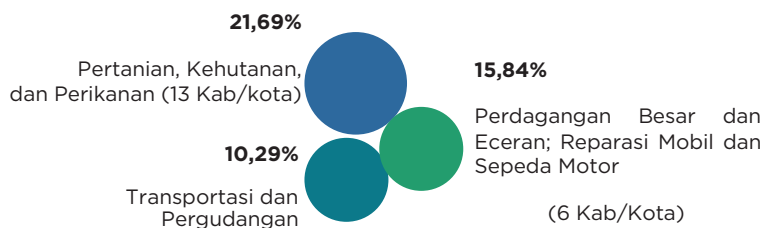


Gambar 3.14 Peta Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

3.3 Profil Ekonomi

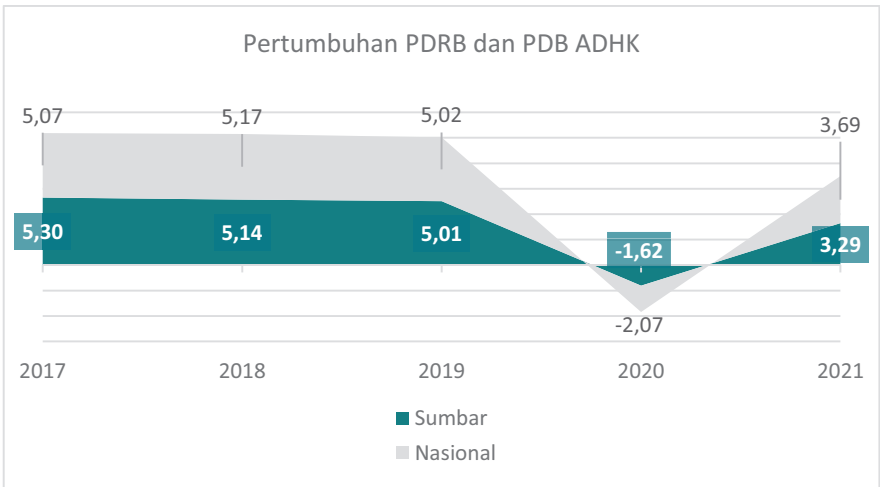
PDRB dan Sektor Unggulan, berdasarkan hitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2017 – 2022 seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu terjadinya peningkatan meskipun dengan laju yang berbeda-beda. Meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan tapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Potensi tertinggi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Apabila dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2017 – 2021 per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat maka PDRB terbesar ada di Kota Padang dengan laju pertumbuhan juga yang cukup signifikan, sedangkan PDRB yang paling sedikit berada pada Kota Padang Panjang. PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat berkontribusi hanya 1.57% terhadap perekonomian nasional dengan nilai 252.749 Miliar Rupiah. Berikut 3 sektor utama yang memberikan kontribusi sekitar 73,93% perekonomian Sumatera Barat.

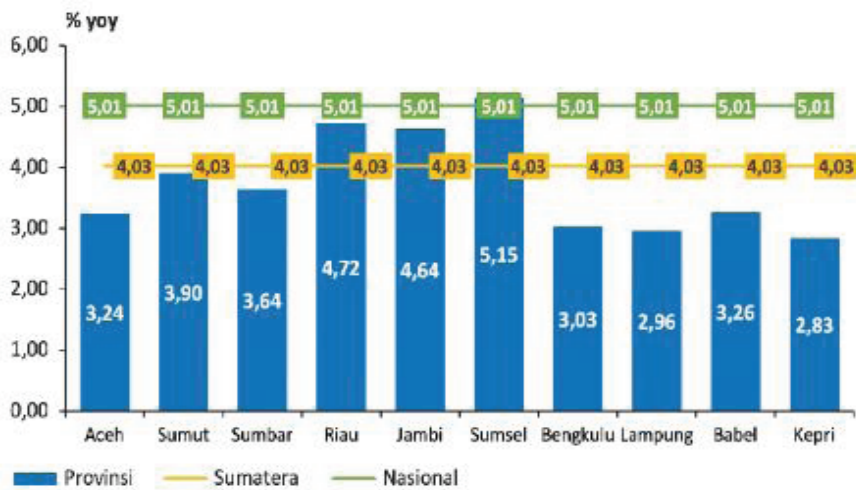


Gambar 3.15 Diagram Persentase Distribusi PDRB Sektor Unggulan Sumatera Barat Terhadap PDRB Nasional
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berdasarkan hasil analisis, kontribusi paling besar terdapat pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sekitar 21,69%, dengan persentase ini Provinsi Sumatera Barat menyumbang kurang lebih 1,72% ke PDRB nasional pada sektor yang sama. Daerah yang menghasilkan PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tertinggi adalah Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, dan Kab. Pesisir Selatan. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat juga memberikan kontribusi nilai ekspor nasional sebesar 1,32%. Komoditas unggulan tahun 2021 adalah minyak kelapa sawit dengan *share* sejumlah 79% dari total nilai ekspor, diikuti karet remah (5,91%), serta kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (3,56%).

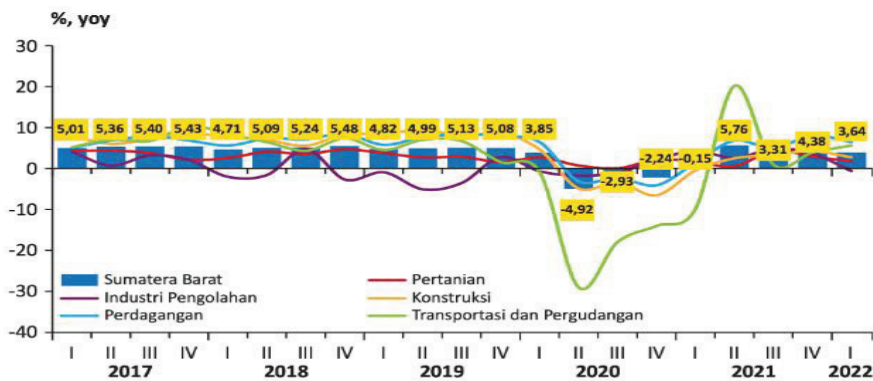
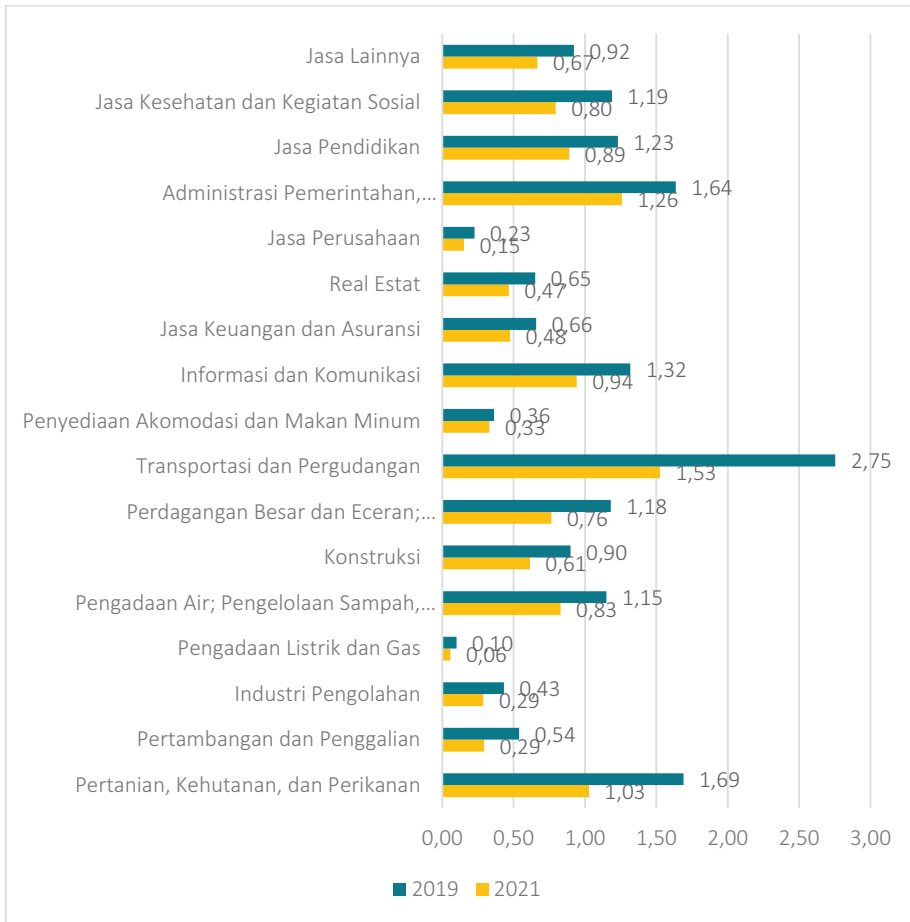


Gambar 3.16 Pertumbuhan PDRB dan PDB ADHK
Sumber: Sumatera Barat dalam Angka dan BPS Statistik Nasional, 2022



Sumber: BPS, diolah
Gambar 3.17 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Sumatera Triwulan 1 2022
Sumber: Sumatera Barat dalam Angka dan BPS Statistik Nasional, 2022

Dari hasil pengolahan data, didapati bahwa nilai LQ terbesar di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu, sektor unggulan lainnya adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.18 Pertumbuhan PDRB Per Lapangan Usaha Semua Sumatera Barat

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka dan BPS Statistik Nasional, 2022

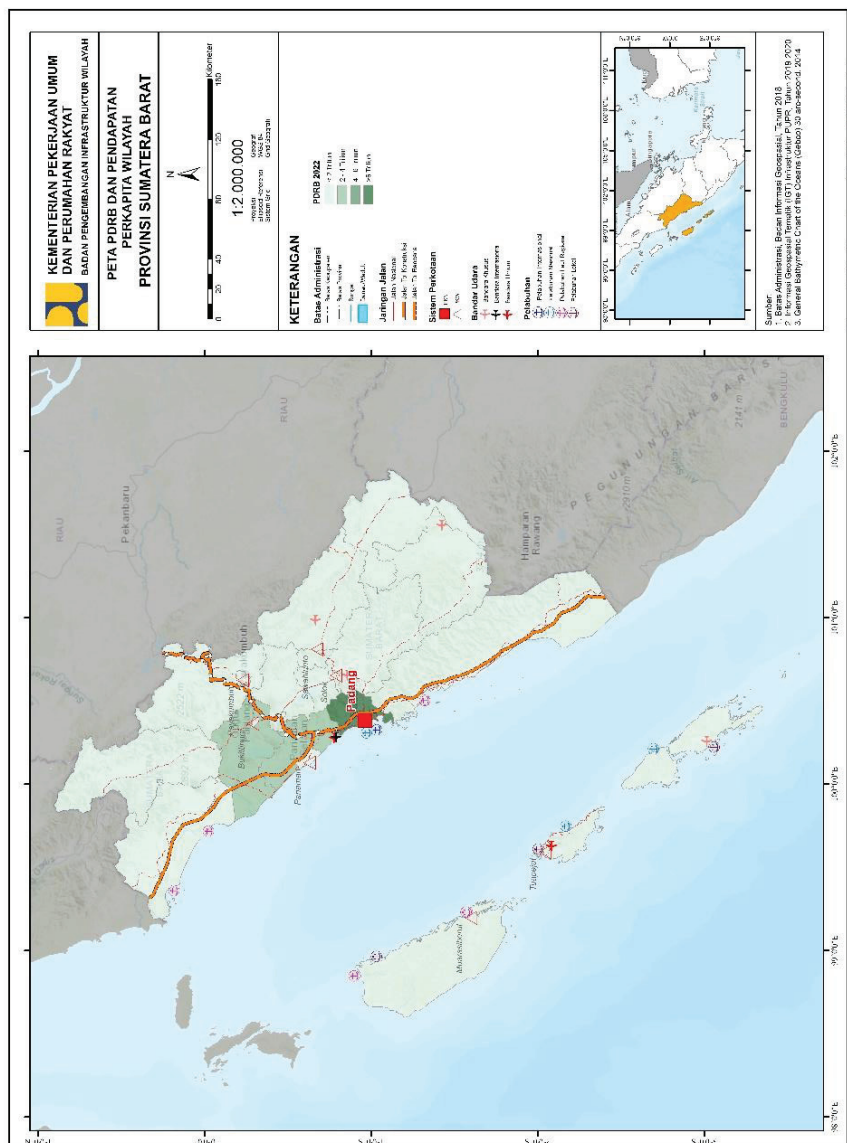
Tabel 3.10 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Sumatera Barat (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Sumatera Barat (Juta Rupiah)					
	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Solok	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Agam
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6131080.76	5257081.28	2858804.80	4187180.24	4742341.59	6113614.34
B. Pertambangan dan Penggalian	540978.87	852721.85	1438829.12	486618.30	1489976.53	748257.33
C. Industri Pengolahan	1129706.91	749841.03	295225.99	1608196.07	2422526.50	1981878.01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7774.42	4492.54	4380.09	3698.76	7422.69	4980.51
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9690.23	8032.83	4530.66	16422.52	10668.08	10248.61
F. Konstruksi	1936093.96	1576048.24	1566065.19	1570554.51	2179333.69	1893282.55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2072536.57	1817100.55	1297475.06	2091645.51	2315940.37	3838634.84
H. Transportasi dan Pergudangan	627908.20	1708943.19	768214.89	1321663.88	4291850.53	1296804.97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	211203.64	150750.86	88734.90	117432.81	282170.52	159295.31
J. Informasi dan Komunikasi	1191488.06	1112179.51	376743.03	834450.59	833304.46	1187018.48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	367502.90	287997.15	264610.68	395873.19	361949.52	245908.41
L. Real Estate	219593.32	136676.70	120616.13	250681.90	229451.53	387946.45
M,N Jasa Perusahaan	8095.36	10952.74	2167.86	5670.39	17004.89	7368.29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1128200.41	1054078.65	570577.23	1035998.35	1189178.17	961051.12
P. Jasa Pendidikan	573742.29	635841.08	567121.62	589568.65	1325763.19	1123714.38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	244935.57	252205.54	230777.50	247611.55	155496.02	260420.77
R,S,T,U Jasa Lainnya	200810.35	166196.43	213676.51	291960.91	338986.75	156145.85
Produk Domestik Regional Bruto	16601341.83	15781140.16	10668551.27	15055228.13	22193365.04	20376570.25

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Sumatera Barat (Juta Rupiah)
----------------	---

	Kabupaten Limapuluh Kota	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Dharmasray a	Kabupaten Pasaman Barat	Kota Padang
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5162289.31	4301672.28	1780363.29	3254822.97	6990590.08	3737689.30
B. Pertambangan dan Penggalian	1258458.83	174375.85	579620.08	794286.48	313367.79	2272678.98
C. Industri Pengolahan	987902.39	345158.30	274266.30	642008.64	243555.44	8213412.66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2577.75	1963.00	2397.00	2411.17	4133.40	68692.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4543.26	8480.99	2858.46	1389.11	1960.94	108081.86
F. Konstruksi	821960.68	486406.91	818675.14	1789501.38	1382165.55	7446684.62
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2305423.69	1243833.36	1372506.70	1842908.72	2329769.29	12706686.62
H. Transportasi dan Pergudangan	1541444.55	405746.65	404410.99	745516.91	940706.08	11425537.81
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110362.39	80763.74	53851.37	124327.77	121370.10	973219.34
J. Informasi dan Komunikasi	904092.58	455141.71	348564.16	845952.39	1042329.67	6193932.60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	263291.80	204800.34	52386.42	282855.03	375193.24	4088834.41
L. Real Estate	180974.62	123092.20	52748.03	266857.83	280987.63	2285350.59
M,N Jasa Perusahaan	4710.44	4771.09	928.61	2315.03	10524.54	1022848.89
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	982826.57	686546.38	338873.73	908323.65	782296.76	5035687.99
P. Jasa Pendidikan	543521.55	254863.50	172941.54	385681.59	506707.02	3905060.99
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	259993.88	97065.43	88440.83	239538.11	240809.13	1389310.92
R,S,T,U Jasa Lainnya	207126.54	95042.28	85403.77	104773.17	130658.89	2087941.60
Produk Domestik Regional Bruto	15541500.82	8969724.02	6429236.43	12233469.96	17889125.53	72961651.23

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Sumatera Barat (Juta Rupiah)					
	Kota Solok	Kota Sawahlunto	Kota Padang Panjang	Kota Bukittinggi	Kota Payakumbuh	Kota Pariaman
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	242159.40	383196.89	209899.95	112008.15	486078.90	1043060.40
B. Pertambangan dan Penggalian	27937.03	232270.30	10467.81	197.80	41207.88	100647.30
C. Industri Pengolahan	203003.16	474214.96	339756.72	503980.03	405987.14	410142.50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2790.59	75267.01	2442.00	64835.08	4490.56	4378.03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8071.56	15990.18	10061.84	13491.31	18908.43	2181.40
F. Konstruksi	645993.88	478404.86	388476.52	657647.76	1113070.14	889843.30
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1219584.65	655119.93	741501.23	3491546.44	2072187.47	908673.90
H. Transportasi dan Pergudangan	713821.57	359078.49	488132.92	1031660.91	977905.63	607173.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114708.57	97528.60	115077.88	515564.38	276102.52	153101.80
J. Informasi dan Komunikasi	340990.04	362836.13	399654.28	750590.00	691799.29	509534.10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	212191.66	155104.57	180640.13	601038.91	499594.85	168513.71
L. Real Estate	125938.48	76468.71	143170.94	329850.66	231045.26	165846.60
M,N Jasa Perusahaan	798.14	5910.61	3135.81	61868.33	18349.83	7814.70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	414807.73	551559.26	392104.18	640926.31	594220.39	360456.10
P. Jasa Pendidikan	291066.53	148065.22	404130.20	613701.48	402174.06	273084.90
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79337.75	57006.07	63173.43	392389.70	130269.17	78748.00
R,S,T,U Jasa Lainnya	149952.38	261894.70	194720.24	412723.31	286911.44	198652.30
Produk Domestik Regional Bruto	4793153.11	4389916.49	4086546.10	10194020.58	8250302.95	5881852.94



Gambar 3.19 Peta PDRB dan Pendapatan Perkapita Wilayah
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Jumlah Tenaga Kerja dan Perusahaan, Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS) di Sumatera Barat pada tahun 2019 mengalami 4% peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 192 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 200 perusahaan pada tahun 2019. Jumlah tenaga kerja yang diserap industri manufaktur besar dan sedang pada tahun 2019 berkurang sekitar 9,98% atau menjadi 23.466 orang. Jumlah perusahaan yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan yaitu total sebanyak 45.369 perusahaan, diikuti kelompok industri tekstil (17 perusahaan) untuk IBS dan industri pakaian jadi (17.700 perusahaan) untuk IMK. Didapati bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam menjadi tempat mata pencaharian Industri Mikro dan Kecil (IMK) terbanyak. Sedangkan Kota Padang memiliki jumlah perusahaan dan tenaga kerja Industri Besar-Sedang terbesar.

Tabel 3.11 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja

Kabupaten/Kota		Industri Besar - Sedang		Industri Mikro dan Kecil	
		Jumlah Perusahaan (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Jumlah Perusahaan (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
	Kabupaten				
1	Kep. Mentawai	-	-	404	942
2	Pesisir Selatan	5	445	5.127	9.125
3	Solok	4	610	5.589	10.869
4	Sijunjung	5	251	1.935	3.254
5	Tanah Datar	12	408	7.124	11.127
6	Padang Pariaman	14	3.105	7.999	16.168
7	Agam	9	1.111	14.801	19.336
8	Lima Puluh Kota	4	163	16.865	30.184
9	Pasaman	6	134	4.383	8.415
10	Solok Selatan	5	840	1.370	2.822
11	Dharmasraya	11	1.149	2.769	4.985
12	Pasaman Barat	16	2.251	6.210	11.722
	Kota				
1	Padang	70	11.890	10.810	26.153
2	Solok	1	29	1.537	3.020
3	Sawahlunto	2	50	1.873	3.344
4	Padang Panjang	1	33	1.565	4.079
5	Bukittinggi	6	183	3.316	5.678
6	Payakumbuh	20	541	3.697	7.833
7	Pariaman	9	273	3.338	6.761
Sumatera Barat		200	23.466	100.712	185.817

Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka, 2022

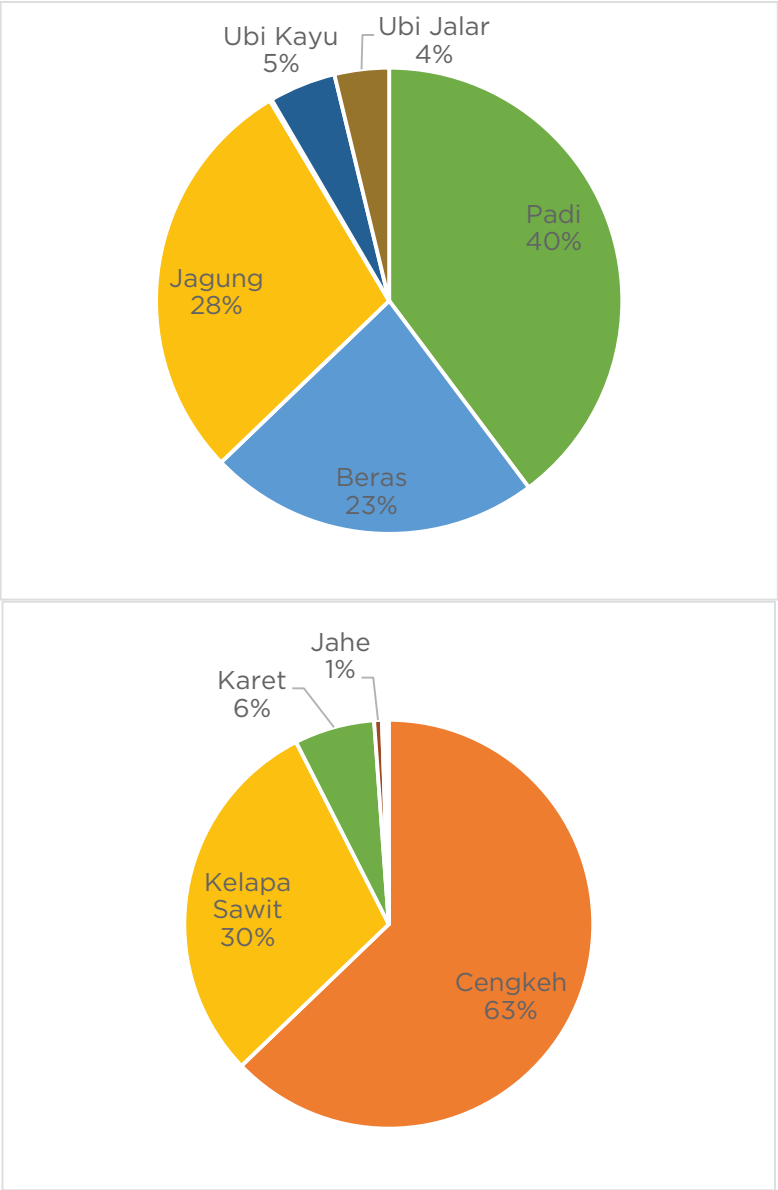
Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

di Provinsi Sumatera Barat adalah padi. Produksi padi di Sumatera Barat tahun 2021 berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) tercatat sebesar 1.317.209,38 ton, dengan produktivitas sebesar 48,36 ton/ha, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan peningkatan sekitar 3,07%. Selain tanaman padi di provinsi Sumatera Barat menghasilkan beberapa produktivitas tanaman pangan lainnya yaitu jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Luas panen di Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 272.391,95 hektar, dengan luas panen terluas berada di Kabupaten Solok (32.553,83 hektar) dan yang terkecil di Kabupaten Kepulauan Mentawai (376,77 hektar).

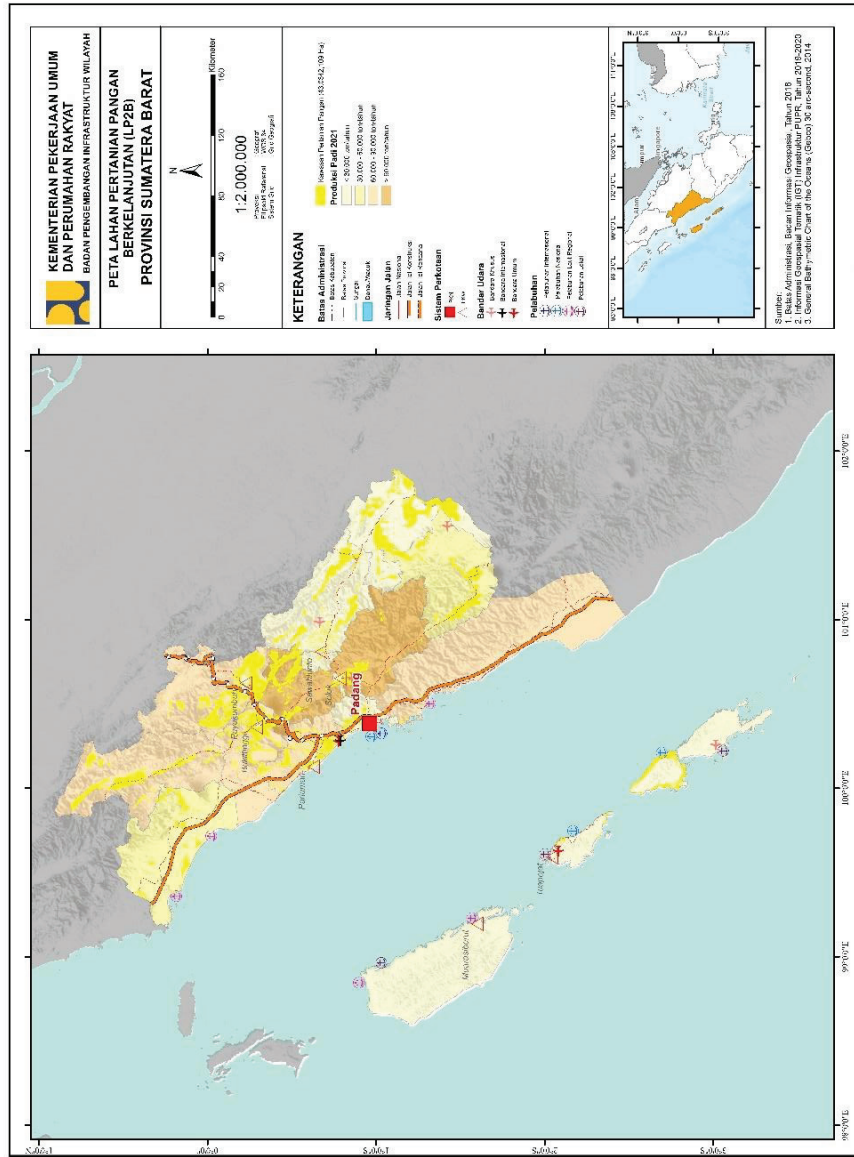
Produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-5 terbesar di Pulau Sumatera, berada di bawah Provinsi Aceh. Produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menyumbang 2,38% produksi nasional dan produksi beras menyumbang 2,41% beras nasional (peringkat ke-11 nasional). Produksi pertanian pangan lainnya adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Total produksi jagung mencapai 928.062,16 ton dan sentra produksi tertinggi berada di Kab. Pasaman Barat.

Komoditas unggulan sektor lainnya merupakan sektor perkebunan. Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat menurut pengelolaannya secara garis besar dapat dibedakan menjadi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan PNP/PTP. Komoditi perkebunan rakyat dengan luas tanam paling besar di Sumatera Barat tahun 2021 adalah kelapa sawit dan karet. Dari perkebunan rakyat pada tahun 2021 tercatat luas tanam kelapa sawit dan karet masing-masing 249.518,69 hektar dan 180.267,34 hektar dengan produksi 681.431,79 ton dan 145.557,90 ton.

Produksi tanaman kelapa sawit paling banyak di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan produksi tanaman karet paling banyak di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman. Hasil perkebunan terbanyak adalah cengkeh, penghasil terbanyak berada di Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Solok. Produksi kelapa sawit Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke-5 di Pulau Sumatera dan ke-8 nasional. Daerah penghasil terbanyak berada di Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Pesisir Selatan. Produksi karet Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke-9 nasional, penghasil terbesar berada di Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, dan Kab. Dharmasraya.



Gambar 3.20 Diagram Komoditas Unggulan
Sumber: Hasil Olahan Data Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2022



Gambar 3.21 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Jalur Pergerakan Komoditas Kelapa Sawit (CPO), Karet, dan Cengkeh, bermuara ke pabrik untuk diolah dan didistribusi menuju pelabuhan untuk diekspor. Kelapa sawit, karet, dan cengkeh merupakan hasil perkebunan dengan produksi tertinggi di Sumatera Barat. Sementara itu, minyak kelapa sawit dan karet merupakan komoditi ekspor terbesar. Kota Padang (pelabuhan) menjadi muara alur pergerakan komoditas sebelum disalurkan ke luar wilayah Sumbar.

Tabel 3.12 Produksi Komoditas Cengkeh, Kelapa Sawit, dan Karet

Kabupaten/Kota		Produksi		
		Cengkeh	Kelapa Sawit	Karet
	Kabupaten			
1	Kepulauan Mentawai	33.130,00	-	27,00
2	Pesisir Selatan	82.528,50	83.413,30	11.279,69
3	Solok	284.400,00	116,23	3.121,73
4	Sijunjung	-	22.686,52	35.853,93
5	Tanah Datar	328.280,00	-	7.059,75
6	Padang Pariaman	61.330,00	2.675,37	3.630,00
7	Agam	449.380,00	18.443,02	1.350,57
8	Lima Puluh Kota	84.950,00	8.725,86	6.795,23
9	Pasaman	-	10.755,80	31.799,60
10	Solok Selatan	4.732,00	43.878,92	10.308,78
11	Dharmasraya	242,00	103.279,18	25.888,27
12	Pasaman Barat	2.250,00	386.512,54	6.006,25
	Kota			
1	Padang	58.360,00	6,30	190,68
2	Solok	43.820,00	16,00	21,45
3	Sawahlunto	2.803,34	811,16	2.223,86
4	Padang Panjang	1.500,00	-	-
5	Bukittinggi	-	-	-
6	Payakumbuh	3.142,75	-	1,10
7	Pariaman	437,00	111,60	-
	Sumatera Barat	1.441.285,59	681.431,79	145.557,90

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka 2022, Kemenperin, dan RPIP Sumatera Barat 2018-2031

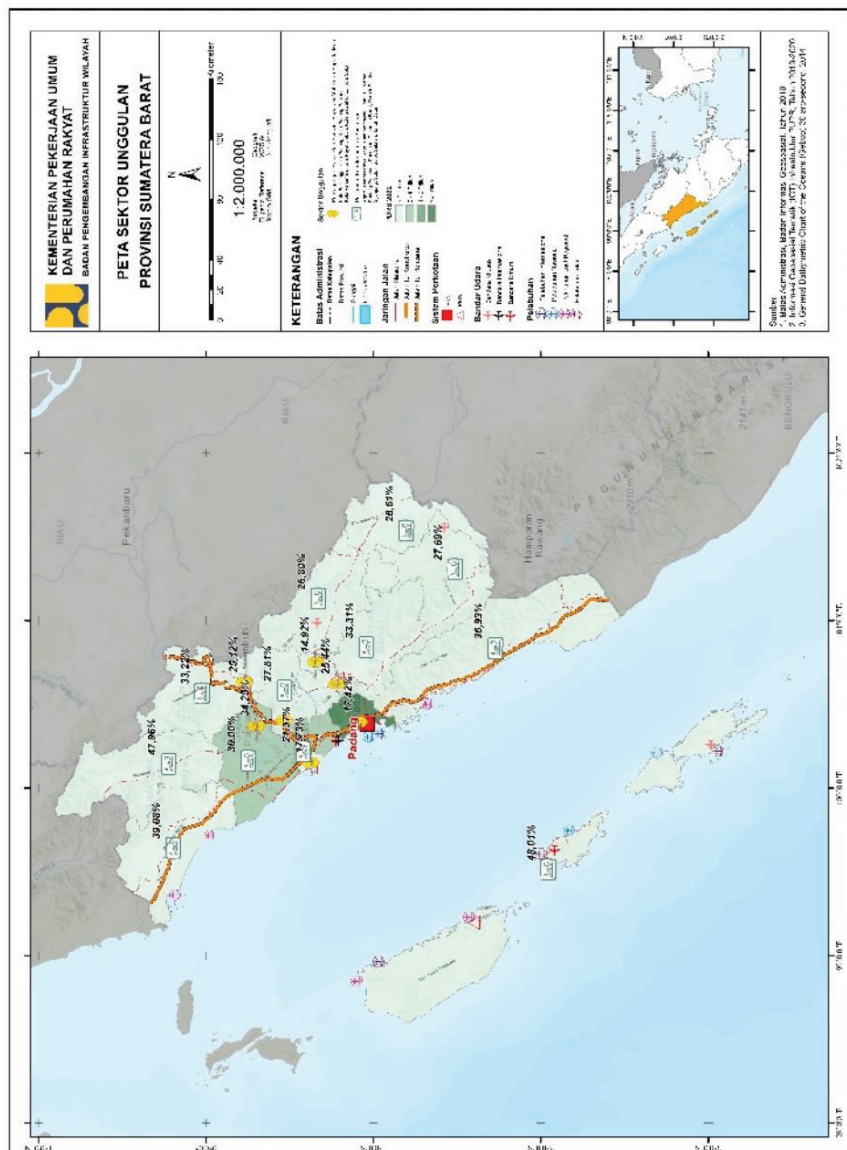
Berdasarkan data milik Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2022 (BPS, 2022) didapati bahwa produksi cengkeh paling banyak berada di Kabupaten Agam. Kemudian, produksi kelapa sawit terbanyak berada di Kabupaten Pasaman Barat dan Produksi Karet terbanyak berada di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Kota Bukittinggi tidak memiliki jumlah produksi untuk ketiga komoditas tersebut baik komoditas kelapa sawit, karet dan cengkeh.

Kegiatan Ekspor-Import di Provinsi Sumatera Barat banyak dilakukan melalui pelabuhan. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan utama di Provinsi Sumatera Barat. Di Tahun 2021, Pelabuhan Teluk Bayur menyumbang 98,31% volume ekspor di Provinsi Sumatera Barat dengan total volume 5,1 juta ton, sedangkan Bandara Tabing menyumbang 528 ton. Total kegiatan ekspor melalui pelabuhan menyumbang sekitar 0,86% dari volume ekspor nasional. Nilai ekspor melalui provinsi asal di Sumatera Barat tahun 2021 tercatat US\$ 3,07 miliar. Angka ini naik 87,89% dibandingkan nilai ekspor tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,63 miliar US\$.

Nilai ekspor Sumbar terbesar di muat pada Pelabuhan Teluk Bayur yaitu sebesar US\$ 2.910,8 miliar (1,32% nasional). Nilai impor Sumbar terbesar pada tahun 2021 melalui Pelabuhan Teluk Bayur sebesar US\$ 271 juta. Nilai impor di Sumatera Barat menurut negara asal mengalami kenaikan sebesar 118,38% dari 187,79 juta US\$ tahun 2020 menjadi 410,12 juta US\$ tahun 2021. Komoditas minyak kelapa sawit memiliki nilai ekspor yang paling tinggi diantara komoditi lainnya. Berdasarkan komoditinya berikut adalah nilai ekspor pada masing-masing jenis komoditi yang melakukan kegiatan ekspor-impor:

US\$ 2.437.219.520,17	Minyak Kelapa Sawit
US\$ 284.670.019,01	Karet Remah
US\$ 108.848.803,95	Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari hasil Pertanian
US\$ 222.369.281,71	Komoditi Lainnya

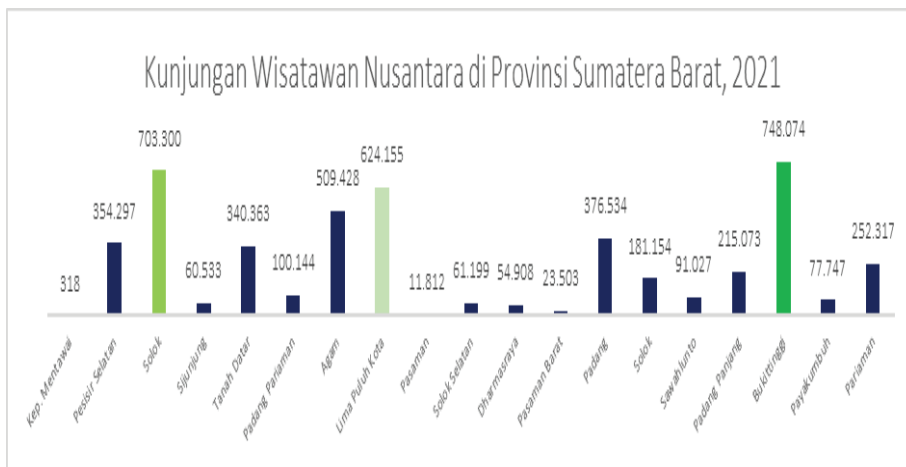
Gambar 3.22 Nilai Ekspor berdasarkan Komoditi
Sumber: Hasil Olahan Data Sumatera Barat dalam Angka 2022



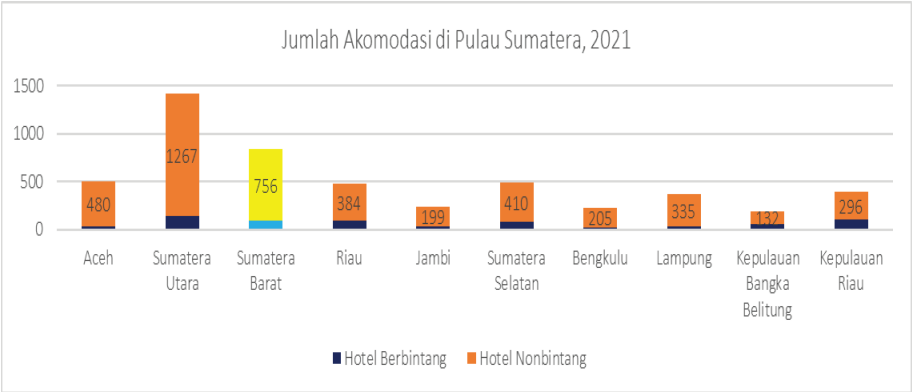
Gambar 3.23 Peta Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Wisatawan, Akomodasi dan Amenitas, pada tahun 2021, jumlah wisatawan mancanegara menurun 100% disebabkan oleh pembatasan wisatawan mancanegara yang masuk ke Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19. Jumlah Wisatawan nusantara mencapai 4.785.886 jiwa sedangkan jumlah wisatawan mancanegara tidak ada sama sekali (Gambar 3.31). Pada tahun 2022, wisatawan mancanegara melalui Bandara Minangkabau menyumbang 0,28% jumlah kunjungan secara nasional. Sehubungan dengan hal ini diketahui bahwa Jumlah akomodasi hotel di Provinsi Sumatera Barat merupakan ke-2 terbanyak di Pulau Sumatera (Gambar 3.32).

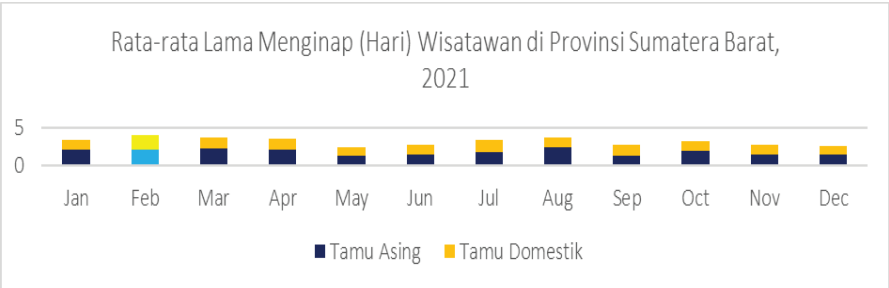
Kemudian, Fasilitas pendukung sektor pariwisata terbanyak berada di Kota Padang sebanyak 345 unit, sedangkan Fasilitas pariwisata tersedikit berada di Kabupaten Dharmasraya yakni sebanyak 34 unit. Adapun Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) pada hotel berbintang tahun 2021 adalah selama 1,37 hari, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 1,53 hari. Selain itu, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) pada hotel berbintang naik sebesar 10,06 poin dari 31,88% tahun 2020 menjadi 41,94% tahun 2021. Pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya TPK tahun 2021 tercatat sebesar 16,19%, (sama dengan tahun sebelumnya) (Gambar 3.33). Potensi sektor Pariwisata tematik yang cukup beragam dan dukungan penetapan di tingkat Pusat: 1 DPP, 4 KSPN, 6 KPPN, dan 1 usulan KSPN (Mandeh).



Gambar 3.24 Kunjungan Wisatawan Nusantara tahun 2021
Sumber: Hasil Olahan Data Sumatera Barat dalam Angka 2022

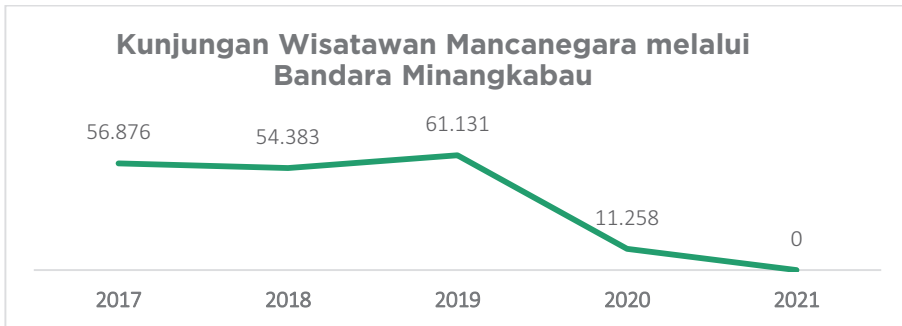


Gambar 3.25 Jumlah Akomodasi di Pulau Sumatera Barat
Sumber: Hasil Olahan Data Sumatera Barat dalam Angka 2022



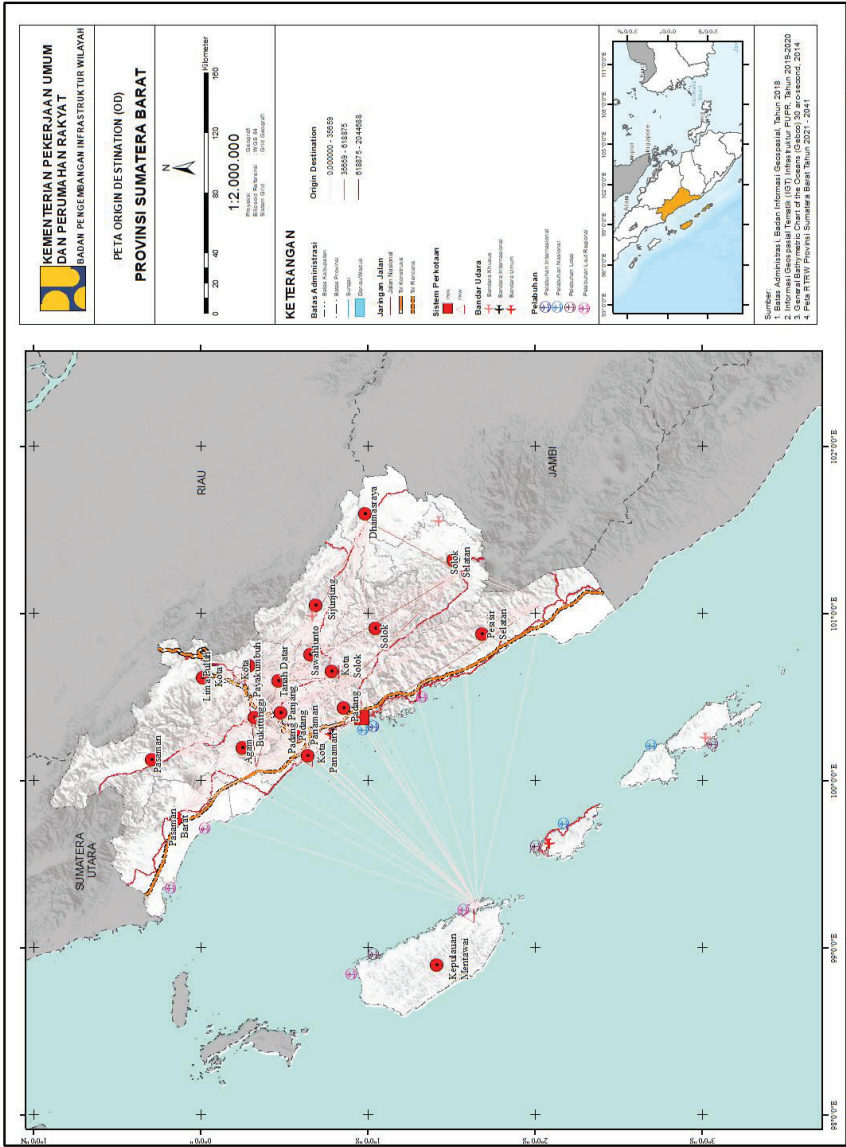
Gambar 3.26 Rata-Rata Lama Menginap
Sumber: Hasil Olahan Data Sumatera Barat dalam Angka 2022

Pergerakan Wisatawan, sebelum pandemi covid-19 terjadi, pada tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 61 ribu orang dengan mayoritas wisatawan berasal dari Malaysia, Australia, Amerika Serikat, dan Singapura. Kota Bukittinggi menjadi wilayah yang paling banyak diminati oleh wisatawan. Rata-rata lama menginap wisatawan asing maupun domestik adalah 1,5 hari dan merupakan peringkat ke-2 terendah di Pulau Sumatera. Namun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan cukup signifikan seperti yang telah disampaikan pada bahasan sebelumnya.



Gambar 3.27 Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Sumber: Hasil Olahan Data Tim BPIW, 2022

Jumlah kunjungan wisatawan kemudian terbagi menjadi beberapa klasifikasi yakni Kunjungan Tinggi yang meliputi Kab. Bukittinggi, Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Agam. Kemudian ada pula yang termasuk ke dalam kunjungan wisatawan sedang yakni Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kab. Padang Pariaman. Kemudian, ada pula kabupaten/kota yang termasuk kunjungan rendah yaitu Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman. Dan wilayah yang termasuk ke dalam kunjungan wisatawan rendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.



Gambar 3.28 Peta Origin Destination
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

3.3.1 Penentuan Kawasan Prioritas

Dalam rangka mendukung pengembangan Provinsi Sumatera Barat pada masing-masing fokus perencanaan, yaitu: perkotaan, pariwisata, dan pertanian maka ditentukan kawasan prioritas pada masing-masing fokus yang akan dilaksanakan sampai dengan periode tahun 2029. Adapun penetapan kawasan prioritas dan dan tahapan dilakukan dengan pembobotan kriteria, sebagai berikut:

A. Kawasan Prioritas Sektor Perkotaan

Penentuan Kawasan prioritas perkotaan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)
2. Memiliki infrastruktur transportasi kebandarudaraan
3. Ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat
4. Adanya kesesuaian pengembangan provinsi

Tabel 3.13 Penentuan Kawasan Prioritas Perkotaan

PERKOTAAN							
Kawasan	1	2	3	4	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
PKN Palapa	V	V	V	V	4	V	1. PKN Palapa, dengan strategi operasionalisasi: Meningkatkan keterkaitan PKN Padang dengan PKN Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang sebagai pusat perkotaan. Fungsi pelayanan industri, perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan Pariwisata 2. Bandara Miangkabau 3. PKN 4. Sesuai

PERKOTAAN							
Kawasan	1	2	3	4	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
PKW Solok	V		V	V	3		1. Fungsi pelayanan perkebunan, pertambangan, pertanian, pariwisata, industry 2. - 3. PKW Kota Solok 4. Sesuai
PKW Pariaman	V		V	V	3		1. Fungsi pelayanan industri, pertanian, Pariwisata 2. - 3. PKW Kota Bukittinggi 4. Sesuai
PKW Bukittinggi	V		V	V	3		1. Fungsi pelayanan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan industri 2. - 3. PKW Kota Pariaman 4. Sesuai
PKW Sawahlunto	V		V	V	3		1. Fungsi pelayanan Industri, perkebunan, pertambangan, dan pertanian 2. - 3. PKW Kota Sawahlunto 4. Sesuai
PKW Muarasibert	V		V	V	3		1. Fungsi pelayanan industri, perikanan, pariwisata, dan pertanian 2. - 3. PKW Muara Siberut 4. Sesuai
PKW Payakumbuh	V				1		1. Fungsi pelayanan tidak termuat dalam lampiran RTRWN 2. - 3. Ditetapkan sebagai PKWp 4. Tidak Sesuai
PKW Tuapejat	V				1		1. Fungsi pelayanan tidak termuat dalam lampiran RTRWN 2. - 3. Ditetapkan sebagai PKL 4. Tidak Sesuai

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

B. Kawasan Prioritas Sektor Pariwisata

Penentuan Kawasan prioritas sektor pariwisata, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan ditetapkan dalam RPJMN dan/ RIPARNAS
2. Memiliki infrastruktur transportasi kebandarudaraan
3. Ditetapkan sebagai Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata (KUUP)
4. Adanya kesesuaian arahan pengembangan provinsi

Tabel 3.14 Penentuan Kawasan Prioritas Pariwisata

PARIWISATA							
Kawasan	1	2	3	4	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
KSPN Bukittinggi	V	V	V	V	4	V	1. Padang – Bukittinggi dan sekitarnya, citra pariwisata <i>The Soul of Minangkabau</i> *RIPARNAS 2. Bandara Minangkabau di Padang Pariaman (Pengumpul Sekunder) 3. Kawasan Unggulan: Kawasan Wisata Bukittinggi sekitarnya (Kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark) 4. Sesuai
DPN Mentawai - Siberut dan Sekitarnya	V	V	V	V	4	V	1. Mentawai – Siberut dan sekitarnya, citra pariwisata: <i>Undiscovered Islands of Indonesia</i> *RIPARNAS 2. Bandara Rokot di Kep. Mentawai (Pengumpulan) 3. Kawasan Unggulan: Kawasan Wisata Teluk Katurai Siberut dan Kawasan Wisata Taman Nasional Siberut serta KUUP Dusun Jati dan Dusun Mapadegat *DPN Mentawai didukung dengan adanya destinasi wisata berkelas dunia *Kab Kep Mentawai termasuk dalam 3T Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, guna mendukung konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang, meningkatkan produktivitas ekonomi

PARIWISATA							
Kawasan	1	2	3	4	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
							<i>wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di daerah</i> 4. Sesuai
KSPN Maninjau			V	V	2		1. - 2. - 3. Kawasan Unggulan: Kawasan Wisata Maninjau Sekitarnya (Danau Maninjau) 4. Sesuai
KSPN Singkarak			V	V	2		1. - 2. - 3. Kawasan Unggulan : Kawasan Wisata Danau Singkarak (Wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar) 4. Sesuai
KSPN Siberut			V	V	2		1. - 2. - 3. Kawasan Unggulan: Kawasan Wisata Teluk Katurai Siberut dan Kawasan Wisata Taman Nasional Siberut; 4. Sesuai

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

C. Kawasan Prioritas Sektor Pertanian

Penentuan Kawasan prioritas sektor pertanian, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan ditetapkan dalam RPJMN
2. Luas lahan sawah termasuk dalam 3 (tiga) kab/kota tertinggi di Provinsi Sumatera Barat
3. Kontribusi PDRB sektor pertanian, perkebunan, dan kebutuhan termasuk dalam 3 (tiga) kab/kota tertinggi di Provinsi Sumatera Barat
4. Adanya kesesuaian arahan pengembangan provinsi

Tabel 3.15 Penentuan Kawasan Prioritas Pertanian

PERTANIAN							
Kawasan	1	2	3	4	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
KPPN Agam (Agam)	V	V	V	V	4	V	1. Dalam RPJMN 2020-2024 2. Luas panen 71.940 Ha dan Produktivitas sawah/tanaman pangan 5.07 ton/ha 3. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan kehutanan Rp.6.113.614juta (Menduduki peringkat ke-3 di Sumatera Barat) 4. Dikembangkan sebagai kawasan agrolopitan dan kawasan pertanian lahan sawah irigasi <i>*Mendorong pengembangan jalur distribusi melalui Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat</i>
KPPN Tapan (Pesisir Selatan)	V	V	V	V	4		1. Dalam RPJMN 2020-2024 2. Luas lahan sawah 23.885 Ha 3. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan kehutanan Rp.6.131.080juta (Menduduki peringkat ke-2 di Sumatera Barat) 4. Dikembangkan sebagai kawasan agrolopitan
KPPN Mandeh (Pesisir Selatan)		V	V	V	3		1. Masterplan KPPN Mandeh (BPIW) 2. Luas lahan sawah 23.885 Ha 3. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan kehutanan Rp.6.131.080juta (Menduduki peringkat ke-2 di Sumatera Barat) 4. Dikembangkan sebagai kawasan agrolopitan

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

D. Kawasan Prioritas Sektor Perkotaan

Penentuan Kawasan daerah tertinggal, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024
2. Nilai indeks tingkat kemiskinan
3. Nilai indeks pembangunan manusia (IPM)

Tabel 3.16 Penentuan Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal

Kawasan Daerah Tertinggal						
Kawasan	1	2	3	Total Poin	Prioritas	Argumentasi
Kawasan 3T Kepulauan Mentawai	V	V	V	3	V	1. Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 2. Tingkat kemiskinan Kab. Kep. Mentawai di tahun 2020 adalah 14,35% yang berada di atas tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia. 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kep. Mentawai adalah 61,09 atau terkategori sedang. Namun kondisi IPM tersebut masih di bawah rata-rata IPM Indonesia.

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berdasarkan penentuan kawasan prioritas di Provinsi Sumatera Barat di atas, sehingga diperoleh Kawasan prioritas pada masing-masing fokus sebagai berikut.

Tabel 3.17 Kawasan Priortas Provinsi Sumatera Barat

Fokus	No	Kawasan Prioritas
Perkotaan	1	PKN Palapa Meliputi: Kota Padang - Lubuk Alung - Pariaman
Pariwisata	2	KSPN Bukittinggi Meliputi: Kota Bukittinggi
Pertanian	3	KPPN Agam Meliputi: Kab. Agam
Kawasan Daerah tertinggal	4	Kawasan Daerah 3T Mentawai Meliputi: Kab. Kepulauan Mentawai

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

3.3.2 Profil dan Potensi Fokus Perkotaan

Kawasan Prioritas Perkotaan PALAPA

Perkotaan PALAPA sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, memiliki peran dalam meningkatkan keterkaitan PKN Padang dengan PKN Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang sebagai pusat perkotaan. Dengan fungsi pelayanan industri, perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan Pariwisata. Perkotaan Palapa berada pada sebagai salah satu sebagai gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), maupun Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Jalur Utama Distribusi Logistik Provinsi Sumatera Barat dengan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Gerbang Utama Ekspor Impor. Akses Utama Menuju Destinasi Pariwisata dengan Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai Gerbang Utama Pariwisata. Wilayah dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB provinsi, diharapkan bisa memberikan *trickling down effect* terhadap wilayah sekitar (terutama daerah tertinggal). Berperan menjadi super hub bagi Koridor Wisata Bukittinggi-Solok dan Klaster Kepulauan (Mentawai).

3.3.3 Profil dan Potensi Fokus Pariwisata

KSPN Bukittinggi

Berdasarkan pengembangan Pariwisata ditetapkan dengan Tematik dan citra kekhasan, diantaranya KSPN Bukittinggi dan sekitarnya sebagai *The Soul of Minangkabau*. Destinasi Pariwisata di Sumatera Barat terintegrasi antar obyek wisata dalam 1 koridor paket wisata tematik: destinasi pantai & pulau, geopark, geo wisata Ngarai Sianok, budaya Minangkabau Tempo dulu, warisan tambang batubara (ombilin), geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang- Goa Batu Kapal - TNKS, destinasi selancar & ombak, dll. Penetapan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional: DPN, KSPN, KPPN. Aktivitas pariwisata

berkontribusi 6,87% terhadap PDRB, dan berkontribusi 7,09% terhadap nilai output yang ada di Sumatera Barat, lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional, dimana kontribusi pariwisata nasional terhadap nilai tambah bruto sebesar 4,1% dan kontribusi terhadap nilai output sebesar 4,29%.

Strategi pengembangan kawasan Pariwisata dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan objek wisata alam serta objek wisata buatan berdasarkan konsep ramah lingkungan serta berkesinambungan
- b. Menjaga serta melestarikan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah serta bagian dari daya tarik wisata
- c. Mengarahkan perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu
- d. kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
- e. Mendorong kegiatan atraksi wisata pada setiap zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
- f. Mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan wisata

Wilayah Pengembangan kawasan pariwisata:

- I. Wilayah I Padang dan sekitarnya
 1. Kawasan yang dikembangkan sebagai berikut:
 - a. KUPP Kota Padang (Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang)
 - b. KSPP Kabupaten Pesisir Selatan (Kawasan Wisata Mandeh).
 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut:
 - a. KSPP Kabupaten Padang Pariaman (Kawasan Wisata Pantai Tiram)
 - b. KPPP Kota Pariaman (Kawasan Pantai Gandoriah, Pulau Angso Duo)
- II. Wilayah II Bukittinggi dan sekitarnya,
 1. Kawasan yang dikembangkan sebagai berikut:
 - a. KUPP Bukittinggi (Kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark)
 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut:
 - a. KSPP Kabupaten Agam (Kawasan Maninjau)
 - b. KSPP Kabupaten Lima Puluh Kota (Kawasan Harau)
 - c. KPPP Kabupaten Pasaman (Kawasan Equator)

- d. KPPP Kabupaten Pasaman Barat (Kawasan Pulau Panjang)
- e. KPPP Kota Payakumbuh (Kawasan Ngalau Indah)

Kawasan Andalan Nasional dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian. Kawasan Strategis Nasional sudut kepentingan Hankam, Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (Batas Terluar Kep. Mentawai). Strategis Perikanan Nasional (SKPT). Destinasi Selancar dan Ombak dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia diminati wisatawan mancanegara. Secara berkala menjadi lokasi event pariwisata kejuaraan Dunia (World Champions Surfing Series). Ragam potensi unggulan Kepulauan Mentawai belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi daerah dan masyarakat, sehingga masih masuk dalam kategori Daerah Tertinggal.

3.3.4 Profil dan Potensi Fokus Pertanian

KPPN Agam

Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi. Demikian juga terhadap pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas. Kontribusi PDRB paling besar terdapat pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sekitar 21,69%, dengan persentase ini Provinsi Sumatera Barat menyumbang kurang lebih 1,72% ke PDRB nasional pada sektor yang sama. Daerah yang menghasilkan PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tertinggi adalah Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, dan Kab. Pesisir Selatan.

Pengembangan KPPN Agam dalam mendukung sektor pertanian, kehutanan dan perikanan perlu didukung dengan pengembangan outlet. Pelabuhan Teluk Tapang merupakan perwujudan pengembangan sistem transportasi laut di Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Pasaman Barat yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam. Perwujudan tersebut didukung dengan ada tatanan kepelabuhan diantaranya Pelabuhan pengumpul teluk Tapang di Kecamatan Sungai Beremas dan Pelabuhan pengumpan Sasak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Alur pelayaran teluk Tapang antara lain:

1. Teluk Bayur – Teluk Tapang;
2. Teluk Tapang – Belawan – Teluk Tapang, dan
3. Teluk Tapang – Nias – Teluk Tapang.

Saat ini, pelayanan jalur logistik di Provinsi Sumatera Barat berfokus di Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di wilayah Sumatera Barat bagian Selatan. Teluk Bayur merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi Kawasan ITMB yaitu Kawasan Indarung-Teluk Bayur-Bungus-Mandeh. Peluang Teluk Bayur untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub ditentukan antara lain oleh kelengkapan fasilitas penunjang, kualitas pelayanan, dan kemampuan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pasar global, terutama pasar Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Pelabuhan Teluk Bayur menjadi Pelabuhan yang sibuk di Kota Padang dan Sumatera Barat. Beban Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan utama perlu adanya pembagian distribusi ke Pelabuhan lain yang berada di Sumatera Barat bagian utara untuk menanganinya, Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang sebagai penopang Pelabuhan Teluk Bayur dan sekaligus untuk dapat membantu mengurangi antrian kapal dan penumpukan barang di Pelabuhan Teluk Bayur.

3.3.5 Profil dan Potensi Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

Kawasan Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai

Kepulauan Mentawai terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan 4 pulau utama yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 6.011,35 Km² atau 601.135 Ha, terdiri dari 10 kecamatan. Kecamatan Siberut Barat memiliki luas wilayah paling luas (112.486 Ha atau sekitar 18,71 % dari total wilayah). Luas terkecil adalah Kecamatan Sipora Selatan (26.847 Ha atau 4,47%). Dalam konstelasi regional, PPKT Mentawai mengemban berbagai peran dan fungsi strategis, yaitu selain merupakan PKW (Muara Siberut dan Tuapejat), juga merupakan KSPN Siberut, KPPN Sipora dan Pagai Utara, sekaligus merupakan 3 dari 111 PPKT (P. Pagai Utara, P. Sinyau-nyau, P. Sibaru-baru) di Indonesia. Untuk mendukung berbagai kegiatannya, saat ini telah didukung oleh Pel. Muara Siberut, Pel. Tuapejat, Pel. Sikakap dan Bandara Rokot. Salah satu yang menjadi rencana nasional untuk dijadikan lokasi fokus perikanan dan kelautan adalah pengembangan SKPT Sikakap di Kec. Sikakap dan berada pada WPP 572. Komoditas perikanan dari berbagai kawasan produksi perikanan yang tersebar di Kepulauan Mentawai kemudian didistribusikan menuju pusat koleksi dan distribusi PPS Teluk Bungus di Kota Padang.

Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai jumlah penduduk 87.632 jiwa dengan kepadatan 14 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk 1,41%. Jumlah penduduk terbesar dan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sipora Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kep. Mentawai adalah 61,09 atau terkategori sedang. Namun kondisi IPM tersebut masih di bawah rata-rata IPM Indonesia. Tingkat kemiskinan Kab. Kep. Mentawai adalah 14,35% yang berada di atas tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami.

3.4 Profil Sosial Budaya

Suku Adat dan Bangunan Adat

Istana Pagaruyung

Istano Basa yang lebih terkenal dengan nama Istana Pagaruyung, adalah sebuah istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini merupakan obyek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana dari era Kerajaan Pagaruyung yang dibangun pada abad ke-17 ini dibuat untuk kediaman keluarga dari masa Rajo Alam Minangkabau, yang runtuh pada masa Perang Padri, setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda.



Gambar 3.29 Istana Pagaruyung
Sumber: Google Image

Rumah Gadang

Rumah Gadang merupakan sebutan dari rumah adat Suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Rumah Gadang dibuat berbentuk empat persegi panjang dan dibagi atas dua bagian muka dan belakang, umumnya berbahan kayu, dan sepintas kelihatan seperti berbentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti tanduk kerbau, masyarakat setempat menyebutnya *Gonjong*, dan dahulunya atap ini berbahan ijuk dan sekarang sudah mulai ada perubahan dengan menggunakan bahan atap seng. Rumah Gadang juga mempunyai kekhasan tersendiri dengan konstruksi yang tidak menggunakan paku besi sebagai pengikat tapi menggunakan pasak kayu yang cukup kuat.



Gambar 3.30 Rumah Gadang
Sumber: Google Image

Desa Adat dan Desa Wisata, Sumatera Barat memiliki total sebanyak 11 desa adat yang berada di 3 pulau yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai dan 1 Kabupaten yakni Kabupaten Tanah Datar. Berikut merupakan beberapa desa adat yang ada di Sumatera Barat:

Tabel 3.18 Daftar Nama Wilayah Adat Di Provinsi Sumatera Barat
Desa Adat di Pulau Siberut

No	Nama Wilayah Adat	Kecamatan
1	Polak Teteu / Tiop	Siberut Barat Daya
2	Salappak	Siberut Selatan
3	Polak Teteu / Tolou Loggo	Siberut Barat Daya
4	Polak Teteu / Puro	Siberut Selatan
5	Gotap	Siberut tengah

Pulau Sipora

No	Nama Wilayah Adat	Kecamatan
6	Polak Muttogat Suku Mentawai	Sipora Selatan
7	Sababalat Polak Muntogat saureinu	Sipora Selatan
8	Laggai Goiso Oinan	Sipora Utara
9	Laggai Rokot	Sipora Selatan

Pulau Pagai

No	Nama Wilayah Adat	Kecamatan
10	Muntogat Parak Batu	Pagai selatan

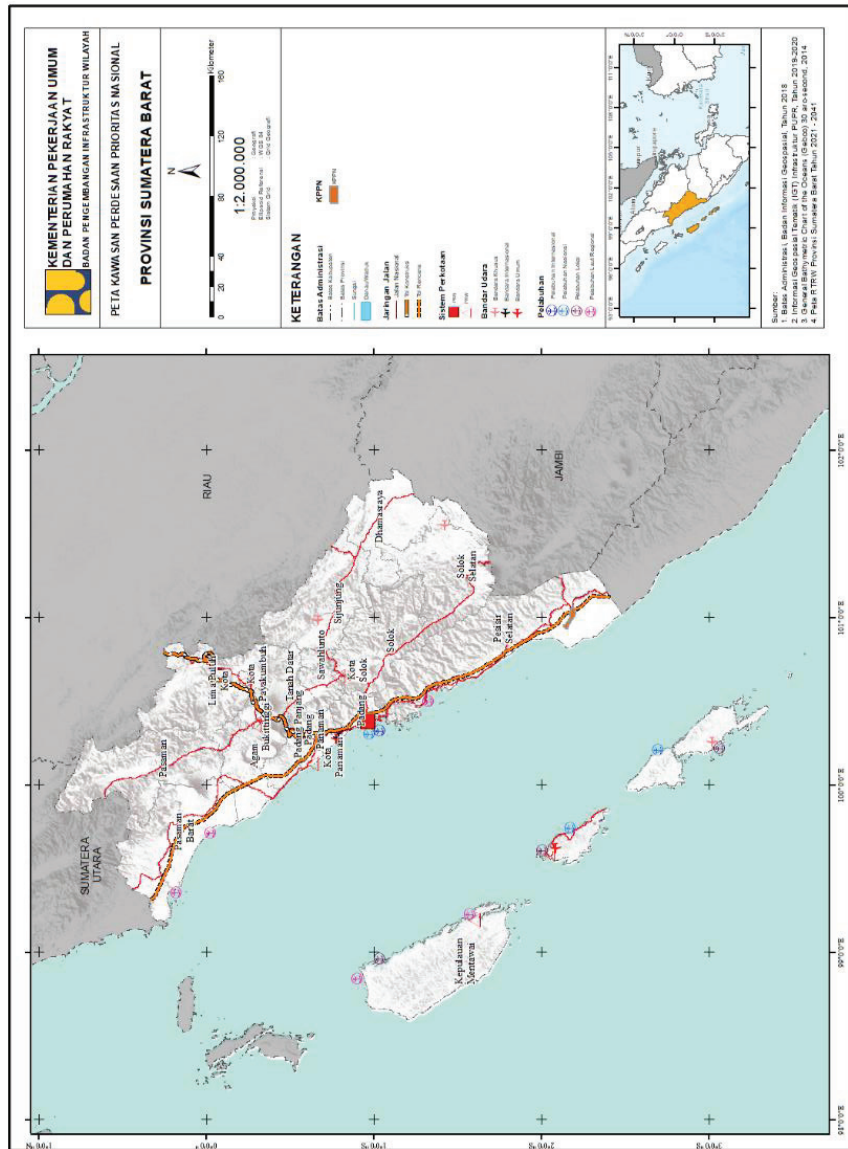
Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Wilayah Adat	Kecamatan
11	Malalo (Guguak Malalo)	Batipuh Selatan

Sumber: Website jadesta.kememparekraf.go.id

Selain itu, Desa Adat Pariangan (Nagari Tuo Pariangan) yang sudah sangat terkenal akan keelokan bangunan serta pemandangannya. Desa ini terletak di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian, Desa Adat Sijunjung terletak di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Desa ini menghadirkan wisata budaya masyarakat Minangkabau dengan adanya Rumah Gadang tua. Selanjutnya terdapat Kawasan Saribu Rumah Gadang yang berlokasi di Desa Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Dan Kampung adat Sarugo (Saribu Gonjong) yang terdapat Nagari Koto Tinggi, di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Desa Wisata yang berada di Sumatera Barat yakni Desa Wisata GTP ulakan yang berlokasi di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kab. Ulakan. Keanekaragaman alam, budaya, dan religi. Desa Wisata yang kedua merupakan Desa Wisata Silokek yang berada di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, cukup unik karena dilintasi sejumlah sungai dan dikelilingi tebing karst. Dan terakhir, Desa Wisata Pariangan yang terletak di Lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, melewati jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri.



Gambar 3.31 Peta Kawasan Perdesaan Nasional di Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPW, 2023

3.5 Profil Interaksi Antar Kawasan

Interaksi kawasan menjelaskan keterkaitan dengan kawasan lainnya dalam konteks dalam kawasan, kawasan yang berada disekitarnya, regional, nasional, hingga internasional. Keterkaitan pola hubungan antar wilayah dapat mempengaruhi penentuan arah kebijakan dan program rencana yang ingin dikembangkan. Interaksi antar kawasan Provinsi Sumatera Barat dibagi atas 3 (tiga) konteks keterkaitan antar kawasan, yakni pembahasan dalam konteks makro, pembahasan dalam konteks meso, dan pembahasan dalam konteks mikro.

Interaksi makro merupakan pola keterkaitan antara kawasan dengan berbagai wilayah dalam konteks regional, pulau, nasional hingga internasional. Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT. Melalui kerja sama IMT-GT, sektor swasta terus didorong menjadi “engine of growth”. Untuk tujuan tersebut telah dibentuk suatu wadah bagi para pengusaha di kawasan IMT-GT yang disebut Joint Business Council (JBC). Interaksi dalam konteks internasional didukung infrastruktur perkotaan serta destinasi Pariwisata yang menarik turis mancanegara ke Provinsi Sumatera Barat. Berikut beberapa interaksi antar kawasan dalam konteks makro berdasarkan fokus perencanaan :

1. Kawasan Perkotaan
 - a. Provinsi Sumatera Barat tergabung dalam wilayah wilayah Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), melalui pengembangan connectivity corridors sebagai penguatan maritime transport links dan perdagangan melalui Selat Malaka.
 - b. Terjadi antrian bongkar muat kapal di Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan utama untuk kegiatan perdagangan internasional yang berada 7 km dari pusat Kota Padang. Nilai ekspor Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 sebesar 3.071,2 juta US\$. Sebagai arah pengembangan perlu Memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses PKN Padang sebagai pusat pengembangan Kawasan serta mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan infrastruktur lainnya.
 - c. Pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan akses PKN Padang sebagai pusat pengembangan Kawasan serta

mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat, Pulau Sumatera Bagian Utara, jaringan jalan arteri primer dari PKN Padang, dan Bandar Udara Minangkabau

2. Pariwisata

- a. Kekuatan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, salah satunya didukung oleh sektor pariwisata berskala nasional maupun internasional yang belum terintegrasi
- b. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam Sumatera Barat world heritage Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto yang ditetapkan oleh UNESCO
- c. Kawasan Padang-Bukittinggi dan sekitarnya mendorong Kekuatan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, salah satunya didukung oleh sektor pariwisata berskala nasional maupun internasional yang belum terintegrasi. Hal tersebut diperkuat dengan penetapan Perwujudan pusat pariwisata tematik dan terintegrasi antar wilayah serta berdaya saing internasional (5 Tematik pariwisata Sumatera Barat: Marine Adventure Tourism, Geopark Tourism, Ancient Minangkabau Tourism, Colonial the Old Mining Town Tourism, Whitesand Tourism)
- d. Jumlah wisatawan asing terbanyak di Provinsi Sumatera Barat berasal Malaysia sebanyak 46.730 jiwa (tahun 2019).

3. Pertanian

- a. Pulau Sumatera diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi yang membutuhkan hilirisasi produk dan konektivitas distribusi. Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

4. Kawasan Daerah Tertinggal

- a. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah 3T (Terdepan, Terluar Tertinggal), memiliki kategori IPM sedang dan masuk dalam kategori miskin ekstrem, sangat bergantung pada keterhubungan dengan Kota Padang (pusat interaksi kawasan)

Interaksi messo merupakan pola keterkaitan antara kawasan pada tingkat menengah seperti kawasan, provinsi sekitar, dan dalam pulau. Terdapat pola interaksi yang terjadi antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dari keterkaitan konektivitas dan kunjungan wisatawan menuju destinasi wisata di Provinsi Sumatera Barat.

1. Kawasan Perkotaan

Peran Kota Padang sebagai Super Hub Kawasan antar wilayah didukung prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Kota Padang sebagai jalur utama distribusi Logistik Sumatera Barat didukung dengan jalan tol yang menghubungkan dengan Pekanbaru, Provinsi Riau melalui Jalan tol Padang- Sicincin (Kapalo Hilalang) yang saat belum dapat dimanfaatkan, dengan progres fisik pembangunan 100% untuk Sta 0+200 - 4+200 dan 29,7 % untuk Sta 4+200 - 36+600.

2. Pariwisata

Kunjungan wisatawan berasal dari Riau dan Sumatera Utara, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Sumatera Barat nomor 2 di Pulau Sumatera, dengan jumlah kunjungan 10.750.168 wisatawan. Kunjungan wisatawan ditingkatkan melalui peningkatan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai dan terintegrasi.

3. Pertanian

Terdapat Pelabuhan Teluk Tapang status Pelabuhan Pengumpul (PP) saat ini berada di bawah manajemen KSOP Kelas II Teluk Bayur. Fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang untuk sisi laut sudah selesai 100%. Untuk fasilitas sisi darat Pelabuhan Teluk Tapang telah dibangun tanggul dan kolam. Arah pengembangan di masa depan Pelabuhan Teluk Tapang menjadi outlet distribusi hasil produktivitas tanaman pangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

4. Kawasan Daerah Tertinggal

Pembangunan yang masih terkonsentrasi di Wilayah Utara dan Tengah Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi terhadap adanya ketimpangan pembangunan

Interaksi Mikro mencerminkan pentingnya keterkaitan dan saling ketergantungan di antara aktor-aktor ekonomi di tingkat mikro dalam konteks internal Provinsi Sumatera Barat dan internal kawasan. Interaksi mikro dikembangkan berdasarkan unsur penguatan fungsi ekonomi perkotaan, kebutuhan rencana mitigasi

bencana, dukungan infrastruktur kawasan, serta dukungan infrastruktur dasar.

1. Kawasan Perkotaan

- Kota Padang sebagai pusat kegiatan dan aktivitas ekonomi merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, dengan kontribusi mencapai 25,67% pada tahun 2022, dari sektor pertanian, perikanan dan perhutanan (sub sektor tanaman perkebunan dan pangan)".
- Kota Padang sebagai penghubung kawasan perkotaan PALAPA (Padang - Lubuk Alung - Pariaman) & menimbulkan Pergerakan (Commuter) dari/ke Kota Satelit Sekitar Kota Padang.
- Jumlah penduduk di Kota Padang menduduki peringkat pertama di Provinsi Sumatera Barat dengan laju pertumbuhan penduduk 0,63 dengan jumlah 919.145 jiwa".
- Pelayanan infrastruktur perkotaan metropolitan PALAPA belum sepenuhnya optimal
 - Pelayanan SPAM belum optimal Cakupan Pelayanan PDAM Kota Padang baru 61,48%
 - Cakupan pelayanan SPAM Desa Koto Marapak baru mencapai 45%
 - Pengelolaan TPA belum optimal, keterbatasan lahan untuk pengembangan TPA dengan Timbulan sampah di Metropolitan PALAPA mencapai 5.018.615 lt/hr, serta usia pakai lahan TPA yang akan habis tahun 2024
 - Tingginya angka backlog yang disertai dengan kualitas kelayakan rumah yang masih rendah
 - Backlog rumah di Wilayah Metropolitan PALAPA mencapai 93.374 unit (26,54%)
 - Luas kawasan permukiman kumuh di wilayah Metropolitan PALAPA yang belum tertangani masih cukup tinggi, seluas 1193,46 ha
- Secara geografis, Kota Padang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera, dengan Indeks risiko bencana multi ancaman tinggi dengan Skor 179,03.

2. Pariwisata

- Jumlah destinasi wisata di Kota Padang terdiri dari 40 wisata alam, 37 wisata bahari, 3 wisata budaya, dan 29 wisata belanja.

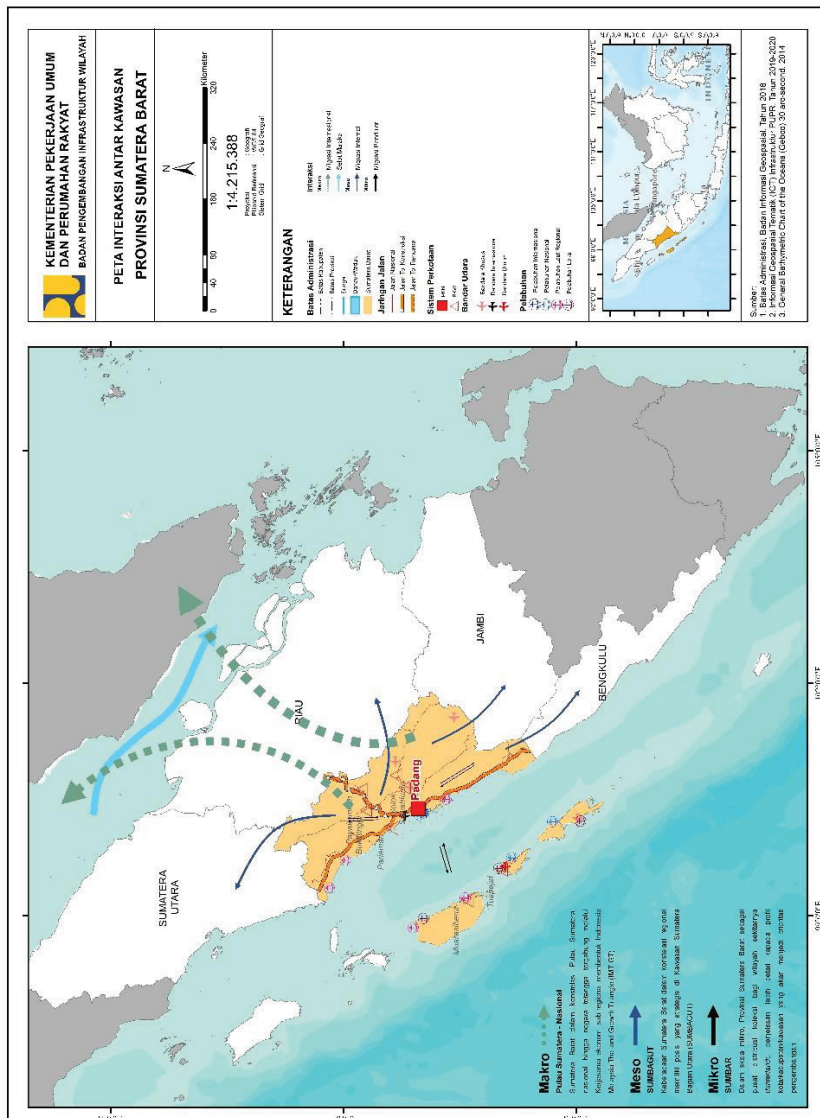
- Mengedepankan destinasi wisata sejarah dan budaya Minang Diantaranya: Kerajaan Pagaruyung, Padangsche Spaarbank, dan lainnya.
- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Bukittinggi paling tinggi di Sumatera Barat, dengan jumlah kunjungan 1.231.306 wisatawan.

3. Pertanian

- PDRB Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,71%) "Kontribusi PDRB Kabupaten Agam terhadap Provinsi Sumatera Barat 8,36 atau terbesar ke-2.
- Nilai PDRB sebesar Rp. 6.113.614 juta rupiah. Kontribusi PDRB Kabupaten Agam terbesar atas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,41%, dengan komoditi unggulan dari padi dan jagung.
- Terjadi penurunan produktivitas tanaman padi sawah di Kabupaten Agam sebesar 0,73 ha/ton
- Irigasi belum mampu menyediakan air dalam jumlah yang cukup. hanya 67.06 % peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi.
- Pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang belum sepenuhnya berfungsi. Pembangunan mencapai 22,079 Km dari total panjang jalan 43,167 Km (51,14%).

4. Kawasan Daerah Tertinggal

- Infrastruktur dasar di Kabupaten Mentawai masih rendah
 - Jalan lingkaran Trans Mentawai belum tersambung, kemandapan jalan yaitu masih 60,98%
 - Terdapat 25% jalan di Sumatera Barat dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat sebagai jalur utama penghubung antar wilayah
 - Masih rendahnya tingkat pelayanan air minum (cakupan pelayanan PDAM 18,64%) tingkat kehilangan air masih tinggi 40,92%
 - Rumah tangga dengan akses sanitasi layak 51,42%
 - Rendahnya tingkat pelayanan persampahan dengan kondisi TPA open dumping



Gambar 3.32 Peta Pola Interaksi Kawasan Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPW, 2023

[illegible]

Gambar 3.33 Peta Konstelasi Wilayah
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



BAB 4

PROFIL KINERJA INFRASTRUKTUR



4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Sesuai dengan data ketersediaan air wilayah sungai (WS), Provinsi Sumatera Barat memiliki enam wilayah sungai kewenangan pusat, dua wilayah sungai kewenangan provinsi, dan satu wilayah sungai kewenangan kabupaten. WS Batanghari merupakan wilayah sungai dengan debit air yang terbesar sekitar 1755,21 m³/det. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Wilayah Sungai	Nama WD	Ketersediaan Air (m ³ /dt)
1	WS BATANGHARI	WD Batanghari	1755,21
2	WS KAMPAR	WD Kampar A	975,16
		WD Kampar B	5,07
3	WS BATANG NATAL-BATANG BATAHAN	WD Batang Natal-Batang Batahan	181,8
4	WS INDRAGIRI-AKUAMAN	WD Indragiri-Akuaman A	104,77
		WD Indragiri-Akuaman B	58,62
		WD Indragiri-Akuaman C	743,32
5	WS ROKAN	WD Rokan	668,39

Sumber: Ketersediaan Air WS, Pusdatin

Total area Wilayah Sungai yang dikelola oleh BWS Sumatera V adalah 31.823,45 km². yang terdiri dari 28 DAS, mencakup 17 Kabupaten / Kota. Selain itu di Sumatera Barat juga terdapat beberapa danau seperti Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Ditas dan Danau Dibawah. Danau Singkarak dan Danau Maninjau pada saat ini merupakan Danau Prioritas Nasional yang harus di jaga keberadaannya. Dari empat WS yang dikelola oleh BWS Sumatera V, WS. Indragiri-Akuaman merupakan yang paling luas wilayahnya, yaitu mencakup 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. WS Indragiri-Akuaman semula merupakan 2 WS terpisah; WS Akuaman (Strategis Nasional) dan WS Indragiri (Lintas Provinsi). Namun sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, kedua WS tersebut digabungkan menjadi satu dengan status WS Lintas Provinsi. Adapun dasar penggabungan kedua WS ini adalah akibat adanya outlet Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak (Danau Singkarak – WS Indragiri) yang dialirkan ke Sungai Batang Anai (WS Akuaman) sehingga terjadi interkoneksi antar kedua WS tersebut.

Potensi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, Wilayah Sungai Kampar, dan Wilayah Sungai Rokan di Provinsi

Sumatera Barat ditinjau dari aspek pengelolaannya adalah sebagai berikut :

- Aspek Konservasi
 - Beberapa sungai di bagian Hulu masih terjaga ekosistem dan kualitas airnya.
 - Adanya potensi pembangunan embung
 - Potensi dukungan dari pemerintah daerah kabupaten dan/atau provinsi, dinas, balai, terkait kegiatan program konservasi lahan.
 - Kesadaran sebagian masyarakat untuk melaksanakan penghematan air, membuat tampungan air hujan
- Aspek Pendayagunaan SDA
 - Tingginya curah hujan hampir di sepanjang tahun kemungkinan beroperasinya sawah-sawah tadah hujan.
 - Adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk menata ruang sungai dengan berwawasan lingkungan.
 - Sungai sebagai sumber air baku dan pusat pertumbuhan ekonomi baru
 - Terdapat 3 danau alami yang dapat dikelola untuk budidaya ikan, pertanian, pariwisata dan PLTA, antara lain Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Dibawah.
 - Terdapat sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk air baku.
- Aspek Pengendalian Daya Rusak Air
 - Adanya dukungan antar stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air
- Aspek SISDA
 - Sudah adanya rencana program role sharing antar institusi pengelola sumber daya air, yang memungkinkan sharing sistem informasi sumber daya air.
 - Sudah ada instansi yang melakukan pengumpulan data dan penyebaran informasi secara rutin.
 - Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam hal berbagi data dan informasi SDA.
- Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Sudah adanya aturan hukum dan sanksi terhadap tindakan para pelanggar lingkungan (illegal logging, pencemaran lingkungan).

- Adanya potensi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan.

Tabel 4.2 Daftar Sistem Air Baku di Provinsi Sumatera Barat

Nama Sistem Air Baku	Nama Objek Infrastruktur	Nama Sungai	Kota/Kabupaten
SPAB Satu	intake sungai 1	Tanah Taban	Kab. Padang Pariaman
SPAB Dua	intake sungai 2	Batang Sumani	Kab. Solok
SPAB Tiga	Intake Sungai 3	Batang Karimo	Kab. Sijunjung
SPAB Empat	Intake Sungai 4	Salido Ketek	Kab. Pesisir Selatan
SPAB Lima	Intake Sungai 5	Batang Lambau	Kab. Pasaman Barat
SPAB Enam	Intake Sungai 6	Lubuk Paraku	Kab. Padang Pariaman
SPAB Tujuh	Intake Sungai 7	Batang Air Sonsang	Kab. Pesisir Selatan
SPAB Delapan	Intake Sungai 8	Batang Timbulun	Kab. Pesisir Selatan
SPAB Sembilan	Intake Sungai 9	Ulu Gadut	Kab. Padang Pariaman
SPAB Sepuluh	Intake Sungai 10	Batang Sako	Kab. Pesisir Selatan
SPAB Sebelas	Intake Sungai 11	Batang Sumpahan	
SPAB Duabelas	Intake Sungai 12	Batang Penukahan	Kab. Padang Pariaman
SPAB Tigabelas	Intake Sungai 13	Sungai Nyalo Mandeh	Kab. Pesisir Selatan
SPAB Empat Belas	Intake Sungai 14	Batang Kularian	Kab. Pasaman Barat
SPAB Air Baku Marumuak Tahap II	Air Baku Marumuak Tahap II	Batang Marumuak	Kab. Pasaman
SPAB Air Baku IKK Musus	Optimalisasi Jaringan Pipa Transmisi Air Baku IKK Musus	Batang Musus	Kab. Pasaman
SPAB Air Baku Marumuak Tahap I	Air Baku Marumuak Tahap I	Batang Marumuak	Kab. Pasaman
SPAB Air Baku Batang Mahat	Air Baku Batang Mahat	Batang Mahat	
SPAB Air Baku Sungai Landai	Air Baku Sungai Landai	Sungai Landai	Kab. Pasaman
SPAB Air Baku Batang Malanca	Air Baku Batang Malanca	Batang Malanca	

Nama Sistem Air Baku	Nama Objek Infrastruktur	Nama Sungai	Kota/Kabupaten
SPAB Air Baku IKK Aie Jilatang Kawasan Rao	Air Baku IKK Aie Jilatang Kawasan Rao	anak Aie Jilatang	Kab. Pasaman
SPAB Air Baku IKK Junjung Siriah	Air Baku IKK Junjung Siriah	Air Baku IKK Junjung Siriah	Kab. Solok
Air Baku Batang Musus	Air Baku Batang Musus	Batang Musus	Kab. Pasaman
SPAB Air Baku Kawasan Sialang	Air Baku Kawasan Sialang	Batang sopan	Kab. Pasaman
SPAB Air Baku Sungai Tarab	Air Baku Sungai Tarab	sungai Tarab	Kab. Tanah Datar
Reservoar Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukit Barisan	Reservoar Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukit Barisan	Batang Mahat	

Sumber: Pusdatin, 2023

Untuk mendukung potensi sumber daya air tersebut, terdapat beberapa program strategis di tahun WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat pada 2022 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, diantaranya adalah pembangunan 1 (satu) unit kolam retensi di kota Padang untuk melindungi 3.74 ha kawasan dari bencana daya rusak air (banjir), kemudian telah dibangun bangunan pengendali banjir pada 2 (dua) buah sungai (Batang Lembang di Kab. Solok dan Batang Tapan di Kab. Pesisir Selatan) sepanjang 0.45 km dan 0.5 km untuk melindungi wilayah seluas 2.25 ha dan 25 ha dari bahaya daya rusak air (banjir).

Provinsi Sumatera Barat memiliki 90 embung, 4 danau, dan 13 daerah irigasi yang merupakan kewenangan pusat yakni terdiri dari 11 irigasi permukaan dan 2 irigasi rawa. Uraian luasan daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Daftar Daerah Irigasi Provinsi Sumatera Barat

Kewenangan	Pusat		Provinsi		Kabupaten/ Kota	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha

Irigasi Permukaan	11	76.471	65	65.007	3.133	222.828
Irigasi Air Tanah	-	-	-	-	49	994
Irigasi Pompa	-	-	-	-	-	-
Irigasi Rawa	2	8.500	3	5.700	14	5.520
Irigasi Tambak	-	-	-	-	-	-

Sumber: Pusdatin, 2023

Tabel 4.4 Daerah Irigasi Kewenangan TP-OP Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

Daerah Irigasi	Lokasi Kab/Kota	Areal (Ha)
D.I. Anai	Padang Pariaman	13.604
D.I. Antokan	Agam	4.200
D.I. Tongar	Pasaman Barat	6.644
D.I. Bayang	Pasaman Barat	6.500
D.I. Batahan	Pasaman Barat	3.000
D.I. Panti Rao	Pasaman	8.300
D.I. Inderapura	Pesisir Selatan	6.040
D.I. Malapang Ampang Tulak	Pesisir Selatan	3.000
D.I. Kumbung	Pesisir Selatan	6.500
D.I. Rimbo Kaluang, Surantih, Sei. Pamapan	Pesisir Selatan	7.641
		65.429

Sumber: Pusdatin, 2023

Performa Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada kelima titik lokasi, pada umumnya tidak kritis hingga kritis ringan. Sumatera Barat cukup rawan akan bahaya bencana banjir, seperti yang termuat dalam Tabel 4.3, WS Indragiri-Akuaman, WS Batanghari, dan WS Kampar merupakan tiga teratas yang memiliki luasan bahaya bencana terbesar. Kondisi ini masuk dalam pertimbangan pengembangan Klaster Palapa dan Klaster Bukittinggi-Solok Selatan. Kondisi IPA yang terkategori kritis ringan hingga sedang berada di Kota Sawahlunto.

Tabel 4.5 Daftar Luas Bahaya Bencana Banjir Provinsi Sumatera Barat

WS	Luas Bahaya Bencana Banjir (ha)
WS BATANG NATAL - BATANG ASAHAN	941,00
WS MASANG-PASAMAN	2.385,29
WS ROKAN	662,04
WS INDRAGIRI - AKUAMAN	30.629,33
WS BATANGHARI	13.665,68
WS KAMPAR	17.269,22
WS SILAUT - TARUSAN	12.391,69
WS SIBERUT - PAGAI - SIPORA	0,00

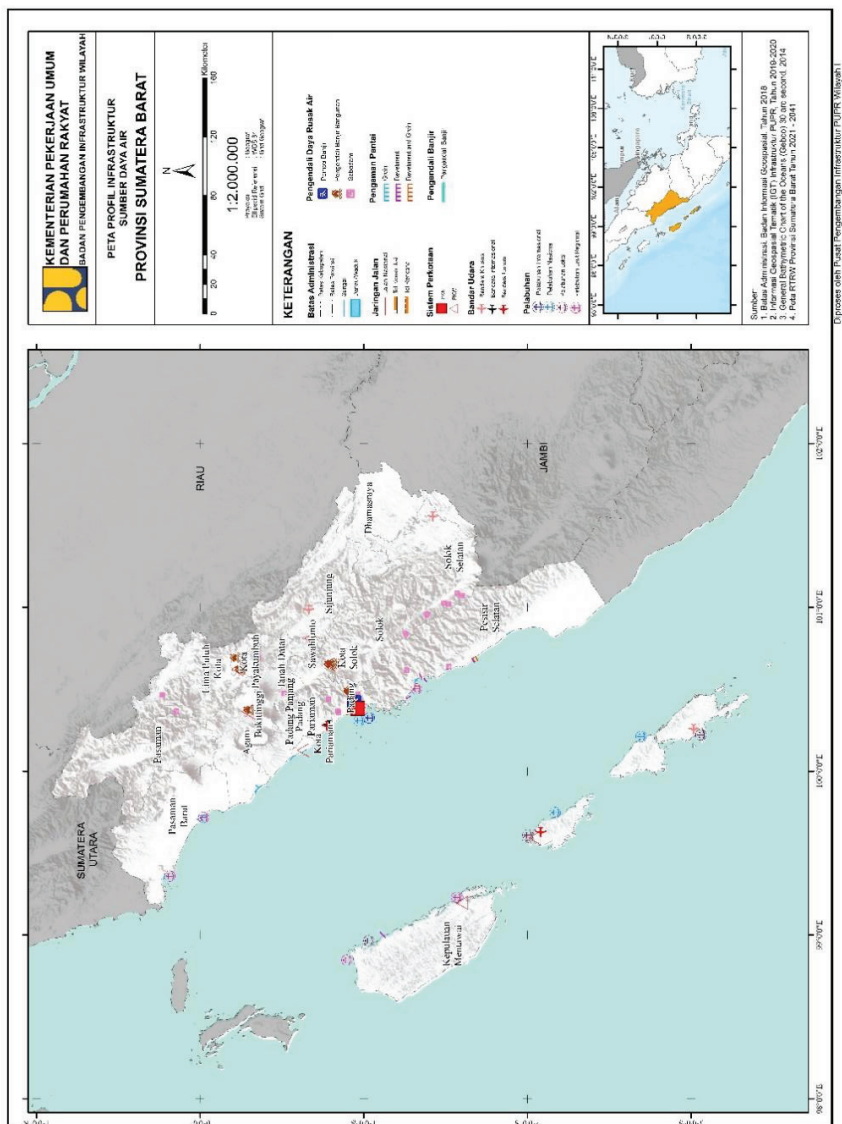
Sumber: Pusdatin, 2023

Konservasi dan pengendalian air baku dalam mendukung PKN dan kawasan strategis di Provinsi Sumatera Barat, telah terselenggara sejumlah kegiatan seperti: tujuh bangunan pengendali banjir, 1 pompa banjir yang terletak di Kota Padang (0,25 l/dt, jenis submersible), 18 sabodam, dan 33 infrastruktur pengamanan pantai.

Tabel 4.6 Daftar Pengendali Banjir Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Kewenangan	Jenis Bangunan	Panjang (m)
Kota bukittinggi	Kota	Groundsill	300
Kota padang	Kota	Groundsill	150
Kota payakumbuh	Kabupaten	Bronjong	400
	Kota	Dinding penahan	400
Kota solok	Pusat	Checkdam	0
	Kota	Dinding penahan	600
Lima puluh kota	Kota	Dinding penahan	400

Sumber: Pusdatin, 2023



Gambar 4.1 Peta Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Hasil Analisis Tim BP1W, 2023

Pada lokasi yang menjadi lokus perencanaan masing-masing isu prioritas memiliki kinerja infrastruktur yang berbeda. Berikut merupakan profil dan kinerja infrastruktur pada masing-masing isu prioritas.

4.1.1 Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Perkotaan

Fokus kawasan perkotaan yang mencakup PKN Palapa memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur SDA yang tersedia.

Tabel 4.7 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Perkotaan

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Air Baku	1,171 m ³ /detik	Kota Padang
		0,153 m ³ /detik	Kota Pariaman
2	Pengaman Pantai	2 km	Kab. Padang Pariaman (Kampung Dalam)
3	Pengndali Banjir (Groundsill)	150 m	Kota Padang
4	D.I Anai	13.604 Ha	Padang Pariaman

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.1.2 Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Pariwisata

Fokus kawasan pariwisata yang mencakup KSPN Bukittinggi dan, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur SDA yang tersedia.

Tabel 4.8 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Pariwisata

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Pengndali Banjir (Groundsill)	300 m	Kota Bukittinggi

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.1.3 Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Pertanian

Fokus kawasan pertanian yang mencakup KPPN Agam, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur SDA yang tersedia.

Tabel 4.9 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Pertanian

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	D.I. Antokan	4.200 Ha	Kabupaten Agam
	D.I Batang Sianok	1285 Ha	
	D.I. Batang Gumarang	1778 Ha	
	D.I. Baramban Lurah II	1164 Ha	
	D.I. Bdr Sangkir Garagahan	1031 Ha	
	D.I Bdr Batang Dareh	1128 Ha	
2	Jaringan Irigasi Permukaan	250 meter	Kabupaten Agam
3	Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	1543 meter	Kabupaten Agam
4	Embung	4	Kabupaten Agam
5	Air Baku	0,741 m ³ /detik	Kabupaten Agam

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.1.4 Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Daerah Tertinggal

Fokus kawasan daerah tertinggal yang mencakup Kepulauan Mentawai, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting

dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur SDA yang tersedia.

Tabel 4.10 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Fokus Daerah Tertinggal

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Air Baku	57,5 L/detik	Mentawai

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

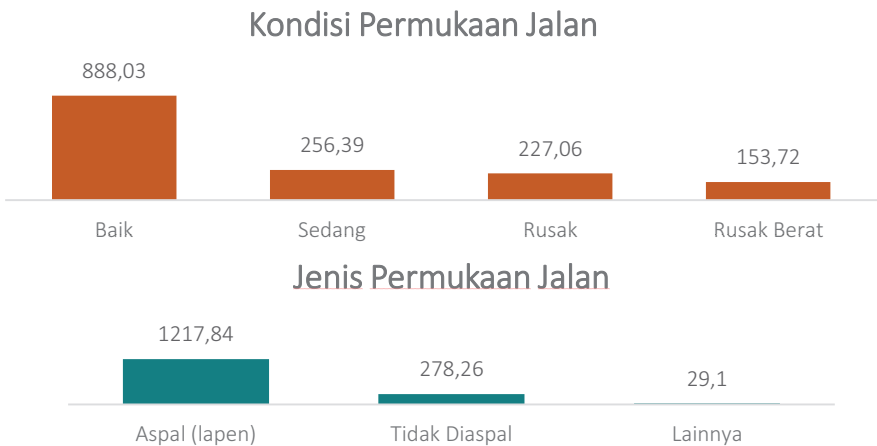
Panjang Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Barat adalah sepanjang 1.448,8 km (6%) dari total Panjang jalan di Provinsi Sumatera Barat) dengan kemantapan jalan sekitar 92,30%.

Tabel 4.11 Daftar Status Jalan di Provinsi Sumatera Barat

Status Jalan	Panjang Ruas Jalan (km)
Jalan Nasional	1448,8
Jalan Arteri Primer	657,8
Jalan Kolektor Primer	791
Jalan Provinsi	1525,2
Jalan Kabupaten dan Kota	19413,8

Sumber: Unit Organisasi Ditjen Bina Marga, 2022

Kondisi permukaan jalan secara umum berkondisi baik dengan jenis permukaan jalan beraspal sekitar 1217,84 km.



Gambar 4.2 Kondisi Permukaan Jalan dan Jenis Permukaan Jalan

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Sementara itu, pengembangan dan penguatan konektivitas melalui Tol Trans Sumatera (Koridor VI Pekanbaru - Padang) terbagi menjadi beberapa seksi sebagai berikut:

- Seksi 1 Padang – Sicincin dengan progres konstruksi 45,5% (36 km) dan progres pembebasan lahan 81,2%;
- Seksi 2 Sicincin – Bukittinggi;
- Seksi 3 Bukittinggi – Payakumbuh;
- Seksi 4 Payakumbuh – Pangkalan;
- Seksi 5 Pangkalan – Bangkinang; dan
- Seksi 6 Bangkinang – Pekanbaru.



Gambar 4.3 Tingkat Aksesibilitas Jalan Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 4.12 Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2022

Kondisi		Kondisi Tahun 2022	
		Panjang (meter)	Jumlah Jembatan (Buah)
Baik	0	66,20	4,00
	1	6.053,80	227,00
Sedang	2	10.884,15	348,00
Rusak ringan	3	1.249,90	45,00
Rusak Berat	4	115,10	8,00
	5	-	-
TOTAL		18.369,15	632,00
Mantap		92,57%	
Tidak Mantap		7,43%	

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Jalan Tol, berdasarkan monitoring konstruksi jalan tol di Pulau Sumatera, jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 739 km, konstruksi (telah PPJT sepanjang 439 km, rencana (telah PPJT) sepanjang 512 km, dan rencana (belum PPJT) sepanjang 3.909 km.

Tabel 4.13 Rekap Progres Ruas Konstruksi Jalan Tol di Pulau Sumatera

Ruas	Pjg (Km)	Seksi	Lahan	Fisik	Target
Binjai - Langsa	57,5	Seksi 1, 2, 3 : Binjai - Pangkalan Brandan	82,0 %	66,0 %	Mei 2023
	44,2	Seksi 4 : Pangkalan Brandan - Kuala Simpang	0,0 %	0,0 %	Setelah 2024
	29,2	Seksi 5 : Kuala Simpang - Langsa	0,0 %	0,0 %	Setelah 2024
Indrapura Kisaran	47,8	Seksi 1, dan 2 : Indrapura-Kisaran	78,4 %	79,5 %	Mar 2023
Kayu Agung - Palembang - Betung	24,9	Seksi 2B : Kramasan - Musilandas	89,5 %	73,8 %	Agu 2023
	44,3	Seksi 3 : Musilandas - Betung	62,7 %	43,1 %	Agu 2023
Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat	7,1	Junction Tebing Tinggi	98,4 %	76,6 %	Q2 2023
	20,4	Seksi 1 Tebing Tinggi - Indrapura	100,0 %	100,0 %	Q1 2023
	18,1	Seksi 2 Indrapura - Kuala Tanjung	100,0 %	85,7 %	Q2 2023
	30,0	Seksi 3 Tebing Tinggi - Serbelawan	99,9 %	75,8 %	Q2 2023
	28,0	Seksi 4 Serbelawan - Pematang Siantar	83,5 %	62,6 %	Jun 2023
	22,3	Seksi 5 : Pematang Siantar - Seribudolok	0,0 %	0,0 %	Setelah 2024
	16,7	Seksi 6 : Seribudolok - Parapat	0,0 %	0,0 %	Setelah 2024
Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu	54,0	Seksi 1 : Lubuk Linggau - Kepahiang	0,0 %	0,0 %	Setelah 2024
	23,0	Seksi 2 : Kepahiang - Taba Penanjung	0,0 %	0,0 %	Setelah 2024
Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	114,5	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	0,0 %	0,0 %	Setelah 2024
Padang - Pekanbaru	40,0	Pekanbaru - Bangkinang	93,4 %	78,0 %	Operasi 31 Km (2022)
	24,7	Bangkinang - Pangkalan Tahap I (Tj. Alai)	59,8 %	73,9 %	Jul 2023
	153,1	Pangkalan (Tj. Alai) - Sicincin (Kapalo	0,0 %	0,0 %	Setelah 2024

Ruas	Pjg (Km)	Seksi	Lahan	Fisik	Target
		Hilalang)			
	4,0	Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang)	100,0 %	100,0 %	Jan 2024
		Sta 0+200 - 4+200			
	32,4	Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang)	80,0 %	29,7 %	Jan 2024
		Sta 4+200 - 36+600			
Sigli - Banda Aceh	24,7	Seksi 1 : Padang Tiji - Seulimeum	98,2 %	81,2 %	Des 2023
	7,3	Seksi 5 : Blang Bintang - Kuto Baro	100,0 %	99,0 %	Mar 2023
	5,1	Seksi 6 : Kuto Baro - Baitussalam	98,4 %	82,1 %	Mar 2023
Simpang Indralaya - Muara Enim	64,5	Simpang Indralaya - Prabumulih	96,0 %	91,6 %	Jun 2023
	54,6	Prabumulih - Muara Enim	19,0 %	8,7 %	Setelah 2024

Sumber: Badan Pengelola Jalan Tol, 2023

Tabel 4.14 Rekap Kemantapan Jalan di Sumatera Barat

NAMA RUAS JALAN	Panjang Survei (KM)	Total Kemantapan									
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
JLN. SOLOK BATUNG - KACANG KAYU	1,505	0,4	26,58	0,9	59,8	0,1	6,64	0,10	6,98	1,3	86,38
BTS. KAB. TANAH DATAR - BTS. KOTA SOLOK	20,934	3,4	16,24	16,734	79,94	0,6	2,87	0,2	0,96	20,134	96,18
MUARA KALABAN - TANAH BADANTUNG	25,209	3,4	13,49	18,809	74,61	2,9	11,5	0,1	0,4	22,209	88,1
TANAH BADANTUNG - KILIRANJAO	51,787	12	23,17	33,8	65,27	5,787	11,17	0,2	0,39	45,8	88,44
BTS. KAB. DHAMAS RAYA - SEI DAREH	13,114	1,8	13,73	11,014	83,99	0,2	1,53	0,1	0,76	12,814	97,71
SEI DAREH - JUNCTION (KOTO BARU)	31,47	5,9	18,75	22,97	72,99	2,2	6,99	0,4	1,27	28,87	91,74
BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR (PADANG)	1,169	0	0	0,5	42,77	0,5	42,77	0,16	14,46	0,5	42,77
JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG)	22,214	5,6	25,21	15,314	68,94	1,2	5,4	0,1	0,45	20,914	94,15
BTS. KOTA PAINAN - KAMBANG	52,125	23,725	45,52	25,2	48,35	3	5,76	0,2	0,38	48,925	93,86
BTS. PROV. RIAU - BTS. KOTA PAYAKUMBUH	74,446	11,7	15,71	58,66	78,78	3,5	4,7	0,6	0,81	70,36	94,49
JLN. K.H. AHMAD DAHLAN (PAYAKUMBUH)	4,956	1,2	24,21	2,756	55,61	0,6	12,11	0,4	8,07	3,956	79,82
BTS. KOTA PADANG - JLN. SIMP. HARU	22,788	2,6	11,41	19,688	86,4	0,4	1,76	0,1	0,44	22,288	97,81
TOAPEJAT - ROKOT	25,86	0,6	2,32	19	73,47	5,76	22,27	0,5	1,93	19,6	75,79
ROKOT - SIOBAN	19,418	2,9	14,93	5,9	30,38	6,718	34,6	3,9	20,08	8,8	45,32
SIOBAN - KATIET	32,6	0	0	3,2	9,82	6,2	19,02	23,2	71,17	3,2	9,82
RANJAU BATU (BTS. PROV. SUMUT) - PANTI	37,063	13,9	37,5	22,7	61,25	0,463	1,25	0	0	36,6	98,75
PANTI - BTS. KOTA LUBUK SIKAPING	28,344	17,6	62,09	10,744	37,91	0	0	0	0	28,344	100
LUBUK SIKAPING BY PASS	7,406	4,906	66,24	2,5	33,76	0	0	0	0	7,406	100
BTS. KOTA LUBUK SIKAPING - SP. KUMPULAN	20,845	10,7	51,33	9,745	46,75	0,4	1,92	0	0	20,445	98,08
SP. KUMPULAN - BTS. KOTA BUKIT TINGGI	47,467	8,5	17,91	38,267	80,62	0,7	1,47	0	0	46,767	98,53

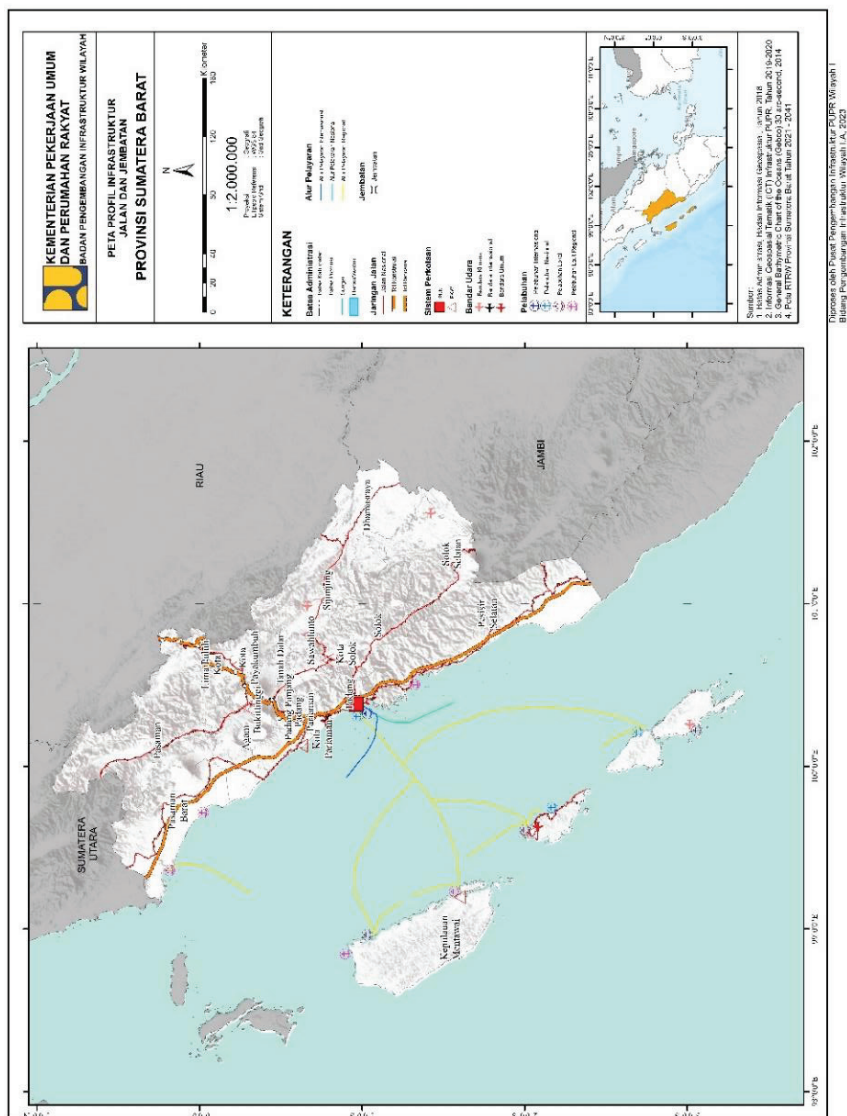
NAMA RUAS JALAN	Panjang Survei (KM)	Total Kemantapan											
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
BUKIT TINGGI BYPASS I (SP. TAMAN - SP. BY PASS ANAK AIR)	2,621	1,8	68,68	0,821	31,32	0	0	0	0	2,621	100	0	0
BTS. KOTA BUKITTINGGI - SP. PADANG LUAR	2,36	0,2	8,47	2,06	87,29	0,1	4,24	0	0	2,26	95,76	0,1	4,24
BUKIT TINGGI BYPASS II (JLN. ST. SYAHRIR (SP. LAPANGAN KANTIN) - SP. AUR KUNING - SP. BYPASS ANAK AIR)	3,821	1,5	39,26	2,321	60,74	0	0	0	0	3,821	100	0	0
JLN. SUDIRMAN (B.TINGGI)	1,235	0,935	75,71	0,3	24,29	0	0	0	0	1,235	100	0	0
SP. AUR KUNING - SP. TALUK	1,283	0,1	7,79	1,183	92,21	0	0	0	0	1,283	100	0	0
SP. TALUK - SP. JAMBU AIR	0,743	0,3	40,38	0,443	59,62	0	0	0	0	0,743	100	0	0
SP. PADANG LUAR - BTS. KOTA PADANG PANJANG	12,999	4,8	36,93	8,199	63,07	0	0	0	0	12,999	100	0	0
JLN. PROF. HAMKA (PADANG PANJANG)	1,092	0,2	18,32	0,892	81,68	0	0	0	0	1,092	100	0	0
JLN. M. DAUD RASIDI (PADANG PANJANG)	0,719	0,1	13,91	0,619	86,09	0	0	0	0	0,719	100	0	0
JLN. KOMARULLAH (PADANG PANJANG)	0,837	0	0	0,837	100	0	0	0	0	0,837	100	0	0
BTS. KOTA PADANG PANJANG - KUBU KERAMBIL	4,734	2,3	48,58	2,334	49,3	0,1	2,11	0	0	4,634	97,89	0,1	2,11
JLN. HAMKA - BUKIT SURUNGAN	0,047	0	0	0,047	100	0	0	0	0	0,047	100	0	0
JLN. BUKIT SURUNGAN - BUKIT KANDUNG	1,4	0	0	1,4	100	0	0	0	0	1,4	100	0	0
JLN. PASAR TERNAK GANTING	0,716	0,2	27,93	0,516	72,07	0	0	0	0	0,716	100	0	0
JLN. BKIA - SOLOK BATUNG	1,255	0,5	39,84	0,755	60,16	0	0	0	0	1,255	100	0	0
KUBU KERAMBIL - BTS. KAB. TANAH DATAR	19,807	4,9	24,74	14,707	74,25	0,2	1,01	0	0	19,607	98,99	0,2	1,01
JLN. IMAM BONJOL (SOLOK)	2,291	0,3	13,09	1,991	86,91	0	0	0	0	2,291	100	0	0
JLN. KH. DEWANTORO (SOLOK)	0,865	0,5	57,8	0,365	42,2	0	0	0	0	0,865	100	0	0
JLN. A. YANI (SOLOK)	0,578	0,2	34,6	0,378	65,4	0	0	0	0	0,578	100	0	0
JLN. DIPONEGORO (SOLOK)	0,373	0,373	100	0	0	0	0	0	0	0,373	100	0	0
BTS. KOTA SOLOK - BTS. KOTA SAWAHLUNTO	16,917	3,4	20,1	13,317	78,72	0,2	1,18	0	0	16,717	98,82	0,2	1,18

NAMA RUAS JALAN	Panjang Survei (KM)	Total Kemantapan											
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
BTS. KOTA SAWAHLUNTO - MUARA KALABAN	6,703	0,5	7,46	6,103	91,05	0,1	1,49	0	0	6,603	98,51	0,1	1,49
KILIRANJAO - BTS. KAB. DHAMAS RAYA	8	1,2	15	6,4	80	0,4	5	0	0	7,6	95	0,4	5
JUNCTION (KOTO BARU) - BTS. PROV. JAMBI	12,78	3	23,47	8,78	68,7	1	7,82	0	0	11,78	92,18	1	7,82
BEDENG RAPAT (BTS. PROV. SUMUT) - SILAPING	13,78	3,3	23,95	10,38	75,33	0,1	0,73	0	0	13,68	99,27	0,1	0,73
SILAPING - SIMP. AIR BALAM	17,51	1,8	10,28	15,61	89,15	0,1	0,57	0	0	17,41	99,43	0,1	0,57
SIMP. AIR BALAM - SIMP. EMPAT	61,92	37	59,75	24,92	40,25	0	0	0	0	61,92	100	0	0
SIMP. EMPAT - PADANG SAWAH	40,77	31,9	78,24	8,87	21,76	0	0	0	0	40,77	100	0	0
PADANG SAWAH - MANGGOPOH	32,214	22,8	70,78	9,414	29,22	0	0	0	0	32,214	100	0	0
MANGGAPOH - BTS. KOTA PARIAMAN	39,586	33,486	84,59	6,1	15,41	0	0	0	0	39,586	100	0	0
JLN. SITI MANGGOPOH (PARIAMAN)	4,263	3,8	89,14	0,463	10,86	0	0	0	0	4,263	100	0	0
JLN. ZAINI (PARIAMAN)	0,5	0,2	40	0,3	60	0	0	0	0	0,5	100	0	0
JLN. AHMAD DAHLAN (PARIAMAN)	0,759	0,1	13,18	0,659	86,82	0	0	0	0	0,759	100	0	0
JLN. SOEKARNO - HATTA (PARIAMAN)	2,069	0	0	2,069	100	0	0	0	0	2,069	100	0	0
KURAITAJI - LUBUK ALUNG	15,532	12,7	81,77	2,832	18,23	0	0	0	0	15,532	100	0	0
LUBUK ALUNG - SIMP. DUKU	13,359	5	37,43	8,359	62,57	0	0	0	0	13,359	100	0	0
JLN. ADINEGORO (PADANG)	9,521	5,9	61,97	3,621	38,03	0	0	0	0	9,521	100	0	0
JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG)	4,052	1,3	32,08	2,752	67,92	0	0	0	0	4,052	100	0	0
BANDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU (BIM) - SIMP. DUKU	2,795	2,3	82,29	0,495	17,71	0	0	0	0	2,795	100	0	0
PADANG BYPASS II (BARU)	22,07	11,4	51,65	10,67	48,35	0	0	0	0	22,07	100	0	0
PADANG BYPASS I	4,835	0	0	4,735	97,93	0,1	2,07	0	0	4,735	97,93	0,1	2,07
BTS. KOTA PADANG - BTS. KOTA PAINAN	48,379	11,9	24,6	33,979	70,24	2,5	5,17	0	0	45,879	94,83	2,5	5,17

NAMA RUAS JALAN	Panjang Survei (KM)	Total Kemantapan											
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
JLN. ILYAS YAKUB (PAINAN)	0,963	0,8	83,07	0,163	16,93	0	0	0	0	0,963	100	0	0
JLN. SUTAN SYAHRI (PAINAN)	0,659	0,4	60,7	0,259	39,3	0	0	0	0	0,659	100	0	0
KAMBANG - INDRAPURA	57,564	44,364	77,07	13,1	22,76	0,1	0,17	0	0	57,464	99,83	0,1	0,17
INDRAPURA - TAPAN	24,144	16,7	69,17	7,444	30,83	0	0	0	0	24,144	100	0	0
TAPAN - BTS. PROV. BENGKULU	39,551	25,4	64,22	14,151	35,78	0	0	0	0	39,551	100	0	0
JLN. SUDIRMAN (PAYAKUMBUH)	0,471	0	0	0,371	78,77	0,1	21,23	0	0	0,371	78,77	0,1	21,23
BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO	15,272	4,1	26,85	10,972	71,84	0,2	1,31	0	0	15,072	98,69	0,2	1,31
JLN. SOEKARNO HATTA (PAYAKUMBUH)	3,813	0,513	13,45	3,2	83,92	0,1	2,62	0	0	3,713	97,38	0,1	2,62
JLN. DIPONEGORO (PAYAKUMBUH)	6,343	1,3	20,5	4,443	70,05	0,6	9,46	0	0	5,743	90,54	0,6	9,46
BASO - BTS. KOTA BUKIT TINGGI	7,546	1,6	21,2	5,946	78,8	0	0	0	0	7,546	100	0	0
JLN. SOEKARNO HATTA (BUKITTINGGI)	2,113	0,813	38,48	1,3	61,52	0	0	0	0	2,113	100	0	0
BTS. KOTA PADANG PANJANG - SICINCIN	19,282	7,8	40,45	11,482	59,55	0	0	0	0	19,282	100	0	0
JLN. ST. SYAHRI (PADANG PANJANG)	4,059	0,3	7,32	3,659	90,24	0,1	2,44	0	0	3,959	97,56	0,1	2,44
SICINCIN - LUBUK ALUNG	14,577	11,977	82,16	2,6	17,84	0	0	0	0	14,577	100	0	0
BTS. KOTA SOLOK - LUBUK SELASIH	22,666	1,966	8,67	19,9	87,8	0,8	3,53	0	0	21,866	96,47	0,8	3,53
JLN. LUBUK SIKARAH (SOLOK)	0,764	0,764	100	0	0	0	0	0	0	0,764	100	0	0
JLN. HAMKA (SOLOK)	0,788	0,788	100	0	0	0	0	0	0	0,788	100	0	0
LUBUK SELASIH - BTS. KOTA PADANG	8,859	1,8	20,32	6,859	77,42	0,2	2,26	0	0	8,659	97,74	0,2	2,26
JLN. SAWAHLUNTO - MUARA KALABAN (SAWAHLUNTO)	5,706	0	0	5,306	92,99	0,4	7,01	0	0	5,306	92,99	0,4	7,01
KILIRANJAO - BTS. PROV. RIAU	23,051	5,5	23,86	15,551	67,46	2	8,68	0	0	21,051	91,32	2	8,68
SOLOK BYPASS (JL. NASIR PAMUNCAK)	3,106	1,6	51,51	1,506	48,49	0	0	0	0	3,106	100	0	0

NAMA RUAS JALAN	Panjang Survei (KM)	Total Kemantapan											
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
BY PASS PARIAMAN (KOTA PARIAMAN)	5,1	0,7	13,73	3,4	66,67	1	19,61	0	0	4,1	80,39	1	19,61
TAPAN - BTS. JAMBI	25,627	4,3	16,78	20,327	79,32	1	3,9	0	0	24,627	96,1	1	3,9

Sumber: Badan Pengelola Jalan Tol, 2023



Gambar 4.4 Peta Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat

4.2.1 Infrastruktur Jalan Fokus Perkotaan

Fokus kawasan perkotaan yang mencakup PKN Palapa memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur jalan dan jembatan yang tersedia.

Tabel 4.15 Profil Dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Perkotaan

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Jalan Nasional	87,85 km	• PADANG BYPASS II (BARU) • JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG) • JLN. ADINEGORO (PADANG) • BTS. KOTA PADANG - JLN. SIMP. HARU • BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR (PADANG) • JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG) • PADANG BYPASS I
		12,92 km	• JLN. ZAINI (PARIAMAN) • JLN. SITI MANGGOPOH (PARIAMAN) • BYPASS PARIAMAN (KOTA PARIAMAN) • JLN. AHMAD DAHLAN (PARIAMAN) • JLN. SOEKARNO - HATTA (PARIAMAN)
2	Jalan Tol	32,4 km	Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang) progres pembangunan 29,7%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pengembangan kawasan perkotaan Palapa dilakukan dengan mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Padang pada sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan juga memperhatikan kecukupan dan kebutuhan infrastruktur dasar perkotaan sesuai dengan standar. Infrastruktur perkotaan Palapa diantaranya dari sistem jaringan transportasi meliputi jalan nasional

dan jalan tol Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang) yang saat ini dalam tahap pembangunan dengan progres 29,7%.

Tabel 4.16 Tingkat Pelayanan Jalan Fokus Perkotaan Tahun 2020

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020
PADANG BYPASS II (BARU)	A	22,27	0,49	C
JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG)	A	4,10	0,77	D
JLN. ADINEGORO (PADANG)	A	9,49	0,50	C
BTS. KOTA PADANG - JLN. SIMP. HARU	A	23,46	0,32	B
PADANG BYPASS I	A	4,90	0,49	C
BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR (PADANG)	A	1,17	0,07	A
JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG)	K1	22,46	0,69	C
LUBUK ALUNG - SIMP. DUKU	A	13,49	0,89	E
BTS. KOTA PADANG PANJANG - SICINCIN	A	19,29	0,09	A
MANGGAPOH - BTS. KOTA PARIAMAN	K1	40,06	0,16	A
BANDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU (BIM) - SIMP. DUKU	A	2,80	0,29	B
SICINCIN - LUBUK ALUNG	A	13,51	0,13	A
KURAITAJI - LUBUK ALUNG	K1	16,98	0,26	B
JLN. ZAINI (PARIAMAN)	K1	0,80	0,09	A
JLN. SITI MANGGAPOH (PARIAMAN)	K1	4,22	0,27	B
BY PASS PARIAMAN (KOTA PARIAMAN)	K1	5,20	0,03	A
JLN. AHMAD DAHLAN (PARIAMAN)	K1	0,61	0,09	A
JLN. SOEKARNO - HATTA (PARIAMAN)	K1	2,09	0,03	A

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.2.2 Infrastruktur Jalan Fokus Pariwisata

Fokus kawasan pariwisata yang mencakup KSPN Bukittinggi, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur Jalan dan Jembatan yang tersedia.

Tabel 4.17 Profil Dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Pariwisata

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Jalan Nasional	87,85 km	• Kota Padang • PADANG BYPASS II (BARU) • JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG) • JLN. ADINEGORO (PADANG) • BTS. KOTA PADANG - JLN. SIMP. HARU • BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR (PADANG) • JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG) • PADANG BYPASS I
2	Jalan Tol	32,4 km	Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang) progres pembangunan 29,7%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Pengembangan kawasan Pariwisata KSPN Bukittinggi dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan infrastruktur aksesibilitas, amenitas, hingga jaringan yang saling terintegrasi. Termasuk pula pengembangan produk wisata, perbaikan ekosistem ekonomi kreatif, hingga persiapan sumber daya manusia. Keberadaan infrastruktur eksisting pada kawasan prioritas Pariwisata di Sumatera Barat diantaranya pengembangan sistem jaringan transportasi dari jalan nasional dan jalan tol Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang) yang saat ini masih dilakukan pembangunan dengan progres 29,7%.

Tabel 4.18 Tingkat Pelayanan Jalan Fokus Pariwisata Tahun 2020

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020
BUKIT TINGGI BYPASS I (SP. TAMAN - SP. BY PASS ANAK AIR)	A	2,60	0,28	B
SP. AUR KUNING - SP. TALUK	A	1,27	0,66	C
JLN. SOEKARNO HATTA (BUKITTINGGI)	A	2,13	0,40	B
JLN. SUDIRMAN (B.TINGGI)	A	1,22	0,82	E
BUKIT TINGGI BYPASS II (JLN. ST. SYAHRIR (SP. LAPANGAN KANTIN) - SP. AUR KUNING - SP. BYPASS ANAK AIR)	A	3,80	0,51	C

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.2.3 Infrastruktur Jalan Fokus Pertanian

Fokus kawasan pertanian yang mencakup KPPN Agam, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur jalan dan jembatan yang tersedia.

Tabel 4.19 Profil Dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Fokus Pertanian

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Jalan Nasional	104,69 km	• PADANG SAWAH - MANGGOPOH 32,41 km • SP. KUMPULAN - BTS. KOTA BUKIT TINGGI 46,50 km • SP. TALUK - SP. JAMBU AIR 0,73 km • BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO 15,13 km • BASO - BTS. KOTA BUKIT TINGGI 7,52 km • BTS. KOTA BUKITTINGGI - SP. PADANG LUAR 2,39 km
2	Jalan Tol	40 km	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang status pembangunan 78%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur umum pendukung kawasan pertanian di KPPN Agam diantaranya dari sistem prasarana transportasi meliputi jalan nasional dan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan progres 78%.

Tabel 4.20 Tingkat Pelayanan Jalan Fokus Pertanian Tahun 2020

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020
PADANG SAWAH - MANGGOPOH	K1	32,41	0,18	A
SP. KUMPULAN - BTS. KOTA BUKIT TINGGI	A	46,50	0,25	B
SP. TALUK - SP. JAMBU AIR	A	0,73	0,23	B
BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO	A	15,13	0,66	C
BASO - BTS. KOTA BUKIT TINGGI	A	7,52	0,23	B
BTS. KOTA BUKITTINGGI - SP. PADANG LUAR	A	2,39	1,10	F

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.2.4 Infrastruktur Jalan Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

Infrastruktur Jaringan Jalan dan Jembatan

Total Ruas jalan nasional terbangun di Klaster Kepulauan Mentawai adalah sepanjang 89,49 km, terbagi menjadi tiga ruas:

- Ruas Tuapejat-Rokot: panjang jalan 36,1 km; lebar jalan 8,42 m; volume kendaraan 497 smp/hari, tingkat kemantapan 98,83%; IRI 4,9 dengan V/C R 0,07
- Ruas jalan Rokot-Sioban: panjang jalan 21 km; lebar jalan 4,38 m; volume kendaraan 0 smp/hari, tingkat kemantapan jalan 87,59%; IRI 6,06 dengan V/C R 0,02
- Ruas jalan Sioban-Katiet: panjang jalan 32,29 km; lebar jalan 3,99 m; volume kendaraan 0 smp/hari, tingkat kemantapan jalan 13,19%; IRI 12,37 dengan V/C R 0,00

Tabel 4.21 Tingkat Pelayanan Jalan Fokus Pertanian Tahun 2020

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020
Toapejat - Rokot	K1	36,10	0,07	A
Sioban - Katiet	K1	32,39	0,00	A
Rokot - Sioban	K1	21,00	0,02	A

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan dari tinjauan kondisi eksisting:

- Secara umum tingkat pelayanan jalan di Klaster Kepulauan Mentawai sampai dengan tahun 2030 diprediksikan masih tergolong baik, berada pada Grade A (volume lalu lintas rendah, bebas hambatan, kecepatan tinggi).
- Standar teknis jalan yang memerlukan penanganan >22.000 smp/hr, sedangkan Proyeksi Volume Kendaraan di Ruas jalan Tuapejat-Rokot 4.369 smp/hari, sehingga ruas Jalan Tuapejat - Rokot belum terlalu mendesak untuk mendapatkan penanganan.

Ruas jalan nasional yang mendesak untuk mendapatkan penanganan adalah Jalan Sioban - Katiet (Sioban - Sagitci dan Sagitci - Katiet) dimana terjadi abrasi pantai yang mengancam terjadinya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan permukiman di sekitarnya, sehingga selain diperlukan perbaikan terhadap jalan dengan kondisi rusak berat atau pengalihan trase, juga perlu didukung oleh pengembangan bangunan pengaman pantai.

4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Ketersediaan air minum, sanitasi, pengolahan air limbah, dan tempat pembuangan sampah merupakan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan dalam dukungan terhadap PKN dan kawasan strategis khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Air Minum

Persentase air minum layak telah terakses sekitar 83,37%, air minum perpipaan sekitar 28,4%, dan air minum aman sekitar 10,09% dengan jumlah sambungan rumah sekitar 383,463 SR. Performa kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 11 PDAM berkinerja sehat dan 5 PDAM berkinerja kurang sehat dengan status tarif PDAM menggunakan *full cost recovery* (FCR) di empat PDAM.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah terbangun berikut kinerjanya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.22 Data SPAM Provinsi Sumatera Barat

KABUPATEN	Jumlah SPAM	Tepasang	Produksi	Distribusi	Idle Capacity	SR
		(L/detik)	(L/detik)	(L/detik)	(L/detik)	
Kepulauan Mentawai	8	57,5	10	0	47,5	2138
Pesisir Selatan	14	410	246	232,79	164	25297
Kab.Solok	14	260	119,5	114,29	140,5	18115
Sijunjung	19	260	119,5	114,29	140,5	13871
Tanah Datar	10	367,5	255,88	189,46	111,62	19378
Padang Pariaman	18	825	578	211,02	247	31628
Agam	9	227,5	165,5	124,76	62	17976
Lima Puluh Kota	12	177,5	156,5	132,24	21	16697
Pasaman	11	289	167,8	159,34	121,21	18908
Solok Selatan	16	270	167,96	120,43	102,04	13154
Dharmasraya	8	135	74	0	61	1444
Pasaman Barat	8	242,5	112,6	121,67	129,9	11027
Padang	13	1465	1500,27	1304,41	35,27	111848
Kota Solok	7	340	262,43	234,33	77,57	18155
Sawahlunto	8	190	105,47	97,83	84,53	8557
Padang Panjang	10	226	180,68	166,24	45,32	9300
Bukittinggi	8	251,5	214,32	195,23	37,18	14355
Payakumbuh	5	448	370	321,75	78	27373

KABUPATEN	Jumlah SPAM	Tepasang	Produksi	Distribusi	Idle Capacity	SR
		(L/detik)	(L/detik)	(L/detik)	(L/detik)	
Pariaman	2	60	17,5	0	42,5	1515

Sumber: Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya, 2022

Tabel 4.23 Daftar Lokasi SPAM di Provinsi Sumatera Barat

SPAM	Kab/Kota
SPAM Desa Unggan	Sijunjung
SPAM Desa Nagari Tanjung Balik Sumiso, Kec. Tigo Lurah dan Koto Sani	Solok
SPAM Kawasan Pesisir Nagari Palangai dan Nagari Nyiur Melambai Ranah Pasisie	Pesisir Selatan
SPAM Kawasan Khusus Kampus Universitas Andalas-Limau Manis	Kota Padang
SPAM Desa Nagari Taluak Koto Panjang Kec. Batang Kapas	Pesisir Selatan
SPAM Desa Nagari Sungai Duo Kec. Pauh Duo	Solok Selatan
SPAM Desa Kolok Nan Tuo Kec. Barangin	Kota Sawahlunto
SPAM Desa Nagari Koto Anau	Solok
SPAM Desa Pulasan Tanjung Gadang dan Tamparungo Sumpur Kudus	Sijunjung
SPAM PPI Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kepulauan Mentawai
SPAM IKK Musus	Pasaman
SPAM IKK Kabupaten Pasaman	Pasaman
SPAM IKK Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan
SPAM IKK Kabupaten Solok	Solok
SPAM IKK Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya
SPAM IKK Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya
SPAM IKK Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan
SPAM IKK Kabupaten Solok	Solok
SPAM IKK Kabupaten 50 Kota	Lima Puluh Kota
SPAM IKK Kabupaten Pasaman	Pasaman
SPAM IKK Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya
SPAM IKK Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan
SPAM IKK Salido Ketek	Pesisir Selatan
SPAM IKK Kota Padang	Kota Padang
SPAM IKK Malampa	Pasaman

SPAM	Kab/Kota
SPAM IKK Salimpaung	Tanah Datar
SPAM IKK Kawasan Mandeh	Pesisir Selatan
SPAM Binaan Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh
SPAM IKK Palukahan Gadang	Kota Padang

Sumber: Pusdatin, 2022

Tabel 4.24 Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

Keterangan	Nilai	Satuan
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	19	Kota/Kab
Perluasan SPAM	175	SR
SPAM Berbasis masyarakat	4.670	SR
Sanitasi Berbasis Masyarakat	511	KK

Sumber: DIPA dan e-Monitoring, 2022

Air Limbah

Penanganan air limbah di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25 Daftar IPAL dan IPLT

Kabupaten	Nama Infrastruktur	Lokasi	Tahun Dibangun
AGAM	IPLT Sungai Jariang	Lubuk Basung	2018
DHARMASRAYA	IPAL Perumahan Ranah Tibarau	Blangpidie	2006
	IPLT Sitiung V Rabusa	Gunung Medan, Sitiung	2015
	IPLT Aur Jaya	Koto Padang, Koto Baru	2015
Pesisir Selatan	IPLT Sago	Bukit Penyabungan Sago	2007
	IPAL Ampang Pulau Pulau Karam 1	Kec. Koto XI Tarusan	2018
	IPAL Salido	Kec. IV Jurai	2019
	IPAL Sago Salido	Kec. IV Jurai	2019
	IPAL SMK Kelautan Sago	Kec. IV Jurai	2019
Tanah Datar	IPLT Kutu Anyir	Saruaso, Tanjung Emas	2001
Kota Padang	IPLT Surau Gadang	Surau Gadang, Nanggalo	2009
	IPAL Banda Buek	Banda Buek, Lubuk Kilangan	2011

Kabupaten	Nama Infrastruktur	Lokasi	Tahun Dibangun
	IPAL Danau Cimpago	Purus, Padang Barat	2011
Padang Panjang	IPLT Kota Padang Panjang (IPLT Sungai Andok)	Kampung Manggis, Padang Panjang Bara	2008
Kota Padang	IPAL Desa Taluak	Desa Taluak, Kota Pariaman	2010
Payakumbuh	IPLT Sungai Durian	Sungai Durian, Lamposi Tigo Nagori	2009 (2020 rehabilitasi)
	IPAL Tanjung Pauh	Tanjung Pauh, Payakumbuh	2011
Sawahlunto	IPLT Kota Sawahlunto (IPLT Kayu Gadang)	Kayu Gadang	2008
Kota Solok	IPAL Laing Gelanggang Batuang	Nan Balimo, Tanjung Harapan	2012
	IPLT Ampang Kualo	Kampung Jawa, Tanjung Harapan	2016

Sumber: Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya, 2022

Persampahan

Penanganan persampahan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26 Daftar TPA Provinsi Sumatera Barat

KAB/KOTA	TPA	STATUS	KAPASITAS
Pesisir Selatan	TPA Gunung Bungkuak	TPA Pemda (Non Regional)	12775000
Kab.Solok	TPA Sampah Regional Solok	TPA Regional	16616000
Sijunjung	TPA Muaro Batuak	TPA Pemda (Non Regional)	5475000
Tanah Datar	TPA Bukik Sangkiang	TPA Pemda (Non Regional)	16129920
Padang Pariaman			
Agam	TPA Sampah Regional Payakumbuh	TPA Regional TPA Pemda (Non Regional)	9694400
	TPST Sei. Jariang		8997250 18691650
Lima Puluh Kota	TPA Regional Payakumbuh	TPA Regional	6869300
Pasaman	TPA PUNCAK LABUAI	TPA Pemda (Non Regional)	7183530

KAB/KOTA	TPA	STATUS	KAPASITAS
Solok Selatan	TPA Jujutan	TPA Pemda (Non Regional)	5120950
Dharmasraya	TPA Rabusa	TPA Pemda (Non Regional)	29448200
Pasaman Barat	MUARA KIAWAI	TPA Pemda (Non Regional)	11680000
Padang	UPTD TPA AIE DINGIN	TPA Pemda (Non Regional)	170659400
Kota Solok	TPA Sampah Regional Solok	TPA Regional	16616000
Sawahlunto	TPA Sampah Kayu Gadang	TPA Pemda (Non Regional)	5088100
Padang Panjang	TPA Sei Andok	TPA Pemda (Non Regional)	15636600
Bukittinggi	TPA SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH	TPA Regional	41610000
Payakumbuh	TPA REGIONAL	TPA Regional	29798600
Pariaman	TPAS Tungkal Selatan	TPA Pemda (Non Regional)	12410000
Kepulauan Mentawai			

Sumber: Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya, 2022

Kawasan Permukiman Kumuh

Jumlah kawasan kumuh mencapai 477 kawasan dengan luas sekitar 5.163,99 ha. Kawasan kumuh terbanyak dan terluas: Kab. Padang Pariaman (108 kawasan, 886,77 ha). Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pusat 2.460,77 ha, terluas ada di Kab. Lima Puluh Kota (587 ha). Kawasan kumuh di Wilayah Metropolitan PALAPA (145 kawasan, 1.193,46 ha).

Tabel 4.27 Daftar Kawasan Kumuh Provinsi Sumatera Barat

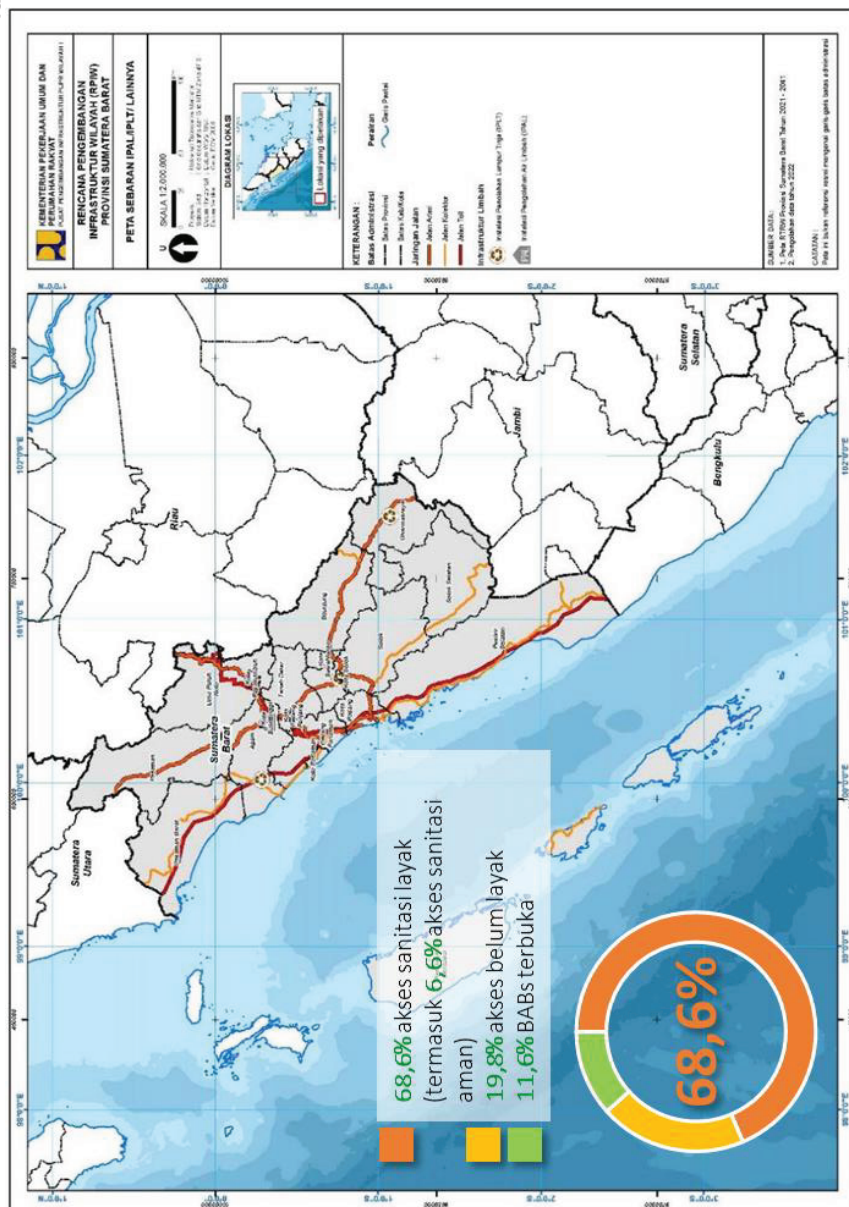
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Kumuh	Luas Kumuh Berdasarkan Kewenangan (Ha)			
			Kab./Kota	Provinsi	Pusat	Jumlah
1	Kota Padang	22	58,44	47,21	16,68	122,33
2	Kab. Dharmasraya	31	107,98	61,44	178,89	348,31
3	Kab. Kepulauan Mentawai	10	6,8		234,81	241,61
4	Kab. Pesisir Selatan	46	140,21	216,03	132,84	489,08
5	Kab. Sijunjung	31	96,93	64,24	254,03	415,2
6	Kab. Solok	37	68	216	290	574
7	Kab. Solok Selatan	2			71,04	71,04
8	Kota Sawahlunto	16	40,73	77,6	16,58	134,91
9	Kota Solok	8	11,16	38,65	53,85	103,66
10	Agam	11	30,79	49,03	91,14	170,96
11	Kab. Lima Puluh Kota	27	25,26	88,71	586,89	700,86
12	Kab. Pasaman	8	49,5			49,5
13	Kab. Pasaman Barat	34	111,19	49,08	15,22	175,49
14	Kota Bukittinggi	5	4,25	29,03	31,5	64,78
15	Kab. Padang Pariaman	108	316,26	299,61	270,9	886,77
16	Kota Padang Panjang	10			47,718	47,718
17	Kota Pariaman	15	30,38	88,27	65,71	184,36
18	Kota Payakumbuh	10	20,5	10,19	32,76	63,45
19	Kab. Tanah Datar	46	172,93	76,82	70,21	319,96
	Jumlah	477	1.291,31	1.411,91	2.460,77	5.163,99

Paling Banyak
Sedang
Sedikit
Paling Sedikit

Sumber: Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya, 2022



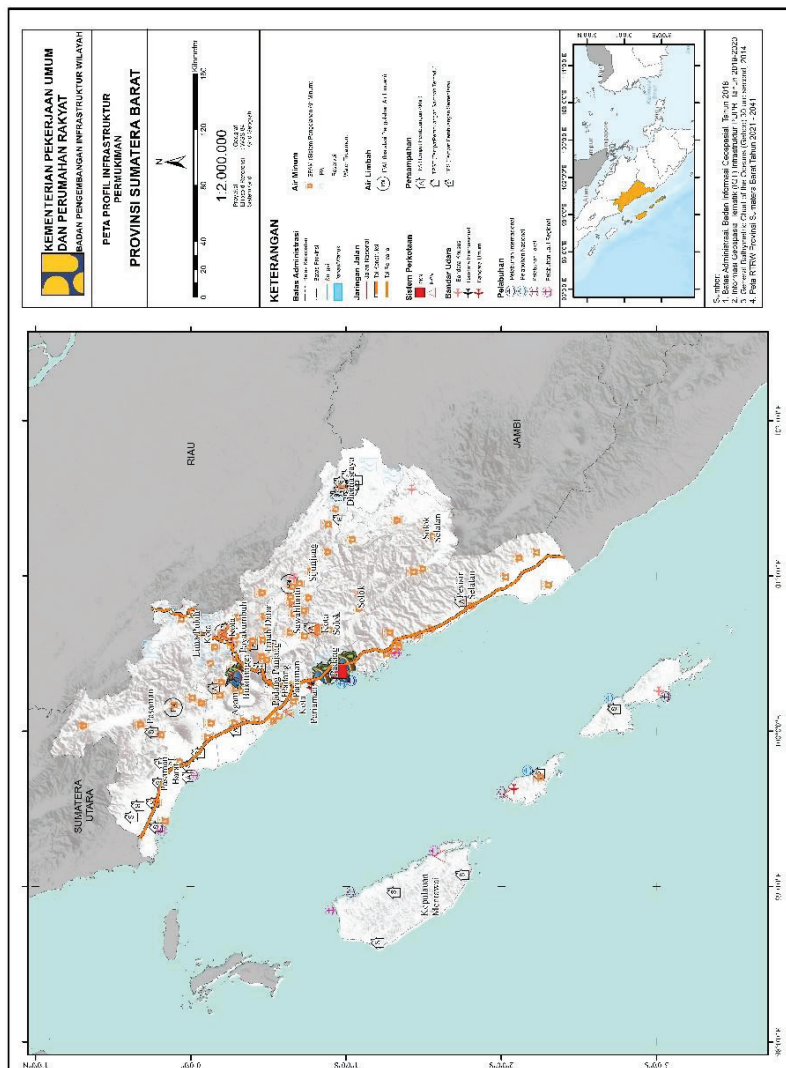
Gambar 4.5 Peta Kawasan Kumuh
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 4.6 Peta Sebaran IPAL/IPLT
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 4.7 Peta Sebaran TPS/TPA
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 4.8 Peta Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.3.1 Infrastruktur Permukiman Fokus Perkotaan

Fokus kawasan perkotaan yang mencakup PKN Palapa memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur permukiman yang tersedia.

Tabel 4.28 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Perkotaan

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	TPA Air Dingin	18 Hektar	Kota Padang
3	TPA Ladang Laweh	3,8 Hektar	Padang Pariaman
4	TPA Tungkal Selatan	2,3 Hektar	Pariaman
5	Akses terhadap sanitasi	61,85%	Palapa

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur eksisting lainnya yang berada di Kawasan Perkotaan Palapa yaitu TPA Padang dengan luas 30 ha dan kapasitas 216 m³/Tahun, TPA Padang sudah menggunakan sistem sanitary landfill yang terintegrasi antara ruang tampung dengan aliran air sampah sehingga tidak menimbulkan polusi tanah.

Tabel 4.29 Profil Infrastruktur Air Minum Fokus Perkotaan

KAB KOTA	Nama SPAM	Kap. Terpasang (l/detik)	Produksi (/detik)	Distribusi (m3)	Idle Capacity	SR	Ket
Padang	IPA Gunung Pangilun	500	539,78	1304,41	-39,78	36089	Berfungsi
	IPA Ulu Gadut IA dan IB	80	78,33		1,67	31778	Berfungsi
	IPA Ulu Gadut IIA	40	40		0		Berfungsi
	IPA Ulu Gadut IIB	100	97,68		2,32		Berfungsi
	IPA Lubuk Paraku	150	150,38		-0,38		Berfungsi
	IPA Jawa Gadut	20	19,24		0,76		Berfungsi
	IPA Pengambiran	5	5		0		Berfungsi
	IPA Bungus	40	30,59		9,41		Berfungsi
	IPA Latung 60, 20, dan 10	90	82,92		7,-8	43981	Berfungsi
	IPA Latung 200	200	200		0		Berfungsi
	IPA Guo Kuranji	40	52,92		-13,92		Berfungsi
	IPA Taban	100	108,1		-8,1		Berfungsi
	IPA Palukahan	100	95,33		4,67		Berfungsi
		1465	1500,27	1304,41	18,83	111848	
Pariaman	Cubadak Mentawai 1	50	30		20	1515	Berfungsi
	Cubadak Mentawai 2	10	10		0		Berfungsi
		60	40	0	20	1515	

KAB KOTA	Nama SPAM	Kap. Terpasang (l/detik)	Produksi (/detik)	Distribusi (m3)	Idle Capacity	SR	Ket
Padang Pariaman	Unit Pariaman Utara	20	0		20	804	Tidak Berfungsi
	Unit Pariaman Tengah	10	10		0	3646	Berfungsi
	2x1l Enam	20	20		0	3225	Berfungsi
	Lingkung/Unit Sicincin	225	100		125		Berfungsi
	VII Koto Sungai Sarik/Unit Sungai Sarik	-	-		-	2018	
	Enam Lingkung/Unit Pakandangan	-	-		-	1317	
		20	12		8		Berfungsi
	Nan Sabaris/Unit Pauh Kambar	-	-		-	696	
	Lubuk Alung/Unit Lubuk alung	5	5		0	3080	Berfungsi
		80	60		20		Berfungsi
		20	20		0		Berfungsi
	Batang Anai/Unit Pasar Usang	20			20		Tidak Berfungsi
		50			50	6056	Tidak Berfungsi
	Unit Ketaping	100	120		-20		Berfungsi
		20					Tidak Berfungsi
	Patamuan/Unit Tandikat	5	5		0		Berfungsi
		20	20		0	957	Berfungsi
		20	20		0		Berfungsi
	Padang Sago/Unit Padang Sago	-	-		-	1416	
	IV Koto Aur Malintang/Unit Aur Mailintang	5	6		-1		Berfungsi
		15	15		0	1048	Berfungsi
	Unit Batu Basa	5	5		0		Berfungsi
	Batang Gasan/Unit Gasan Gadang	40	20		20	31	Berfungsi
	2x1l Kayu Tanam/Unit Kayu Tanam	35	30		5	1095	Berfungsi
	V Koto Kampung Dalam/Unit Kampung Dalam	5	5		0	1557	Berfungsi
		20	30		-10		Berfungsi
	V Koto Timur/Unit Kudu Ganting	20	20		0	456	Berfungsi
	Sungai Geringging	15	15		0	3134	Berfungsi
		20	20		0		Berfungsi
	Sungai Limau	0	0		0	660	
		10	0		10		Tidak Berfungsi
	Ulakan Tapakis	-	-			386	
		825	558	0	247	31582	
	TOTAL PERKOTAAN	2350,00	2098,27	1304,41	251,73	144945	0

Tabel 4.30 Profil Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Fokus
Perkotaan

Kabupaten	Nama Infrastruktur	Lokasi	Tahun Dibangun	Kapasitas (m3/hari)	Kapasitas Terpakai	Idle Capacity (m3/hari)
Kota Padang	IPLT Surau Gadang	Surau Gadang, Nanggalo	2009	81,6	18	63,6
	IPAL Banda Buek	Banda Buek, Lubuk Kilangan	2011	250	0	250
	IPAL Danau Cimpago	Purus, Padang Barat	2011	75	0	75
Kota Pariaman	IPAL Desa Taluak	Desa Taluak, Kota Pariaman	2010	50	35	15
Padang Pariaman			-	-	-	-
				456,6	53	403,6

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 4.31 Profil Infrastruktur Persampahan Fokus Perkotaan

Kab/Kota	Nama	Tahun Awal Operasi	Luas Total (ha)	Luas Sel Landfill (ha)	Estimasi Timbunan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah Terangkut (ton/hari)
Padang	TPA Air Dingin	2011	18	3	482	440
Padang Pariaman	TPA Ladang Laweh	2016	3,8	1	216,51	18,2
Pariaman	TPA Tungkal Selatan	2006	2,3	1,8	66,55	36,14
			24,1	5,8	765,06	494,34

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.3.2 Infrastruktur Permukiman Fokus Pariwisata

Fokus kawasan pariwisata yang mencakup KSPN Bukittinggi, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur permukiman yang tersedia.

Tabel 4.32 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Pariwisata

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	TPA Padang	30 ha, 216 m ³ /Tahun (Sanitary landfill)	Balai Gadang, Kota Padang

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 4.33 Profil Infrastruktur Air Minum Fokus Pariwisata

Nama SPAM	Kap. Terpasang (l/detik)	Produksi (/detik)	Distribusi (m ³)	Idle Capacity	SR	Ket
Mata Air Sungai Tanang	160	150,55	195,23	9,45	14355	Berfungsi
Mata Air Cingkariang	10	8,45		1,55		Berfungsi
Sumur Dangkal Kubang Putih	6	5,26		0,74		Berfungsi
Sumur Bor Birugo	3	0		3		Tidak Berfungsi
Sumur Bor Bukit Apit	2,5	2,21		0,29		Berfungsi
WTP Tabek Gadang I	10	9		1		Berfungsi
WTP Tabek Gadang II	20	18		2		Berfungsi
WTP Belakang Balok	40	20,85		19,15		Berfungsi
	251,5	214,32	195,23	37,18	14355	

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.3.3 Infrastruktur Permukiman Fokus Pertanian

Fokus kawasan pertanian yang mencakup KPPN Agam, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur permukiman yang tersedia.

Tabel 4.34 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Pertanian

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	TPA Sungai Jariang	5,5 Hektar	Kabupaten Agam
2	TPS 3R	1	Dasman, Kec Cingkariang
3	IPLT Sungai Jariang	15 m ³ /hari	Lubuk Basung

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 4.35 Profil Infrastruktur Air Minum Fokus Pertanian

Nama SPAM	Kap. Terpasang (l/detik)	Produksi (/detik)	Distribusi (m3)	Idle Capacity	SR	Ket
Silayang	20	10				Berfungsi
Batang Antokan	60	40		40		Berfungsi
Silasung	20	20				Berfungsi
Arikir	20	10				Berfungsi
Balai Badak	10	9		1		Berfungsi
Cacang Randah I	0	0				Tidak Berfungsi
Cacang Randah II	20	15		5		Berfungsi
Sarasah	15	15		0		Berfungsi
Koto Gadang	5	5		0		Berfungsi
Tanjung Lurah	5	5		0		Berfungsi
Rimbo Takuruang	5	5		0		Berfungsi
Tarok	02.05	02.05		0		Berfungsi
Tabek Barawak I	02.05	02.05		0		Berfungsi
Tabek Barawak II	5	5		0		Berfungsi
Sei,Jernih	02.05	02.05				Berfungsi
Batu Putih I	30	15		16		Berfungsi
Batu Putih II	5	4				Berfungsi
TOTAL PERTANIAN	220,26	158,26	0,00	62,00	0,00	

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.3.4 Infrastruktur Permukiman Fokus Daerah Tertinggal

Fokus kawasan daerah tertinggal yang mencakup Kepulauan Mentawai, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur permukiman yang tersedia.

Tabel 4.36 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus Daerah Tertinggal

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	TPA SP2	1 Hektar (open dumping)	Kec Sipora Utara

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 4.37 Profil Infrastruktur Air Minum Fokus Daerah Tertinggal

Nama SPAM	Kap. Terpasang (l/detik)	Produksi (/detik)	Distribusi (m3)	Idle Capacity	SR	Ket
Tuapejat	10,00	10	10	0	561	Berfungsi
Sioban	7,50				400	Berfungsi
Muara Siberut	10,00				370	Berfungsi
Sikakap	2,50				122	Berfungsi
KM.37 & Malakopa	7,50				160	Berfungsi
Sirilogui	5,00				150	Berfungsi
Betaet	5,00				75	Berfungsi
Saibi	10,00				300	Berfungsi
	57,50	10,00	10,00	47,50	2138,00	

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Perkembangan suatu kawasan tidak lepas dari peranan perumahan dan permukiman yang handal. Berikut sebaran backlog dan RTLH di Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 4.38 Jumlah RTLH di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH
1	Kepulauan Mentawai	15.888
2	Pesisir Selatan	15.500
3	Kab.Solok	7.690
4	Sijunjung	11.058
5	Tanah Datar	9.898
6	Padang Pariaman	19.257
7	Agam	13.653
8	Lima Puluh Kota	7.363
9	Pasaman	8.483
10	Solok Selatan	5.644
11	Dharmasraya	5.769
12	Pasaman Barat	17.603
13	Padang	14.815
14	Kota Solok	1.708
15	Sawahlunto	1.300

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH
16	Padang Panjang	1.952
17	Bukittinggi	4.000
18	Payakumbuh	4.941
19	Pariaman	1.426

Sumber: Data P3KE, 2023

Profil Eksisting Infrastruktur Perumahan

- Rumah Susun
Rumah Susun yang terbangun hingga tahun 2021 adalah sejumlah 1.672 unit
- Rumah Khusus
Rumah Khusus yang terbangun hingga tahun 2021 adalah sejumlah 1.215 unit
- Rumah Swadaya
Bantuan stimulan perumahan swadaya yang diterima hingga tahun 2021 adalah sejumlah 44.083 unit
- Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang terbangun hingga tahun 2021 adalah sejumlah 1.056 PSU

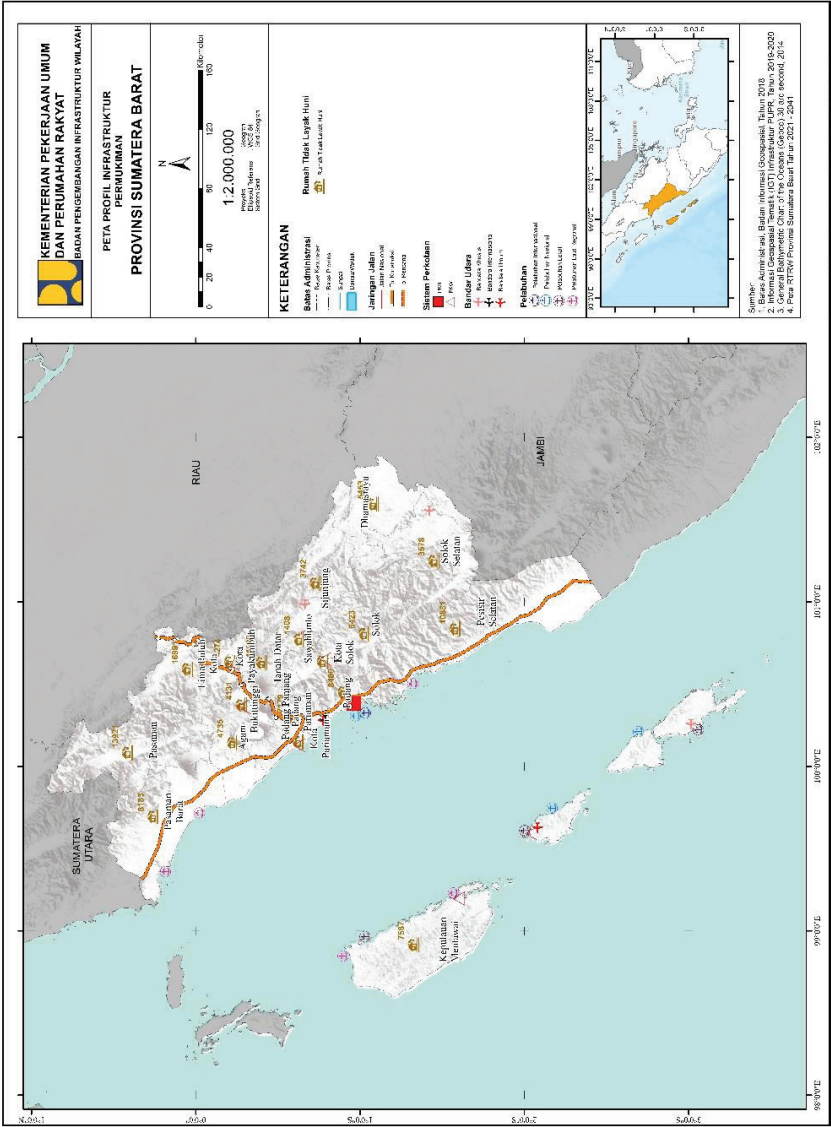
Kinerja Infrastruktur Perumahan yang belum terpenuhi

- Backlog Rumah
 - ❖ Backlog rumah di Prov. Sumatera Barat masih tinggi, mencapai 351.808 unit
 - ❖ Tertinggi di Kota Padang, mencapai 59.736 unit (16,98%)
 - ❖ Backlog rumah di Wilayah Metropolitan mencapai 93.374 unit (26,54%)
- Rumah Tidak Layak Huni
 - ❖ 59,5% rumah tangga menempati hunian yang memenuhi seluruh aspek kelayakan (2022), artinya terdapat 44,5% rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni.
 - ❖ Terbatasnya akses pembiayaan perumahan, dimana rasio KPR terhadap PDB masih sekitar 3,2% (2022)
 - ❖ Rutilahu di Prov. Sumatera Barat masih tinggi, mencapai 96.076 unit
 - ❖ Tertinggi di Kab. Pesisir Selatan, mencapai 11.345 unit (11,81)

Tabel 4.39 Jumlah Kepemilikan Rumah dan Backlog Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal				Backlog Hunian	% Backlog	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun 2030	Kebutuhan Total Tahun 2030 (Backlog + Proyeksi Kebutuhan)
		Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Menumpang	Lainnya				
1	Kepulauan Mentawai	20.071	81	1.041	182	1.304	0,4%	9.227	10.531
2	Pesisir Selatan	68.546	3.377	13.773	215	17.373	5,1%	-888	16.485
3	Kab. Solok	57.213	1.626	11.611	262	13.499	4,0%	353	13.852
4	Sijunjung	37.431	2.888	3.661	449	6.997	2,1%	4.214	11.211
5	Tanah Datar	49.903	3.146	17.555	241	20.942	6,1%	3.086	24.028
6	Padang Pariaman	61.739	5.000	16.591	0	21.591	6,3%	5.304	26.895
7	Agam	70.964	8.120	25.934	2.825	36.868	10,8%	20.965	57.833
8	Lima Puluh Kota	59.193	2.691	19.947	222	22.860	6,7%	15.103	37.963
9	Pasaman	42.136	2.701	7.275	649	10.620	3,1%	1.731	12.351
10	Solok Selatan	28.506	1.362	3.797	4.499	9.654	2,8%	13.049	22.703
11	Dharmasraya	35.390	7.164	4.107	2.810	14.086	4,1%	14.934	29.020
12	Pasaman Barat	72.897	7.710	16.855	865	25.440	7,5%	36.132	61.572
13	Padang	82.337	45.632	39.480	4.877	89.989	26,4%	3.930	93.919
14	Kota Solok	8.007	3.211	2.042	372	5.627	1,6%	1.990	7.617
15	Sawahlunto	9.527	1.545	1.599	628	3.772	1,1%	2.333	6.105
16	Padang Panjang	4.398	2.435	981	293	3.709	1,1%	-1.328	2.381
17	Bukittinggi	9.661	12.397	4.182	775	17.354	5,1%	5.952	23.306
18	Payakumbuh	20.170	5.545	4.862	611	11.019	3,2%	11.152	22.171
19	Pariaman	13.094	2.389	5.922	60	8.372	2,5%	8.293	16.665
	SUMATERA BARAT	495.702	30.992	121.185	9.542	341.074	100,0%	155.532	496.606

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



4.5 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR

Kondisi simpul transportasi di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari empat jenis moda transportasi, yakni bandar udara, Pelabuhan, terminal, dan kereta api seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.9 Simpul transportasi di Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Data Website Kementerian Perhubungan, 2022

Jumlah penumpang/barang yang melalui setiap moda transportasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.40 Jumlah Penumpang melalui Bandara Minangkabau

Tahun	Jumlah Penumpang melalui Bandara Minangkabau (orang)			
	Internasional		Domestik	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2017	115.207	115.890	1.817.462	1.845.986
2018	143.886	145.301	1.948.029	1.902.512
2019	171.606	170.387	1.397.698	1.330.899
2020	32.625	30.090	628.014	581.112
2021	-	15	535.043	541.811

Tabel 4.41 Jumlah Barang melalui Bandara Minangkabau

Tahun	Produksi Kargo dan Pos melalui Bandara Minangkabau (kg)			
	Internasional		Domestik	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2019	146.433	344.199	9.135.483	4.476.833
2020	0	144.403	7.379.027	3.655.179
2021	0	557.068	6.855.267	3.649.099

Tabel 4.42 Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang

Jumlah Penumpang melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang (orang)		
Tahun	Naik	Turun
2019	71.003	65.970
2020	31.557	29.630
2021	34.803	32.207

Tabel 4.43 Jumlah Barang melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang

Angkutan Khusus Peti Kemas melalui Pelabuhan Teluk Bayur Padang (<i>Twenty Equivalen Units</i>)		
Tahun	Bongkar	Muat
2017	39.570	38.635
2018	42.135	45.524
2019	44.576	44.580
2020	44.499	52.949
2021	52.741	53.005

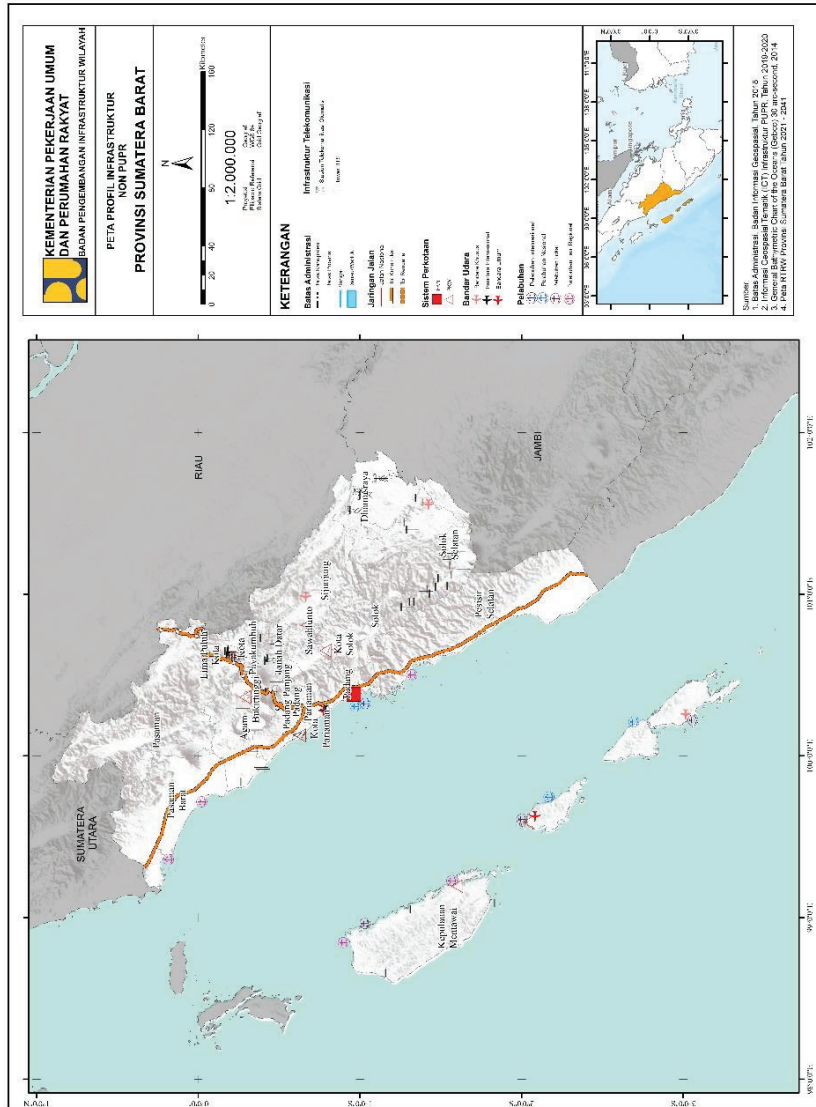
Tabel 4.44 Jumlah Penumpang Kereta Api
Jumlah Penumpang Kereta Api (orang)

Tahun	Jumlah	Persentase
2017	1.088.236	-
2018	1.389.171	27,65%
2019	1.474.934	6,17%
2020	595.509	-59,62%
2021	642.827	7,95%

Tabel 4.45 Jumlah Volume Angkutan Barang Kereta Api
Volume Angkutan Barang Kereta Api (ton)

Tahun	Jumlah	Persentase
2017	2.794.050	-
2018	3.265.689	16,88%
2019	2.536.870	-22,32%
2020	2.521.255	-0,62%
2021	2.065.490	-18,08%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 4.10 Peta Infrastruktur Non PUPR Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 4.11 Peta Jaringan Transportasi Regional Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Fokus kawasan perkotaan yang mencakup PKN Palapa memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur yang tersedia.

Tabel 4.46 Profil dan Kinerja Infrastruktur Fokus Perkotaan

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Jalan Nasional	87,85 km	• PADANG BYPASS II (BARU) • JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG) • JLN. ADINEGORO (PADANG) • BTS. KOTA PADANG - JLN. SIMP. HARU • BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR (PADANG) • JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG) • PADANG BYPASS I
		12,92 km	• JLN. ZAINI (PARIAMAN) • JLN. SITI MANGGOPOH (PARIAMAN) • BYPASS PARIAMAN (KOTA PARIAMAN) • JLN. AHMAD DAHLAN (PARIAMAN) • JLN. SOEKARNO - HATTA (PARIAMAN)
2	Jalan Tol	32,4 km	Padang - Sicincin (Kapalo Hilalang) progres pembangunan 29,7%
3	Bandar Udara	1	Minangkabau, Kota Padang
4	Pelabuhan	1	Teluk Bayur, Kota Padang
5	Air Baku	1,171 m ³ /detik	Kota Padang
		0,153 m ³ /detik	Kota Pariaman
6	TPA Padang	30 ha, 216 m ³ /Tahun (Sanitary landfill)	Balai Gadang, Kota Padang

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
7	Backlog Perumahan	26,4%	Padang
		2,5%	Pariaman
8	Pengaman Pantai	2 km	Kab. Padang Pariaman (Kampung Dalam)
9	Akses terhadap sanitasi	61,85%	Palapa
10	D.I Anai	13.604 Ha	Padang Pariaman

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

4.5.1 Infrastruktur Non PUPR Fokus Perkotaan

Fokus kawasan perkotaan yang mencakup PKN Palapa memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur non PUPR yang tersedia.

Tabel 4.47 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Perkotaan

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Bandar Udara	1	Minangkabau, Kota Padang
2	Pelabuhan	1	Teluk Bayur, Kota Padang

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Selain sistem jaringan transportasi didukung juga dengan adanya sarana transportasi meliputi Bandar udara Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan Pelabuhan yang melayani distribusi logistik skala nasional dan internasional, saat ini terdapat kendala dengan adanya antrian bongkar muat di Pelabuhan tersebut.

4.5.2 Infrastruktur Non PUPR Fokus Pariwisata

Fokus kawasan pariwisata yang mencakup KSPN Bukittinggi, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur non PUPR yang tersedia.

Tabel 4.48 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Pariwisata

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Bandar Udara Minangkabau	1	Kota Padang
2	Pelabuhan Teluk Bayur	1	Kota Padang

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Sistem sarana transportasi didukung dengan adanya Bandar Udara dan Pelabuhan untuk melayani wisatawan dari luar daerah dan mancanegara. Di Kawasan KSPN Bukittinggi terdapat Bandara Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di Kota Padang.

4.5.3 Infrastruktur Non PUPR Fokus Pertanian

Fokus kawasan pertanian yang mencakup KPPN Agam, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur non PUPR yang tersedia.

Tabel 4.49 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Pertanian

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Terminal Barang	1	Kecamatan Banuhampu

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Sistem sarana transportasi didukung dengan adanya terminal angkutan barang di Kecamatan Banuhampu, outlet berupa Pelabuhan rencananya akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Teluk Tapang yang berada di Kabupaten Pasaman Barat yang berada dibagian Utara Kabupaten Agam, Pelabuhan ini sudah operasional namun pembangunan jalan aksesnya masih dalam pembangunan dengan progres 51,14% pada tahun 2023.

4.5.4 Infrastruktur Non PUPR Fokus Daerah Tertinggal

Fokus kawasan pariwisata yang mencakup KSPN Bukittinggi, memiliki beberapa dukungan infrastruktur eksisting sekaligus terdapat beberapa gap antara infrastruktur eksisting dengan kebutuhan mendatang. Berikut merupakan beberapa infrastruktur non PUPR yang tersedia.

Tabel 4.50 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

No	Infrastruktur	Volume dan Satuan	Lokasi
1	Bandar Udara Rokot	1	Kab Mentawai
2	Pelabuhan Sikakap	1	Kab Mentawai

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Sistem sarana transportasi didukung dengan adanya Bandar Udara dan Pelabuhan untuk melayani wisatawan dari luar daerah dan mancanegara. Di Kawasan daerah tertinggal Kep Mentawai terdapat Bandara Rokot dan Pelabuhan Sikakap yang terdapat di Kabupaten Mentawai.



BAB 5

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



5.1 Isu Strategis Provinsi

Permasalahan dan isu strategis Provinsi Sumatera Barat merumuskan potensi dan kendala (termasuk limitasi/daya dukung dan daya tampung) yang harus ditangani serta peluang dan tantangan yang dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR di Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan dan isu strategis ini akan menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah.

Provinsi Sumatera Barat sebagai gerbang masuk Indonesia di wilayah barat, memiliki potensi sebagai pintu ekspor di Wilayah Sumatera Bagian Utara, dengan Negara tujuan ekspor: India, Pakistan, Tiongkok, Rusia, Singapura, Malaysia. Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia- Malaysia-Thailand (IMT-GT)

Dalam mendukung Pulau Sumatera sebagai Sentral produksi dan pengolahan hasil bumi dan Lumbung Energi Nasional, Provinsi Sumatera Barat juga merupakan:

- a. Penghasil komoditas padi, kelapa sawit, dan karet terbesar ke-5 di Sumatera sebesar 1.422.874 ton padi, 1.352.000 ton kelapa sawit, dan 137.600 ton tahun 2021
- b. Kegiatan perikanan tangkap (nilai produksi 6.095.472.522 ribu rupiah tahun 2019) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui kegiatan ekspor

Akan tetapi semua potensi tersebut menghadapi kendala rawan bencana yang cukup besar akibat letak geografis Provinsi Sumatera Barat yang berada pada gugus Bukit Barisan dan gunung berapi aktif serta terletak pada jalur patahan Sumatera dan lempeng benua. Berdasarkan hasil analisis, didapati bahwa terdapat 37,49% yang termasuk kedalam kawasan rawan bencana (gempa, banjir, tanah longsor) di Sumatera Barat. Maka dibutuhkan konsep pengembangan dengan pendekatan *Recilient City*.



5.2 Isu Strategis Fokus Perencanaan

5.2.1 Isu Strategis Fokus Perkotaan

Pada sub bab ini akan menjelaskan perumusan isu strategis pada fokus perkotaan melalui beberapa tahapan.

a. Peluang

- Penetapan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA) sebagai PKN oleh pemerintah disertai dengan dukungan infrastruktur skala lokal, regional, dan nasional
- Kontribusi PDRB Kota Padang terhadap Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat 1 dengan Rp. 72.961.651.230.000 dan jumlah terbesar dari sektor perdagangan, Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat sebagai salah satu pusat ekonomi di bagian Barat Pulau Sumatera
- Peningkatan kualitas hidup penduduk melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosial, pendidikan, dan lainnya
- Pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendorong produktivitas pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan
- Penetapan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA) sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan

b. Tantangan

- Terjadi perbedaan prioritas pembangunan karena kawasan PALAPA ditangani oleh beberapa stakeholder dari Kota Padang, Kab Padang Pariaman, dan Kota Pariaman
- Terjadi ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat karena adanya gap PDRB Perkapita antar Kab/Kota
- Ketimpangan wilayah terutama di wilayah Selatan yang relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah tengah dan Utara Provinsi Sumatera Barat
- Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi yang belum merata

- Prioritas pembangunan dan kemungkinan adanya arahan revisi kebijakan dapat mempengaruhi pengembangan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA)
 - Secara geografis, Kota Padang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera, dengan Indeks risiko bencana multi ancaman tinggi
- c. Potensi
- Kawasan perkotaan PALAPA (Padang - Lubuk Alung - Pariaman) menimbulkan Pergerakan (Commuter) dari/ke Kota Satelit Sekitar Kota Padang
 - Kota Padang sebagai pusat kegiatan dan aktivitas ekonomi merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Sumatera Barat
 - Jumlah penduduk di Kota Padang menduduki peringkat pertama di Provinsi Sumatera Barat dengan laju pertumbuhan penduduk 0,63 dengan jumlah 919.145 jiwa"
 - Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan
- d. Kendala
- Kawasan perkotaan meningkatkan tingkat urbanisasi, tingginya kepadatan penduduk yang memicu tumbuhnya kawasan kumuh, kemacetan dan degradasi lingkungan serta tingkat layanan infrastruktur yang belum maksimal (air bersih, air limbah, persampahan)
 - Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan
 - Terjadinya urban sprawl di Kawasan Metropolitan PALAPA
 - Limitasi pembangunan akibat masuk ke dalam daerah rawan bencana & penetapan Kawasan Lindung serta dampak tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi

Tabel 5.1 Perumusan Isu Strategis Fokus Perkotaan

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Perkotaan	Makro Nasional-Internasional	Peningkatan kerjasama daerah berskala Internasional	Provinsi Sumatera Barat termasuk wilayah Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand and Growth Triangle (IMT-GT)	Mengembangkan IMT-GT Connectivity Corridor menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan.	PKN PALAPA	Pengembangan connectivity corridors sebagai penguatan maritime transport links dan perdagangan melalui Selat Malaka	Kondisi dan status pelabuhan perlu ditingkatkan dalam mendukung Joint Business Councils (JBCCS) IMT-GT Coastal Network.	Belum optimalnya infrastruktur Perkotaan dalam Kawasan Metropolitan yang Kompak berbasis Resilient City
		Peningkatan jalur distribusi berskala Internasional	Terjadi antrian bongkar muat kapal di Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan utama untuk kegiatan perdagangan internasional	Pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan akses PKN Padang sebagai pusat pengembangan Kawasan serta mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat, Pulau Sumatera Bagian Utara, jaringan jalan arteri primer, dari PKN Padang, dan Bandar Udara Minangkabau		Optimalisasi fungsi dan peran pelabuhan Teluk Bayur diperlukan pengembangan alternatif hub di sebelah utara Sumatera Barat (Teluk Tapang, Pasaman Barat)	Terjadi antrian bongkar muat logistik Pelabuhan Teluk Bayur	
			Nilai ekspor Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 nasional sebesar 3.071,2 juta US\$					
	Meso Sumatera Bagian Utara	PKN yang menjadi pusat pengembangan kawasan	Konektivitas Padang menuju Pekanbaru (Riau) melalui Jalan tol Padang- Sicincin (Kapalo Hilalang) belum dapat dimanfaatkan, dengan progres fisik pembangunan 10,0% untuk Sta 0+200 - 4+200 dan 29,7 % untuk Sta 4+200 - 36+600	Peningkatan keterkaitan PKN Padang dengan PKN Pekanbaru, PKN Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Pengembangan Kota Padang sebagai Super Hub Kawasan antar wilayah didukung prasarana dan sarana transportasi yang memadai	Peran Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat aktivitas dan ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur terpadu, pemenuhan kebutuhan SPM dan berpotensi menyebabkan permasalahan lingkungan	Peran Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat aktivitas dan ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur terpadu, pemenuhan kebutuhan SPM dan berpotensi menyebabkan permasalahan lingkungan	
	Mikro Sumatera Barat	Penguatan fungsi ekonomi perkotaan	Pelayanan Infrastruktur Sumatera Barat belum sepenuhnya optimal	Pengembangan Infrastruktur Dasar di Provinsi Sumatera Barat		Pengembangan Sumatera Barat dengan dukungan infrastruktur pada kawasan strategis & pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Kawasan perkotaan Barat dengan dukungan tingkat urbanisasi, tingginya kepadatan penduduk yang memicu tumbuhnya kawasan kumuh, kemacetan dan degradasi lingkungan serta tingkat layanan infrastruktur yang belum maksimal (air	
			Air minum layak terakses sebesar 83,37%, air minum perpipaan sekitar 28,4%, dan air minum aman sekitar 10,09% dengan jumlah sambungan rumah sekitar 383,463 SR.	Pembangunan SPAM Regional		Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di kawasan perkotaan Metropolitan		

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							bersih, air limbah, persampahan)	
			Sistem TPA masih berbasis open dumping Backlog rumah di Prov. Sumatera Barat masih tinggi, mencapai 351.808 unit Terdapat 44,5% rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni dan Jumlah kawasan kumuh mencapai 477 kawasan dengan luas sekitar 5.163,99 ha	Pengurangan sampah melalui penyediaan TPS3R pada skala kawasan/kota. Pembangunan rumah susun Penataan / peningkatan kualitas lingkungan kawasan kumuh perkotaan		Pengembangan TPA Regional Penyediaan rumah bagi MBR Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman		
			Kota Padang sebagai pusat kegiatan dan aktivitas ekonomi merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan kontribusi mencapai 25,67% pada tahun 2022, dari sektor pertanian, perikanan dan perhutanan (sub sektor tanaman perkebunan dan pangan)	Pengembangan PKN sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan		Kota Padang sebagai Akses Utama Menuju Destinasi Pariwisata Sumatera Barat dengan Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai Gerbang Utama Pariwisata Sumatera Barat		
			Kawasan perkotaan PALAPA (Padang - Lubuk Alung - Pariaman) menimbulkan Pergerakan (Commuter) dari/ke Kota Satelit Sekitar Kota Padang	Pengendalian perkembangan PKN yang menjalar (urban sprawl)		Perkotaan Palapa berpotensi menciptakan skala ekonomi yang lebih besar serta perwujudan infrastruktur yang lebih terpadu		
			Jumlah penduduk di Kota Padang menduduki peringkat pertama di Provinsi Sumatera Barat dengan laju pertumbuhan penduduk 0,63 dengan jumlah 919.145 jiwa	Pengendalian perkembangan PKN yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai		Kawasan Perkotaan dengan dukungan infrastruktur pada kawasan strategis & pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terjadinya urban sprawl di Kawasan Metropolitan PALAPA	
			Pelayanan infrastruktur perkotaan metropolitan PALAPA belum sepenuhnya optimal Pelayanan SPAM belum optimal Cakupan Pelayanan PDAM Kota Padang baru 61,48%	Pengembangan Infrastruktur Dasar Perkotaan di Perkotaan PALAPA Pembangunan SPAM Regional		Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di kawasan perkotaan Metropolitan	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan	
			Pengelolaan TPA belum optimal, keterbatasan lahan untuk pengembangan TPA dengan Timbulan sampah di Metropolitan	Pengurangan sampah melalui penyediaan TPS3R pada skala kawasan/kota.		Pengembangan TPA Regional		

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			PALAPA mencapai 5.018.615 lt/hr, serta usia pakai lahan TPA yang akan habis tahun 2024 Tingginya angka backlog yang disertai dengan kualitas kelayakan rumah yang masih rendah Backlog rumah di Wilayah Metropolitan PALAPA mencapai 93.374 unit (26,54%) Luas kawasan permukiman kumuh di wilayah Metropolitan PALAPA yang belum tertangani masih cukup tinggi, seluas 1193,46 ha	Pembangunan rumah susun Penataan / peningkatan kualitas lingkungan kawasan kumuh perkotaan		Penyediaan rumah bagi MBR di Wilayah Metropolitan PALAPA Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman di Wilayah Metropolitan PALAPA		
		Kebutuhan rencana mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana di Pulau	Secara geografis, Kota Padang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera, dengan Indeks risiko bencana multi ancaman tinggi dengan Skor 179,03,	Pengendalian perkembangan PKN Padang yang berada di kawasan rawan bencana tsunami di wilayah pesisir, longsor, gempa bumi		Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan	Limitasi pembangunan akibat masuk ke dalam daerah rawan bencana & penetapan Kawasan Lindung serta dampak tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi	

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

5.2.2 Isu Strategis Fokus Pariwisata

Pada sub bab ini akan menjelaskan perumusan isu strategis pada fokus pariwisata melalui beberapa tahapan.

a. Peluang

- Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Nasional di Sumatera Barat didukung oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan tematik dan citra kawasan wisata
- Destinasi pariwisata di Sumatera Barat beragam dan beberapa berkelas dunia sehingga dapat ditetapkan tematik wisata untuk menarik minat wisatawan dan investor
- Keterlibatan masyarakat daerah disertai dengan peningkatan SDM dalam mengelola pariwisata
- Kemajuan di bidang teknologi informasi, yang memungkinkan calon wisatawan memperoleh akses informasi terkini mengenai keanekaragaman destinasi
- Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Nasional dalam RPJMN dan RIPARNAS
- Kekayaan alam dan budaya yang melimpah mampu menjadikan keragaman dan keunikan daya tarik alam dan budaya sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan

b. Tantangan

- Belum ada koordinasi keterpaduan pengembangan antar tematik pariwisata di Sumatera Barat
- Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum menyatu Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak antara pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, dan masyarakat di objek wisata.
- Mapping destinasi (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) untuk penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata
- Perkembangan implementasi tata pemerintahan yang baik (good governance) memberikan ruang bagi perbaikan sistem manajemen pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata baik antar sektor, antar instansi, antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan
- Aktivitas wisatawan yang masif dapat berdampak terhadap degradasi lingkungan

c. Potensi

- Sumatera Barat memiliki beberapa tematik pengembangan pariwisata (alam, budaya, sejarah, kuliner, dll)
- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Bukittinggi paling tinggi di Sumatera Barat, dengan jumlah kunjungan 1.231.306 wisatawan
- Perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam Sumatera Barat world heritage Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto yang ditetapkan oleh UNESCO

d. Kendala

- Tematik Destinasi wisata Sumatera Barat masih belum terintegrasi
- Industri Kreatif Sumatera Barat belum optimal dalam mendukung pariwisata
- Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tabel 5.2 Perumusan Isu Strategis Fokus Pariwisata

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS	
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pariwisata	Makro: Nasional - Internasional	Potensi wisata bertaraf regional, nasional dan Internasional	Kekuatan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, salah satunya didukung oleh sektor pariwisata berskala nasional maupun internasional yang belum terintegrasi	Perwujudan pusat pariwisata tematik dan terintegrasi antar wilayah serta berdaya saing internasional (5 Tematik pariwisata Sumbang : Marine Adventure Tourism, Geopark Tourism, Ancient Minangkabau Tourism, Colonial the Old Mining Town Tourism, Whitesand Tourism)	KSPN Bukittinggi	Pengembangan industri pariwisata yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional berbasis masyarakat lokal setempat, khususnya budaya dan tradisi alam Minangkabau	belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata serta kegiatan ekonomi kreatif masyarakat di kawasan wisata/rendahnya inovasi	Pengembangan Tematik Pariwisata yang belum terintegrasi antar destinasi dan dengan industri kreatif
			Perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam Sumatera Barat <i>world heritage Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto</i> yang ditetapkan oleh UNESCO					
			Jumlah wisatawan asing di Sumatera Barat terbanyak berasal Malaysia sebanyak 46.730 jiwa (tahun 2019)					
	Meso: Sumatera Bagian Utara	Tersedianya aksesibilitas dan konektivitas yang memadai untuk menuju destinasi wisata	Kunjungan wisatawan berasal dari Riau dan Sumatera Utara, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Sumatera Barat nomor 2 di Pulau Sumatera, dengan jumlah kunjungan 10.750.168 wisatawan Sumatera Barat memiliki beberapa tematik pengembangan pariwisata (alam, budaya, sejarah, kuliner, dll)	Pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata		Peningkatan lama waktu berwisata		
	Mikro: Sumatera Barat	Pengembangan Pariwisata	Tematik	Jumlah destinasi wisata di Kota Padang terdiri dari 40 wisata alam, 37 wisata bahari, 3 wisata budaya, dan 29 wisata belanja		Penetapan Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata (KUPP) I Wilayah Kota Padang	Pengembangan destinasi wisata	
		Dukungan destinasi wisata yang menunjang kawasan strategis	Kota Padang mengedepankan destinasi wisata sejarah dan budaya Minang Diantaranya : Kerajaan Pagaruyung, Padangsche Spaarbank, danlainnya	Mewujudkan citra destinasi wisata Padang-Bukittinggi dan sekitarnya sebagai <i>The Soul Of Minangkabau</i>	Pengembangan pariwisata dalam kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi	Industri Kreatif Sumatera Barat belum optimal dalam mendukung pariwisata	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap	

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Bukittinggi paling tinggi di Sumatera Barat, dengan jumlah kunjungan 1.231.306 wisatawan	Pengembangan Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata (KUPP) Bukittinggi Kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark)		atau karakteristik yang dimiliki	peningkatan kesejahteraan masyarakat	
			Masih rendahnya tingkat pelayanan air minum (cakupan pelayanan PDAM 18,64%) tingkat kehilangan air masih tinggi 40,92%	Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan pusat-pusat permukiman (dusun) serta kawasan wisata Peningkatan akses sanitasi layak		Peningkatan infrastruktur dasar perkotaan		
Pemenuhan infrastruktur Dasar			Rumah tangga dengan akses sanitasi layak 51,42%				Pengembangan Lokasi TPA menggunakan sistem Sanitary Landfill dan 3 R (reuse, reduce, dan recycle)	
			Rendahnya tingkat pelayanan persampahan dengan kondisi TPA open dumping	Pengembangan sistem jaringan persampahan				

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

5.2.3 Isu Strategis Fokus Pertanian

Pada sub bab ini akan menjelaskan perumusan isu strategis pada fokus pertanian melalui beberapa tahapan.

a. Peluang

- Penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam didukung oleh Pemerintah Daerah
- pemasaran produksi tanaman pangan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan daerah disekitarnya terutama diekspor sampai ke luar daerah seperti Riau, Jambi, Bengkulu dan beberapa daerah tetangga lainnya
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa melalui Gapoktan dan Rembuk Tani
- Mengembangkan inovasi dan teknologi pendukung melalui instalasi pengolahan, mesin pemilah, dan lainnya
- Menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan pengendalian alih fungsi lahan dengan ditetapkannya lahan pangan berkelanjutan dalam RTRW Kabupaten Menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan pengendalian alih fungsi lahan dengan ditetapkannya lahan pangan berkelanjutan dalam RTRW Kabupaten
- Mengembangkan pengolahan kembali limbah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan sektor perkebunan dan peternakan

b. Tantangan

- Harga komoditi pertanian yang menurun pada saat panen raya atau saat adanya produk masuk dari daerah lain
- "Komoditi pertanian menjadi komoditi
- global dalam perdagangan bebas"
- Sumber Daya Manusia pertanian yang produktif semakin berkurang, serta berkurangnya minat untuk menjadi petani
- Terbatasnya akses petani terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan dan perlindungan usaha tani
- Perumusan mekanisme dan skema insentif dan disinsentif dalam penetapan Lahan Petanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada pemilik lahan agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan
- Terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian atau area peruntukkan lainnya

c. Potensi

- PDRB Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,71%)
- Produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-5 terbesar di Pulau Sumatera, berada di bawah Provinsi Aceh.

Produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menyumbang 2,38% produksi nasional dan produksi beras menyumbang 2,41% beras nasional (peringkat ke-11 nasional).

- Sekitar 89% perekonomian di Sumatera Barat ditopang oleh 600 ribu unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk didalamnya sektor pertanian

d. Kendala

- Terjadi penurunan produktivitas tanaman padi sawah di Kabupaten Agam sebesar 0,73 ha/ton
- Terjadi alih fungsi pertanian menjadi lahan non pertanian
- "Irigasi belum mampu menyediakan air dalam jumlah yang cukup hanya 67.06 % peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi"

Tabel 5.3 Perumusan Isu Strategis Fokus Pertanian

KONTEKS PERENCANAAN FOKUS	BASELINE KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN	KAWASAN PRIORITAS	OPSI MASA DEPAN	SKENARIO MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pertanian	Makro Nasional	Pulau Sumatera diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional, dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi yang membutuhkan hilirisasi produk dan konektivitas distribusi	Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional	KPPN Agam	Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian melalui industri kreatif dan digital serta mendorong pembangunan pedesaan (rural development)	Produksi pertanian Sumatera Barat masih dalam posisi ke-5 se-Pulau Sumatera dan belum adanya pengolahan terhadap hasil pertanian	Penurunan produktivitas pertanian dan belum optimalnya konektivitas menuju pemasaran	
	Meso Sumatera Bagian Utara	Pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang belum sepenuhnya berfungsi. Pembangunan mencapai 22,079 Km dari total panjang jalan 43,167 Km (51,14%)	Peningkatan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi, jasa pendukung komoditas pertanian, serta outlet pemasaran		Mendorong ekspor produksi pertanian ke berbagai wilayah melalui Pelabuhan Teluk Tapang	Jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang belum sepenuhnya berfungsi		
	Mikro Sumatera Barat	PDRB Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,71%).	Pengembangan hilirisasi pertanian dengan industri pengolahan skala Usaha Kecil Menengah dan Mikro		Pemantapan hilirisasi pertanian dengan industri pengolahan skala Usaha Kecil Menengah dan Mikro	Sumber Daya Manusia pertanian yang produktif semakin berkurang dan keterbatasan kapasitas kelembagaan petani		
		Produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-5 terbesar di Pulau Sumatera, berada di bawah Provinsi Aceh. Produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menyumbang 2,38% produksi nasional dan produksi beras menyumbang 2,41% beras nasional (peringkat ke-11 nasional). Sekitar 89% perekonomian di Sumatera Barat ditopang oleh 600 ribu unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk didalamnya sektor pertanian						

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kontribusi PDRB Kabupaten Agam terhadap Provinsi Sumatera Barat 8,36 atau terbesar ke-2. Nilai PDRB sebesar Rp. 6.113.614 juta rupiah. Kontribusi PDRB Kabupaten Agam terbesar atas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,41%, dengan komoditi unggulan dari padi dan jagung					
		Terjadi penurunan produktivitas tanaman padi sawah di Kabupaten Agam sebesar 0,73 ha/ton	Pengembangan kawasan budi daya pertanian melalui mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis		Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Pemerintah Daerah sehingga tidak mudah dikonversi menjadi area penggunaan lain	Terjadi alih fungsi pertanian menjadi lahan non pertanian	
		Irigasi belum mampu menyediakan air dalam jumlah yang cukup hanya 67,06 % peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sstim Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi		Menciptakan sistem irigasi yang mampu menjamin produksi pertanian dan menjaga ketahanan panga	Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau petani pemakai air dalam pengelolaan air di saluran irigasi	

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

5.2.4 Isu Strategis Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

Pada sub bab ini akan menjelaskan perumusan isu strategis pada fokus daerah tertinggal melalui beberapa tahapan.

a. Peluang

- Pembangunan Kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar: Kep. Mentawai (RPJMN 2020-2024)
- Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas dan ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru mendukung pemerataan pembangunan (Kebijakan Penataan Ruang)
- Dukungan infrastruktur dalam ketahanan air meliputi penyediaan air baku untuk kawasan prioritas yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan terluar; pulau kecil terluar

b. Tantangan

- Pembangunan yang masih terkonsentrasi di Wilayah Utara dan Tengah Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi terhadap adanya ketimpangan pembangunan
- Infrastruktur dasar di Kabupaten Mentawai masih rendah
- Terdapat 25% jalan di Sumatera Barat dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat sebagai jalur utama penghubung antar wilayah
- Masih rendahnya tingkat pelayanan air minum (cakupan pelayanan PDAM 18,64%) tingkat kehilangan air masih tinggi 40,92%
- Rumah tangga dengan akses sanitasi layak 51,42%
- Rendahnya tingkat pelayanan persampahan dengan kondisi TPA open dumping

c. Potensi

- Provinsi Sumatera Barat didukung prasarana dan sarana transportasi yang memadai (Jalan Nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Internasional Teluk Bayur)
- Percepatan penanganan daerah tertinggal dengan meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar serta

aksesibilitas yang didukung dengan pengembangan potensi lokal yaitu sektor perikanan dan pariwisata

- Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Sumatera Barat guna mendukung pemerataan pembangunan
- Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah
- Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang

d. Kendala

- Konektivitas antar wilayah (khususnya antar pulau) perlu ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dapat meningkat
- Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan 3T dengan pelayanan infrastruktur dasar yang masih rendah

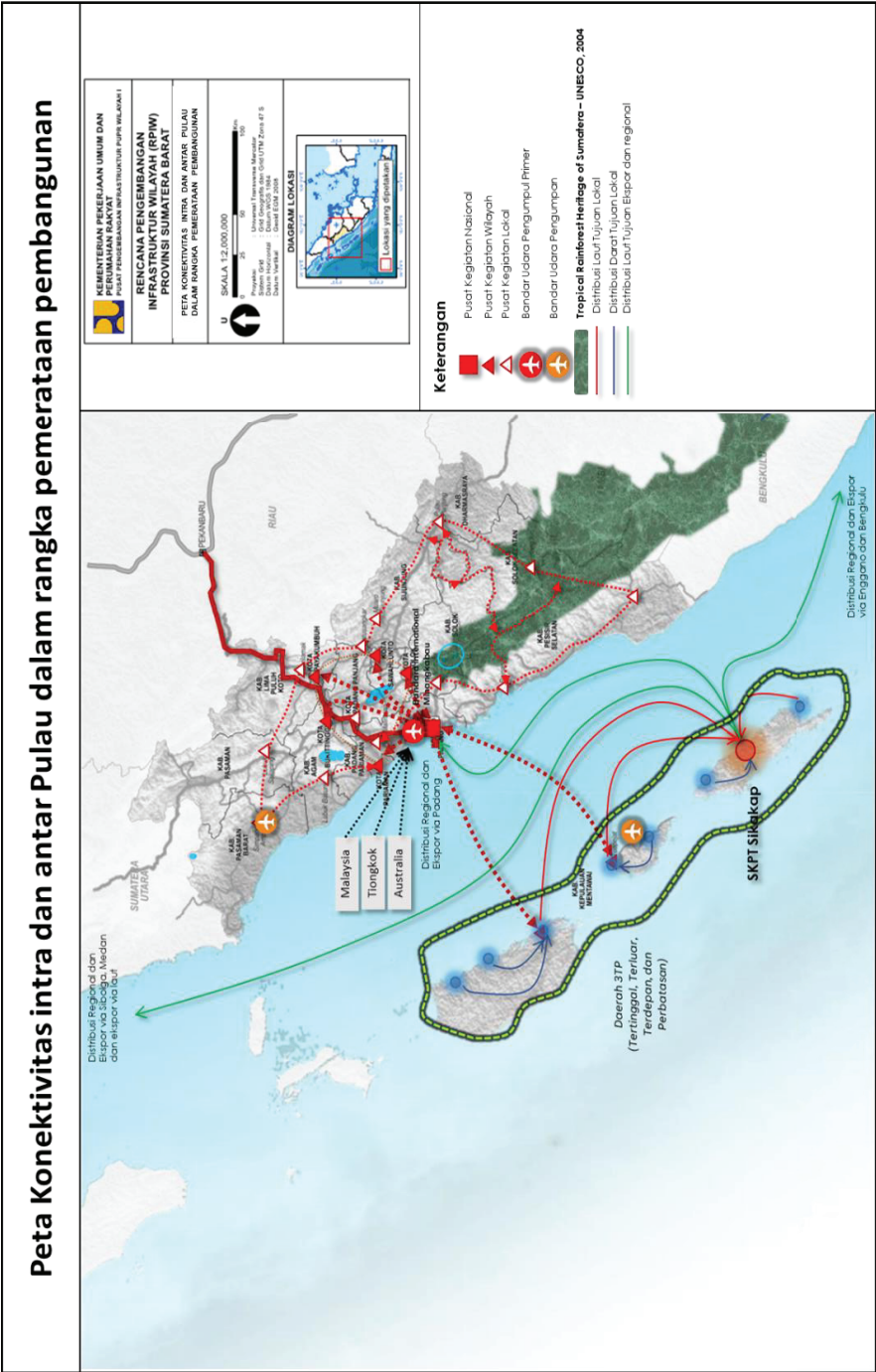
Tabel 5.4 Perumusan Isu Strategis Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Daerah Tertinggal	Makro: Nasional - Internasional	Amanat Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024	Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah 3T (Terdepan, Terluar Tertinggal), memiliki kategori IPM sedang dan masuk dalam kategori miskin ekstrem, sangat bergantung pada keterhubungan dengan Kota Padang (pusat interaksi kawasan)	Pembangunan Kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar: Kep. Mentawai (RPJMN 2020-2024)	Kawasan 3T Mentawai	Provinsi Sumatera Barat didukung prasarana dan sarana transportasi yang memadai (Jalan Nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Internasional Teluk Bayur)	Konektivitas antar wilayah (khususnya antar pulau) perlu ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dapat meningkat	Masih rendahnya konektivitas dan infrastruktur dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai
				Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas dan ditetapkan sebagai kawasan Andalan Nasional dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian		Percepatan penanaman daerah tertinggal dengan meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar serta aksesibilitas yang didukung dengan pengembangan potensi lokal yaitu sektor perikanan dan pariwisata		
				Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan		Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan		
	Meso: Sumatera	Tersedianya aksesibilitas dan	Pembangunan yang masih terkonsentrasi	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan				

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
	Bagian Utara	konektivitas yang memadai	di Wilayah Utara dan Tengah Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi terhadap adanya ketimpangan pembangunan	ekonomi baru mendukung pemerataan pembangunan (Kebijakan Penataan Ruang)		ekonomi baru di Provinsi Sumatera Barat guna mendukung pemerataan pembangunan	Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan 3T dengan pelayanan infrastruktur dasar yang masih rendah	
			Infrastruktur dasar di Kabupaten Mentawai masih rendah	Dukungan infrastruktur dalam ketahanan air meliputi penyediaan air baku untuk kawasan prioritas yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan terluar; pulau kecil terluar		Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah		
	Mikro: Sumatera Barat	Pemenuhan infrastruktur Dasar	Jalan lingkar Trans Mentawai belum tersambung, kemandapan jalan yaitumasih 60,98% Terdapat 25% jalan di Sumatera Barat dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat sebagai jalur utama penghubung antar wilayah	Pembangunan jalan Trans Mentawai (RPJMN) Pengembangan Wilayah V Kepulauan Mentawai termasuk Wilayah V atas Pembangunan Pariwisata KUPP Dusun Jati dan Mapadegat (Renstra Pariwisata Provinsi		Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang		

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
FOKUS	LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
				Sumatera Barat)				
			Masih rencahnya tingkat pelayanan air minum (cakupan pelayanan PDAM 18,64%) tingkat kehilangan air masih tinggi 40,92%	Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan di Pusat Pelayanan Lingkungan pusat-pusat lingkungan permukiman (dusun) serta kawasan wisata		Peningkatan infrastruktur dasar perkotaan		
			Rumah tangga dengan akses sanitasi layak 51,42%	Peningkatan akses sanitasi layak				
			Rendahnya tingkat pelayanan persampahan dengan kondisi TPA open dumping	Pengembangan sistem jaringan persampahan		Pengembangan Lokasi TPA menggunakan sistem Sanitary LandFill dan 3 R (reuse, reduce, dan recycle)		

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 5.2 Peta Konektivitas Intra dan antar Pulau dalam rangka Pemerataan Pembangunan
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 5.3 Peta Pembangunan, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Berkelanjutan



BAB 6

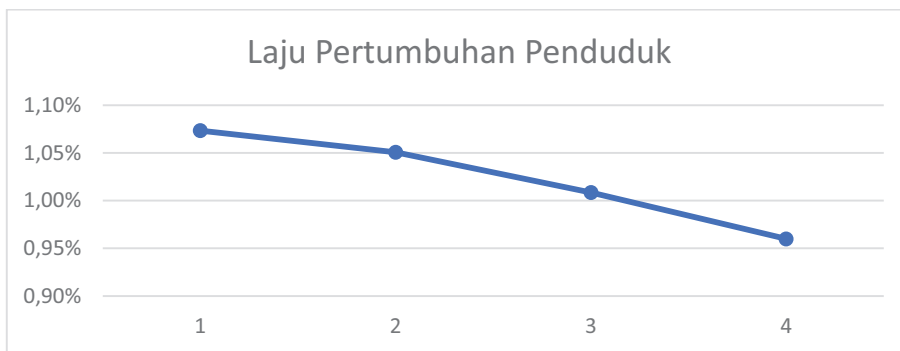
SKENARIO PEMBANGUNAN WILAYAH



6.1 Proyeksi Pertumbuhan

Proyeksi Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh adanya faktor migrasi dari luar daerah berpindah ke kawasan atau wilayah yang lebih berkembang. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2034 diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar 6.344.267 jiwa, wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Padang sebesar 1.132.708 jiwa, Kabupaten Pasaman Barat sebesar 569.028 jiwa dan Kabupaten Agam sebesar 545.286 jiwa penduduk.

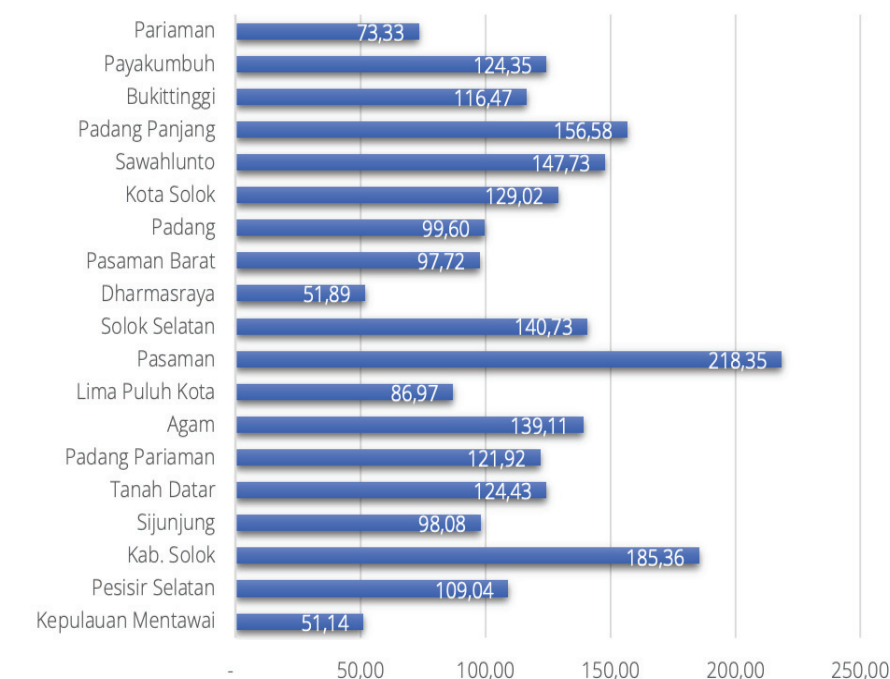


Gambar 6.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023, 2025, 2029 dan 2034

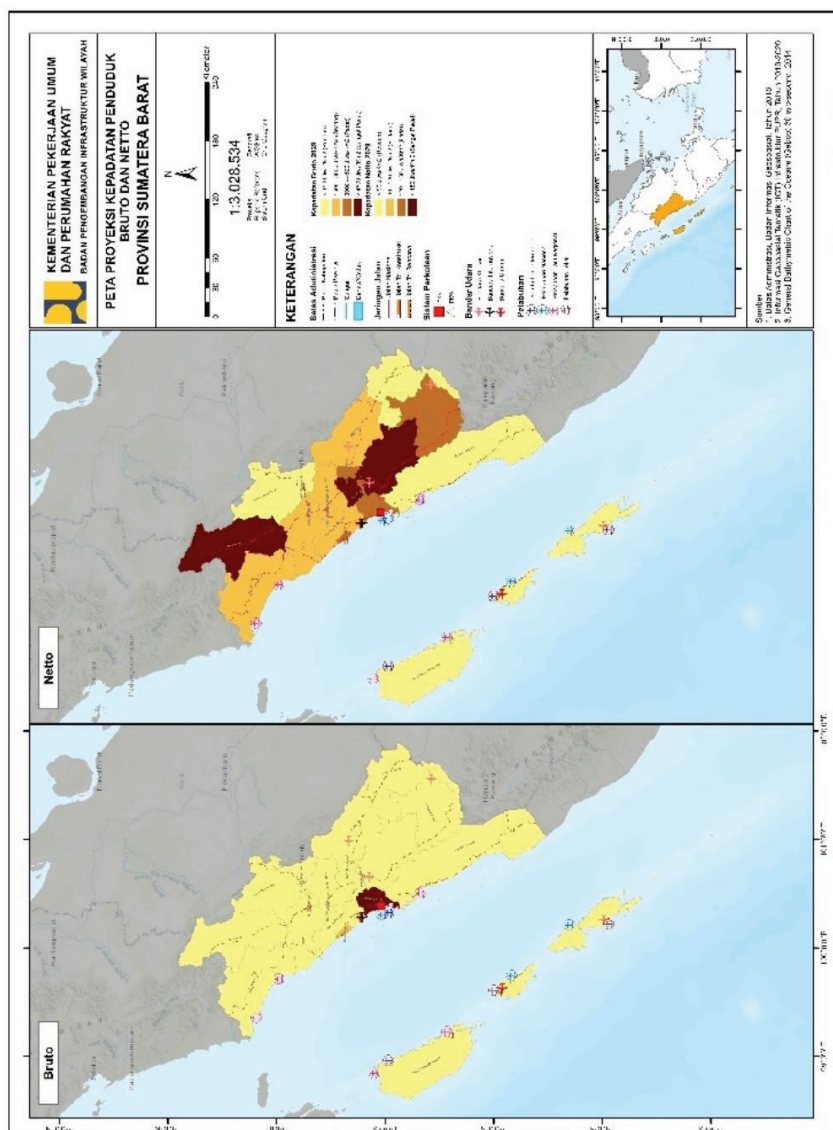
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 151 jiwa/Ha pada tahun 2034. Secara umum proyeksi kepadatan penduduk seluruh Kab/Kota tergolong hingga tahun 2032 pada kepadatan penduduk sedang (150-250 jiwa/Ha). Namun jika dilihat dari angka, maka kepadatan penduduk netto tertinggi berada di Kabupaten Pasaman dengan kepadatan penduduk sebesar 218 jiwa/Ha. Dari proyeksi grafik kepadatan berikut, Pasaman merupakan kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi.



Gambar 6.2 Grafik Kepadatan Penduduk tahun 2034
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 6.3 Peta Kepadatan Penduduk Bruto dan Netto Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kepulauan Mentawai	97066	98747	100429	102110	103792	105473	107155	108836	110518	112199	113881	115562	117244
Pesisir Selatan	474226	477660	481094	484529	487963	491397	494831	498266	501700	505134	508568	512003	515437
Kab.Solok	380712	383144	385577	388009	390442	392874	395307	397739	400172	402604	405037	407469	409902
Sijunjung	248524	252240	255956	259672	263388	267104	270820	274536	278252	281968	285684	289400	293116
Tanah Datar	350762	351610	352458	353306	354153	355001	355849	356697	357544	358392	359240	360088	360935
Padang Pariaman	422766	425150	427534	429919	432303	434687	437071	439456	441840	444224	446608	448993	451377
Agam	502083	505683	509283	512884	516484	520084	523684	527285	530885	534485	538085	541686	545286
Lima Puluh Kota	393296	396757	400218	403679	407140	410601	414062	417523	420984	424445	427906	431367	434828
Pasaman	289707	292539	295371	298203	301035	303867	306699	309531	312363	315195	318027	320859	323691
Solok Selatan	179534	182354	185174	187994	190813	193633	196453	199273	202092	204912	207732	210552	213371
Dharmasraya	265929	272046	278163	284280	290396	296513	302630	308747	314863	320980	327097	333214	339330
Pasaman Barat	468783	477137	485491	493845	502198	510552	518906	527260	535613	543967	552321	560675	569028
Padang	987436	999542	1011648	1023754	1035860	1047966	1060072	1072178	1084284	1096390	1108496	1120602	1132708
Kota Solok	74688	75914	77140	78366	79592	80818	82044	83270	84496	85722	86948	88174	89400
Sawahlunto	64278	64862	65447	66031	66616	67200	67785	68369	68954	69538	70123	70707	71292
Padang Panjang	55801	56503	57206	57908	58611	59313	60016	60718	61421	62123	62826	63528	64231
Bukittinggi	131957	133099	134241	135383	136525	137667	138809	139951	141093	142235	143377	144519	145661
Payakumbuh	141441	143380	145319	147258	149197	151136	153075	155014	156953	158892	160831	162770	164709
Pariaman	91345	92293	93241	94189	95137	96085	97033	97981	98929	99877	100825	101773	102721
Sumatera Barat	5.620.334	5.680.660	5.740.990	5.801.319	5.861.645	5.921.971	5.982.301	6.042.630	6.102.956	6.163.282	6.223.612	6.283.941	6.344.267

Tabel 6.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	PDRB	Laju Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kabupaten										
1	Kep. Mentawai									
		2,89	3.137.540,52	3.236.561,30	3.338.707,18	3.444.076,78	3.552.771,84	3.664.897,32	3.780.561,48	3.899.876,00
2	Pesisir Selatan									
		3,37	10.138.308,91	10.498.624,41	10.871.745,52	11.258.127,35	11.658.241,20	12.072.575,09	12.501.634,41	12.945.942,50
3	Solok									
		3,32	10.479.075,48	10.851.082,66	11.236.296,10	11.635.184,61	12.048.233,66	12.475.945,96	12.918.842,04	13.377.460,93
4	Sijunjung									
		3,15	7.130.202,40	7.375.338,76	7.628.902,90	7.891.184,58	8.162.483,51	8.443.109,69	8.733.383,80	9.033.637,54
5	Tanah Datar									
		3,30	10.233.446,90	10.587.728,83	10.954.276,00	11.333.513,03	11.725.879,25	12.131.829,19	12.551.833,12	12.986.377,58
6	Padang Pariaman									
		2,18	12.325.262,89	12.451.966,59	12.579.972,81	12.709.294,93	12.839.946,48	12.971.941,13	13.105.292,69	13.240.015,10
7	Agam									
		3,70	15.470.159,91	16.019.659,99	16.588.678,32	17.177.908,17	17.788.067,47	18.419.899,63	19.074.174,46	19.751.689,14
8	Lima Puluh Kota									
		3,33	11.837.246,65	12.258.415,89	12.694.570,32	13.146.243,13	13.613.986,47	14.098.372,10	14.599.992,18	15.119.459,90
9	Pasaman									
		3,39	6.549.973,92	6.777.520,01	7.012.971,06	7.256.601,67	7.508.696,02	7.769.548,12	8.039.462,22	8.318.753,14
10	Solok Selatan									
		3,35	4.198.512,50	4.342.269,57	4.490.948,88	4.644.718,97	4.803.754,15	4.968.234,69	5.138.347,05	5.314.284,05
11	Dharmasraya									
		3,42	7.982.465,55	8.264.889,32	8.557.301,11	8.860.058,42	9.173.527,29	9.498.086,68	9.834.128,99	10.182.060,47
12	Pasaman Barat									
		3,75	12.089.009,38	12.509.948,68	12.945.545,10	13.396.308,98	13.862.768,46	14.345.470,05	14.844.979,32	15.361.881,50
Kota										
1	Padang									
		3,66	47.012.651,73	48.867.770,96	50.796.093,21	52.800.507,04	54.884.015,05	57.049.738,28	59.300.920,96	61.640.935,30
2	Solok									
		3,56	3.048.662,12	3.164.755,17	3.285.269,05	3.410.372,10	3.540.239,06	3.675.051,37	3.814.997,32	3.960.272,42
3	Sawahlunto									
		2,49	2.930.153,66	3.034.291,32	3.142.150,03	3.253.801,34	3.369.441,44	3.489.191,38	3.613.197,25	3.741.610,28
4	Padang Panjang									
		3,46	2.731.989,45	2.836.296,81	2.944.586,62	3.057.010,94	3.173.727,61	3.294.900,54	3.420.699,84	3.551.302,16
5	Bukittinggi									
		3,61	6.511.024,44	6.768.730,78	7.036.637,15	7.315.147,25	7.604.680,77	7.905.674,04	8.218.580,62	8.543.872,04
6	Payakumbuh									
		3,58	4.754.438,28	4.944.235,46	5.141.609,34	5.346.862,38	5.560.309,13	5.782.276,67	6.013.105,16	6.253.148,31
7	Pariaman									
		3,53	3.806.065,91	3.947.575,44	4.094.346,30	4.246.574,09	4.404.461,72	4.568.219,60	4.738.066,01	4.914.227,30
Sumatera Barat		3,29	182.015.534,54	182.251.666,61	188.491.963,68	194.945.928,51	201.620.877,10	208.524.375,94	215.664.250,57	223.048.594,51

Tabel 6.3 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	PDRB	Laju Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kabupaten									
1	Kep. Mentawai	2,89	3.129.450,00	3.219.891,11	3.312.945,96	3.408.690,10	3.507.201,24	3.608.559,36	3.712.846,72	3.820.147,99
2	Pesisir Selatan	3,37	10.120.294,65	10.461.348,58	10.813.896,02	11.178.324,32	11.555.033,85	11.944.438,49	12.346.966,07	12.763.058,82
3	Solok	3,32	10.455.799,89	10.802.932,45	11.161.589,81	11.532.154,59	11.915.022,12	12.310.600,86	12.719.312,80	13.141.593,99
4	Sijunjung	3,15	7.110.349,94	7.334.325,97	7.565.357,23	7.803.665,99	8.049.481,46	8.303.040,13	8.564.585,89	8.834.370,35
5	Tanah Datar	3,30	10.217.423,44	10.554.598,42	10.902.900,16	11.262.695,87	11.634.364,83	12.018.298,87	12.414.902,74	12.824.594,53
6	Padang Pariaman	2,18	12.465.805,15	12.737.559,70	13.015.238,50	13.298.970,70	13.588.888,26	13.885.126,02	14.187.821,77	14.497.116,29
7	Agam	3,70	15.492.270,39	16.065.484,39	16.659.907,31	17.276.323,88	17.915.547,87	18.578.423,14	19.265.824,80	19.978.660,31
8	Lima Puluh Kota	3,33	11.811.185,00	12.204.497,46	12.610.907,23	13.030.850,44	13.464.777,76	13.913.154,86	14.376.462,91	14.855.199,13
9	Pasaman	3,39	6.544.656,66	6.766.520,53	6.995.905,57	7.233.066,77	7.478.267,73	7.731.781,01	7.993.888,39	8.264.881,20
10	Solok Selatan	3,35	4.195.508,46	4.336.058,00	4.481.315,94	4.631.440,02	4.786.593,26	4.946.944,14	5.112.666,77	5.283.941,10
11	Dharmasraya	3,42	7.973.372,10	8.246.061,43	8.528.076,73	8.813.736,95	9.121.371,96	9.433.322,88	9.755.942,52	10.089.595,75
12	Pasaman Barat	3,75	12.120.317,76	12.574.829,68	13.046.385,79	13.535.625,26	14.043.211,21	14.569.831,63	15.116.200,31	15.683.057,83
	Kota									
1	Padang	3,66	46.883.299,77	48.599.228,54	50.377.960,31	52.221.793,65	54.133.111,30	56.114.383,17	58.168.169,60	60.297.124,61
2	Solok	3,56	3.041.378,79	3.149.651,87	3.261.779,48	3.377.898,83	3.498.152,03	3.622.686,24	3.751.653,87	3.885.212,75
3	Sawahlunto	2,49	2.900.046,82	2.972.257,99	3.046.267,21	3.122.119,27	3.199.860,03	3.279.536,55	3.361.197,01	3.444.890,82
4	Padang Panjang	3,46	2.722.568,62	2.816.769,49	2.914.229,71	3.015.062,06	3.119.383,21	3.227.313,87	3.338.978,93	3.454.507,60
5	Bukittinggi	3,61	6.489.228,74	6.723.489,90	6.966.207,89	7.217.687,99	7.478.246,53	7.748.211,23	8.027.921,65	8.317.729,63

Kabupaten/Kota	PDRB	Laju Pertumbuhan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6 Payakumbuh	4.571.926,96	3,58	4.735.601,95	4.905.136,49	5.080.740,38	5.262.630,89	5.451.033,07	5.646.180,06	5.848.313,30	6.057.682,92
7 Pariaman	3.669.629,10	3,53	3.799.167,01	3.933.277,60	4.072.122,30	4.215.868,22	4.364.688,37	4.518.761,87	4.678.274,16	4.843.417,24
Sumatera Barat	176.217.963,54	3,29	3,29	182.015.534,54	188.003.845,63	194.189.172,15	200.577.995,91	207.177.011,98	213.993.135,67	221.033.509,83

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

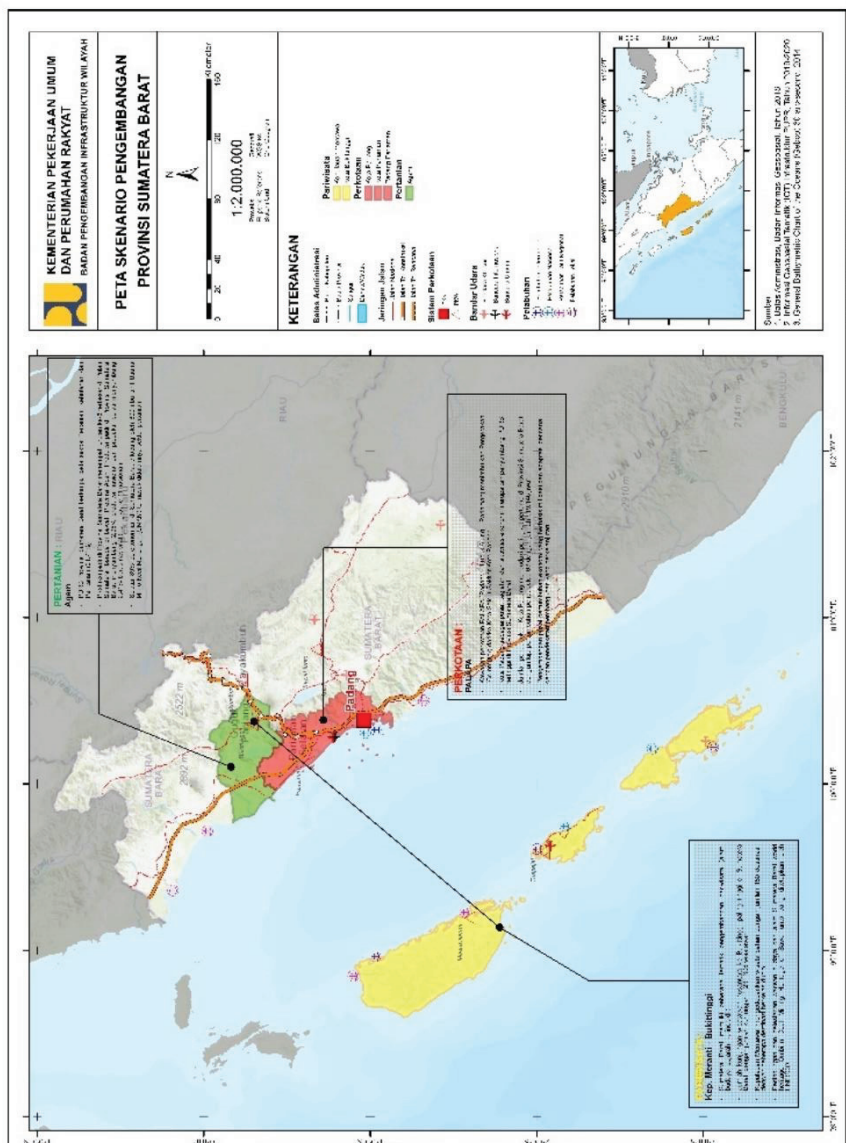
6.2 Visi dan Strategi

Visi dan strategi memberikan gambaran wilayah yang diharapkan pada masa yang akan datang dan pendekatan yang diperlukan dalam mewujudkannya. pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2034 menjadi dasar perumusan Kawasan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, penetapan visi menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 7 (tujuh) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Barat. Adapun visi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2034, yaitu: “Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Penguatan Kawasan Metropolitan Serta Pengembangan Pariwisata, Pertanian & Industri Kreatif Berbasis Lingkungan dan Mitigasi Bencana”.

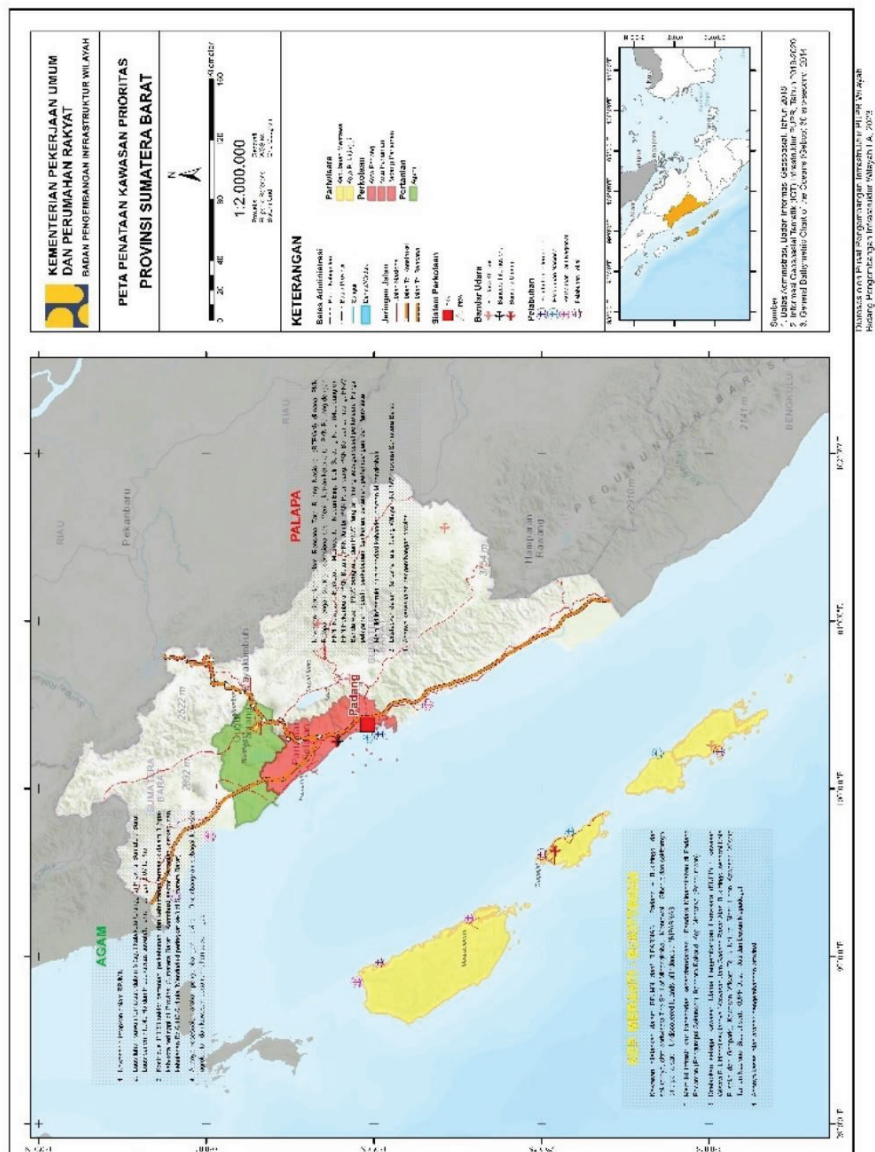
Strategi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur perkotaan
2. Sektor pariwisata yang mendukung ekonomi lokal, antara lain di DPP, DPN dan KSPN
3. Sektor industri berbasis Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah
4. Sektor Pertanian yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur menuju kedaulatan pangan
5. Pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan-keamanan negara pada daerah tertinggal, baik di Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Pemenuhan pelayanan infrastruktur PUPR: SDA, Bina Marga, CK, Perumahan

6.3 Skenario Pengembangan



Gambar 6.4 Peta Skenario Pengembangan Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 6.5 Peta Penataan Kawasan Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

6.3.1 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Perkotaan

Dalam merumuskan skenario pengembangan fokus perkotaan digunakan tahapan analisis, yaitu: analisis PESTLE, *porter's five forces*, EFAS-IFAS, *grand strategy*, dan *strategy*. Analisis PESTLE merupakan kerangka yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor kunci (berupa *political, economic, sociological, technological, legal*, dan *environmental*) yang mempengaruhi suatu wilayah dari sisi luar (eksternal) yang berdampak pada strategi dan keputusan pengembangan ke depan. Analisis PESTLE fokus perkotaan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Tabel 6.4 Analisis Pestle Fokus Perkotaan

	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Penetapan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA) sebagai PKN oleh pemerintah disertai dengan dukungan infrastruktur skala lokal, regional, dan nasional	Terjadi perbedaan prioritas pembangunan karena kawasan PALAPA ditangani oleh beberapa stakeholder dari Kota Padang, Kab Padang Pariaman, dan Kota Pariaman	5	26,3%
ECONOMIC	Kontribusi PDRB Kota Padang terhadap Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat 1 dengan Rp. 72.961.651.230.000 dan jumlah terbesar dari sektor perdagangan, Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat sebagai salah satu pusat ekonomi di bagian Barat Pulau Sumatera	Terjadi ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat karena adanya gap PDRB Perkapita antar Kab/Kota	4	21,1%
SOCIOLOGICAL	Peningkatan kualitas hidup penduduk melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosial, pendidikan, dan lainnya	Ketimpangan wilayah terutama di wilayah Selatan yang relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah tengah dan Utara Provinsi Sumatera Barat	1	5,3%
TECHNOLOGICAL	Pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendorong produktivitas pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan	Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi yang belum merata	3	15,8%
LEGAL	Penetapan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA) sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Prioritas pembangunan dan kemungkinan adanya arahan revisi kebijakan dapat mempengaruhi pengembangan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA)	4	21,1%

	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
ENVIRONMENT	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan	Secara geografis, Kota Padang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera, dengan Indeks risiko bencana multi ancaman tinggi	2	10,5%
			19	100,0%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Analisis Selanjutnya yang digunakan adalah *porter's five forces*. Analisis *porter's five forces* adalah sebuah metode yang menganalisa dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis, biasa digunakan untuk mengidentifikasi struktur industri dalam menentukan strategi. Analisis *porter's five forces* pada fokus perkotaan sebagai berikut.

Tabel 6.5 Analisis *Porter's Five Forces* Fokus Perkotaan

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR				
Konversi Threat Menjadi Opportunity	2	20%	Pendekatan logistik terpadu melibatkan pengintegrasian berbagai komponen distribusi, termasuk transportasi, pergudangan, manajemen inventaris, dan teknologi informasi. Dengan membangun sistem logistik terpadu yang efisien dan terkoordinasi, tantangan kualitas jalan dan kondisi geografis wilayah dapat diatasi.	Adanya tumpukan atau antrian barang di Pelabuhan Teluk Bayur
Kualitas Yang Diinginkan	3	30%	Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan di KPN PALAPA yang memadai	Prioritas indikasi program pembangunan berdasarkan dokumen kebijakan terbatas pada tahun pembangunan tertentu
Inovasi	5	50%	Pengembangan jaringan infrastruktur khususnya jaringan transportasi darat (jalan tol dan nasional) berpotensi meningkatkan interaksi antar wilayah internal maupun eksternal	Secara lokasi geografis perkotaan PALAPA tidak berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama yang ada di Pulau Sumatera
SUB TOTAL	10	100%		
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS				
Sensitivitas Target	2	22%	Meningkatkan Super Hub Kawasan antar wilayah didukung prasarana dan sarana transportasi yang memadai	Kesepakatan MoU Strategi dan Kerjasama untuk Percepatan perwujudan Kawasan Metropolitan Palapa
Trend Eksisting	5	56%	Provinsi Sumatera Barat memiliki simpul utama berskala regional di Perkotaan Palapa berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau sebagai penghubung dengan wilayah eksternal	Tingkat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan tempat tinggal mendorong terjadinya pemukiman tidak terkendali atau Urban Sprawl
Penciptaan Nilai	2	22%	Menciptakan Kawasan Perkotaan PALAPA yang berkualitas dan berkarakter dengan tetap mempertahankan keunikan dan kekhasan daerah	Dimungkinkan adanya penurunan nilai karena adanya trend masa kini
SUB TOTAL	9	100%		
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS				

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
Ketergantungan Saat ini	4	57%	Kebijakan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah secara nasional	Transportasi jalan berperan besar dalam mendukung perdagangan antar wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah sekitarnya
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	1	14%	Kota Padang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kota Baru (pendekatan Resilient City) yang mandiri dan terpadu di wilayah Sumatera	Pembangunan Kota Padang menjadi recilieny city dapat berdampak pada urbanisasi dan laju pertumbuhan penduduk meningkat
Daya Dukung Eksisting	2	29%	Kota Padang sebagai Akses Utama Menuju Destinasi Pariwisata Sumatera Barat dengan Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai Gerbang Utama Pariwisata Sumatera Barat	pesaing yang sudah ada semakin meningkat, Provinsi Sumatera Barat harus siap menghadapi ancaman penurunan pangsa pasar atau kehilangan keunggulan kompetitif. Provinsi tersebut perlu memastikan bahwa mereka tetap inovatif dan responsif terhadap perubahan pasar untuk menghindari ancaman tersebut.
SUB TOTAL	7	100%		
THREAT OF NEW ENTRANTS				
Tantangan Yang Dihadapi	5	42%	Kota Padang sebagai Jalur Utama Distribusi Logistik Sumatera Barat dan berpotensi mendukung kerjasama regional IMS - GT dan IMT - GT	Perkembangan kawasan perkotaan dengan tingginya pergerakan dan sebagai pusat aktivitas perekonomian menjadi permasalahan yang hampir terjadi pada wilayah aglomerasi di Indonesia
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	3	25%	Menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur di Kawasan Perkotaan PALAPA	Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong budaya inovasi, mengembangkan kemitraan strategis, dan berinvestasi dalam riset dan pengembangan guna mempertahankan daya saing
Ancaman Terhadap Legacy	4	33%	Mengembangkan strategi jangka panjang pada dokumen rencana terkait untuk memastikan pembangunan dan pengembangan Perkotaan PALAPA	Prioritas pembangunan dan kemungkinan adanya arahan revisi kebijakan dapat mempengaruhi pengembangan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA)
SUB TOTAL	12	100%		
THREAT OF SUBSTITUTES				
Trend Analisis PESTLE	5	63%	Penetapan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA) sebagai PKN oleh pemerintah disertai dengan dukungan infrastruktur skala lokal, regional, dan nasional	Terjadi perbedaan prioritas pembangunan karena kawasan PALAPA ditangani oleh beberapa stakeholder dari Kota Padang, Kab Padang Pariaman, dan Kota Pariaman
Trend Yang Mengganggu Kebijakan	1	13%	Penetapan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA) sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Prioritas pembangunan dan kemungkinan adanya arahan revisi kebijakan dapat mempengaruhi pengembangan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA)
Peralihan Cost	2	25%	Persaingan antara pesaing yang sudah ada dapat mendorong Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi lebih inovatif. Provinsi tersebut dapat mengembangkan solusi baru, teknologi baru, atau pendekatan baru yang memberikan keunggulan kompetitif dan menarik minat pelanggan atau pengguna.	Kemungkinan adanya revisi anggaran sehingga terjadi peralihan program prioritas
SUB TOTAL	8	100%		

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Setelah melakukan analisis PESTLE dan porter's five forces tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS). Analisis selanjutnya digambarkan dalam bentuk diagram SWOT sesuai dengan hasil kuadran yang didapatkan.

Tabel 6.6 Pembobotan IFAS Sektor Perkotaan

FAKTOR EKSTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	1 Kawasan perkotaan PALAPA (Padang - Lubuk Alung - Pariaman) menimbulkan Pergerakan (Commuter) dari/ke Kota Satelit Sekitar Kota Padang	3	0,30	3	0,90
	2 Kota Padang sebagai pusat kegiatan dan aktivitas ekonomi merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Sumatera Barat	3	0,30	3	0,90
	3 Jumlah penduduk di Kota Padang menduduki peringkat pertama di Provinsi Sumatera Barat dengan laju pertumbuhan penduduk 0,63 dengan jumlah 919.145 jiwa	2	0,20	2	0,40
	4 Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan	2	0,20	3	0,60
SUB TOTAL		10			2,80
WEAKNESS	1 Kawasan perkotaan meningkatkan tingkat urbanisasi, tingginya kepadatan penduduk yang memicu tumbuhnya kawasan kumuh, kemacetan dan degradasi lingkungan serta tingkat layanan infrastruktur yang belum maksimal (air bersih, air limbah, persampahan)	3	0,27	-2	-0,55
	2 Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan	2	0,18	-2	-0,36
	3 Terjadinya urban sprawl di Kawasan Metropolitan PALAPA	3	0,27	-2	-0,55
	4 Limitasi pembangunan akibat masuk ke dalam daerah rawan bencana & penetapan Kawasan Lindung serta dampak tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi	3	0,27	-2	-0,55
SUB TOTAL		11			-2,00
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL					0,80

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

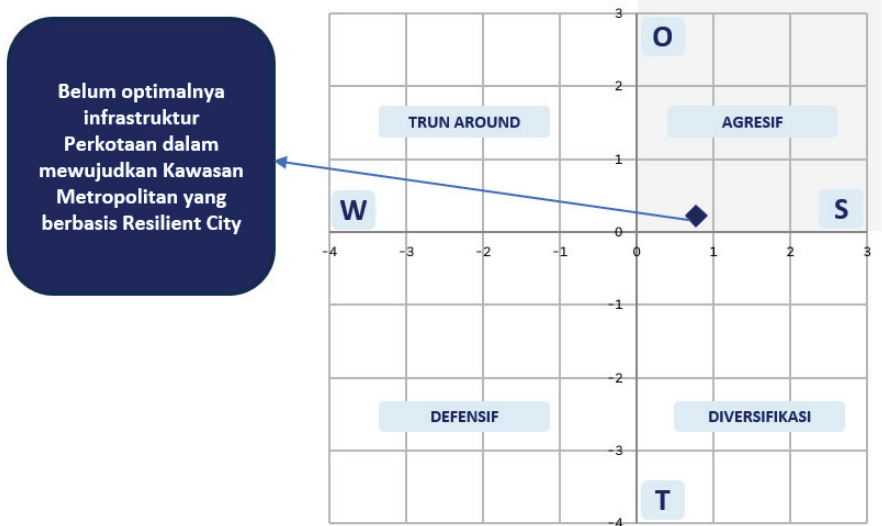
Tabel 6.7 Pembobotan EFAS Sektor Perkotaan

FAKTOR EKSTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1 Pengembangan jaringan infrastruktur khususnya jaringan transportasi darat (jalan tol dan nasional) berpotensi meningkatkan interaksi antar wilayah internal maupun eksternal	3	0,21	3	0,64
	2 Provinsi Sumatera Barat memiliki simpul utama berskala regional di Perkotaan Palapa berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau sebagai penghubung dengan wilayah eksternal	3	0,21	3	0,64
	3 Kebijakan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah secara nasional	3	0,21	2	0,43
	4 Kota Padang sebagai Jalur Utama Distribusi Logistik Sumatera Barat dan berpotensi mendukung kerjasama regional IMS - GT dan IMT - GT	2	0,14	2	0,29

FAKTOR EKSTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	5 Penetapan Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (PALAPA) sebagai PKN oleh pemerintah disertai dengan dukungan infrastruktur skala lokal, regional, dan nasional	3	0,21	2	0,43
SUB TOTAL		14	1,00		2,43
THREAT	1 Secara lokasi geografis perkotaan PALAPA tidak berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama yang ada di Pulau Sumatera	3	0,23	-3	-0,7
	2 Tingkat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan tempat tinggal mendorong terjadinya pemukiman tidak terkendali atau Urban Sprawl	3	0,23	-2	-0,5
	3 Transportasi jalan berperan besar dalam mendukung perdagangan antar wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah sekitarnya	3	0,23	-2	-0,5
	4 Perkembangan kawasan perkotaan dengan tingginya pergerakan dan sebagai pusat aktivitas perekonomian menjadi permasalahan yang hampir terjadi pada wilayah aglomerasi di Indonesia	2	0,15	-2	-0,3
	5 Terjadi perbedaan prioritas pembangunan karena kawasan PALAPA ditangani oleh beberapa stakeholder dari Kota Padang, Kab Padang Pariaman, dan Kota Parimanan	2	0,15	-2	-0,3
SUB TOTAL		13			-2,23
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL					0,20

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus perkotaan berada pada kuadran agresif.



Gambar 6.6 Analisis SWOT Kawasan Perkotaan
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berdasarkan diagram SWOT Industrialisasi, Provinsi Sumatera Barat berada pada kuadran I. Strategi yang dapat diterapkan pada kuadran I adalah agresif. Perumusan strategi dilakukan dengan menerpadukan unsur kekuatan (*strength*), dan peluang (*opportunity*). Isu Strategis: Belum optimalnya infrastruktur Perkotaan dalam mewujudkan Kawasan Metropolitan yang Kompak berbasis *Resilient City*. Adapun strategi dalam mewujudkan isu strategis sebagai berikut:

S2,S3-O1,O3

Pemenuhan **infrastruktur dasar** dalam mendukung Kawasan Megapolitan Palapa

S1,S2-O1,O2,O3,O4

Optimalisasi simpul dan jaringan transportasi sebagai upaya penguatan **konektivitas** antara pusat Metropolitan Kota Padang dan Kota Satelitnya

S3,S4-O5

Mendorong pengembangan Kawasan perkotaan Palapa dengan Konsep **Resilient City** yang memperhatikan mitigasi, adaptasi, dan respons terhadap bencana

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

6.3.2 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Pariwisata

Dalam merumuskan skenario pengembangan fokus pariwisata digunakan tahapan analisis, yaitu: analisis PESTLE, *porter's five forces*, EFAS-IFAS, *grand strategy*, dan *strategy*. Analisis PESTLE merupakan kerangka yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor kunci (berupa *political, economic, sociological, technological, legal*, dan *environmental*) yang mempengaruhi suatu wilayah dari sisi luar (eksternal) yang berdampak pada strategi dan keputusan pengembangan ke depan. Analisis PESTLE fokus pariwisata Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Tabel 6.8 Analisis Pestle Fokus Pariwisata

	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Nasional di Sumatera Barat didukung oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan tematik dan citra kawasan wisata	Belum ada koordinasi keterpaduan pengembangan antar tematik pariwisata di Sumatera Barat	5	23,8%
ECONOMIC	Destinasi pariwisata di Sumatera Barat beragam dan beberapa berkelas duna sehingga dapat ditetapkan tematik wisata untuk menarik minat wisatawan dan investor	Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemiliki modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif	3	14,3%
SOCIOLOGICAL	Keterlibatan masyarakat daerah disertai dengan peningkatan SDM dalam mengelola pariwisata	Koordinasi Lintas Sektor (Lembaga) belum menyatu. Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak antara pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, dan masyarakat di objek wisata.	4	19,0%
TECHNOLOGICAL	Kemajuan di bidang teknologi informasi, yang memungkinkan calon wisatawan memperoleh akses informasi terkini mengenai keanekaragaman destinasi	Mapping destinasi (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) untuk penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata	3	14,3%
LEGAL	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Nasional dalam RPJMN dan RIPARNAS	Perkembangan implementasi tata pemerintahan yang baik (good governance) memberikan ruang bagi perbaikan sistem manajemen pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata baik antar sektor, antar instansi, antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan	2	9,5%
ENVIRONMENT	Kekayaan alam dan budaya yang melimpah mampu menjadikan keragaman dan keunikan daya tarik alam dan budaya sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan	Aktivitas wisatawan yang masif dapat berdampak terhadap degradasi lingkungan	4	19,0%
			21	100,0%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Analisis Selanjutnya yang digunakan adalah *porter's five forces*. Analisis *porter's five forces* adalah sebuah metode yang menganalisa dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis, biasa digunakan untuk mengidentifikasi struktur industri dalam menentukan strategi. Analisis *porter's five forces* pada fokus pariwisata sebagai berikut.

Tabel 6.9 Analisis *Porter's Five Forces* Fokus Pariwisata

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR				
Konversi Threat Menjadi Opportunity	2	25%	Jumlah wisatawan asing terbanyak berasal Malaysia sebanyak 46.730 jiwa (tahun 2019)	Adanya persaingan destinasi wisata dengan Provinsi atau daerah lainnya

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
Kualitas Yang Diinginkan	2	25%	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan sarana prasarana penunjang dan transportasi	Destinasi wisata belum banyak dikenali, sehingga integrasi transportasi masih berfokus kepada kawasan perkotaan
Inovasi	4	50%	Potensi pariwisata berbasis sumber daya lokal dengan dukungan infrastruktur pada beberapa wilayah menimbulkan daya tarik bagi kawasan eksternal maupun internasional	Persaingan antar wilayah untuk memajukan potensi pariwisata sebagai penggerak ekonomi wilayah
SUB TOTAL	8	100%		
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS				
Sensitivitas Target	2	22%	Meningkatkan kunjungan wisata melalui pengembangan atau branding dari digital platform dan didukung dengan UMKM lokal	Keterbatasan dalam membuat digital platform sehingga destinasi wisata kurang diketahui masyarakat luas
Trend Eksisting	5	56%	Potensi perdagangan menjadi magnet pariwisata di Bukittinggi dapat dipadukan dengan aktivitas pariwisata	Potensi industri kreatif sebagai nilai tambah pengembangan pariwisata perlu dikembangkan (inovasi masih rendah)
Penciptaan Nilai	2	22%	Menciptakan nilai tambah wisata di Sumatera Barat melalui kekhasan dan pengembangan produk lokal	Keterbatasan pengembangan produk yang memiliki kekhasan khusus dan bernilai jual tinggi
SUB TOTAL	9	100%		
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS				
Ketergantungan Saat ini	5	63%	Pergerakan utama masyarakat khususnya dalam satu pulau kecenderungan menggunakan moda transportasi darat dapat meningkatkan aksesibilitas yang didukung rencana pembangunan jalan tol	Belum terintegrasi/belum ada keterkaitan yang kuat antar Kawasan Pariwisata serta masih bersifat sektoral (konektivitas)
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	1	13%	Meningkatkan kualifikasi dan keahlian penyedia layanan pariwisata lokal	Kurangnya tenaga kerja yang memadai untuk mendukung layanan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat
Daya Dukung Eksisting	2	25%	Kondisi geografis Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik perbukitan (Bukit Barisan) membutuhkan konektivitas jaringan dalam rangka efisiensi komoditas unggulan wilayah	Sumatera Barat khususnya Kota Padang memiliki indeks bencana multi ancaman 179.03
SUB TOTAL	8	100%		
THREAT OF NEW ENTRANTS				
Tantangan Yang Dihadapi	5	50%	Perkembangan IT mempermudah keterbukaan informasi sebagai media promosi terkait dengan persaingan antar destinasi pariwisata dan industri kreatif	Belum maksimalnya sarana, prasarana wisata serta fasilitas pendukung kepariwisataan sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	2	20%	mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi tantangan tersebut, seperti meningkatkan koordinasi antar-pihak terkait, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan mengembangkan program-program integrasi pariwisata yang berkelanjutan	penurunan daya saing dan kehilangan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Ancaman Terhadap Legacy	3	30%	Secara geografis Provinsi Sumatera barat memiliki keindahan alam, kebudayaan, dan kuliner, dan mengembangkan program-program promosi yang menarik untuk menarik wisatawan. Provinsi Sumatera Utara juga dapat membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan.	Dampak pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi
SUB TOTAL	10	100%		
THREAT OF SUBSTITUTES				
Trend Analisis PESTLE	5	56%	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Nasional di Sumatera Barat didukung oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan tematik dan citra kawasan wisata	Aktivitas wisatawan yang masif dapat berdampak terhadap degradasi lingkungan
Trend Yang Mengganggu Kebijakan	2	22%	Upaya adaptif terhadap perubahan yang terjadi, misalnya ketika pandemi Covid terjadi, ada tren	Tren yang tidak terkendali bisa berdampak memperburuk keadaan/pandemi yang terjadi.

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
			pemulihan aktivitas pariwisata namun kurang sejalan dengan kebijakan pengendalian pandemi sehingga ada peluang untuk adaptif terhadap kondisi yang ada.	
Peralihan Cost	2	22%	Peluang pembiayaan dengan dana non-pemerintah	Perlambatan pengembangan dan pengelolaan akibat pendanaan yang terbatas
SUB TOTAL	9	100%		

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Setelah melakukan analisis PESTLE dan porter’s five forces tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS). Analisis selanjutnya digambarkan dalam bentuk diagram SWOT sesuai dengan hasil kuadran yang didapatkan.

Tabel 6.10 Pembobotan IFAS Sektor Pariwisata

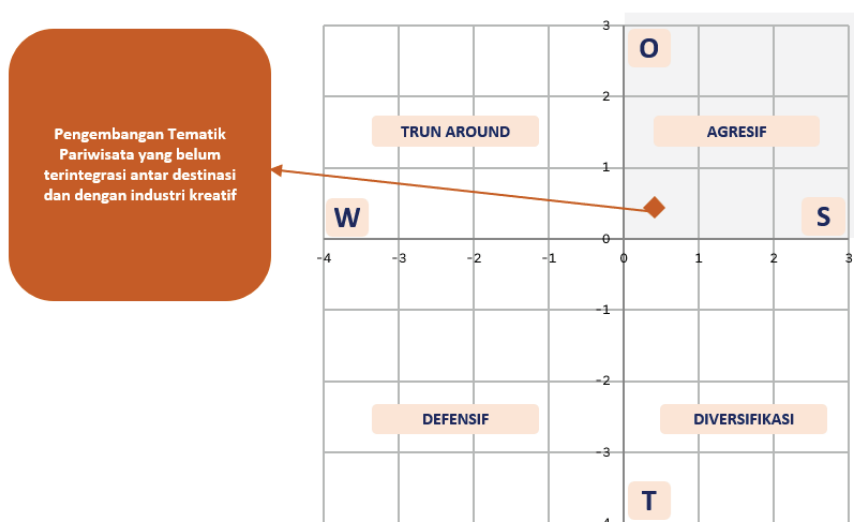
FAKTOR INTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGHT	1 Sumatera Barat memiliki beberapa tematik pengembangan pariwisata (alam, budaya, sejarah, kuliner, dll)	3	0,27	2	0,55
	2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Bukittinggi paling tinggi di Sumatera Barat, dengan jumlah kunjungan 1.231.306 wisatawan	2	0,18	3	0,55
	3 Mengdepankan destinasi wisata sejarah dan budaya Minang Diantaranya : Kerajaan Pagaruyung, Padangsche Spaarbank, danlainnya	3	0,27	3	0,82
	4 Perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam Sumatera Barat world heritage Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto yang ditetapkan oleh UNESCO	3	0,27	3	0,82
SUB TOTAL		11			2,73
WEAKNESS	1 Tematik Destinasi wisata Sumatera Barat masih belum terintegrasi	3	0,30	-3	-0,90
	2 Industri Kreatif Sumatera Barat belum optimal dalam mendukung pariwisata	2	0,20	-2	-0,40
	3 Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	3	0,30	-2	-0,60
	4 Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan 3T dengan pelayanan infrastruktur dasar yang masih rendah	2	0,20	-2	-0,40
SUB TOTAL		10			-2,30
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL					0,43

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 6.11 Pembobotan EFAS Sektor Pariwisata

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
O P P O R T U N I T I E S	1	Potensi pariwisata berbasis sumber daya lokal dengan dukungan infrastruktur pada beberapa wilayah menimbulkan daya tarik bagi kawasan eksternal maupun internasional	3	0,21	3	0,64
	2	Potensi perdagangan menjadi magnet pariwisata khususnya di Kota Padang dan Bukittinggi dapat dipadukan dengan aktivitas pariwisata	2	0,14	2	0,29
	3	Pergerakan utama masyarakat khususnya dalam satu pulau kecenderungan menggunakan moda transportasi darat dapat meningkatkan aksesibilitas yang didukung rencana pembangunan jalan tol	3	0,21	3	0,64
	4	Perkembangan IT mempermudah keterbukaan informasi sebagai media promosi terkait dengan persaingan antar destinasi pariwisata dan industri kreatif	3	0,21	2	0,43
	5	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Nasional di Sumatera Barat didukung oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan tematik dan citra kawasan wisata	3	0,21	3	0,64
SUB TOTAL			14			2,64
T H R E A T	1	Persaingan antar wilayah untuk memajukan potensi pariwisata sebagai penggerak ekonomi wilayah	2	0,15	-1	-0,15
	2	Potensi industri kreatif sebagai nilai tambah pengembangan pariwisata perlu dikembangkan (inovasi masih rendah)	2	0,15	-3	-0,46
	3	Belum terintegrasi/belum ada keterkaitan yang kuat antar Kawasan Pariwisata serta masih bersifat sektoral (konektivitas)	3	0,23	-3	-0,69
	4	Belum maksimalnya sarana, prasarana wisata serta fasilitas pendukung kepariwisataan sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan	3	0,23	-2	-0,46
	5	Aktivitas wisatawan yang masif dapat berdampak terhadap degradasi lingkungan	3	0,23	-2	-0,46
SUB TOTAL			13			-2,23
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL						0,41

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 6.7 Analisis SWOT Kawasan Pariwisata

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berdasarkan diagram SWOT pariwisata, Provinsi Sumatera Barat berada pada kuadran I. Strategi yang dapat diterapkan pada kuadran I adalah agresif. Perumusan strategi dilakukan dengan menerpadukan unsur kekuatan (strength), dan peluang (opportunity). Isu Strategis: Pengembangan Tematik Pariwisata yang belum terintegrasi antar destinasi dan dengan industri kreatif. Adapun strategi dalam mewujudkan isu strategis sebagai berikut:

S1,S2,S3,S4-O1,O2,O5

Pengembangan citra **destinasi wisata** yang terintegrasi dengan **industri kreatif lokal** untuk menarik lebih banyak wisatawan melalui atraksi dan peningkatan kelembagaan

S1,S2,S4-O1,O3

Pengembangan **aksesibilitas transportasi** untuk mendorong konektivitas kawasan dalam rangka mendukung kegiatan wisata

S2,S3-O1

Pengembangan amenitas dan **infrastruktur dasar** di kawasan pariwisata

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

6.3.3 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Pertanian

Dalam merumuskan skenario pengembangan fokus pertanian digunakan tahapan analisis, yaitu: analisis PESTLE, *porter's five forces*, EFAS-IFAS, *grand strategy*, dan *strategy*. Analisis PESTLE merupakan kerangka yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor kunci (berupa *political, economic, sociological, technological, legal*, dan *environmental*) yang mempengaruhi suatu wilayah dari sisi luar (eksternal) yang berdampak pada strategi dan keputusan pengembangan ke depan. Analisis PESTLE fokus pertanian Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Tabel 6.12 Analisis Pestle Fokus Pertanian

	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam didukung oleh Pemerintah Daerah	Harga komoditi pertanian yang menurun pada saat panen raya atau saat adanya produk masuk dari daerah lain	5	23,8%
ECONOMIC	pemasaran produksi tanaman pangan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan daerah disekitarnya terutama diekspor sampai ke luar daerah seperti Riau, Jambi, Bengkulu dan beberapa daerah tetangga lainnya	Komoditi pertanian menjadi komoditi global dalam perdagangan bebas	4	19,0%
SOCIOLOGICAL	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa melalui Gapoktan dan Rembuk Tani	Sumber Daya Manusia pertanian yang produktif semakin berkurang, serta berkurangnya minat untuk menjadi petani	3	14,3%
TECHNOLOGICAL	Mengembangkan inovasi dan teknologi pendukung melalui instalasi pengolahan, mesin pemilah, dan lainnya	Terbatasnya akses petani terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan dan perlindungan usaha tani	3	14,3%
LEGAL	Menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan pengendalian alih fungsi lahan dengan ditetapkannya lahan pangan berkelanjutan dalam RTRW Kabupaten Menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan pengendalian alih fungsi lahan dengan ditetapkannya lahan pangan berkelanjutan dalam RTRW Kabupaten	Perumusan mekanisme dan skema insentif dan disinsentif dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada pemilik lahan agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan	4	19,0%
ENVIRONMENT	Mengembangkan pengolahan kembali limbah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan sektor perkebunan dan peternakan	Terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian atau area peruntukkan lainnya	2	9,5%
			21	100,0%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Analisis Selanjutnya yang digunakan adalah *porter's five forces*. Analisis *porter's five forces* adalah sebuah metode yang menganalisa dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis, biasa digunakan untuk mengidentifikasi struktur industri dalam menentukan strategi. Analisis *porter's five forces* pada fokus pertanian sebagai berikut.

Tabel 6.13 Analisis *Porter's Five Forces* Fokus Pertanian

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR				
Konversi Threat Menjadi Opportunity	2	29%	Berkembangnya Pelabuhan Teluk Tapang akan meningkatkan pertukaran informasi teknologi dan sekaligus inovasi pertanian	Persaingan dan masuknya hasil pertanian sejenis akan menggeser pasar lokal dan kecil.
Kualitas Yang Diinginkan	2	29%	Meningkatnya diversifikasi produk pertanian	keterbatasan kemampuan pengolahan produk pertanian
Inovasi	3	43%	Mendorong ekspor produksi pertanian ke berbagai wilayah melalui Pelabuhan Teluk Tapang	Kondisi geografis yang menghubungkan koneksi antar wilayah berpotensi menjadi hambatan khususnya dengan wilayah Lintas Timur Pulau Sumatera
SUB TOTAL	7	100%		
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS				
Sensitivitas Target	2	20%	Meskipun terjadi penurunan produktivitas tanaman padi sawah di Kabupaten Agam, namun Kontribusi PDRB Kabupaten Agam terhadap Provinsi Sumatera Barat cukup besar yakni 8,36 atau terbesar ke-2	Keterbatasan ketersediaan dan naik turunnya harga baku modal, pupuk, dan pestisida yang masih ada memakai produk impor
Trend Eksisting	5	50%	Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional	Alih fungsi lahan pertanian menjadi area penggunaan lain
Penciptaan Nilai	3	30%	Diversifikasi produk pertanian bisa menjadi peluang untuk pemasaran internasional	Consumer produk pertanian masih mencakup pasar domestik
SUB TOTAL	10	100%		
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS				
Ketergantungan Saat ini	4	50%	Pengembangan hilirisasi pertanian dengan industri pengolahan skala Usaha Kecil Menengah dan Mikro	Sulitnya pendistribusian produk pertanian
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	2	25%	Untuk mengelola sumber daya lokal, pelaku bisnis harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti keahlian teknis, pengalaman, dan perizinan.	Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan adil, sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan oleh pelaku bisnis.
Daya Dukung Eksisting	2	25%	Ketersediaan supplier yang dapat mendukung proyek penguatan konektivitas tersebut juga dapat mempengaruhi bargaining power mereka	Jika terdapat supplier yang telah memiliki hubungan bisnis dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, mereka mungkin memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan supplier baru yang belum memiliki pengalaman
SUB TOTAL	8	100%		
THREAT OF NEW ENTRANTS				
Tantangan Yang Dihadapi	5	50%	Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi	Ketersedian infrastruktur pendukung teknologi yang belum merata
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	2	20%	Pengembangan produk pertanian unggulan, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, atau penerapan kebijakan harga yang lebih kompetitif.	Kualitas produk yang tidak sesuai terhadap kebutuhan pasar
Ancaman Terhadap Legacy	3	30%	Keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi terkait kebutuhan pasar.	Ketidakmampuan dalam adaptasi terhadap perubahan minat pasar dan kecanggihan teknologi
SUB TOTAL	10	100%		

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
THREAT OF SUBSTITUTES				
Trend Analisis PESTLE	5	56%	Penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam didukung oleh Pemerintah Daerah	Komoditi pertanian menjadi komoditi global dalam perdagangan bebas
Trend Yang Mengganggu Kebijakan	2	22%	Persaingan antara produk pertanian domestik dengan produk pertanian impor	Perubahan kebijakan perdagangan atau perubahan peraturan di tingkat nasional atau internasional dapat membuka pintu bagi produk pertanian impor, yang dapat menjadi substitusi bagi produk pertanian domestik
Peralihan Cost	2	22%	Subsidi pemerintah untuk peningkatan produksi pertanian	Pemberian subsidi dapat meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah.
SUB TOTAL	9	100%		

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Setelah melakukan analisis PESTLE dan porter's five forces tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS). Analisis selanjutnya digambarkan dalam bentuk diagram SWOT sesuai dengan hasil kuadran yang didapatkan.

Tabel 6.14 Pembobotan IFAS Sektor Pertanian

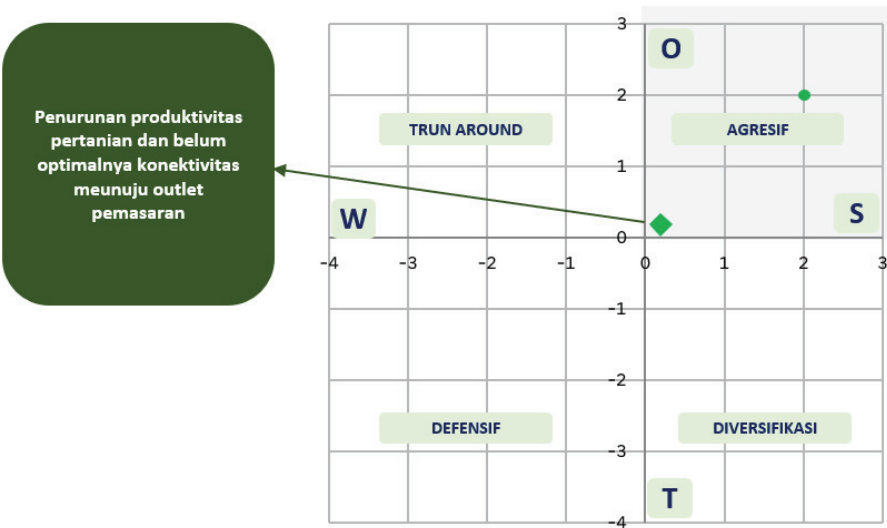
FAKTOR INTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR	
STRENGTH	1	PDRB Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,71%)	3	0,30	3	0,90
	2	Produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-5 terbesar di Pulau Sumatera, berada di bawah Provinsi Aceh. Produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menyumbang 2,38% produksi nasional dan produksi beras menyumbang 2,41% beras nasional (peringkat ke-11 nasional).	3	0,30	3	0,90
	3	Sekitar 89% perekonomian di Sumatera Barat ditopang oleh 600 ribu unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk didalamnya sektor pertanian	2	0,20	3	0,60
	4	Kontribusi PDRB Kabupaten Agam terhadap Provinsi Sumatera Barat 8,36 atau terbesar ke-2. Nilai PDRB sebesar Rp. 6.113.614 juta rupiah. Kontribusi PDRB Kabupaten Agam terbesar atas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,41%, dengan komoditi unggulan dari padi dan jagung	2	0,20	3,00	
SUB TOTAL			10			2,40
WEAKNESS	1	Terjadi penurunan produktivitas tanaman padi sawah di Kabupaten Agam sebesar 0,73 ha/ton	3	0,27	-2	-0,55
	2	Terjadi alih fungsi pertanian menjadi lahan non pertanian	3	0,27	-3	-0,82
	3	Irigasi belum mampu menyediakan air dalam jumlah yang cukup hanya 67,06 % peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi	3	0,27	-3	-0,82

FAKTOR INTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
4	Pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang belum sepenuhnya berfungsi Pembangunan mencapai 22,079 Km dari total panjang jalan 43,167 Km (51,14%)	2	0,18	-2,00	-0,36
SUB TOTAL		11			-2,18
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL					0,22

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 6.15 Pembobotan EFAS Sektor Pertanian

FAKTOR EKSTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1 Mendorong ekspor produksi pertanian ke berbagai wilayah melalui Pelabuhan Teluk Tapang	3	0,21	3	0,64
	2 Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional	3	0,21	3	0,64
	3 Pengembangan hilirisasi pertanian dengan industri pengolahan skala Usaha Kecil Menengah dan Mikro	3	0,21	3	0,64
	4 Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi	3	0,21	3	0,64
	5 Penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam didukung oleh Pemerintah Daerah	2	0,14	2	0,29
SUB TOTAL		14			2,86
THREAT	1 Kondisi geografis yang menghubungkan koneksi antar wilayah berpotensi menjadi hambatan khususnya dengan wilayah Lintas Timur Pulau Sumatera	2	0,15	-2	-0,31
	2 Alih fungsi lahan pertanian menjadi area penggunaan lain	3	0,23	-3	-0,69
	3 Sulitnya pendistribusian produk pertanian	3	0,23	-3	-0,69
	4 Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi yang belum merata	3	0,23	-3	-0,69
	5 Komoditi pertanian menjadi komoditi global dalam perdagangan bebas	2	0,15	-2	-0,31
SUB TOTAL		13			-2,69
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL					0,16



Gambar 6.8 Analisis SWOT Kawasan Pertanian
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berdasarkan diagram SWOT pertanian, Provinsi Sumatera Barat berada pada kuadran I. Strategi yang dapat diterapkan pada kuadran I adalah agresif. Perumusan strategi dilakukan dengan menerpadukan unsur kekuatan (strength), dan peluang (opportunity). Isu Strategis: Penurunan produktivitas pertanian dan belum optimalnya konektivitas menuju Outlet Pemasaran. Adapun strategi dalam mewujudkan isu strategis sebagai berikut:

1. S1,S2-O2-O3
Peningkatan produktivitas melalui dukungan **infrastruktur pertanian**
2. S3-O4,O5
Pengembangan UMKM dan agro industri pertanian melalui penetapan KPPN, teknologi, dan penguatan SDM
3. S1,S2-O1
Peningkatan konektivitas jalur pemasaran untuk mendukung distribusi hasil pangan keluar Sumatera melalui hub di Pasaman Barat dan ke dalam Pulau Sumatera

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

6.3.4 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

Dalam merumuskan skenario pengembangan fokus daerah tertinggal digunakan tahapan analisis, yaitu: analisis PESTLE, *porter's five forces*, EFAS-IFAS, *grand strategy*, dan *strategy*. Analisis PESTLE merupakan kerangka yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor kunci (berupa *political, economic, sociological, technological, legal, dan environmental*) yang mempengaruhi suatu wilayah dari sisi luar (eksternal) yang berdampak pada strategi dan keputusan pengembangan ke depan. Analisis PESTLE fokus kawasan daerah tertinggal Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Tabel 6.16 Analisis Pestle Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

	OPPORTUNITIES	THREAT	SIGNIFIKANSI (1-5)	BOBOT PENGARUH
POLITICAL	Rencana pembangunan jalan tol dan dibangun simpul transportasi laut dan udara di Provinsi Sumatera Barat	Beberapa kondisi jalan yang menghubungkan antar wilayah dalam kondisi yang kurang baik	5	23,8%
ECONOMIC	Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga termasuk ke dalam WPP 572 yang sangat kaya akan potensi perikanan. Komoditas perikanan dari berbagai kawasan produksi perikanan yang tersebar di Kepulauan Mentawai kemudian didistribusikan menuju pusat koleksi dan distribusi PPS Teluk Bungus di Kota Padang.	Pergerakan orang dan barang antar wilayah masih didominasi dengan menggunakan transportasi moda darat	4	19,0%
SOCIOLOGICAL	Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai jumlah penduduk 87.632 jiwa dengan kepadatan 14 jiwa/km2 dan laju pertumbuhan penduduk 1,41%. Jumlah penduduk terbesar dan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sipora Utara.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kep. Mentawai adalah 61,09 atau terkategori sedang. Namun kondisi IPM tersebut masih di bawah rata-rata IPM Indonesia. Tingkat kemiskinan Kab. Kep. Mentawai di tahun 2020 adalah 14,35% yang berada di atas tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia.	3	14,3%
TECHNOLOGICAL	Pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendorong produktivitas pemenuhan infrastruktur dasar	Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi yang belum merata	3	14,3%
LEGAL	Penetapan Penetapan Kawasan 3T merupakan ketetapan dalam Peraturan Presiden 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024	Prioritas pembangunan dalam pengentasan kawasan 3T	4	19,0%
ENVIRONMENT	Termasuk kabupaten dengan kondisi geografis kepulauan sehingga memiliki banyak wisata alam	Diperlukan konsep pembangunan berwawasan lingkungan guna mengatasi isu global lingkungan (climate change) akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi	2	9,5%
			21	100,0%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Analisis Selanjutnya yang digunakan adalah *porter's five forces*. Analisis *porter's five forces* adalah sebuah metode yang menganalisa dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis, biasa digunakan untuk mengidentifikasi struktur industri dalam menentukan strategi. Analisis *porter's five forces* pada fokus perkotaan sebagai berikut.

Tabel 6.17 Analisis *Porter's Five Forces* Fokus Perkotaan

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR				
Konversi Threat Menjadi Opportunity	2	20%	Rencana pembangunan jalan tol dan pembangun simpul transportasi laut dan udara di Provinsi Sumatera Barat	Beberapa kondisi jalan yang menghubungkan antar wilayah dalam kondisi yang kurang baik
Kualitas Yang Diinginkan	2	30%	Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga termasuk ke dalam WPP 572 yang sangat kaya akan potensi perikanan. Komoditas perikanan dari berbagai kawasan produksi perikanan yang tersebar di Kepulauan Mentawai kemudian didistribusikan menuju pusat koleksi dan distribusi PPS Teluk Bungus di Kota Padang.	Pergerakan orang dan barang antar wilayah masih didominasi dengan menggunakan transportasi moda darat
Inovasi	3	43%	Rencana pembangunan KA Trans Sumatera dan reaktivasi jalur KA Pariaman - Naras - Sungai Limau	Kondisi geografis yang menghubungkan koneksi antar wilayah berpotensi menjadi hambatan khususnya dengan wilayah Lintas Timur Pulau Sumatera
SUB TOTAL	7	100%		
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS				
Sensitivitas Target	2	20%	Penetapan Kawasan 3T merupakan ketetapan dalam Peraturan Presiden 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024	Prioritas pembangunan dalam pengentasan kawasan 3T
Trend Eksisting	5	56%	Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas dan ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian	Provinsi Sumatera Barat memiliki Kepulauan Mentawai yang masuk dalam wilayah 3TP, yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur
Penciptaan Nilai	3	30%	Pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendorong produktivitas pemenuhan infrastruktur dasar	Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi yang belum merata
SUB TOTAL	10	100%		
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS				
Ketergantungan Saat ini	4	50%	Kebijakan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah secara nasional	Sulitnya pendistribusian sumber daya dari/ke daerah terluar dan tertinggal
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	2	25%	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru mendukung pemerataan pembangunan (Kebijakan Penataan Ruang)	Pembangunan yang masih terkonsentrasi di Wilayah Utara dan Tengah Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi terhadap adanya ketimpangan pembangunan
Daya Dukung Eksisting	2	25%	Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai jumlah penduduk 87.632 jiwa dengan kepadatan 14 jiwa/km2 dan laju pertumbuhan penduduk 1,41%. Jumlah penduduk terbesar dan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sipora Utara.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kep. Mentawai adalah 61,09 atau terkategori sedang. Namun kondisi IPM tersebut masih di bawah rata-rata IPM Indonesia. Tingkat kemiskinan Kab. Kep. Mentawai di tahun 2020 adalah 14,35% yang berada di atas tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia.
SUB TOTAL	8	100%		
THREAT OF NEW ENTRANTS				

PARAMETER	BOBOT KEMUNGKINAN TERCAPAI (1-5)	HIPOTESA STRATEGI	OPPORTUNITIES	THREAT
Tantangan Yang Dihadapi	5	50%	Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi	Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi yang belum merata
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	2	20%	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru mendukung pemerataan pembangunan (Kebijakan Penataan Ruang)	Pembangunan yang masih terkonsentrasi di Wilayah Utara dan Tengah Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi terhadap adanya ketimpangan pembangunan
Ancaman Terhadap Legacy	3	30%	Rencana pembangunan jalan tol dan pembangun simpul transportasi laut dan udara di Provinsi Sumatera Barat	Beberapa kondisi jalan yang menghubungkan antar wilayah dalam kondisi yang kurang baik
SUB TOTAL	10	100%		
THREAT OF SUBSTITUTES				
Trend Analisis PESTLE	5	56%	Rencana pembangunan jalan tol dan pembangun simpul transportasi laut dan udara di Provinsi Sumatera Barat	Pergerakan orang dan barang antar wilayah masih didominasi dengan menggunakan transportasi moda darat
Trend Yang Mengganggu Kebijakan	2	22%	Penetapan Penetapan Kawasan 3T merupakan ketetapan dalam Peraturan Presiden 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024	Prioritas pembangunan dalam pengentasan kawasan 3T
Peralihan Cost	2	22%	Dukungan infrastruktur dalam ketahanan air meliputi penyediaan air baku untuk kawasan prioritas yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan terluar; pulau kecil terluar	Infrastruktur dasar di Kabupaten Mentawai masih rendah
SUB TOTAL	9	100%		

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Setelah melakukan analisis PESTLE dan porter's five forces tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS). Analisis selanjutnya digambarkan dalam bentuk diagram SWOT sesuai dengan hasil kuadran yang didapatkan.

Tabel 6.18 Pembobotan IFAS Sektor Kawasan Daerah Tertinggal

FAKTOR EKSTERNAL			TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGHT	1	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Sumatera Barat guna mendukung pemerataan pembangunan	3	0,38	3	1,13
	2	Provinsi Sumatera Barat didukung prasarana dan sarana transportasi yang memadai (Jalan Nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Internasional Teluk Bayur)	3	0,38	3	1,13
	3	Percepatan penanganan daerah tertinggal dengan meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar serta aksesibilitas yang didukung dengan pengembangan potensi lokal yaitu sektor perikanan dan pariwisata	2	0,25	3	0,75
SUB TOTAL			8			3,00
WEAKNESS	1	Pembangunan yang masih terkonsentrasi di Wilayah Utara dan Tengah Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi terhadap adanya ketimpangan pembangunan	3	0,33	-2	-0,67
	2	Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah 3T (Terdepan, Terluar Tertinggal), memiliki kategori IPM sedang dan masuk dalam kategori miskin ekstrem, sangat bergantung pada keterhubungan dengan Kota Padang (pusat interaksi kawasan)	3	0,33	-3	-1,00

FAKTOR EKSTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
	3 Terdapat 25% jalan di Sumatera Barat dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat sebagai jalur utama penghubung antar wilayah	3	0,33	-3	-1,00
SUB TOTAL		9			-2,67
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL					0,33

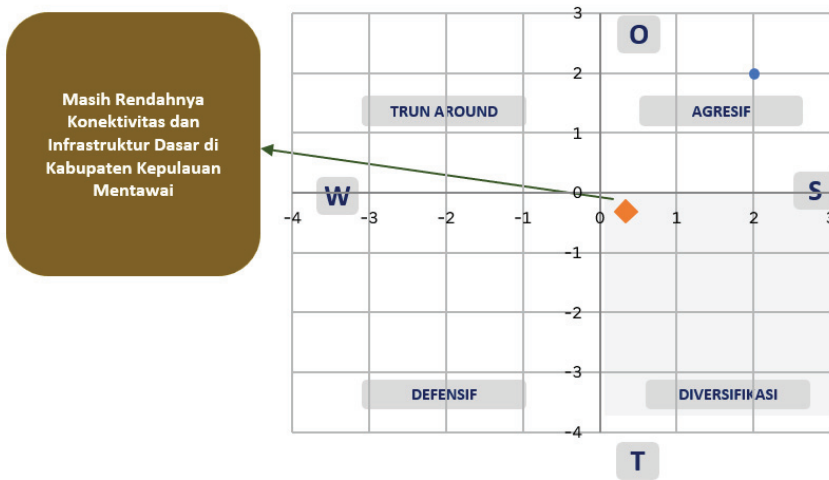
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 6.19 Pembobotan EFAS Sektor Kawasan Daerah Tertinggal

FAKTOR EKSTERNAL		TINGKAT	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1 Rencana pembangunan KA Trans Sumatera dan reaktivasi jalur KA Pariaman - Naras - Sungai Limau	3	0,23	3	0,69
	2 Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas dan ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian	2	0,15	2	0,31
	3 Kebijakan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah secara nasional	3	0,23	3	0,69
	4 Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi	3	0,23	3	0,69
	5 Rencana pembangunan jalan tol dan pembangun simpul transportasi laut dan udara di Provinsi Sumatera Barat	2	0,15	2	0,31
SUB TOTAL		13	1,00		2,69
THREAT	1 Kondisi geografis yang menghubungkan koneksi antar wilayah berpotensi menjadi hambatan khususnya dengan wilayah Lintas Timur Pulau Sumatera	3	0,21	-3	-0,64
	2 Provinsi Sumatera Barat memiliki Kepulauan Mentawai yang masuk dalam wilayah 3TP, yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur	3	0,21	-3	-0,64
	3 Sulitnya pendistribusian sumber daya dari/ke daerah terluar dan tertinggal	3	0,21	-3	-0,64
	4 Ketersedian infrastruktur pendukung teknologi yang belum merata	3	0,21	-3	-0,64
	5 Pergerakan orang dan barang antar wilayah masih didominasi dengan menggunakan transportasi moda darat	2	0,14	-3	-0,43
SUB TOTAL		14			-3,00
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL					-0,31

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus perkotaan berada pada kuadran agresif.



Gambar 6.9 Analisis SWOT Kawasan Daerah Tertinggal

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berdasarkan diagram SWOT, Provinsi Sumatera Barat berada pada kuadran I. Strategi yang dapat diterapkan pada kuadran II adalah diversifikasi. Perumusan strategi dilakukan dengan menerpadukan unsur kekuatan (strength), dan peluang (opportunity). Isu Strategis: Masih Rendahnya Konektivitas dan Infrastruktur Dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun strategi dalam mewujudkan isu strategis sebagai berikut:

S1,S2-T1,T3

Peningkatan jaringan intra dan antar wilayah untuk mendukung konektivitas orang dan barang di Provinsi Sumatera Barat

S3-T2

Penyelenggaraan sarana dan prasarana pada daerah terluar maupun tertinggal

S3-T4

Peningkatan SDM yang berdaya saing dan melek teknologi

S2-T5

Integrasi berbagai jenis moda transportasi serta peningkatan kualitas transportasi darat, laut, udara, dan kereta api

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



BAB 7

ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR



7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

7.1.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Perkotaan PALAPA

Proyeksi Penduduk

Pengembangan wilayah perkotaan Palapa didasarkan atas proyeksi penduduk, jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2021 sebanyak 1.486.109 jiwa, pada tahun 2029 kenaikan penduduk menjadi 1.609.615 jiwa dan pada tahun 2034 menjadi 1.686.806 jiwa.

Tabel 7.1 Proyeksi Penduduk Perkotaan Palapa

No	Kabupaten/	Penduduk	Proyeksi				
	Kota		2023	2024	2025	2029	2034
1	Padang Pariaman	420.382	425.150	427.534	429.919	439.456	451.377
2	Padang	975.330	999.542	1.011.648	1.023.754	1.072.178	1.132.708
3	Pariaman	90.397	92.293	93.241	94.189	97.981	102.721
	Jumlah	1.486.109	1.516.985	1.532.423	1.547.862	1.609.615	1.686.806

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Sumber Daya Air – Air Baku

Sumber daya air yang terdapat di Kawasan perkotaan Palapa (Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Pariaman) adalah WS Indragiri – Akuaman. Berdasarkan ketersediaan infrastruktur pada tahun 2015, layanan air di WS Indragiri - Akuaman adalah sebesar 11,8 miliar m³ pertahun, sementara kebutuhan air diperkirakan mencapai 27 miliar m³ per tahun. Kebutuhan air yang mampu dilayani oleh PDAM pada tahun 2016 adalah 33,53%.

Tabel 7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Perkotaan PALAPA

KAB/KOTA	Hasil Proyeksi Air Baku (Liter/Detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Padang Pariaman	917,46	922,63	927,81	932,98	953,68	979,55
Padang	2571,45	2602,97	2634,50	2666,03	2792,13	2949,76
Pariaman	174,44	176,25	178,06	179,87	194,36	196,17
Jumlah	3663,35	3701,86	3740,37	3778,88	3940,17	4125,48

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis kebutuhan penyediaan air baku maka berikut adalah indikasi penanganannya:

1. Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting Kota Padang;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Gunung Pangilun/S. Kuranji $0,31 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Jawa Gadut/S. Danau Limau Manis $0,10 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Lubuk Paraku/S. Lubuk Kilangan $0,05 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Limau Manih/S. Limau Manis $0,05 \text{ m}^3/\text{det}$.
2. Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Kab Padang Pariaman;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Batang Gasan/S. Gasan Gadang $0,01 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Sungai Limau/S. Limau $0,01 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Koto/S. Naras $0,03 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Kayu Tanam/S. Kamumuan $0,04 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Pauh Kamba/S. Ulakan $0,13 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Sungai Geringging/S. Limau $0,04 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Kuraitaji/S. Mangau $0,06 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Lubuk Alung/S. Anai $0,18 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Sicincin/S. Ulakan $0,07 \text{ m}^3/\text{det}$;
 - Pembangunan penyediaan air baku Kec. Padang Sago/ S. Pariaman $0,01 \text{ m}^3/\text{det}$.

Infrastruktur Sumber Daya Air – Bangunan Pengendalian Daya Rusak Air

Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis kebutuhan upaya pengendalian daya rusak air maka berikut adalah indikasi penanganannya:

- Pembangunan Check Dam Bt. Bungus, 3 unit;
- Pembangunan Jetty Muara Bt. Bungus, 2@ 100 m;
- Pengamanan tebing/tanggul Sungai Bt Bungus di Permukiman Masyarakat, L = 30 km;
- Pembangunan Groundsill Bt. Arau di Jembatan Lubuk Begalung, 1 unit;
- Perkuatan Tebing pada segmen Checkdam Kampung Kalawi – Jembatan Bypass, L = 5 km;

- Pembuatan Groundsill di Hilir Bendung Batang Anai. Lubuk Alung;
 - Normalisasi Sungai Bt. Tapakis. Segmen Lintas Jalan Padang-Pariaman, L = 2 km;
 - Normalisasi Sungai Bt. Mangor. Segmen Lintas Jalan Padang-Pariaman, L = 5 km;
 - Pembuatan Tanggul di bagian tengah di Kab. Padang Pariaman (Kampung Dalam), L = 2 km;
- Normalisasi Sungai Bt. Sei Ilmauà Segmen Lintas Jalan Padang-Pariaman, L = 5 km.



Gambar 7.1 Peta Kondisi Eksisting Rawan Bencana Banjir
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Jaringan Jalan dan Jembatan

Ruas jalan nasional yang mendesak untuk mendapatkan penanganan adalah Padang Bypass II (Baru) dan Bandara Internasional Minangkabau (Bim) - Simp. Duku untuk dapat dilakukan pengembangan jaringan jalan tersebut. Sementara kebutuhan lain yang perlu diprioritaskan dalam mendukung pengembangan wilayah Perkotaan Palapa adalah Pembangunan Jalan Akses Terminal Tipe A Padang dan penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan karena adanya rencana reaktivasi dan peningkatan jalur kereta api di Kawasan Perkotaan Palapa melalui pembangunan *fly over* (FO). Ruas jalan nasional yang ada di Kawasan Perkotaan Palapa adalah berikut dengan proyeksi kinerja pelayanan jalan nasional (LOS) hingga tahun 2030:

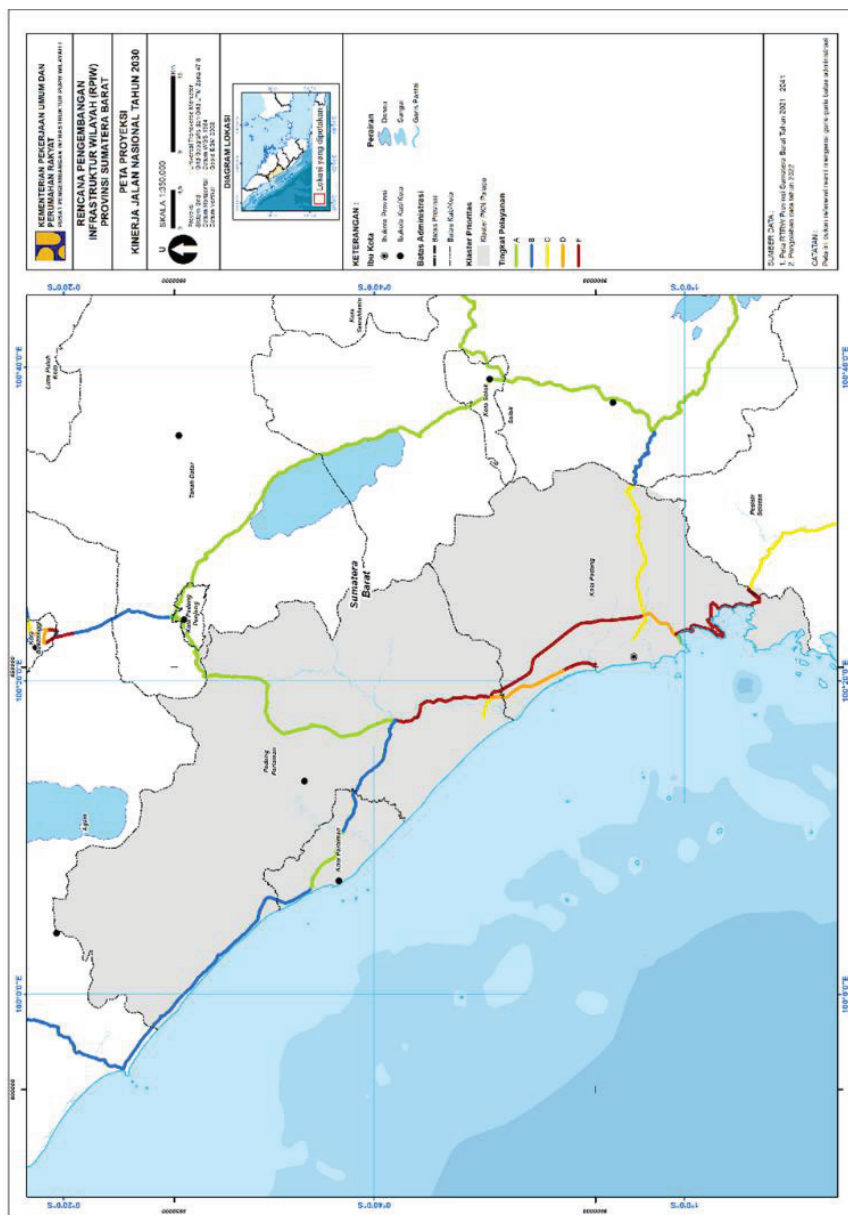
Tabel 7.3 Proyeksi Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Fokus Perkotaan PALAPA

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI					
					NILAI VCR			NILAI LOS		
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2029	LOS 2034
PADANG BYPASS II (BARU)	A	22,27	0,49	C	0,60	0,72	0,86	C	C	E
JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG)	A	4,10	0,77	D	0,96	1,14	1,14	E	F	F
JLN. ADINEGORO (PADANG)	A	9,49	0,50	C	0,62	0,74	0,88	C	C	E
BTS. KOTA PADANG - JLN. SIMP. HARU	A	23,46	0,32	B	0,39	0,47	0,56	B	C	C
PADANG BYPASS I	A	4,90	0,49	C	0,60	0,72	0,86	C	C	E
BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR (PADANG)	A	1,17	0,07	A	0,09	0,11	0,13	A	A	A
JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG)	K1	22,46	0,69	C	0,85	1,01	1,21	E	F	F
LUBUK ALUNG - SIMP. DUKU	A	13,49	0,89	E	1,10	1,30	1,56	F	F	F
BTS. KOTA PADANG PANJANG - SICINCIN	A	19,29	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A	A
MANGGAPOH - BTS. KOTA PARIAMAN	K1	40,06	0,16	A	0,19	0,23	0,28	A	B	B
BANDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU (BIM) - SIMP. DUKU	A	2,80	0,29	B	0,36	0,43	0,51	B	B	C
SICINCIN - LUBUK ALUNG	A	13,51	0,13	A	0,17	0,20	0,23	A	A	B
KURAITAJI - LUBUK ALUNG	K1	16,98	0,26	B	0,33	0,39	0,46	B	B	C
JLN. ZAINI (PARIAMAN)	K1	0,80	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A	A
JLN. SITI MANGGOPOH (PARIAMAN)	K1	4,22	0,27	B	0,34	0,40	0,48	B	B	C
BY PASS PARIAMAN (KOTA PARIAMAN)	K1	5,20	0,03	A	0,04	0,05	0,06	A	A	A
JLN. AHMAD DAHLAN (PARIAMAN)	K1	0,61	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A	A
JLN. SOEKARNO - HATTA (PARIAMAN)	K1	2,09	0,03	A	0,04	0,05	0,06	A	A	A

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

- 0.00-0.20 Bebas hambatan
- 0.20-0.44 Arus stabil tapi kecepatan dibatasi
- 0.45-0.74 Arus stabil tapi kecepatan dikendalikan
- 0.75-0.84 Arus mendekati stabil
- 0.85-1.00 Arus tidak stabil, terkadang terhenti

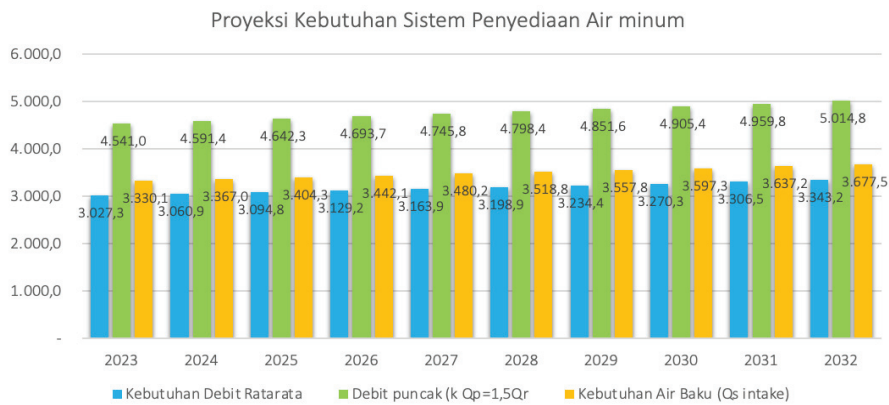
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.2 Peta Proyeksi Kinerja Jalan Nasional Tahun 2020
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Permukiman

- o Air Minum
Kebutuhan debit rata-rata dan kebutuhan air baku diprediksi akan meningkat seperti pada grafik Proyeksi Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum pada figur di bawah ini:



Gambar 7.3 Proyeksi Sistem Penyediaan Air Minum
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Sementara itu berdasarkan proyeksi kebutuhan air bersih, Kota Padang merupakan kota dengan kebutuhan air bersih tertinggi di Perkotaan Palapa, seperti terurai pada tabel berikut:

Tabel 7.4 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kawasan Perkotaan
PALAPA

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (Liter/Detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Padang Pariaman	1100,95	1107,16	1113,37	1119,58	1144,42	1175,46
Padang	2571,45	2602,97	2634,50	2666,03	2792,13	2949,76
Pariaman	126,87	128,18	129,50	130,82	136,08	214,00
Jumlah	3799,27	3838,32	3877,37	3916,42	4072,63	4339,22

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Dari hasil proyeksi dan analisa kebutuhan, terdapat beberapa rekomendasi:

- . Penambahan akses pelayanan pada kawasan strategis dan kawasan yang belum terlayani, seperti kawasan kumuh di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman baik melalui pelayanan non-perpipaan secara swadaya masyarakat maupun pelayanan perpipaan oleh PDAM
- . Peningkatan produksi melalui peningkatan kapasitas yang belum dimanfaatkan (*idle capacity*)

Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Palapa direncanakan dilakukan melalui sistem regional, adapun kondisi pengelolaan sampah di Kota Padang sudah *over capacity* dan 5 kelurahan (5%) beresiko sangat tinggi persampahan

- Kabupaten Padang Pariaman, TPA yang ada adalah lahan sewaan yang akan habis pada tahun 2018 dan 2024 dan belum adanya pengolahan sampah di TPA eksisting
- Kota Pariaman Pengelolaan TPA eksisting masih berbentuk open dumping atau belum *sanitary landfill*

Berikut rekomendasi terkait penanganan persampahan di perkotaan PALAPA:

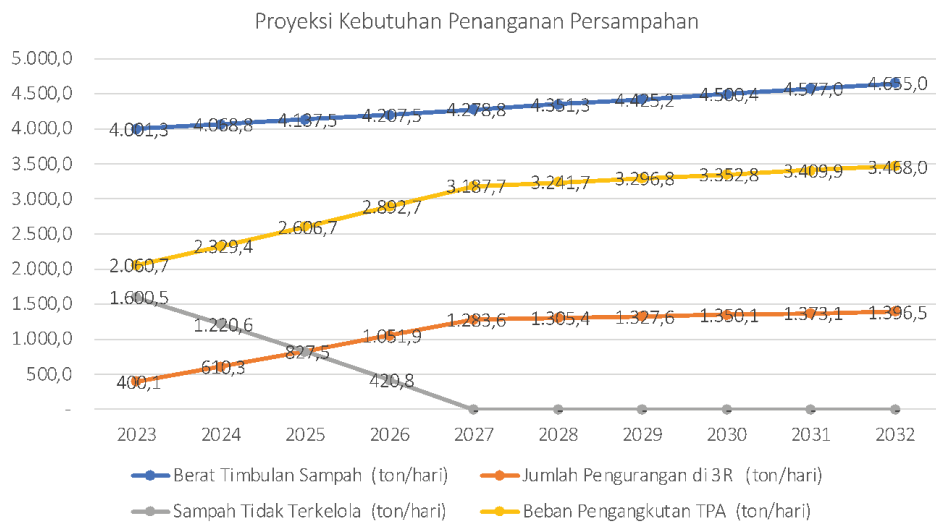
- Pengurangan sampah melalui penyediaan TPS3R pada skala kawasan/kota.
- Penyediaan TPS Kontainer dan alat angkut sampah menuju TPA
- Optimalisasi TPA Kota Padang dan Kota Pariaman, dan Pembangunan TPA Baru di Kab. Padang Pariaman.

Tabel 7.5 Proyeksi Timbunan Persampahan Kawasan Perkotaan PALAPA

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI m3/tahun					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Padang Pariaman	501506,17	504334,19	507162,21	509991,41	521304,68	535445,97
Padang	1171345,96	1185706,70	1200067,44	1214428,18	1271871,15	1343674,87
Pariaman	91687,54	92639,10	93590,65	94542,21	98348,43	103106,20
Jumlah	1764539,67	1782679,98	1800820,30	1818961,81	1891524,26	1982227,04

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Gambar 7.4 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Persampahan



Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

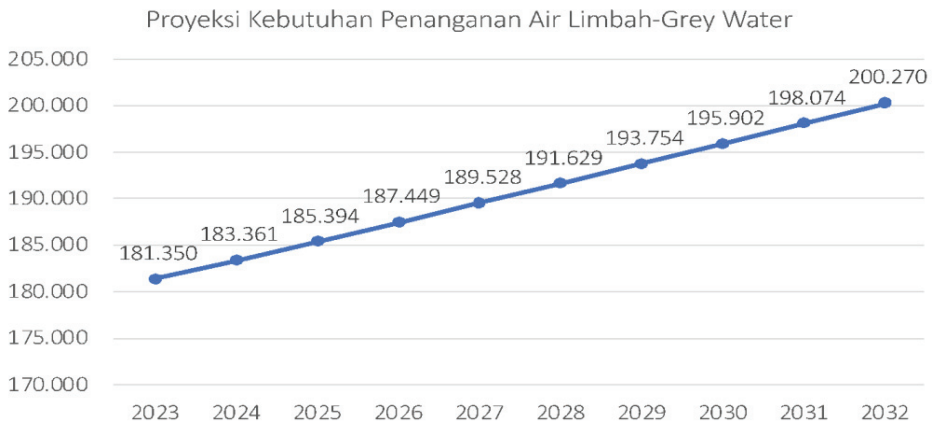
Air Limbah

Kondisi 61,85% akses jamban sehat permanen, 11,67% akses terhadap jamban sehat semi permanen, 6,26% menumpang jamban sehat atau sharing, dan masih buang air besar sembarangan (BABS) 20,22%.

Tabel 7.6 Proyeksi Air Limbah Kawasan Perkotaan
PALAPA

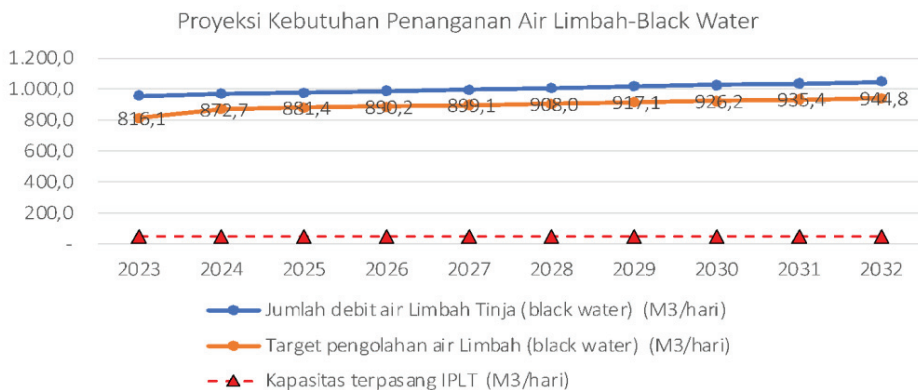
KABUPATEN	Total Limbah Cair (m³/hari)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Padang Pariaman	63,41	63,77	64,13	64,49	65,92	67,71
Padang	177,74	179,92	182,10	184,28	192,99	203,89
Pariaman	12,06	12,18	12,31	12,43	12,93	12,33
Jumlah	253,21	255,87	258,53	261,20	271,84	283,92

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.5 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Air Limbah-Grey Water

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.6 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Air Limbah-Black Water

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berdasarkan data dan proyeksi kebutuhan maka beberapa rekomendasi terkait penanganan air limbah adalah sebagai berikut:

- Penanganan sistem pengelolaan air limbah domestik periode 5 tahun ke depan masih menggunakan sistem setempat dan sistem terpusat skala kawasan misal pada pengembangan perumahan baru.
- Pada jangka panjang mulai dikembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala kota.



Gambar 7.7 Isu Permasalahan Tiap Sektor di Kawasan Perkotaan PALAPA
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

7.1.2 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Proyeksi Penduduk

Pengembangan kawasan KSPN Bukittinggi didasarkan atas proyeksi penduduk, jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 130.815 jiwa, pada tahun 2029 kenaikan penduduk menjadi 139.951 jiwa dan pada tahun 2034 menjadi 145.661 jiwa penduduk.

Tabel 7.7 Proyeksi Penduduk KSPN Bukitinggi

No	Kabupaten/	Penduduk	Proyeksi				
	Kota	2021	2023	2024	2025	2029	2034
1	Bukittinggi	130.815	133.099	134.241	135.383	139.951	145.661

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Sumber Daya Air – Air Baku

Sumber daya air yang terdapat di Kawasan Prioritas Pariwisata adalah WS Indragiri – Akuaman dan WS Batanghari. Potensi ketersediaan air hingga tahun 2033 adalah sebesar 1.058 m³/dt dari WS Indragiri - Akuaman dan 1.360 m³/dt dari WS Batanghari.

Tabel 7.8 Proyeksi Kebutuhan Air Baku di Kawasan Prioritas Pariwisata

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (Liter/Detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Bukittinggi	229,09	231,07	233,06	235,04	242,97	252,88

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

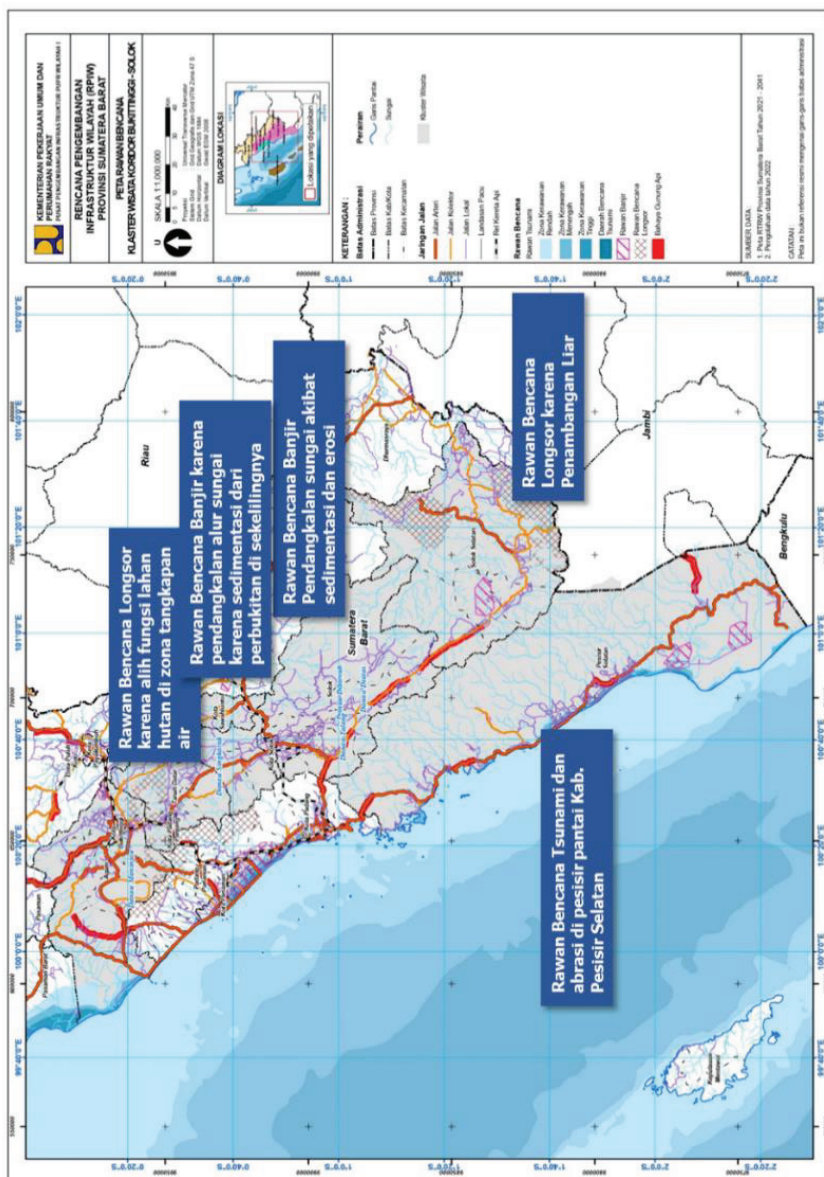
Indikasi penanganan kebutuhan penyediaan air baku: Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting Kota Bukit Tinggi 0,12 m³/det.

Infrastruktur Sumber Daya Air – Bangunan Pengendalian Daya Rusak Air

Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis kebutuhan upaya pengendalian daya rusak air maka berikut adalah indikasi penanganannya:

- Normalisasi Batang Antokan, Kab. Agam, 3 km
- Normalisasi Sungai Tampo, Kab. Tanah Datar, 3 km
- Normalisasi Sungai Agam, Kab. Tanah Datar, 2 km
- Normalisasi Sungai Sumani-Lembang, Kota Solok, 10 km
- Normalisasi Sungai Lasi, Kab. Solok, 3 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Lundang, Kec IV Angkat, Kab. Agam, 4 km

- Pembuatan tanggul Sungai Batang Nilam, Kec. Tj Mutiara, Kab. Agam, 2 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Kurambik, Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam, 5 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Tikus, Kec. IV Koto, Kab. Agam, 10 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Sitalang (Kampung Melayu), Kab. Agam, 1,5 km
- Pengamanan Tebing Batang Agam, Kab. Agam, 2,1 km
- Normalisasi Batang Ombilin, Kab. Tanah Datar 10 km
- Pengendalian Alur Sungai di Batang Tikus, Kab. Agam, 5 km
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Tikus di Kabupaten Agam, 1 km
- Reboisasi Hutan Bakau di Pantai Tanjung Mutiara, Kab. Agam, 542 ha
- Penanganan Abrasi di Danau Singkarak, Kab. Solok, 8 km
- Penanganan Abrasi di Danau Talang, Kab. Solok, 3 km
- Penanganan Abrasi di Danau Dibawah, Kab. Solok, 2 km



Gambar 7.8 Peta Rawan Bencana Klaster Wisata Koridor Bukittinggi-Solok

Infrastruktur Jaringan Jalan dan Jembatan

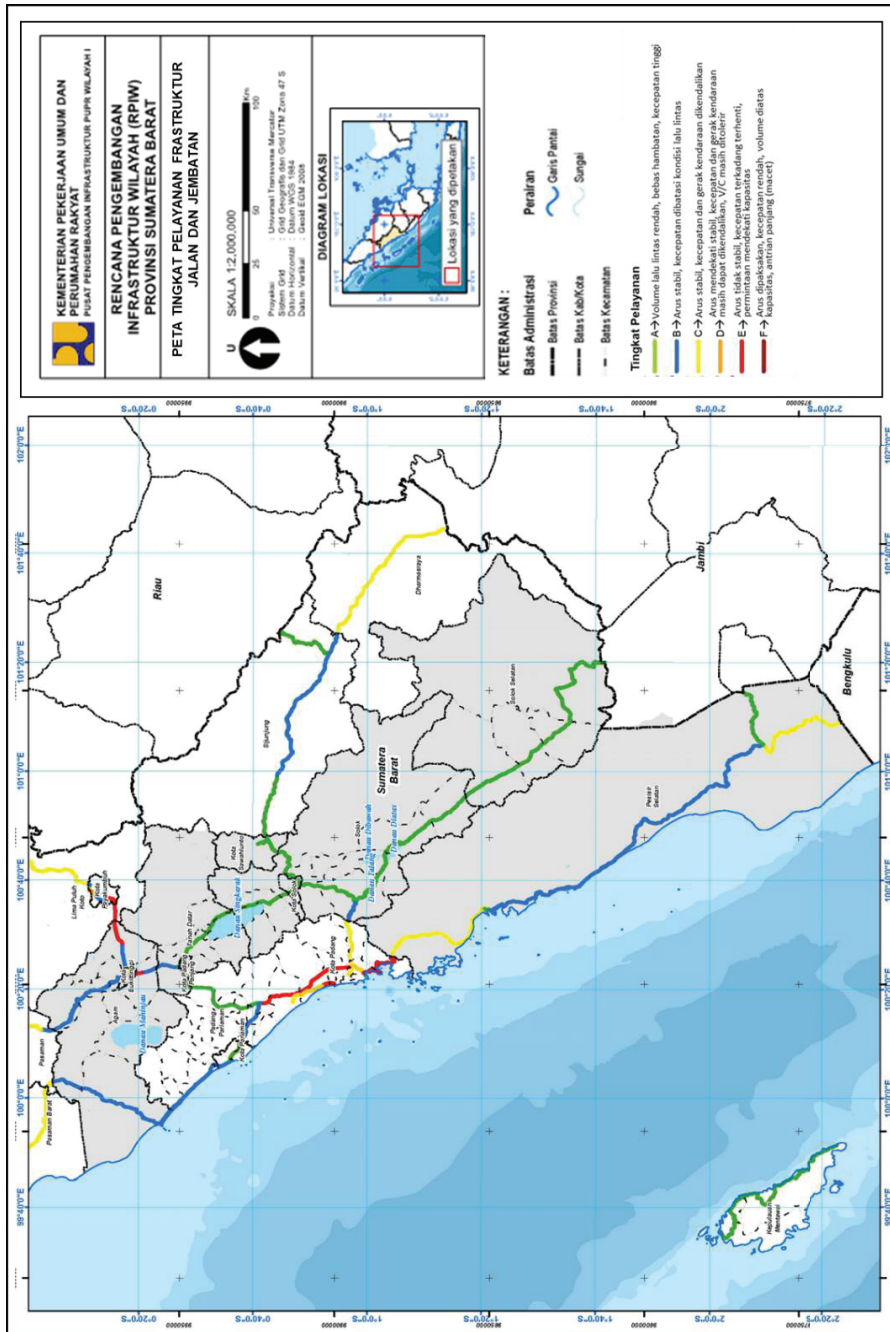
Secara umum tingkat pelayanan jalan di Kawasan Prioritas Pariwisata sampai dengan tahun 2030 diprediksikan masih tergolong baik, berada pada Grade A (volume lalu lintas rendah, bebas hambatan, kecepatan tinggi).

Terdapat beberapa ruas jalan yang diproyeksikan akan berada pada grade F (arus tidak stabil, terkadang terhenti) di tahun 2030 yakni pada ruas Jalan Tapan - batas Jambi (Kab. Pesisir Selatan); ruas jalan batas Kab. Tanah Datar - batas Kota Solok (Kab. Solok); ruas simpang Padang Luar - batas Kota Padang Panjang (Kab. Tanah Datar); ruas Surian - simpang Padang Aro (Kab. Solok Selatan); ruas Jalan Lubuk Sikarah (Kota Solok); dan ruas jalan Prof. Hamka (Kota Padang Panjang).

Tabel 7.9 Proyeksi Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Fokus Pariwisata KSPN Bukittinggi

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI				
					NILAI VCR			NILAI LOS	
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2029 2034
BUKIT TINGGI BYPASS I (SP. TAMAN - SP. BY PASS ANAK AIR)	A	2,60	0,28	B	0,35	0,41	0,50	B	C
SP. AUR KUNING - SP. TALUK	A	1,27	0,66	C	0,82	0,97	1,16	D	F
JLN. SOEKARNO HATTA (BUKITTINGGI)	A	2,13	0,40	B	0,49	0,58	0,70	C	C
JLN. SUDIRMAN (B.TINGGI)	A	1,22	0,82	E	1,02	1,21	1,45	F	F
BUKIT TINGGI BYPASS II (JLN. ST. SYAHRIR (SP. LAPANGAN KANTIN) - SP. AUR KUNING - SP. BYPASS ANAK AIR)	A	3,80	0,51	C	0,63	0,75	0,89	C	E
0,00-0,20 Bebas hambatan									
0,20-0,44 Arus stabil tapi kecepatan dibatasi									
0,45-0,74 Arus stabil tapi kecepatan dikendalikan									
0,75-0,84 Arus mendekati stabil									
0,85-1,00 Arus tidak stabil, terkadang terhenti									

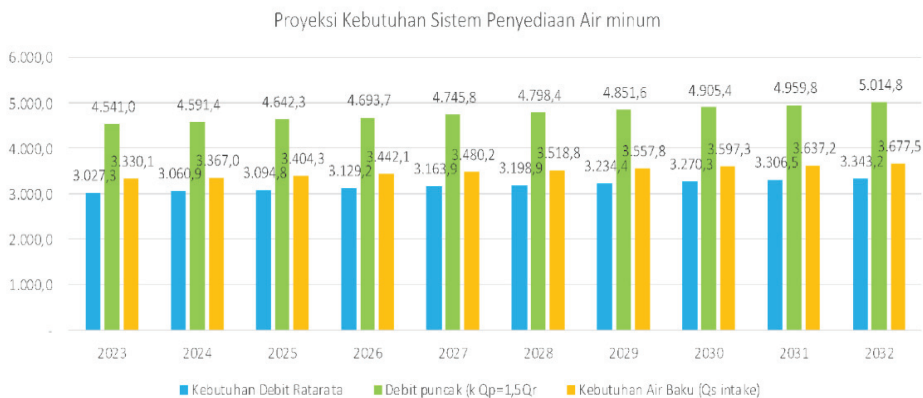
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.9 Peta Tingkat Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Permukiman

- Air Minum
Terdapat 14 titik SPAM yang berada di Kawasan Prioritas Pariwisata yang tersebar di beberapa kabupaten/kota



Gambar 7.10 Proyeksi Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.10 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan Prioritas Pariwisata

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (Liter/Detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Bukittinggi	274,91	277,29	279,67	282,05	291,56	303,46

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

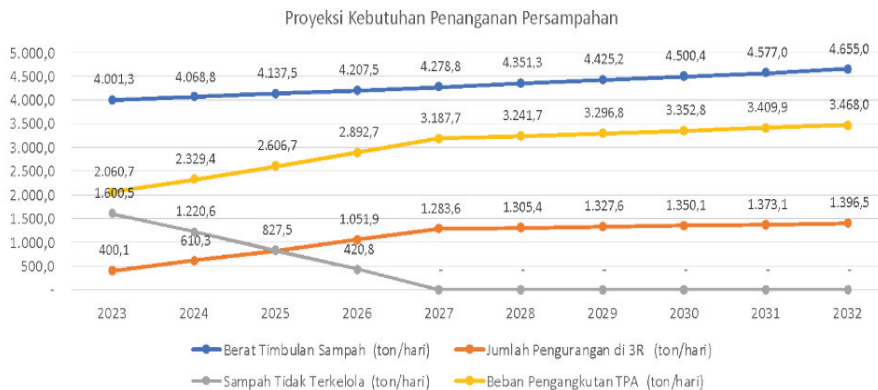
Rekomendasi terkait pelayanan air minum di Kawasan Bukittinggi - Solok Selatan dsk adalah Penambahan akses pelayanan pada kawasan strategis dan kawasan yang belum terlayani, baik melalui pelayanan non-perpipaan secara swadaya masyarakat maupun pelayanan perpipaan oleh PDAM.

- Persampahan
Dalam mengantisipasi perkembangan Kawasan Prioritas Pariwisata maka diperlukan sistem persampahan yang teratur dan baik yang terdiri dari sistem pewadahan, sistem pengumpulan, sistem pengangkutan, pengelolaan akhir dan pengelolaan. Merujuk pada Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka diperlukannya target reduksi sampah sebesar 30% pada tahun 2025.

Tabel 7.11 Proyeksi Timbulan Persampahan di Kawasan Prioritas Pariwisata

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (m ³ /tahun)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Bukittinggi	132451,84	133598,12	134744,40	135890,69	140475,82	146207,23

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.11 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Persampahan
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berikut beberapa rekomendasi terkait penanganan persampahan di KSPN Bukittinggi:

1. Pengurangan sampah melalui penyediaan TPS3R pada skala kawasan/kota.
2. Penyediaan TPS Kontainer dan alat angkut sampah menuju TPA
3. Optimalisasi TPA eksisting yang berada di Kota Sawahlunto, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok Selatan.

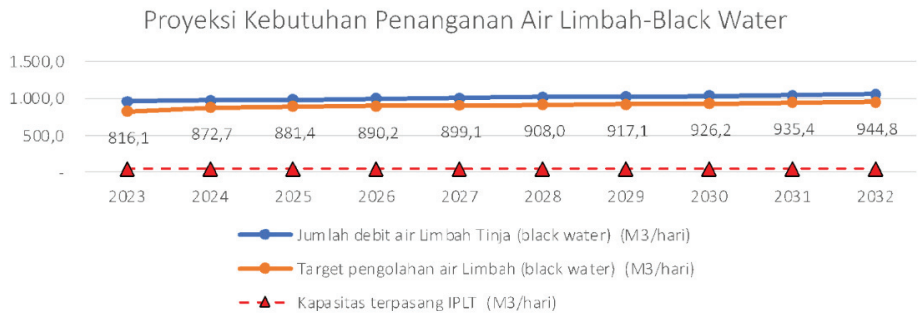
- Air Limbah

Rata-rata kondisi sistem sanitasi layak yang terdapat di kabupaten/kota Kawasan Prioritas Pariwisata berada pada kondisi yang baik yaitu sebesar 72,16% dengan kondisi terendah berada di Kabupaten Solok (47,63%).

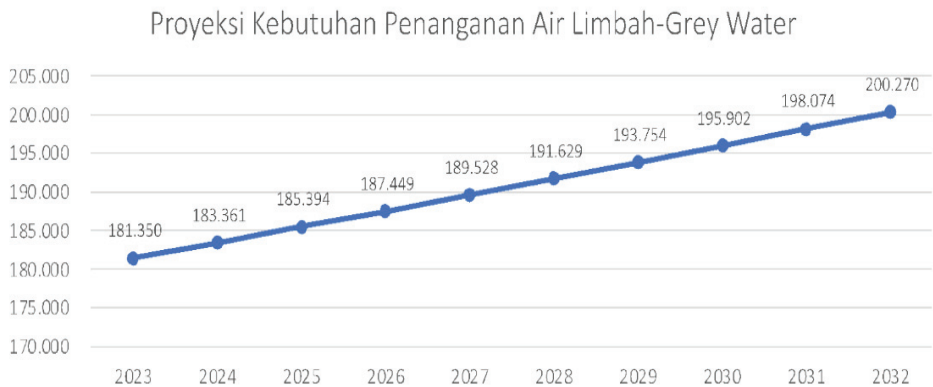
Tabel 7.12 Proyeksi Air Limbah Kawasan Prioritas Pariwisata

KABUPATEN	Total Limbah Cair (m ³ /hari)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Bukittinggi	15,83	15,97	16,11	16,25	16,79	17,48

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.12 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Air Limbah-Black Water



Gambar 7.13 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Air Limbah-Grey Water

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Beberapa rekomendasi terkait penanganan air limbah di KSPN Bukittinggi:

1. Penanganan sistem pengelolaan air limbah domestik periode 5 tahun kedepan masih menggunakan sistem setempat dan sistem terpusat skala kawasan.
2. Pada jangka panjang mulai dikembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala kota.

7.1.3 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Pertanian

Proyeksi Penduduk

Pengembangan Kabupaten Agam didasarkan atas proyeksi penduduk, jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2021 sebanyak 498.483 jiwa, pada tahun 2029 kenaikan penduduk menjadi 527.285 jiwa dan pada tahun 2034 kenaikan jumlah penduduk menjadi 545.286 jiwa penduduk.

Tabel 7.13 Proyeksi Penduduk Kawasan Prioritas Pertanian - Kabupaten Agam

No	Kabupaten/	Penduduk	Proyeksi				
	Kota	2021	2023	2024	2025	2029	2034
1	Agam	498.483	505.683	509.283	512.884	527.285	545.286

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Produktivitas Pertanian

Luas pertanaman padi dari tahun 2016-2020 terus meningkat yaitu dari angka 68.518 hektar menjadi 75.999 hektar. Untuk komoditas jagung tahun 2016 seluas 14.084 hektar meningkat menjadi 16.012 ha tahun 2019, namun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 15.507 hektar. Komoditas ubi kayu tahun 2016 seluas 930 hektar meningkat menjadi 1.642 hektar tahun 2019, namun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 406 hektar. Demikian juga dengan ubi jalar yang mengalami peningkatan, dimana luas tanam tahun 2016 seluas 1.157 hektar naik menjadi 1.398 hektar tahun 2019, namun tahun 2020 turun menjadi 633 hektar. Komoditas kacang tanah dan kacang hijau tahun 2016-2020 mengalami penurunan luas tanam. Komoditas hortikultura cabe merah dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami Peningkatan yaitu dari angka 2.843 hektar menjadi 3.895 hektar. Komoditas bawang merah juga meningkat dari 280 hektar pada tahun 2016 menjadi 769 hektar tahun 2020. Luas tanaman jeruk meningkat dari 258.219 pohon pada tahun 2016 menjadi 285.853 pohon tahun 2020. Komoditas manggis juga demikian meningkat dari 147.670 pohon tahun 2016 menjadi 155.589 pohon tahun 2020.

Tabel 7.14 Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Agam

No	Komoditi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	68518	75610	74869	75993	75999
2	Jagung	14084	15845	15891	16012	15507
3	Ubi Kayu	930	984	1621	1642	406
4	Ubi Jalar	1157	1113	1371	1398	663
5	Kacang Tanah	1217	841	1181	763	378
6	Kacang Hijau	47	44	31	19	10

Sumber: Pertanian dalam Data, 2020

Tabel 7.15 Proyeksi Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Agam

No	Komoditi	Proyeksi (ton)				
		2023	2024	2025	2029	2034
1	Padi	77495,2	78991,4	80487,6	86472,4	93953,4
2	Jagung	15791,6	16076,2	16360,8	17499,2	18922,2
3	Ubi Kayu	427	448	469	553	658
4	Ubi Jalar	723,25	783,5	843,75	1084,75	1386
5	Kacang Tanah	718	1058	1398	2758	4458
6	Kacang Hijau	13	16	19	31	46

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Sumber Daya Air – Air Baku

Sumber daya air yang terdapat di Kawasan Prioritas KPP Agam adalah WS Indragiri – Akuaman dan WS Batanghari. Potensi ketersediaan air hingga tahun 2033 adalah sebesar 1.058 m³/dt dari WS Indragiri - Akuaman dan 1.360 m³/dt dari WS Batanghari.

Tabel 7.16 Proyeksi Kebutuhan Air Baku di Kawasan Prioritas Pertanian

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (Liter/Detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Agam	1046,01	1053,51	1061,01	1068,51	1098,51	1136,01

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Indikasi penanganan kebutuhan penyediaan air baku:

Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting Kab Agam:

- Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Baso/S. Agam 0,09 m³/det;

- Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Lasi/S. Lasi 0,14 m³/det;
- Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Biaro/S. Agam 0,13 m³/det;
- Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Pakankamih/S. Agam 0,09 m³/det;
- Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Lubuk Basung/S. Antokan 0,24 m³/det;
- Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Maninjau/Danau 0,10 m³/det;
- Peningkatan kapasitas penyediaan air baku eksisting di Kamang Magek/S. Agam 0,02 m³/det;

Infrastruktur Sumber Daya Air – Bangunan Pengendalian Daya Rusak Air

Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis kebutuhan upaya pengendalian daya rusak air maka berikut adalah indikasi penanganannya:

- Normalisasi Batang Antokan, Kab. Agam, 3 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Lundang, Kec IV Angkat, Kab. Agam, 4 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Nilam, Kec. Tj Mutiara, Kab. Agam, 2 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Kurambik, Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam, 5 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Tiku, Kec. IV Koto, Kab. Agam, 10 km
- Pembuatan tanggul Sungai Batang Sitalang (Kampung Melayu), Kab. Agam, 1,5 km
- Pengamanan Tebing Batang Agam, Kab. Agam, 2,1 km
- Pengendalian Alur Sungai di Batang Tiku, Kab. Agam, 5 km
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Tiku di Kabupaten Agam, 1 km
- Reboisasi Hutan Bakau di Pantai Tanjung Mutiara, Kab. Agam, 542 ha

Infrastruktur Jaringan Jalan dan Jembatan

Secara umum tingkat pelayanan jalan di Kawasan Prioritas Pariwisata sampai dengan tahun 2030 diprediksikan masih tergolong baik, berada pada Grade A (volume lalu lintas rendah, bebas hambatan, kecepatan tinggi).

Terdapat beberapa ruas jalan yang diproyeksikan akan berada pada grade F (arus tidak stabil, terkadang terhenti) di tahun 2030 yakni pada ruas Jalan Tapan - batas Jambi (Kab. Pesisir Selatan); ruas jalan batas Kab. Tanah Datar – batas Kota Solok (Kab. Solok); ruas simpang Padang Luar - batas Kota Padang Panjang (Kab. Tanah

Datar); ruas Surian – simpang Padang Aro (Kab. Solok Selatan); ruas Jalan Lubuk Sikarah (Kota Solok); dan ruas jalan Prof. Hamka (Kota Padang Panjang).

Tabel 7.17 Proyeksi Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Fokus Pertanian

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI				
					NILAI VCR			NILAI LOS	
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2029 2034
PADANG SAWAH - MANGGOPOH	KI	32,41	0,18	A	0,22	0,26	0,31	B	B
SP. KUMPULAN - BTS. KOTA BUKIT TINGGI	A	46,50	0,25	B	0,31	0,37	0,44	B	B
SP. TALUK - SP. JAMBU AIR	A	0,73	0,23	B	0,28	0,34	0,40	B	B
BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO	A	15,13	0,66	C	0,82	0,98	1,17	D	E
BASO - BTS. KOTA BUKIT TINGGI	A	7,52	0,23	B	0,28	0,34	0,40	B	B
BTS. KOTA BUKITTINGGI - SP. PADANG LUAR	A	2,39	1,10	F	1,36	1,61	1,93	F	1,61

0.00-0.20 Bebas hambatan
0.20-0.44 Arus stabil tapi kecepatan dibatasi
0.45-0.74 Arus stabil tapi kecepatan dikendalikan
0.75-0.84 Arus mendekati stabil
0.85-1.00 Arus tidak stabil, terkadang terhenti

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Air Bersih

Kebutuhan air bersih Kabupaten Agam sekitar 159.646.380 liter/hari, pelayanan air minum di Kabupaten Agam adalah Penambahan akses pelayanan pada kawasan strategis dan kawasan yang belum terlayani, baik melalui pelayanan non-perpipaan secara swadaya masyarakat maupun pelayanan perpipaan oleh PDAM.

Tabel 7.18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan Prioritas Pertanian

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (Liter/Detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Agam	1307,51	1316,88	1326,26	1335,64	1373,14	1420,02

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

7.1.4 Analisis Kesenjangan Infrastuktur Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

Proyeksi Penduduk

Pengembangan kawasan DPP Mentawai – Siberut dsd didasarkan atas proyeksi penduduk, jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2021 sebanyak 95.384 jiwa, pada tahun 2034 kenaikan penduduk menjadi 117.244 jiwa.

Tabel 7.19 Proyeksi Penduduk Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk 2021	Proyeksi				
			2023	2024	2025	2029	2034
1	Kep. Mentawai	95.384	97.066	98.747	100.429	108.836	117.244

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Sumber Daya Air

Sumber daya air yang terdapat di Klaster Kepulauan Mentawai adalah WS Siberut – Pagai - Sipora yang merupakan kewenangan kabupaten dengan ketersediaan air 6,53 mm/hari atau 451,84 m³/dt yang tersebar seluas 5.982 km² yang terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, serta Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Kebutuhan total air baku di Klaster Mentawai mencapai 227,97 lt/dt atau 2,13 m³/dt khususnya dari kegiatan rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI). Dengan mempertimbangkan ketersediaan air sebesar 451,84 m³/dt, maka neraca air di Klaster Mentawai masih surplus.

Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (Liter/Detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Kepulauan Mentawai	185,37	188,58	191,79	177,27	188,95	203,55

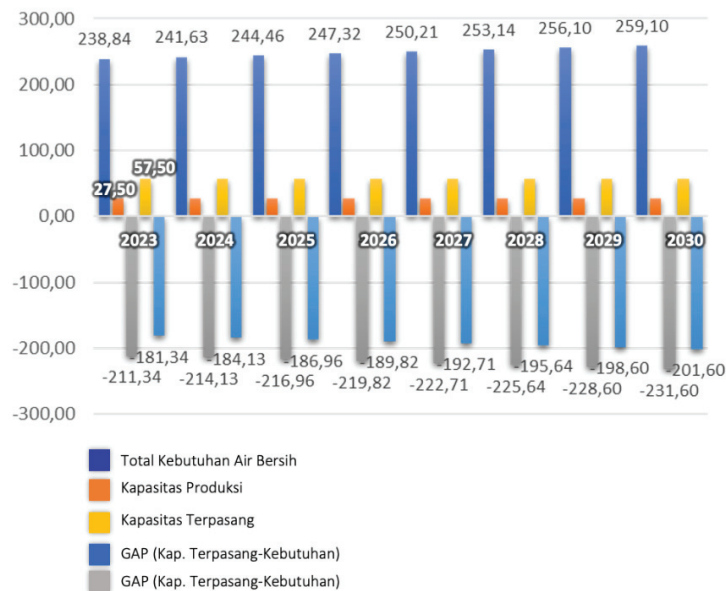
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

- Air Minum
Jumlah pengguna air minum pada tahun 2030 di Klaster Kep. Mentawai diperkirakan mencapai 98.144 jiwa dengan total kebutuhan air minum mencapai 259,10 lt/dt; sementara kapasitas produksi 27,50 lt/dt dan kapasitas terpasang 57,50 lt/dt. Sandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air minum menghasilkan gap sebesar (-) 201,60 lt/dt pada tahun 2030.

Tabel 7.21 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (Liter/Detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Kepulauan Mentawai	134,81	137,15	139,48	212,73	226,74	244,26

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.14 Total Kebutuhan Air Bersih, Kapasitas Produksi dan Terpasang, GAP Terpasang-Kebutuhan

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Beberapa rekomendasi terkait pelayanan air minum di Kep. Mentawai:

1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembangunan Perpipaan distribusi air
 2. Pengelolaan air bersih ditangani oleh UPT PAM Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Persampahan

Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2030 berdasarkan hasil proyeksi diperkirakan mencapai 244 m³/hr. Hal ini didukung oleh adanya rencana pembangunan TPA Tuapejat dengan kapasitas 451,71 m³/hr, dan luas areal TPA 5,1 ha. Dengan kebutuhan luas areal pada akhir tahun proyeksi seluas 7,36 ha, dan menyandingkan kebutuhan luas areal persampahan dengan luas rencana TPA Tuapejat, maka kapasitas luasan TPA akan mengalami *over capacity* sebesar - 2,26 ha, sehingga perlu dikembangkan TPA lainnya.

Berikut merupakan rekomendasi untuk penanganan persampahan di Kep. Mentawai:

1. Perencanaan dan Pembangunan TPA
2. Penyediaan TPS3R

Tabel 7.22 Proyeksi Timbulan Persampahan Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (m ³ /tahun)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Kepulauan Mentawai	97430,00	99117,30	100805,11	102492,91	109244,14	117683,67

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

- Air Limbah
Jumlah timbulan air limbah domestik di Klaster Kepulauan Mentawai tahun 2030 diperkirakan mencapai 9365,58 m³/hr dan lumpur tinja 29,27 m³/hr. Dengan cakupan pelayanan eksisting 47% pada tahun 2021, maka kebutuhan IPAL komunal di tahun 2030 untuk melayani + 50 KK adalah sebesar 491 unit, IPLT 10 unit, dan truk tinja 5 unit.

Tabel 7.23 Proyeksi Air Limbah Kawasan Prioritas Daerah Tertinggal Kepulauan Mentawai

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI (m ³ /tahun)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Kepulauan Mentawai	12,81	13,03	13,26	12,25	13,06	14,07

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Berikut beberapa rekomendasi penanganan air limbah di Kep. Mentawai:

1. Pembangunan IPAL Terpusat
2. Pembangunan IPLT

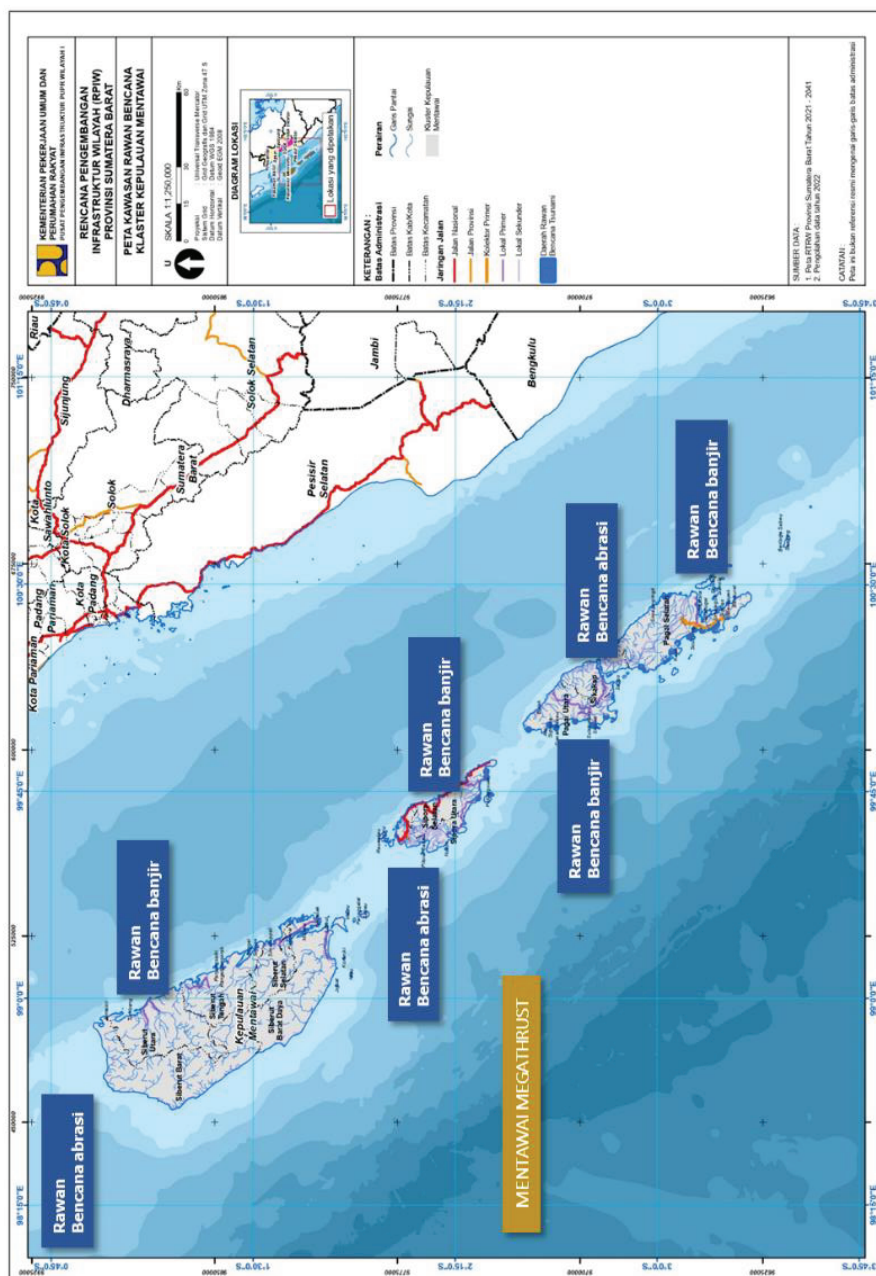
Infrastruktur Sumber Daya Air – Bangunan Pengendalian Daya Rusak Air

Berdasarkan kondisi eksisting Kepulauan Mentawai dan analisa kebutuhan upaya pengendalian daya rusak air maka berikut adalah indikasi penanganannya:

- 1) Pembangunan pengaman pantai Sioban-Sipora Selatan, Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut, Muara Sikabalu
- 2) Pembangunan embung, penampungan air hujan, serta akuifer buatan simpanan air hujan



5 Peta Potensi Ketersediaan Air Mentawai dsk
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.16 Peta Sebaran Lokasi Rawan Bencana Banjir Kepulauan Mentawai
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Infrastruktur Jaringan Jalan dan Jembatan

Total Ruas jalan nasional terbangun di Klaster Kepulauan Mentawai adalah sepanjang 89,49 km, terbagi menjadi tiga ruas:

- Ruas Tuapejat-Rokot: panjang jalan 36,1 km; lebar jalan 8,42 m; volume kendaraan 497 smp/hari, tingkat kemantapan 98,83%; IRI 4,9 dengan V/C R 0,07
- Ruas jalan Rokot-Sioban: panjang jalan 21 km; lebar jalan 4,38 m; volume kendaraan 0 smp/hari, tingkat kemantapan jalan 87,59%; IRI 6,06 dengan V/C R 0,02
- Ruas jalan Sioban-Katiet: panjang jalan 32,29 km; lebar jalan 3,99 m; volume kendaraan 0 smp/hari, tingkat kemantapan jalan 13,19%; IRI 12,37 dengan V/C R 0,00

Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan dari tinjauan kondisi eksisting:

- Secara umum tingkat pelayanan jalan di Klaster Kepulauan Mentawai sampai dengan tahun 2030 diprediksikan masih tergolong baik, berada pada Grade A (volume lalu lintas rendah, bebas hambatan, kecepatan tinggi).
- Standar teknis jalan yang memerlukan penanganan >22.000 smp/hr, sedangkan Proyeksi Volume Kendaraan di Ruas jalan Tuapejat-Rokot 4.369 smp/hari, sehingga ruas Jalan Tuapejat - Rokot belum terlalu mendesak untuk mendapatkan penanganan.

Ruas jalan nasional yang mendesak untuk mendapatkan penanganan adalah Jalan Sioban - Katiet (Sioban - Sagitci dan Sagitci - Katiet) dimana terjadi abrasi pantai yang mengancam terjadinya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan permukiman di sekitarnya, sehingga selain diperlukan perbaikan terhadap jalan dengan kondisi rusak berat atau pengalihan trase, juga perlu didukung oleh pengembangan bangunan pengaman pantai.

Tabel 7.24 Proyeksi Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI				
					NILAI VCR			NILAI LOS	
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2029 2034
TOAPEJAT - ROKOT	K1	36,10	0,07	A	0,09	0,11	0,13	A	A
SIOBAN - KATIET	K1	32,39	0,00	A	0,00	0,00	0,00	A	A
ROKOT - SIOBAN	K1	21,00	0,02	A	0,03	0,03	0,04	A	A

0.00-0.20

0.20-0.44

0.45-0.74

0.75-0.84

0.85-1.00

Bebas hambatan

Arus stabil tapi kecepatan dibatasi

Arus stabil tapi kecepatan dikendalikan

Arus mendekati stabil

Arus tidak stabil, terkadang terhenti

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 7.17 Peta Jaringan Jalan Kepulauan Mentawai
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

7.1.5 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal (SPM) di Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan analisis kesenjangan SPM diantaranya sebagai berikut.

Tabel 7.25 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kota/Kab di Sumatera Barat

KAB/KOTA	KEBUTUHAN AIR BAKU (Liter/Detik)												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kepulauan Mentawai	185	189	192	177	180	183	186	189	192	195	198	201	204
Pesisir Selatan	1,029	1,037	1,044	1,051	1,059	1,066	1,074	1,081	1,045	1,052	1,060	1,067	1,074
Kab.Solok	826	831	837	842	847	853	858	863	868	874	879	884	890
Sijunjung	431	438	444	451	457	464	470	477	483	490	496	502	509
Tanah Datar	761	763	765	767	769	770	772	774	776	778	780	781	783
Padang Pariaman	917	923	928	933	938	943	949	954	959	964	969	974	980
Agam	1,046	1,054	1,061	1,069	1,076	1,084	1,091	1,099	1,106	1,114	1,121	1,129	1,136
Lima Puluh Kota	854	861	869	876	884	891	899	906	914	921	929	936	944
Pasaman	503	508	513	518	653	659	666	672	678	684	690	696	702
Solok Selatan	312	317	321	326	331	336	341	346	351	356	361	366	370
Dharmasraya	462	472	483	494	504	515	657	670	683	697	710	723	736
Pasaman Barat	1,017	1,035	1,054	1,072	1,046	1,064	1,081	1,098	1,116	1,133	1,151	1,168	1,185
Padang	2,571	2,603	2,635	2,666	2,698	2,729	2,761	2,792	2,824	2,855	2,887	2,918	2,950
Kota Solok	143	145	147	150	152	154	157	159	161	164	166	168	171
Sawahlunto	123	124	125	126	127	128	129	131	132	133	134	135	136
Padang Panjang	87	88	89	90	92	93	94	95	117	119	120	121	123
Bukittinggi	229	231	233	235	237	239	241	243	245	247	249	251	253
Payakumbuh	246	249	252	256	259	262	266	269	272	276	279	283	286
Pariaman	174	176	178	180	182	183	185	187	189	191	193	177	178

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.26 Analisis Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan di Provinsi Sumatera Barat

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI					
					NILAI VCR			NILAI LOS		
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2029	LOS 2034
PADANG BYPASS II (BARU)	A	22,27	0,49	C	0,60	0,72	0,86	C	C	E
JLN. PROF. DR. HAMKA (PADANG)	A	4,10	0,77	D	0,96	1,14	1,14	E	F	F
JLN. ADINEGORO (PADANG)	A	9,49	0,50	C	0,62	0,74	0,88	C	C	E
BTS. KOTA PADANG - JLN. SIMP. HARU	A	23,46	0,32	B	0,39	0,47	0,56	B	C	C
PADANG BYPASS I	A	4,90	0,49	C	0,60	0,72	0,86	C	C	E
BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR (PADANG)	A	1,17	0,07	A	0,09	0,11	0,13	A	A	A
JLN. BUKIT PUTUS - BTS. KOTA PADANG (PADANG)	K1	22,46	0,69	C	0,85	1,01	1,21	E	F	F
LUBUK ALUNG - SIMP. DUKU	A	13,49	0,89	E	1,10	1,30	1,56	F	F	F
BTS. KOTA PADANG PANJANG - SICINCIN	A	19,29	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A	A
MANGGAPOH - BTS. KOTA PARIAMAN	K1	40,06	0,16	A	0,19	0,23	0,28	A	B	B
BANDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU (BIM) - SIMP. DUKU	A	2,80	0,29	B	0,36	0,43	0,51	B	B	C
SICINCIN - LUBUK ALUNG	A	13,51	0,13	A	0,17	0,20	0,23	A	A	B
KURAITAJI - LUBUK ALUNG	K1	16,98	0,26	B	0,33	0,39	0,46	B	B	C
JLN. ZAINI (PARIAMAN)	K1	0,80	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A	A
JLN. SITI MANGGOPOH (PARIAMAN)	K1	4,22	0,27	B	0,34	0,40	0,48	B	B	C
BY PASS PARIAMAN (KOTA PARIAMAN)	K1	5,20	0,03	A	0,04	0,05	0,06	A	A	A
JLN. AHMAD DAHLAN (PARIAMAN)	K1	0,61	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A	A
JLN. SOEKARNO - HATTA (PARIAMAN)	K1	2,09	0,03	A	0,04	0,05	0,06	A	A	A

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI					
					NILAI VCR			NILAI LOS		
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2029	LOS 2034
TOAPEJAT - ROKOT	K1	36,10	0,07	A	0,09	0,11	0,13	A	A	A
SIOBAN - KATIET	K1	32,39	0,00	A	0,00	0,00	0,00	A	A	A
ROKOT - SIOBAN	K1	21,00	0,02	A	0,03	0,03	0,04	A	A	A
BUKIT TINGGI BYPASS I (SP. TAMAN - SP. BY PASS ANAK AIR)	A	2,60	0,28	B	0,35	0,41	0,50	B	B	C
SP. AUR KUNING - SP. TALUK	A	1,27	0,66	C	0,82	0,97	1,16	D	E	F
JLN. SOEKARNO HATTA (BUKITTINGGI)	A	2,13	0,40	B	0,49	0,58	0,70	C	C	C
JLN. SUDIRMAN (B.TINGGI)	A	1,22	0,82	E	1,02	1,21	1,45	F	F	F
BUKIT TINGGI BYPASS II (JLN. ST. SYAHRIR (SP. LAPANGAN KANTIN) - SP. AUR KUNING - SP. BYPASS ANAK AIR)	A	3,80	0,51	C	0,63	0,75	0,89	C	D	E
PADANG SAWAH - MANGGOPOH	K1	32,41	0,18	A	0,22	0,26	0,31	B	B	B
SP. KUMPULAN - BTS. KOTA BUKIT TINGGI	A	46,50	0,25	B	0,31	0,37	0,44	B	B	B
SP. TALUK - SP. JAMBU AIR	A	0,73	0,23	B	0,28	0,34	0,40	B	B	B
BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO	A	15,13	0,66	C	0,82	0,98	1,17	D	E	F
BASO - BTS. KOTA BUKIT TINGGI	A	7,52	0,23	B	0,28	0,34	0,40	B	B	B
BTS. KOTA BUKITTINGGI - SP. PADANG LUAR	A	2,39	1,10	F	1,36	1,61	1,93	F	1,61	F
JUNCTION (KOTO BARU) - BTS. PROV. JAMBI	A	13,33	0,34	B	0,43	0,51	0,61	B	C	C
SEI DAREH - JUNCTION (KOTO BARU)	A	31,14	0,29	B	0,36	0,43	0,51	B	B	C
BTS. KAB. DHAMAS RAYA - SEI DAREH	A	14,25	0,30	B	0,37	0,44	0,53	B	C	C
JLN. K.H. AHMAD DAHLAN (PAYAKUMBUH)	A	4,94	0,63	C	0,78	0,92	1,10	D	E	F
JLN. SOEKARNO HATTA (PAYAKUMBUH)	A	3,76	1,01	F	1,25	1,49	1,78	F	F	F

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI				
					NILAI VCR			NILAI LOS	
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2034
JLN. KH. DEWANTORO (SOLOK)	A	0,89	0,32	B	0,40	0,48	0,57	B	C
JLN. DIPONEGORO (SOLOK)	A	0,35	0,32	B	0,40	0,48	0,57	B	C
JLN. A. YANI (SOLOK)	A	0,58	0,30	B	0,38	0,45	0,53	B	C
BTS. PROV. RIAU - BTS. KOTA PAYAKUMBUH	A	72,93	0,29	B	0,36	0,42	0,51	A	B
BTS. PROV. RIAU - BTS. KOTA PAYAKUMBUH	A	72,93	0,29	B	0,36	0,42	0,51	B	B
RANJAU BATU (BTS. PROV. SUMUT) - PANTI	A	36,90	0,33	B	0,40	0,48	0,57	B	C
BTS. KOTA LUBUK SIKAPING - SP. KUMPULAN	A	20,68	0,34	B	0,43	0,51	0,61	B	C
LUBUK SIKAPING BY PASS	A	7,33	0,32	B	0,40	0,48	0,57	B	C
SIMP. AIR BALAM - SIMP. EMPAT	K1	62,54	0,33	B	0,41	0,49	0,59	B	C
SIMP. EMPAT - PADANG SAWAH	K1	41,20	0,41	B	0,50	0,60	0,72	C	C
BTS. KOTA PADANG - BTS. KOTA PAINAN	K1	48,81	0,34	B	0,42	0,50	0,59	B	C
TAPAN - BTS. PROV. BENGKULU	K1	39,74	0,36	B	0,45	0,53	0,63	C	C
JLN. PROF. HAMKA (PADANG PANJANG)	A	1,00	0,04	A	0,05	0,06	0,07	A	A
JLN. PASAR TERNAK GANTING	A	0,70	0,08	A	0,10	0,12	0,15	A	A
JLN. BKIA - SOLOK BATUNG	A	1,25	0,07	A	0,09	0,11	0,13	A	A
JLN. M. DAUD RASIDI (PADANG PANJANG)	A	0,80	0,07	A	0,09	0,11	0,13	A	A
JLN. HAMKA - BUKIT SURUNGAN	A	0,07	0,00	A	0,00	0,00	0,00	A	A
JLN. KOMARULLAH (PADANG PANJANG)	A	0,75	0,04	A	0,05	0,06	0,07	A	A
JLN. BUKIT SURUNGAN - BUKIT KANDUNG	A	1,40	0,07	A	0,09	0,11	0,13	A	A
JLN. SOLOK BATUNG - KACANG KAYU	A	1,40	0,04	A	0,05	0,06	0,07	A	A

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI				
					NILAI VCR			NILAI LOS	
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2029 2034
JLN. ST. SYAHRIR (PADANG PANJANG)	A	4,46	0,10	A	0,13	0,15	0,18	A	A
JLN. DIPONEGORO (PAYAKUMBUH)	A	6,21	0,20	A	0,25	0,29	0,35	A	B
JLN. SUDIRMAN (PAYAKUMBUH)	A	0,54	0,23	B	0,28	0,34	0,40	B	B
BTS. KOTA SAWAHLUNTO - MUARA KALABAN	A	6,75	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A
JLN. SAWAHLUNTO - MUARA KALABAN (SAWAHLUNTO)	K1	5,45	0,08	A	0,10	0,12	0,15	A	A
JLN. HAMKA (SOLOK)	A	1,10	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A
SOLOK BYPASS (JL. NASIR PAMUNCAK)	A	3,12	0,09	A	0,12	0,14	0,17	A	A
JLN. LUBUK SIKARAH (SOLOK)	A	0,78	0,10	A	0,13	0,15	0,18	A	A
PANTI - BTS. KOTA LUBUK SIKAPING	A	27,90	0,18	A	0,22	0,26	0,31	B	B
BEDENG RAPAT (BTS. PROV. SUMUT) - SILAPING	K1	13,82	0,22	B	0,27	0,32	0,39	B	B
SILAPING - SIMP. AIR BALAM	K1	17,74	0,08	A	0,10	0,12	0,15	A	A
JLN. ILYAS YAKUB (PAINAN)	K1	0,97	0,05	A	0,06	0,08	0,09	A	A
BTS. KOTA PAINAN - KAMBANG	K1	52,60	0,23	B	0,29	0,34	0,41	A	B
INDRAPURA - TAPAN	K1	24,36	0,21	B	0,26	0,31	0,37	B	B
TAPAN - BTS. JAMBI	K1	25,45	0,03	A	0,04	0,05	0,06	A	A
JLN. SUTAN SYAHRIR (PAINAN)	K1	0,66	0,04	A	0,05	0,06	0,07	A	A
KAMBANG - INDRAPURA	K1	58,25	0,21	B	0,26	0,31	0,37	B	B
MUARA KALABAN - TANAH BADANTUNG	A	25,45	0,05	A	0,06	0,08	0,09	A	A
TANAH BADANTUNG - KILIRANJAO	A	52,12	0,28	B	0,35	0,42	0,50	B	C
KILIRANJAO - BTS. PROV. RIAU	K1	23,29	0,10	A	0,13	0,15	0,18	A	A

NAMA RUAS	FUNGSI	PANJANG (Km)	NILAI VCR 2020	NILAI LOS 2020	PROYEKSI				
					NILAI VCR			NILAI LOS	
					2025	2029	2034	LOS 2025	LOS 2029 2034
KILIRANJAO - BTS. KAB. DHAMAS RAYA	A	7,83	0,19	A	0,23	0,28	0,33	B	B
LUBUK SELASIH - SURIAN	K1	62,58	0,02	A	0,03	0,03	0,04	A	A
BTS. KAB. TANAH DATAR - BTS. KOTA SOLOK	A	19,90	0,11	A	0,14	0,17	0,20	A	A
JLN. IMAM BONJOL (SOLOK)	A	2,34	0,14	A	0,17	0,20	0,24	A	A
BTS. KOTA SOLOK - BTS. KOTA SAWAHLUNTO	A	16,84	0,11	A	0,14	0,17	0,20	A	A
BTS. KOTA SOLOK - LUBUK SELASIH	A	22,81	0,14	A	0,17	0,20	0,24	A	A
LUBUK SELASIH - BTS. KOTA PADANG	A	8,90	0,22	B	0,27	0,32	0,39	B	B
SP. PADANG ARO - BTS. JAMBI	K1	34,00	0,04	A	0,05	0,06	0,07	A	A
SURIAN - SP. PADANG ARO	K1	65,22	0,05	A	0,06	0,08	0,09	A	A
SP. PADANG LUAR - BTS. KOTA PADANG PANJANG	A	13,09	0,20	A	0,24	0,29	0,35	B	B
KUBU KERAMBIL - BTS. KAB. TANAH DATAR	A	20,70	0,06	A	0,08	0,09	0,11	A	A
BTS. KOTA PADANG PANJANG - KUBU KERAMBIL	A	4,75	0,08	A	0,10	0,12	0,15	A	A

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.27 Kebutuhan Infrastruktur Sistem Pelayanan Air Minum Provinsi Sumatera Barat

No	UPTD/PERUMDA/PDAM	Jumlah Unit	Tahun Dibangun SPAM	Kapasitas (L/det)			Idle Capacity
				Terpasang	Produksi	Distribusi	
1	PDAM Kota Padang	13	1897	1,465.00	1,500.27	1,304.41	(35.27)
2	PERUMDA Air Minum Kota Bukittinggi	8	1975	251.50.00	214.32.00	195.23.00	37.18.00
3	PDAM Kota Padang Panjang	10	1979	226.00.00	180.68	166.24.00	45.32.00
4	UPTD Kota Pariaman	2	2017	60.00.00	17.50	00.00	42.50.00
5	PERUMDA Air Minum Kota Payakumbuh	5	1986	448.00.00	370.00.00	321.75	78.00.00
6	PDAM Kota Sawahlunto	8	1992	190.00.00	105.47.00	97.83	84.53.00
7	PDAM Kota Solok	7	1982	340.00.00	262.43.00	234.33.00	77.57.00
8	PDAM Kabupaten Agam	9	1989	227.50.00	165.50.00	124.76	62.00.00
9	UPTD Kabupaten Dharmasraya	8	2013	135.00.00	74.00.00	00.00	61.00.00
10	UPTD Kabupaten Kepulauan Mentawai	8	2013	57.50.00	10.00	00.00	47.50.00
11	PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota	12	1992	177.50.00	156.50.00	132.24.00	21.00
12	PDAM Kabupaten Padang Pariaman	18	1990	825.00.00	578.00.00	211.02.00	247.00.00
13	PDAM Kabupaten Pasaman	11	1989	289.00.00	167.80	159.34.00	121.21.00
14	PDAM Kabupaten Pasaman Barat	8	2006	242.50.00	112.60	121.67	129.90
15	PDAM Kabupaten Pesisir Selatan	14	1983	410.00.00	246.00.00	232.79	164.00.00
16	PDAM Kabupaten Sijunjung	19	1993	260.00.00	119.50.00	114.29.00	140.50.00
17	PDAM Kabupaten Solok	14	1983	360.00.00	164.25.00	150.43.00	195.75
18	PDAM Kabupaten Solok Selatan	16	2005	270.00.00	167.96	120.43.00	102.04.00

No	UPTD/PERUMDA/PDAM	Jumlah Unit	Tahun Dibangun SPAM	Kapasitas (L/det)			Idle Capacity
				Terpasang	Produksi	Distribusi	
19	PDAM Kabupaten Tanah Datar	10	1987	367.50.00	255,88	189.46.00	111.62
Jumlah				6,692.00	4,868.65	3,876.22	1,823.35

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.28 Presentase Kesenjangan Sistem Pelayanan Air Minum Provinsi Sumatera Barat

KABUPATEN	UPTD/PERUMDA/PDAM	Jumlah SPAM	SR	2021	AIR MINUM AMAN	KEBUTUHAN SR 2024	AIR MINUM AMAN	KEBUTUHAN SR 2029	AIR MINUM AMAN	KEBUTUHAN SR 2034	AIR MINUM AMAN
					33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Kepulauan Mentawai	UPTD Kabupaten Kepulauan Mentawai	8	2138	23846	8,97%	25528	8,38%	27209	7,86%	29311,00	7,29%
Pesisir Selatan	PDAM Kabupaten Pesisir Selatan	14	25297	117698	21,49%	121132	20,88%	124567	20,31%	128859,25	19,63%
Kab.Solok	PDAM Kabupaten Solok	14	18115	94570	19,16%	97002	18,67%	99435	18,22%	102475,50	17,68%
Sijunjung	PDAM Kabupaten Sijunjung	19	13871	61202	22,66%	64918	21,37%	68634	20,21%	73279,00	18,93%
Tanah Datar	PDAM Kabupaten Tanah Datar	10	19378	87479	22,15%	88327	21,94%	89174	21,73%	90233,75	21,48%
Padang Pariaman	PDAM Kabupaten Padang Pariaman	18	31628	105096	30,09%	107480	29,43%	109864	28,79%	112844,25	28,03%
Agam	PDAM Kabupaten Agam	9	17976	124621	14,42%	128221	14,02%	131821	13,64%	136321,50	13,19%
Lima Puluh Kota	PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota	12	16697	97459	17,13%	100920	16,54%	104381	16,00%	108707,00	15,36%
Pasaman	PDAM Kabupaten Pasaman	11	18908	71719	26,36%	74551	25,36%	77383	24,43%	80922,75	23,37%
Solok Selatan	PDAM Kabupaten Solok Selatan	16	13154	44179	29,77%	46999	27,99%	49818	26,40%	53342,75	24,66%
Dharmasraya	UPTD Kabupaten Dharmasraya	8	1444	64953	2,22%	71070	2,03%	77187	1,87%	84832,50	1,70%
Pasaman Barat	PDAM Kabupaten Pasaman Barat	8	11027	115108	9,58%	123461	8,93%	131815	8,37%	142257,00	7,75%
Padang	PDAM Kota Padang	13	111848	243833	45,87%	255939	43,70%	268045	41,73%	283177,00	39,50%
Kota Solok	PDAM Kota Solok	7	18155	18366	98,85%	19592	92,67%	20818	87,21%	22350,00	81,23%
Sawahlunto	PDAM Kota Sawahlunto	8	8557	15923	53,74%	16508	51,84%	17092	50,06%	17823,00	48,01%
Padang Panjang	PDAM Kota Padang Panjang	10	9300	13775	67,52%	14477	64,24%	15180	61,27%	16057,75	57,92%
Bukittinggi	PERUMDA Air Minum Kota Bukittinggi	8	14355	32704	43,89%	33846	42,41%	34988	41,03%	36415,25	39,42%
Payakumbuh	PERUMDA Air Minum Kota Payakumbuh	5	27373	34876	78,49%	36815	74,35%	38754	70,63%	41177,25	66,48%
Pariaman	UPTD Kota Pariaman	2	1515	22599	6,70%	23547	6,43%	24495	6,18%	25680,25	5,90%

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.29 Kebutuhan Infrastruktur Persampahan Provinsi Sumatera Barat

KABUPATEN	Timbulan Sampah Eksisting (m ³ /tahun)	Timbulan Sampah Tahun 2032 (m ³ /tahun)	Sampah Masuk (ton/hari)	Cakupan Pelayanan (%)	TPA	Status
Kepulauan Mentawai	97.430	109244	-	-		Belum ada
Pesisir Selatan	290.793	367181	86,13	33,80	TPA Gunung Bungkok	Overload
			0,00	0,00	TPA Tapan	Belum Dioperasikan
Kab.Solok	451.620	471818	36,00	18,26	TPA Regional Ampang Kualo	Underload
Sijunjung	249.456	275566	15,00	12,64	TPA Muaro Batuak	Open Dumping
Tanah Datar	416.091	423132	18,96	10,15	TPA Bukit Sangkhang	Underload
Padang Pariaman	501.506	521305	18,20	8,41	TPA Ladang Laweh	Underload
Agam	503.966	529262	17,33	7,15	TPA Sungai Jariang	Underload
Lima Puluh Kota	466.547	495287	24,87	9,13	Masuk ke TPA Regional Payakumbuh	Overload
			80,68	69,79	TPA Rabusa Pulau Punjung	Overload
Pasaman	290.793	367181	14,36	7,45	Masuk ke TPA Regional Payakumbuh	Overload
			74,11	48,90	TPA Puncak Labui	Overload
Solok Selatan	180.207	200020	14,00	15,15	TPA Jujutan	
			5,50	6,00	TPA Lubuk Gadang Timur	Open Dumping
Dharmasraya	266.926	366251	110,75	83,60	Masuk ke TPA Regional Payakumbuh	Overload

KABUPATEN	Timbulan Sampah Eksisting (m3/tahun)	Timbulan Sampah Tahun 2032 (m3/tahun)	Sampah Masuk (ton/hari)	Cakupan Pelayanan (%)	TPA	Status
Pasaman Barat	556.094	529237	32,00	21,12	TPA Muara Kiawai	Underload
Padang	1.171.346	1271871	440,00	91,32	TPA Air Dingin	Overload
Kota Solok	74.968	83582	32,50	67,57	TPA Regional Ampang Kualo	Underload
Sawahlunto	64.519	68625	17,50	54,86	TPA Kayu Gadang	Underload
Padang Panjang	50.918	55405	42,84	89,25	TPA Sungai Andok	Overload
Bukittinggi	132.452	140476	110,75	83,60	Masuk ke TPA Regional Payakumbuh	Overload
Payakumbuh	141.971	155595	225,78	89,50	TPA Regional Payakumbuh	Overload
Pariaman	91.688	98348	36,14	54,30	TPA Tungkal Selatan	Overload

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.30 Proyeksi Timbulan Persampahan Kota/Kab di Sumatera Barat

KAB/KOTA	HASIL PROYEKSI												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kepulauan Mentawai	97.430	99.117	100.805	102.493	104.181	105.869	107.557	109.244	110.932	112.620	114.308	115.995	117.684
Pesisir Selatan	562.551	566.624	570.698	574.773	578.846	582.920	586.993	591.068	593.581	597.028	510.475	513.923	517.370
Kab.Solok	451.620	454.505	457.391	460.276	463.162	466.047	468.933	471.818	474.704	477.589	480.475	483.360	486.246
Sijunjung	249.456	253.186	256.916	260.646	264.376	268.106	271.836	275.566	279.295	283.025	286.755	290.485	294.215
Tanah Datar	416.091	417.097	418.103	419.109	420.114	421.120	422.126	423.132	424.137	425.143	426.148	427.154	428.159
Padang Pariaman	501.506	504.334	507.162	509.991	512.819	515.647	518.475	521.305	524.133	526.961	529.789	532.618	535.446
Agam	503.966	507.579	511.193	514.807	518.421	522.034	525.648	529.262	532.876	536.489	540.103	543.717	547.331
Lima Puluh Kota	466.547	470.653	474.759	478.864	482.970	487.075	491.181	495.287	499.392	503.498	507.603	511.709	515.815
Pasaman	290.793	293.636	296.479	299.321	357.103	360.462	363.822	367.181	370.541	373.900	377.260	380.619	383.978
Solok Selatan	180.207	183.038	185.868	188.699	191.529	194.359	197.190	200.020	202.850	205.680	208.511	211.342	214.171
Dharmasraya	266.926	273.066	279.206	285.346	291.485	297.625	358.995	366.251	373.506	380.763	388.019	395.275	402.530
Pasaman Barat	556.094	566.004	575.914	585.824	594.081	512.467	520.852	529.237	537.622	546.007	554.392	562.778	571.162
Padang	1.171.346	1.185.707	1.200.067	1.214.428	1.228.789	1.243.150	1.257.510	1.271.871	1.286.232	1.300.593	1.314.953	1.329.314	1.343.675
Kota Solok	74.968	76.199	77.429	78.660	79.890	81.121	82.352	83.582	84.813	86.043	87.274	88.505	89.735
Sawahlunto	64.519	65.105	65.692	66.279	66.866	67.452	68.039	68.625	69.213	69.799	70.386	70.972	71.559
Padang Panjang	50.918	51.559	52.200	52.841	53.483	54.123	54.765	55.405	61.651	62.356	63.062	63.766	64.472
Bukittinggi	132.452	133.598	134.744	135.891	137.037	138.183	139.330	140.476	141.622	142.768	143.915	145.061	146.207
Payakumbuh	141.971	143.918	145.864	147.810	149.756	151.703	153.649	155.595	157.542	159.488	161.434	163.380	165.327
Pariaman	91.688	92.639	93.591	94.542	95.494	96.445	97.397	98.348	99.300	100.252	101.203	102.155	103.106

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.31 Analisis Infrastruktur Sistem Pelayanan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten	Nama Infrastruktur	Tipe	Lokasi	Kapasitas (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Idle Capacity (m3/hari)	Target Layanan terhadap Jumlah Penduduk		Capaian Layanan terhadap Total Jumlah Penduduk	
							Jiwa	%	Jiwa	%
AGAM	IPLT Sungai Jariang	IPLT	Lubuk Basung	15	3,94	11,06	30000	6	7880	1,5
DHARMASRAYA	IPAL Perumahan Ranah Tibarau	IPAL	Blangpidie	50	0	50	625	0,27	0	0
	IPLT Sitiung V Rabusa	IPLT	Gunung Medan, Sitiung	12	3	9	24000	10,38	6000	2,59
	IPLT Aur Jaya	IPLT	Koto Padang, Koto Baru	24	0,5	23,5	48000	20,8	1000	0,43
	IPLT Sago	IPLT	Bukit Penyabungan Sago	50	5	45	100000	19,62	10000	1,96
Pesisir Selatan	IPAL Ampang Pulau Pulau Karam 1	IPAL	Kec. Koto XI Tarusan	20	20	20	20	0	250	
	IPAL Salido	IPAL	Kec. IV Jurai	120	84,4	35,6	1500		1055	
	IPAL Sago Salido	IPAL	Kec. IV Jurai	160	68	92	2000		850	
	IPAL SMK Kelautan Sago	IPAL	Kec. IV Jurai	80	40,8	39,2	1000		510	
Tanah Datar	IPLT Kuti Anyir	IPLT	Saruaso, Tanjung Emas	25	0	25	50000	13,37	0	0

Kabupaten	Nama Infrastruktur	Tipe	Lokasi	Kapabilitas (m3/hari)	Kapabilitas Terpakai (m3/hari)	Idle Capacity (m3/hari)	Target Layanan terhadap Jumlah Penduduk		Capaian Layanan terhadap Total Jumlah Penduduk	
							Jiwa	%	Jiwa	%
Kota Padang	IPLT Surau Gadang	IPLT	Surau Gadang, Nanggalo	81,6	18	63,6	163200	17,87	36000	3,94
	IPAL Banda Buek	IPAL	Banda Buek, Lubuk Kilangan	250	0	250	2403	0,26	0	0
	IPAL Danau Cimpago	IPAL	Purus, Padang Barat	75	0	75	722	0,09	0	0
Padang Panjang	IPLT Kota Padang Panjang (IPLT Sungai Andok)	IPLT	Kampung Manggis, Padang Panjang Bara	25	4	21	50000	87,76	8000	14,04
	IPAL Desa Taluak	IPAL	Desa Taluak, Kota Pariaman	50	35	15	782	0,82	546	0,57
Payakumbuh	IPLT Sungai Durian	IPLT	Sungai Durian, Lamposi Tigo Nagori	15	14	1	30000	21,24	28000	19,83
	IPAL Tanjung Pauh	IPAL	Tanjung Pauh, Payakumbuh	50	0	50	625	0,44	0	0
Sawahlunto	IPLT Kota Sawahlunto (IPLT Kayu Gadang)	IPLT	Kayu Gadang	40	5	35	80000	100	10000	15,67
Kota Solok	IPAL Laing Gelanggang Batuang	IPAL	Nan Balimo, Tanjung Harapan	60	0	60	938	1,26	0	0

Kabupaten	Nama Infrastruktur	Tipe	Lokasi	Kapasitas (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Idle Capacity (m3/hari)	Target Layanan terhadap Jumlah Penduduk		Capaian Layanan terhadap Total Jumlah Penduduk	
							Jiwa	%	Jiwa	%
	IPLT Ampang Kualo	IPLT	Kampung Jawa, Tanjung Harapan	30	6	24	60000	80,57	12000	16,11

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.32 Proyeksi Timbulan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat

KABUPATEN	Total Limbah Cair m³/hari												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kepulauan Mentawai	12,81	13,03	13,26	12,25	12,46	12,66	12,86	13,06	13,26	13,46	13,67	13,87	14,07
Pesisir Selatan	71,13	71,65	72,16	72,68	73,19	73,71	74,22	74,74	72,24	72,74	73,23	73,73	74,22
Kab.Solok	57,11	57,47	57,84	58,20	58,57	58,93	59,30	59,66	60,03	60,39	60,76	61,12	61,49
Sijunjung	29,82	30,27	30,71	31,16	31,61	32,05	32,50	32,94	33,39	33,84	34,28	34,73	35,17
Tanah Datar	52,61	52,74	52,87	53,00	53,12	53,25	53,38	53,50	53,63	53,76	53,89	54,01	54,14
Padang Pariaman	63,41	63,77	64,13	64,49	64,85	65,20	65,56	65,92	66,28	66,63	66,99	67,35	67,71
Agam	72,30	72,82	73,34	73,86	74,37	74,89	75,41	75,93	76,45	76,97	77,48	78,00	78,52
Lima Puluh Kota	58,99	59,51	60,03	60,55	61,07	61,59	62,11	62,63	63,15	63,67	64,19	64,71	65,22
Pasaman	34,76	35,10	35,44	35,78	45,16	45,58	46,00	46,43	46,85	47,28	47,70	48,13	48,55
Solok Selatan	21,54	21,88	22,22	22,56	22,90	23,24	23,57	23,91	24,25	24,59	24,93	25,27	25,60
Dharmasraya	31,91	32,65	33,38	34,11	34,85	35,58	45,39	46,31	47,23	48,15	49,06	49,98	50,90
Pasaman Barat	70,32	71,57	72,82	74,08	72,32	73,52	74,72	75,93	77,13	78,33	79,53	80,74	81,94
Padang	177,74	179,92	182,10	184,28	186,45	188,63	190,81	192,99	195,17	197,35	199,53	201,71	203,89
Kota Solok	9,86	10,02	10,18	10,34	10,51	10,67	10,83	10,99	11,15	11,32	11,48	11,64	11,80
Sawahlunto	8,48	8,56	8,64	8,72	8,79	8,87	8,95	9,02	9,10	9,18	9,26	9,33	9,41
Padang Panjang	6,03	6,10	6,18	6,25	6,33	6,41	6,48	6,56	8,11	8,20	8,29	8,39	8,48
Bukittinggi	15,83	15,97	16,11	16,25	16,38	16,52	16,66	16,79	16,93	17,07	17,21	17,34	17,48
Payakumbuh	16,97	17,21	17,44	17,67	17,90	18,14	18,37	18,60	18,83	19,07	19,30	19,53	19,77
Pariaman	12,06	12,18	12,31	12,43	12,56	12,68	12,81	12,93	13,06	13,18	13,31	12,21	12,33

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Tabel 7.33 Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Sumatera Barat

Kab/Kota	Kebutuhan Rumah (Unit)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Kepulauan Mentawai	5386	5722	6059	6395	6731	7068	7404	7740	9422
Kota Bukittinggi	15621	15850	16078	16307	16535	16763	16992	17220	18362
Agam	27720	28440	29160	29880	30600	31320	32040	32760	36360
Kota Padang	84935	87356	89778	92199	94620	97041	99462	101884	113990
Kota Pariaman	6378	6568	6757	6947	7136	7326	7516	7705	8653
Padang Pariaman	13843	14320	14797	15274	15751	16227	16704	17181	19565
Pesisir Selatan	14623	15310	15997	16684	17371	18057	18744	19431	22865
Solok	12246	12733	13219	13706	14192	14679	15165	15652	18084
Sijunjung	1224	1967	2710	3453	4197	4940	5683	6426	10142
Tanah Datar	4175	4345	4515	4684	4854	5023	5193	5362	6210
Lima Puluh Kota	12028	12720	13413	14105	14797	15489	16181	16874	20335
Pasaman	14277	14844	15410	15977	16543	17109	17676	18242	21074
Solok Selatan	7391	7955	8519	9083	9647	10211	10775	11339	14158
Dharmasraya	11232	12455	13679	14902	16125	17349	18572	19795	25912
Pasaman Barat	30829	32499	34170	35841	37512	39182	40853	42524	50878
Kota Solok	4296	4541	4786	5031	5276	5522	5767	6012	7238
Kota Sawahlunto	1730	1846	1963	2080	2197	2314	2431	2548	3132
Kota Padang Panjang	3742	3883	4023	4164	4304	4445	4585	4726	5428
Kota Payakumbuh	6194	6582	6970	7358	7745	8133	8521	8909	10848
Sumatera Barat	592612	604677	616743	628809	640874	652939	665005	677071	737398

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

7.2 Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Analisis kesenjangan infrastruktur yang telah dilakukan pada 5 (lima) kawasan prioritas pengembangan menjadi dasar dalam melihat keterpaduan infrastruktur yang ada baik dari segi kebijakan maupun dari segi pengembangan. Untuk melihat keterpaduan infrastruktur, dibuat tabel *cascading* dalam rangka menjadi dasar untuk melihat apakah keterpaduan dalam pengembangan infrastruktur dapat terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelas dapat dilihat di Tabel dibawah ini.

Tabel 7.34 Keterpaduan Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
1	TPA Regional Solok	Pelayanan Pengelolaan Persampahan Skala Regional 1. Waktu Pelaksanaan: 2019-2024 2. Manfaat: 2007 sd 2009 3. Manfaat : Pelayanan Persampahan untuk Kabupaten Solok dan Kota Solok 4. Rencana Kapasitas tahun 2024 : 17.000 m3 tan umur TPA sampai dengan tahun 2023								2025-2029		-Pemerintah Kab Solok	- Pemerintah Kab Solok diharapkan dapat mempercepat pengurusan dan pemberian sertifikat tanah agar dapat dipinjamkan pada tahun 2024 agar kepemilikan aset menjadi jelas - UPTD diharapkan dapat melakukan pengembangan TPST 3R pada tahun 2024 - Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan sampah dikembangkan lebih lanjut untuk mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis - Pemerintah daerah secara rutin melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan operasional di TPA Regional Solok (Excavator, Buldozer, dan Truk Sampah)
2	Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang	Konektivitas 1. Waktu Pelaksanaan: 2019 sd 2024 2. Manfaat: Jalan akses menghubungkan kawasan industri Pelabuhan Teluk Tapang serta membagi beban jalur logistik dari Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang 3. Rencana: 43,16 km			Pembangunan Jalan	2019-2024					-	Keterpaduan dengan Infrastruktur Pemukiman: Jalan Akses Teluk Tapang merupakan konektivitas utama menuju Pelabuhan Teluk Tapang yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Dermaga Pelabuhan Teluk Tapang saat ini oleh Kementerian Perhubungan. Saat ini masih dalam proses pembangunan fasilitas-fasilitas pelabuhan.	- Keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang saat ini berada di bawah manajemen KSDP Kelas IIeuk Bayur Fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang untuk sisi laut sudah selesai 100%. - Untuk fasilitas sisi darat Pelabuhan Teluk Tapang telah dibangun tiga dermaga KSDP. - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat melakukan pembenaguan 4 (empat) buah jembatan pada tahun 2024 agar akses dengan fasilitasnya - pembangunan jalan akses Teluk Tapang

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar- Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
													Pemerintah Kab. Pasaman Barat harapan dapat melakukan pengkajian standar MST jalan pada tahun 2024 agar dapat menganalisis angkutan tambang biji besi yang melebihi standar

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



BAB 8

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



8.1. Rencana Aksi Fokus Perencanaan

8.1.1 Fokus Perkotaan

Rencana aksi merupakan program dan kegiatan hingga tahun 2029 dari daftar indikasi program yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Rencana aksi ini terdiri dari penjabaran program dan turunan kebutuhan infrastruktur secara holistik pada Kawasan Prioritas Fokus Perkotaan dilengkapi dengan lokasi yang spesifik dari setiap program serta kelembagaan pelaksana yang terkait dan tahun rencana pelaksanaannya.

Tabel 8.1 Rencana Aksi Fokus Perkotaan

Strategy	Program	Program/Kegiatan	Justifikasi / Tujuan Dan Deskripsi Kegiatan	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	Unor	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
S2.S3-O1.O3 Pemenuhan infrastruktur dasar dalam mendukung Kawasan Megapolitan Palapa	Optimalisasi Infrastruktur Dasar Perkotaan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Belum ada usulan pemerintah kabupaten	3,8	Ha	APBN	25.894.000	PUPR	Cipta Karya	X	X	X	X	X	X	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Pembangunan TPST Reviu rencana induk persampahan FS basic desain Lelang desain dilaksanakan akhir tahun Rencana fisik 2024-2025	1	unit	APBN	2.000.000	PUPR	Cipta Karya	X	X	X	X	X	X	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pembangunan IPLT Pariaman Pemenuhan pelayanan sanitasi perkotaan	101,68	m3/hari	APBN	14.826.000	PUPR	Cipta Karya		X	X	X	X	X	
		Pembangunan SPAM Kota	Pemenuhan pelayanan air minum perkotaan	1	unit	APBN	7.013.000	PUPR	Cipta Karya		X	X	X	X	X	
		Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Kapasitas terpasang 1465 L/detik Kapasitas produksi 1500 L/detik	3 unit (@ 520 L/detik)	Unit	APBN	233.524.000	PUPR	Cipta Karya	X	X					
		Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Jumlah SR eksisting 111.848 SR dari PDAM Kota Padang dan	156197	SR	APBD	1.027.565.000	PUPR	Cipta Karya		X	X	X	X	X	

Strategy	Program	Program/Kegiatan	Justifikasi / Tujuan Dan Deskripsi Kegiatan	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	Unor	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	ketercapaian air minum aman 41,73% Kapasitas terpasang 60 L/detik Kapasitas produksi 20 L/detik	1 unit (@ 230 L/detik)	Unit	APBN	34.408.000	PUPR	Cipta Karya				X	X	X	X	X
		Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Jumlah SR eksisting 1515 SR dari UTPD Kota Pariaman dan ketercapaian air minum aman 6,18%	1515	SR	APBD	9.967.000	PUPR	Cipta Karya	X	X					
		Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Kapasitas terpasang 825 L/detik Kapasitas produksi 578 L/detik	2 unit (@ 391 L/detik)	Unit	APBN	116.986.000	PUPR	Cipta Karya	X	X					
		Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Jumlah SR eksisting 31.628 SR dari PDAM Padang Pariaman dan ketercapaian air minum aman 28,79% Terdapat 14815 RTLH di Kota Padang berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang diasumsikan 50% lokus perkotaan	782	SR	APBD	5.145.000	PUPR	Cipta Karya			X	X	X	X	X
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Terdapat 19257 RTLH di Padang Pariaman berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang diasumsikan 50% lokus perkotaan	7407	unit	APBN	148.140.000	PUPR	Perumahan			X	X	X	X	X
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Terdapat 1426 RTLH di Pariaman berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang diasumsikan 50% lokus perkotaan	8628	unit	APBN	172.560.000	PUPR	Perumahan			X	X	X	X	X
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Terdapat 1426 RTLH di Pariaman berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang diasumsikan 50% lokus perkotaan	713	unit	APBN	14.260.000	PUPR	Perumahan			X	X	X	X	X
		Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Mendukung Perwujudan Kawasan Megapolitan yang kompak dan berkelanjutan	TBD	TBD	APBD	TBD	Pemda	TBD	X	X					

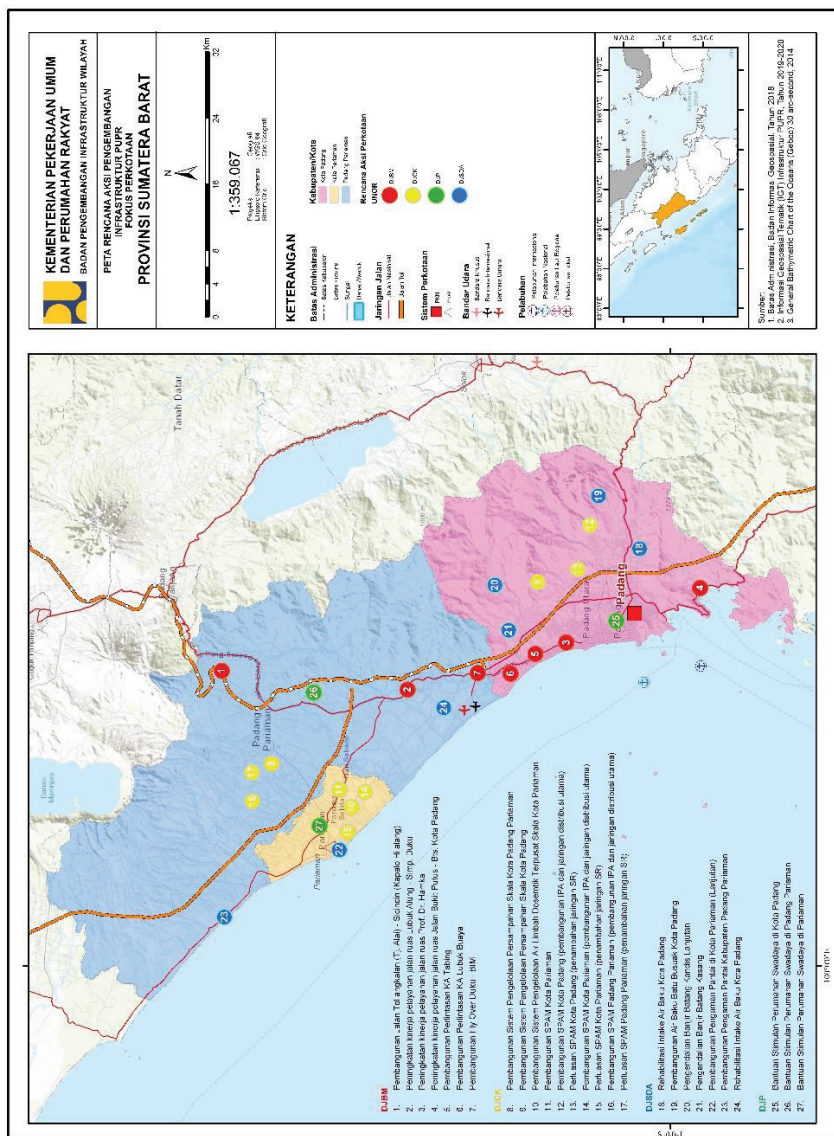
Strategy	Program	Program/Kegiatan	Justifikasi / Tujuan Dan Deskripsi Kegiatan	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	Unor	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Optimalisasi simpul dan jaringan transportasi sebagai upaya penguatan konektivitas antara pusat Metropolitan Kota Padang dan Kota Satelitnya	dan berkelanjutan	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui teknologi dan keterbukaan informasi	Mendukung Perwujudan Kawasan Megapolitan yang kompak dan berkelanjutan	TBD	TBD	APBD	TBD	Pemda	TBD	X	X					
		Pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan	Mendukung Perwujudan Kawasan Megapolitan yang kompak dan berkelanjutan	TBD	TBD	APBD	TBD	Pemda	TBD	X	X	X	X	X	X	X
		Penetapan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang perkotaan	Mendukung Perwujudan Kawasan Megapolitan yang kompak dan berkelanjutan	TBD	TBD	APBD	TBD	Pemda	TBD	X	X	X	X	X	X	X
		Pembangunan Jalan Bebas Hambatan ruas Pangkalan (Tj. Alai) - Sicincin (Kapalo Hilalang)	Menunjang konektivitas melalui jalan tol, ruas Pangkalan (Tj. Alai) - Sicincin (Kapalo Hilalang) Target 153,7 km, berdasarkan estimasi pembangunan pertahun 25 km	153	Km	Swasta/KPBU	10.710.000.000	PUPR	Bina Marga			X	X	X	X	X
Peningkatan Konektivitas		Pelebaran jalan ruas Lubuk Alung - Simp. Duku	Pada tahun 2025, VCR Jalan 1,10 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean)	13,49	Km	APBN	20.653.000	PUPR	Bina Marga			X	X	X	X	X
		Pelebaran jalan ruas Prof. Dr. Hamka	Pada tahun 2025, VCR jalan 0,96 dengan LOS pada klasifikasi E (Volume lalu lintas mendekati kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan kadang terhenti) Pada tahun 2029, VCR jalan 1,19 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet,	4,1	Km	APBN	6.277.000	PUPR	Bina Marga			X	X	X	X	X

Strategy	Program	Program/Kegiatan	Justifikasi / Tujuan Dan Deskripsi Kegiatan	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	Unor	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			kecepatan rendah, antrean)													
			Pada tahun 2025, VCR jalan 0,85 dengan LOS pada klasifikasi E (Volume lalu lintas mendekati kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan kadang terhenti)													
		Pelebaran Jalan Bukit Putus - Bts. Kota Padang	Pada tahun 2029, VCR jalan 1,05 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean)	22,46	Km	APBN	34.385.000	PUPR	Bina Marga			X	X	X	X	X
		Pembangunan Perlintasan KA Tabing	Penanganan simpang sebidang menjadi simpang tak sebidang	1,15	Km	APBN	6.601.000	KEMENHUB	Bina Marga			X	X		X	X
		Pembangunan Perlintasan KA Lubuk Buaya	Penanganan simpang sebidang menjadi simpang tak sebidang	1,318	Km	APBN	7.565.000	KEMENHUB	Bina Marga			X	X	X	X	X
		Pembangunan Fly Over Duku - BIM	Penanganan jalur-jalur jalan dengan kepadatan lalu lintas tinggi													
			Pariaman sebagai jalan alternatif dari Padang menuju Padang Pariaman/ Agam/ Pasaman/ Pasaman Barat	17	Km	APBN	2.035.000	KEMENHUB	Bina Marga			X	X	X	X	X
		Peningkatan kapasitas pelayanan Bnadara Internasional Minangkabau	Kota Padang	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X	X	X
		Peningkatan fungsi Terminal Regional tipe A	Terminal Regional Lubuk Buaya/Begalung, Kota Padang	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB / PEMDA	TBD		X	X				
		Optimalisasi terminal regional tipe B	Terminal Jai di Kota Pariaman	TBD	TBD	TBD	TBD	PEMDA	TBD	X	X					

Strategy	Program	Program/Kegiatan	Justifikasi / Tujuan Dan Deskripsi Kegiatan	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	Unor	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
S3.S4-05 Mendorong pengembangan Kawasan perkotaan Palapa dengan Konsep Resilient City yang memperhatikan mitigasi, adaptasi, dan respons terhadap bencana	Pengembangan Infrastruktur Bencana	Peningkatan pelabuhan Internasional	Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X	X	X
		Peningkatan jaringan transportasi penyebrangan	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Kota Padang	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB / PEMDA	TBD	X	X	X	X	X	X	X
		Peningkatan pelayanan transportasi penyebrangan dermaga	lintasan Mentawai-Padang-Pantai Barat	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB / PEMDA	TBD		X	X	X	X	X	X
		Rehabilitasi Intake Air Baku Kota Padang	Sebagian besar intake air baku mengalami kerusakan dan memerlukan rehabilitasi mengacu pada hasil kajian AKNOP	0,05	m3/det	APBN	50.000.000	PUPR	Sumber Daya Air			X	X	X	X	X
		Pembangunan Air Baku Batu Busuak Kota Padang	Pembebasan tanah dilaksanakan PDAM Kota Padang mulai 2023	0,2	m3/det	APBN	50.000.000	PUPR	Sumber Daya Air			X	X	X	X	X
		Pengendalian Banjir Batang Kandis Lanjutan	Mendukung tujuan pengembangan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap bencana	3,2	Km	APBN	50.000.000	PUPR	Sumber Daya Air			X	X	X	X	X
		Pengendalian Banjir Batang Kasang	Mendukung tujuan pengembangan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap bencana	4,1	Km	APBN	70.000.000	PUPR	Sumber Daya Air			X	X	X	X	X
		Pembangunan Pengaman Pantai di Kota Pariaman (Lanjutan)	Mendukung tujuan pengembangan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap bencana	0,8	Km	APBN	25.000.000	PUPR	Sumber Daya Air			X	X	X	X	X
		Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Padang Pariaman	Mendukung tujuan pengembangan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap bencana	0,6	Km	APBN	20.000.000	PUPR	Sumber Daya Air			X	X	X	X	X
		UFCSI Phase II - Padang Sub Project	Kapasitas sungai saat ini belum mampu menampung debit banjir	0,8	Km	APBN	50.000.000	PUPR	Sumber Daya Air			X	X	X	X	X

Strategy	Program	Program/Kegiatan	Justifikasi / Tujuan Dan Deskripsi Kegiatan	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	Unor	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Perwujudan resilient City	Pengadaan TES (Tempat Evakuasi Sementara)	Mendukung perwujudan resilient City	TBD	TBD	TBD	TBD	PEMDA / BNPB	TBD	X	X					
		Pengadaan TEA (Tempat Evakuasi Akhir)	Mendukung perwujudan resilient City	TBD	TBD	TBD	TBD	PEMDA / BNPB	TBD	X	X					
		Penetapan standar bangunan yang kuat dan adaptif terhadap bencana	Mendukung perwujudan resilient City	TBD	TBD	TBD	TBD	PEMDA / BNPB	TBD	X	X					

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 8.1 Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Fokus Perkotaan
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

8.1.2 Fokus Pariwisata

Rencana aksi merupakan program dan kegiatan hingga tahun 2029 dari daftar indikasi program yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Rencana aksi ini terdiri dari penjabaran program dan turunan kebutuhan infrastruktur secara holistik pada Kawasan Prioritas Fokus Pariwisata dilengkapi dengan lokasi yang spesifik dari setiap program serta kelembagaan pelaksana yang terkait dan tahun rencana pelaksanaannya.

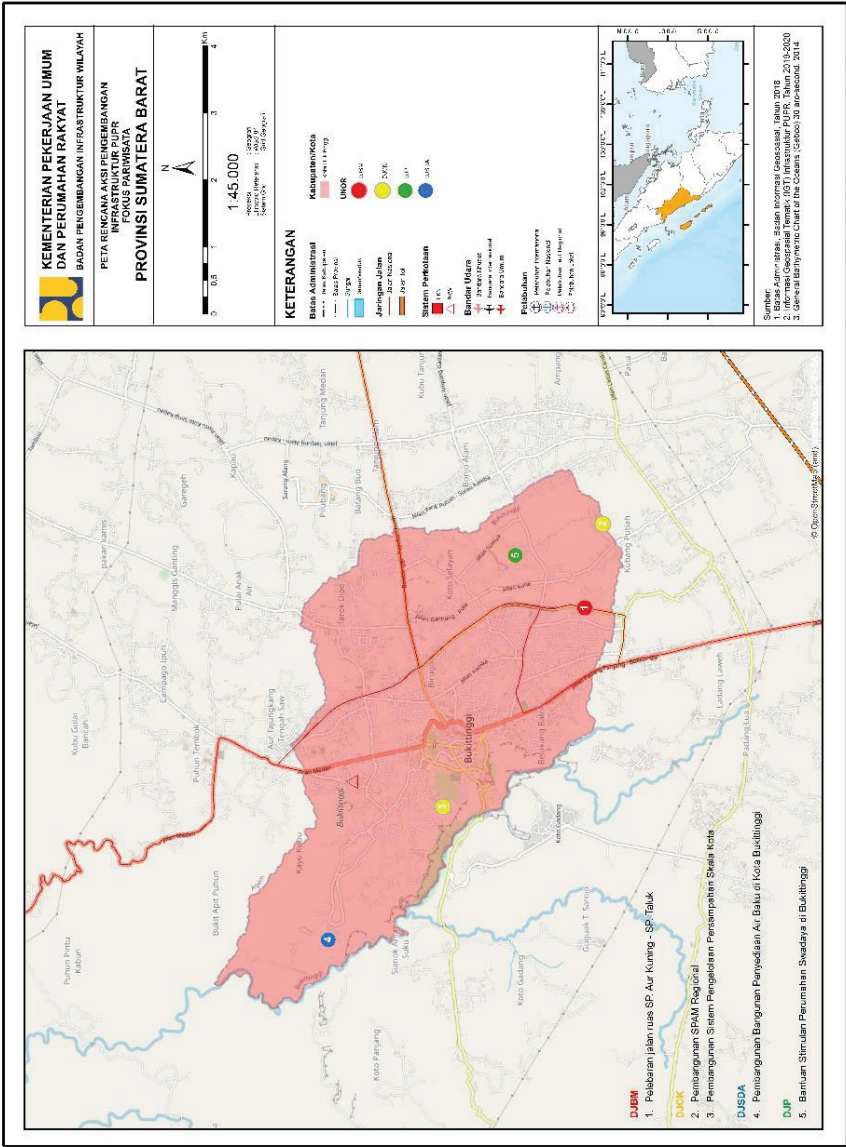
Tabel 8.2 Rencana Aksi Fokus Pariwisata

STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	UNOR	TAHUN PELAKSANAAN				
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027
Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan industri kreatif lokal untuk menarik lebih banyak wisatawan melalui atraksi dan peningkatan kelembagaan	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Peningkatan Kawasan Utama	KSPN Bukittinggi	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPAREKRAF	TBD			X	X	X
		Pengembangan Pariwisata (KUPP) Berbasis Desa Wisata										X	X	X
	Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Potensi Lokal	Penyelenggaraan Event	KSPN Bukittinggi	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPAREKRAF	TBD				X	X
		Penggunaan IT sebagai media Promosi wisata	KSPN Bukittinggi	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPAREKRAF	TBD		X	X	X	
Pengembangan aksesibilitas transportasi untuk mendorong konektivitas kawasan dalam rangka mendukung kegiatan wisata	Pengembangan Konektivitas Menuju Kawasan Wisata	Gelar Karva Produk Kreatif Dan Teknologi Inovatif	KSPN Bukittinggi	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPAREKRAF	TBD		X	X	X	
		Preservasi jalan dan jembatan	Ngarai Sianok (Bukittinggi)	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD			X	X	
S1,S2,S3,S4-O1,O2,O5	Peningkatan Konektivitas Menuju Kawasan Wisata	Pada tahun 2029, VCR jalan 1,02 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean)	Pelebaran jalan ruas SP. Aur Kuning - SP. Taluk	1,27	Km	APBN	1.944.000	PUPR	BINA MARGA				X	X
S1,S2,S4-O1,O3													X	X

STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	UNOR	TAHUN PELAKSANAAN						
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan amenities dan infrastruktur dasar di kawasan pariwisata	Optimalisasi Simpul Transportasi	Optimalisasi Terminal Pelayanan Tipe C	Terminal Aur Tigo Baleh, Mandiangin Koto Selatan, dan Guguk Panjang (Bukittinggi)	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB / PEMDA	TBD		X	X				
		Penyediaan hotel/homestay	KSPN Bukittinggi	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPAREKRAF	TBD			X	X	X	X	X
	Peningkatan Amenitas Pariwisata	Penyediaan restoran	KSPN Bukittinggi	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENPAREKRAF	TBD			X	X	X	X	X
		Pembangunan SPAM Regional														
			Terdapat idle capacity di Bukittinggi sebesar 37,18 L/detik dan Agam sebesar 47,50 L/detik	180 ltr/detik		APBN	200.441.000	PUPR	CIPTA KARYA			X	X	X	X	X
S2.S3-O1	Peningkatan infrastruktur dasar	Pembangunan TPST Bukittinggi Overload Sampah	Diperlukan Pembangunan TPST Bukittinggi Overload Sampah													
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	1	unit	APBN	2.000.000	PUPR	CIPTA KARYA			X	X	X	X	X
			Timbulan sampah yang terangkut 110,75 ton/hari sedangkan sampah yang terangkut 110,75 ton/hari Cakupan pelayanan 83,6% Akhir umur TPA pada 2015													

STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	UNOR	TAHUN PELAKSANAAN					
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Memiliki TPST Tabek Gadang												
		Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku di Kota Bukittinggi	Suplai yang ada belum memenuhi kebutuhan	1,8	Km	APBN	48.000.000	PUPR	SUMBER DAYA AIR			×	×		
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bukittinggi	Terdapat 4.000 RTLH di Bukittinggi berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang diasumsikan 50% fokus pariwisata	2000	unit	APBN	40.000.000	PUPR	PERUMAHAN			×	×		

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 8.2 Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Fokus Pariwisata
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

8.1.3 Fokus Pertanian

Rencana aksi merupakan program dan kegiatan hingga tahun 2029 dari daftar indikasi program yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Rencana aksi ini terdiri dari penjabaran program dan turunan kebutuhan infrastruktur secara holistik pada Kawasan Prioritas Fokus Pertanian dilengkapi dengan lokasi yang spesifik dari setiap program serta kelembagaan pelaksana yang terkait dan tahun rencana pelaksanaannya

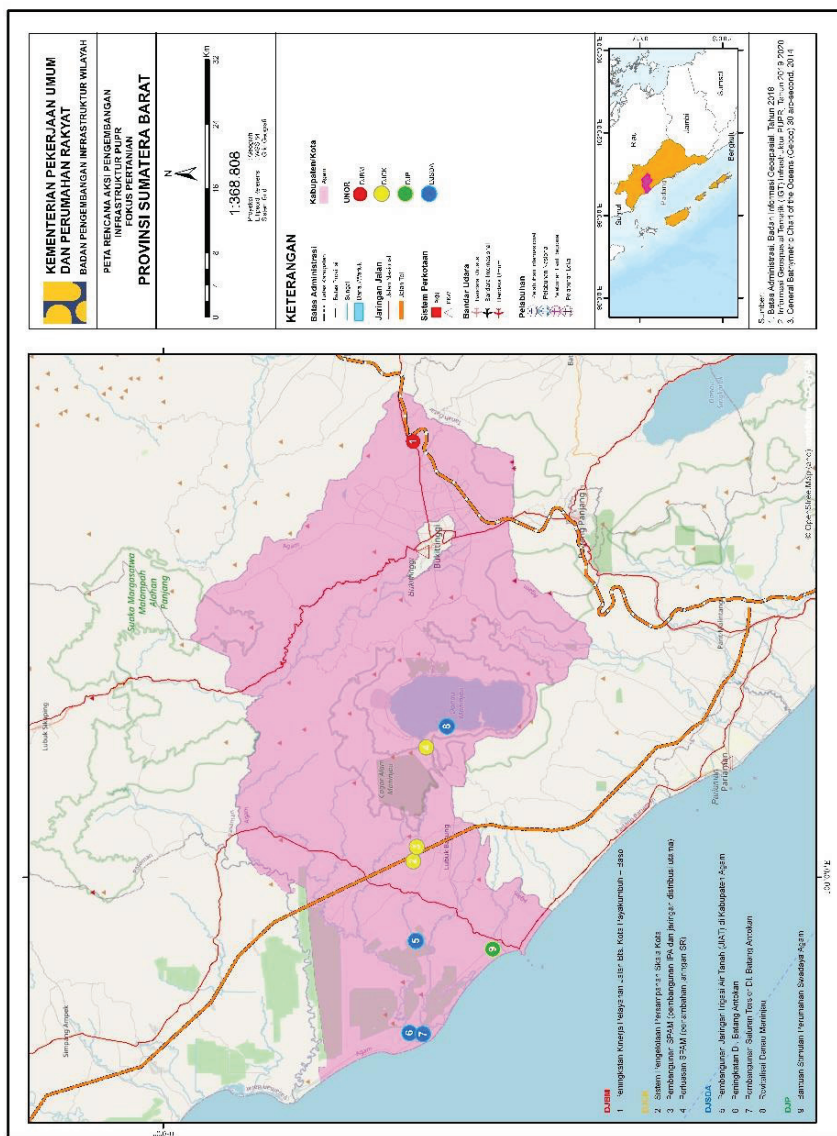
Tabel 8.3 Rencana Aksi Fokus Pertanian

STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPRSIFIK	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	UNOR	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan produktivitas melalui dukungan infrastruktur pertanian S1,S2-O2-O3	Peningkatan Infrastruktur Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Agam	Peningkatan produksi pertanian	1	Km	APBN	5.846.000	PUPR	SUMBER DAYA AIR			x	x	x	x	x
		Peningkatan Di. Batang Antokan	Peningkatan produksi pertanian	6	Km	APBN	86.000.000	PUPR	SUMBER DAYA AIR			x	x	x	x	x
		Pembangunan Saluran Tersier Di. Batang Antokan	Peningkatan produksi pertanian	9	Km	APBN	65.000.000	PUPR	SUMBER DAYA AIR			x	x	x	x	x
		Revitalisasi Danau Maninjau	Danau Maninjau merupakan salah satu tujuan wisata yang searah dengan Bukittinggi. di lokasi tersebut terdapat rumah kelahiran Buya Hamka yang sering dikunjungi wisatawan asal Malaysia.									x	x	x	x	x
			1	unit	APBN	350.000.000	PUPR	SUMBER DAYA AIR			x	x	x	x	x	x

STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPRSIFIK	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	UNOR	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Infrastruktur Dasar		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Diperlukan optimalisasi TPA Timbulan sampah 267,1 ton/hari Jumlah sampah tidak tertangani 224,5 ton/hari Belum ada TPST TPA Sungai Jariang Sampah terangkut 17,33 ton/hari Cakupan pelayanan 7,15% Tahun Pembangunan 2013-2015 Umur TPA sampai tahun 2029 (underload)	5,5	Ha	APBN	37.479.000	PUPR	CIPTA KARYA							
			Sebagian Sampah Masuk ke TPA Payakumbuh (overload) Sampah Terangkut 24,87 ton/hari cakupan pelayanan 9,31% Umur TPA sampai tahun 2015 TPA Payakumbuh overload													
			Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	2 unit (@ 569 L/detik)	Unit	APBN	170.244.000	PUPR	CIPTA KARYA							
			Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	113845	SR	APBD	748.946.000	PUPR	CIPTA KARYA							
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Agam	Terdapat 13.653 RTLH di Agam berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang diasumsikan 50% fokus pertanian	6.826	unit	APBN	136.520.000	PUPR	PERUMAHAN							

STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	LOKASI SPERSIFIK	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Pembiayaan (Rp. 000)	K/L	UNOR	TAHUN PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
S3-O4-05 Pengembangan UMKM agro industri pertanian melalui penetapan KPPN, teknologi, dan penguatan	Pengembangan Kawasan	Reviu dokumen perencanaan KPPN Agam	KPPN Agam, Kabupaten Agam	TBD	TBD	TBD	TBD	PUPR	BPIW			x	x	x	x	x
		Penyusunan masterplan dan action plan pengembangan kawasan pertanian	KPPN Agam, Kabupaten Agam	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementan	TBD	x	x					
	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Pembangunan Pipa Air untuk Fasilitas Hidro dan Aquaponic	KPPN Agam, Kabupaten Agam	TBD	TBD	TBD	TBD	PEMDA	TBD			x	x	x		
S1.S2-01 Peningkatan konektivitas jalur distribusi hasil pangan keluar Sumatera melalui hub di Pasaman	Peningkatan jalur distribusi	Pelebaran jalan BTS. KOTA PAYAKUMBUH - BASO	Pada tahun 2029, VCR jalan 1,02 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean)	15,13	Km	APBN	23.163.000	PUPR	BINA MARGA			x	x	x		
		Optimalisasi Terminal Barang	Banuhampu	TBD	TBD	TBD	TBD	Pemda	TBD	x	x	x	x	x		
	Pengembangan simpul logistik	Optimalisasi Jembatan Timbang	Tilatang Kamang	TBD	TBD	TBD	TBD	Pemda	TBD			x	x	x	x	x
Peningkatan pemasaran untuk mendukung distribusi hasil pangan keluar Sumatera melalui hub di Pasaman	Peningkatan simpul logistik	Pelabuhan pengumpan lokal	Pelabuhan Tiku, Tanjung Mutiara	TBD	TBD	TBD	TBD	Kementerian Kelautan	TBD		x	x	x	x		
		Optimalisasi Pelabuhan	Pelabuhan Teluk Tapang, Kab Pasaman Barat	TBD	TBD	TBD	TBD	KEMENHUB	TBD		x	x	x	x		

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 8.3 Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Fokus Pertanian
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

Rencana aksi merupakan program dan kegiatan hingga tahun 2029 dari daftar indikasi program yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Rencana aksi ini terdiri dari penjabaran program dan turunan kebutuhan infrastruktur secara holistik pada Kawasan Prioritas Fokus Daerah Tertinggal dilengkapi dengan lokasi yang spesifik dari setiap program serta kelembagaan pelaksana yang terkait dan tahun rencana pelaksanaannya

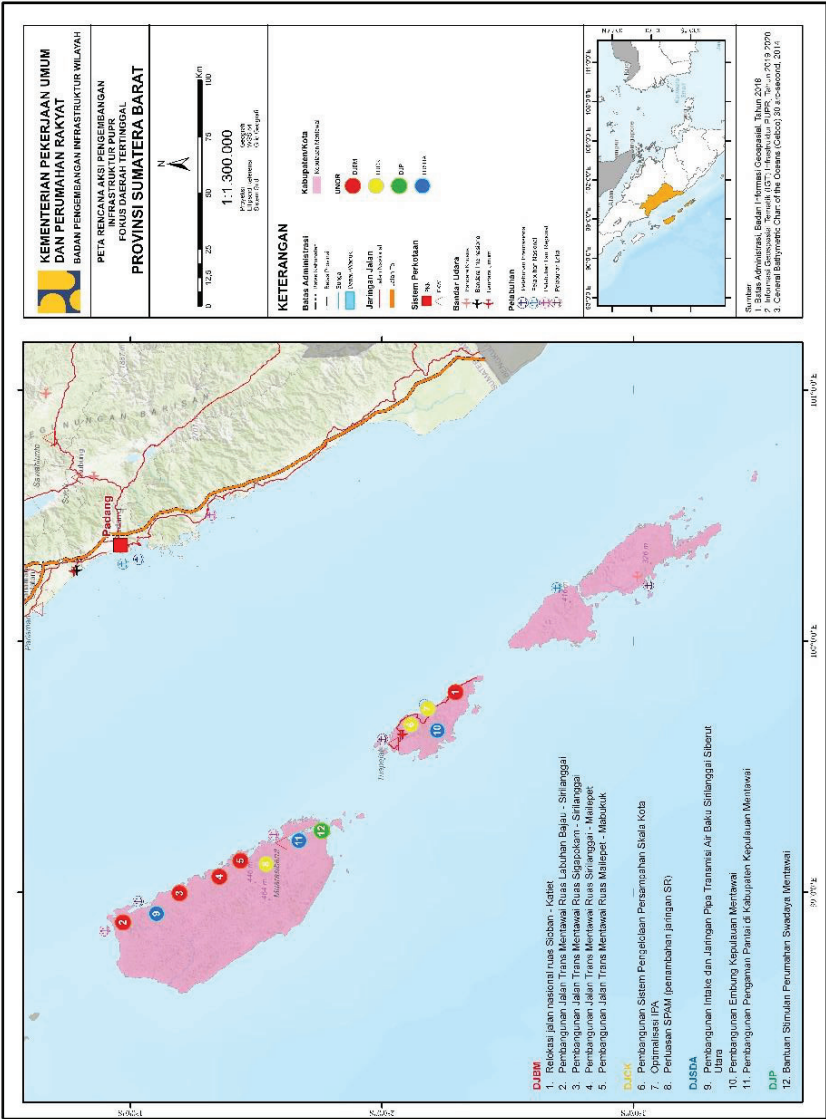
Tabel 8.4 Rencana Aksi Fokus Kawasan Daerah Tertinggal

GRAND STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	JUSTIFIKASI / TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	WAKTU PELAKSANAAN							
				Volume	Satuan				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Peningkatan jaringan intra dan antar wilayah untuk mendukung konektivitas orang dan barang di Provinsi Sumatera Barat	Peningkatan Konektivitas Intra Pulau	Relokasi jalan nasional ruas Sioban - Katiet	Relokasi	km	APBN	179.829.000	PUPR	BINA MARGA								
		Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Labuhan Bajau - Sirilanggai	Termasuk dalam Amanat RPJMN merupakan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Km	APBD	103.030.000		PUPR	BINA MARGA							
		Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Sigapokam - Sirilanggai	Termasuk dalam Amanat RPJMN merupakan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Km	APBD	132.016.000		PUPR	BINA MARGA							
		Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Sirilanggai - Mailepet	Termasuk dalam Amanat RPJMN merupakan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Km	APBD	491.043.000		PUPR	BINA MARGA							
			Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Mailepet - Mabukuk	Termasuk dalam Amanat RPJMN merupakan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Km	APBD	250.429.000	PUPR	BINA MARGA							
	Peningkatan Konektivitas Antar Pulau	Perbaikan kualitas simpul transportasi penghubung	Mewujudkan Peningkatan Konektivitas Antar Pulau	TBD	APBN	TBD	KEMENHUB	TBD								

GRAND STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	JUSTIFIKASI / TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	WAKTU PELAKSANAAN							
				Volume	Satuan				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Peningkatan SDM yang berdaya saing dan melek teknologi S3-T4	Penyediaan Infrastruktur Perumahan	wilayah antar pulau														
		Pengembangan Pelabuhan Sikakap	Mewujudkan Peningkatan Konektivitas Antar Pulau	TBD	APBN	TBD	KEMENHUB	TBD					X	X		
		Penataan trayek angkutan umum penghubung antar pulau	Mewujudkan Peningkatan Konektivitas Antar Pulau	TBD	APBN	TBD	KEMENHUB	TBD		X	X					
		Pembangunan Sistem Belum ada TPST dan TPA di Kepulauan Mentawai	Timbulan sampah 94.750 m3/tahun	unit	APBN	2.000.000	PUPR	CIPTA KARYA				X	X			
		Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Pengangkutan menggunakan dump truk dengan kapasitas 8m3/unit	L/detik	APBN	25.262.000	PUPR	CIPTA KARYA				X	X			
		Optimalisasi IPA	Terdapat idle capacity di Kab Kep Mentawai sebesar 48 L/detik	SR	APBN	164.933.000	PUPR	CIPTA KARYA				X	X			
		Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Jumlah SR eksisting 2138 SR dari UPTD Kab Kep Mentawai	Km	APBN	24.286.000	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	X		
		Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sirilanggai Siberut Utara	Peningkatan kualitas pelayanan air baku	unit	APBN	210.000.000	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	X	X	
		Pembangunan Embung Kepulauan Mentawai	Peningkatan kualitas pelayanan air baku	Km	APBN	35.000.000	PUPR	SUMBER DAYA AIR					X	X		
		Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Peningkatan infrastruktur pengaman pantai	unit	APBN	158.880.000	PUPR	CIPTA KARYA					X	X	X	

GRAND STRATEGY	PROGRAM	RENCANA AKSI	JUSTIFIKASI / TUJUAN DAN DESKRIPSI KEGIATAN	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	K/L	UNOR	WAKTU PELAKSANAAN						
				Volume	Satuan				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
S3-T4 Peningkatan SDM yang berdaya saing dan meleak teknologi	Peningkatan jaringan telekomunikasi dan informatika	Pembangunan menara BTS	Mewujudkan Peningkatan jaringan telekomunikasi dan informatika	TBD	APBN	TBD	KOMINFO	TBD			x	x			
		Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi	Mewujudkan Peningkatan jaringan telekomunikasi dan informatika	TBD	APBN	TBD	KOMINFO	TBD			x	x	x		
	Peningkatan kualitas SDM	Pembangunan sekolah pada wilayah 3T	Mewujudkan Peningkatan kualitas SDM	TBD	APBN	TBD	KEMENDIKBUD	TBD				x	x	x	
		Pelatihan skill secara berkala	Mewujudkan Peningkatan kualitas SDM	TBD	APBN	TBD	KEMENPAREKRAF	TBD				x	x	x	
S2-T5 Integrasi berbagai jenis moda transportasi serta peningkatan kualitas transportasi darat, laut, udara, dan kereta api	Optimalisasi Integrasi Antar Moda	Integrasi layanan park and ride dengan angkutan umum perkotaan	Optimalisasi Integrasi Antar Moda	TBD	APBN	TBD	KEMENHUB	TBD				x	x		
		Penyediaan informasi (jadwal, moda transportasi, dan sebagainya) melalui website atau aplikasi	Optimalisasi Integrasi Antar Moda	TBD	APBN	TBD	KEMENHUB	TBD				x	x	x	
	Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	Penggunaan solar cell untuk kebutuhan listrik pada simul transportasi	Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	TBD	APBN	TBD	KEMENHUB	TBD						x	x
		Green Building Concept dalam pengembangan infrastruktur transportasi	Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	TBD	APBN	TBD	KEMENHUB	TBD					x	x	x

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 8.4 Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Fokus Daerah Tertinggal
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

8.2. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR

8.2.1 Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana aksi merupakan program dan kegiatan hingga tahun 2029 dari daftar indikasi program yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Perkiraan anggaran pada program/kegiatan sektor sumber daya air sebesar Rp2.460.131.868,00. Rencana aksi ini terdiri dari penjabaran program dan turunan kebutuhan infrastruktur pada Sektor Sumber Daya Air.

Tabel 8.5 Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
1	SDA	Rehabilitasi Intake Air Baku Kota Padang	Kawasan Perkotaan Palapa	Kota Padang	Sebagian besar intake air baku mengalami kerusakan dan memerlukan rehabilitasi mengacu pada hasil kajian AKNOP	FS, DED dan Dockling sudah tersedia	0,05	m3/det	Rp 50.000.000	APBN	2024	2025
2	SDA	Pembangunan Air Baku Batu Busuak Kota Padang	Kawasan Perkotaan Palapa	Kota Padang	Pembebasan tanah dilaksanakan PDAM Kota Padang mulai 2023	FS, DED dan Dockling sudah tersedia	0,2	m3/det	Rp 50.000.000	APBN	2025	2026
3	SDA	Pengendalian Banjir Batang Kandiis Lanjutan	Kawasan Perkotaan Palapa	Kota Padang	Mendukung tujuan pengembangan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap bencana	Lanjutan kegiatan UFGS Phase II	3,2	Km	Rp 50.000.000	APBN	2024	2025
4	SDA	Pengendalian Banjir Batang Kasang	Kawasan Perkotaan Palapa	Kota Padang / Kab. Padang Pariaman	Mendukung tujuan pengembangan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap bencana	Desain awal perlu di reviu	4,1	Km	Rp 70.000.000	APBN	2026	2027
5	SDA	Pembangunan Pengaman Pantai di Kota Pariaman (Lanjutan)	Kawasan Perkotaan Palapa	Kota Pariaman	Mendukung tujuan pengembangan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap bencana	RC perlu disiapkan	0,8	Km	Rp 25.000.000	APBN	2025	2026
6	SDA	Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Padang Pariaman	Kawasan Perkotaan Palapa	Kab. Padang Pariaman	Mendukung tujuan pengembangan kawasan perkotaan yang adaptif terhadap bencana	RC perlu disiapkan	0,6	Km	Rp 20.000.000	APBN	2027	2028
7	SDA	UFGSI Phase II - Padang Sub project	Kawasan Perkotaan Palapa	Kota Padang	Kapasitas sungai saat ini belum mampu menampung debit banjir	RC perlu disiapkan	0,8	Km	Rp 50.000.000	APBN	2028	2029
8	SDA	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Baku Sistem Siletut Siletut Siletut Utara	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Peningkatan kualitas pelayanan air baku	RC perlu disiapkan	1	Km	Rp 24.285.714	APBN	2025	2026
9	SDA	Pembangunan Embung Kepulauan Mentawai	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Peningkatan kualitas pelayanan air baku	RC perlu disiapkan	1	unit	Rp 210.000.000	APBN	2027	2029

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
10	SDA	Pembangunan Pengapalan Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Peningkatan infrastruktur pengamanan pantai	RC perlu disiapkan	2	Km	Rp 35.000.000	APBN	2025	2026
11	SDA	Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku di Kota Bukittinggi	KSPN Bukittinggi	Bukittinggi	Suplai yang ada belum memenuhi kebutuhan	RC perlu disiapkan	1,8	Km	Rp 48.000.000	APBN	2027	2027
12	SDA	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Agam	KPPN Agam	Agam	Peningkatan produksi pertanian	RC perlu disiapkan	1	Km	Rp 5.846.154	APBN	2026	2026
13	SDA	Peningkatan DI Batang Antokan	KPPN Agam	DI. Batang Antokan	Peningkatan produksi pertanian	RC perlu disiapkan	6	Km	Rp 86.000.000	APBN	2025	2026
14	SDA	Pembangunan Saluran Tersier DI. Batang Antokan	KPPN Agam	Agam	Peningkatan produksi pertanian	RC perlu disiapkan	9	Km	Rp 65.000.000	APBD	2025	2026
15	SDA	Revitalisasi Danau Maninjau	KPPN Agam	Agam	Danu Maninjau merupakan salah satu tujuan wisata yang searah dengan Bukittinggi, di lokasi tersebut terdapat rumah kelahiran Buya Hamka yang sering dikunjungi wisatawan asal Malaysia.	RC perlu disiapkan	1	Paket	Rp 350.000.000	APBN	2025	2029
16	SDA	Pengembangan intake	Non Kawasan	Taban Tiga (Kab. Solok)	Sudan terbangun 500 liter/detik (diperlukan pengembangan kapasitas)	RC perlu disiapkan	1000	liter/detik	Rp 45.000.000	APBN	2026	2028
17	SDA	Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku di Kabupaten Solok Selatan	Non Kawasan	Kabupaten Solok Selatan	Pemenuhan kebutuhan air baku	RC perlu disiapkan	3	Km	Rp 9100.000	APBN	2026	2027
18	SDA	Pembangunan DI. Batang Bayang (6.500 Ha) di Kab. Pasaman Barat	Non Kawasan	Kabupaten Pasaman Barat	Peningkatan layanan daerah irigasi	FS, DED, Docking, dan Lahan terasada	3	Km	Rp 27.900.000	APBN	2026	2027
19	SDA	Pembangunan DI. Lubuk Buaya Kabupaten Pesisir Selatan	Non Kawasan	Kabupaten Pesisir Selatan	Peningkatan layanan daerah irigasi	RC perlu disiapkan	2,3	Km	Rp 48.000.000	APBN	2026	2027
20	SDA	Peningkatan DI. Batang Tongor Kabupaten Pasaman Barat	Non Kawasan	Kabupaten Pasaman Barat	Peningkatan layanan daerah irigasi	RC perlu disiapkan	4,2	Km	Rp 37.500.000	APBN	2026	2026
21	SDA	Pengembangan Batang Agam di Kota Payakumbuh (Lanjutan)	Non Kawasan	Kota Payakumbuh	Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir	RC perlu disiapkan	2,5	Km	Rp 38.000.000	APBN	2027	2027
22	SDA	Pengendalian Banjir dan Spidren Batang Sidiyasa (untuk anak sungainya) di Kabupaten Pasaman	Non Kawasan	Kab. Pasaman	Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir	RC perlu disiapkan	4	Km	Rp 40.000.000	APBN	2028	2028
23	SDA	Drainase Utama Kota Solok	Non Kawasan	Kota Solok	Pelayanan infrastruktur perkotaan	RC perlu disiapkan	5	Km	Rp 36.000.000	APBN	2026	2027

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
24	SDA	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Siat Kabupaten Dharmasraya	Non Kawasan	Kab. Dharmasraya	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	FS, DED, DOcking, dan Lahan tersedia	3	Km	Rp 36.000.000	APBN	2026	2027
25	SDA	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Timpeh Kabupaten Dharmasraya	Non Kawasan	Kab. Dharmasraya	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	FS, DED, DOcking, dan Lahan tersedia	3,2	Km	Rp 36.000.000	APBN	2026	2027
26	SDA	Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir Batanghari Kabupaten Dharmasraya	Non Kawasan	Kab. Dharmasraya	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	RC perlu disiapkan	4	Km	Rp 55.000.000	APBN	2027	2028
27	SDA	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir dan Sedimen Sungai Batang Sangir Kabupaten Solok	Non Kawasan	Kab. Solok Selatan	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	RC perlu disiapkan	1,6	Km	Rp 25.000.000	APBN	2027	2028
28	SDA	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan	Non Kawasan	Kab. Pesisir Selatan	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	RC perlu disiapkan	1,2	Km	Rp 13.000.000	APBN	2026	2027
29	SDA	Pengendalian Banjir Batang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Non Kawasan	Kab. Pesisir Selatan	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	RC perlu disiapkan	3	Km	Rp 65.000.000	APBN	2026	2027
30	SDA	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir dan Sedimen Batang Sungai Kabupaten Solok Selatan	Non Kawasan	Kabupaten Solok Selatan	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	FS, DED, DOcking, dan Lahan tersedia	2,2	Km	Rp 32.000.000	APBN	2027	2028
31	SDA	Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota	Non Kawasan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	RC perlu disiapkan	3	Km	Rp 45.000.000	APBN	2027	2028
32	SDA	Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota	Non Kawasan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	RC perlu disiapkan	5	Km	Rp 120.000.000	APBN	2026	2027
33	SDA	Pembangunan Pengendalian Banjir Muara 3 Sungai di Kabupaten Sijunjung	Non Kawasan	Kabupaten Sijunjung	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	RC perlu disiapkan	4	Km	Rp 180.000.000	APBN	2027	2027

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
34	SDA	Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku di Kabupaten Pasaman	Non Kawasan	Kabupaten Pasaman	Suplai yang ada belum memenuhi kebutuhan	RC perlu disiapkan	2	Km	Rp 30.000.000	APBN	2027	2027
35	SDA	Pembangunan Sarana Pengaman Pantai Ampiang Parak Lanjutkan Kegiatan Kesiapan Pesisir Selatan	Non Kawasan	Kab. Pesisir Selatan	Peningkatan infrastruktur pengamanan pantai	RC perlu disiapkan	13	Km	Rp 17.500.000	APBN	2026	2026
36	SDA	Revitalisasi Danau Singkarak	Non Kawasan	Kab. Solok	Terjadinya degradasi kerusakan danau yang menyebabkan fungsi danau menurun	RC perlu disiapkan	1	Paket	Rp 350.000.000	APBN	2025	2029
37	SDA	Pembangunan Air Baku Danau Diatas	Non Kawasan	Kab. Solok	Daerah lembah gumanti mengalami perkembangan pesat namun hanya sebagian kecil yang terlayani air baku	RC perlu disiapkan	120	liter/detik	Rp 35.000.000	APBN	2026	2028

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

8.2.2 Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi merupakan program dan kegiatan hingga tahun 2029 dari daftar indikasi program yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Perkiraan anggaran pada program/kegiatan sektor bina marga sebesar Rp9.881.437.770,00. Rencana aksi ini terdiri dari penjabaran program dan turunan kebutuhan infrastruktur pada Sektor Jalan dan Jembatan.

Tabel 8.6 Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
1	BM	Pembangunan Jalan Tol ruas Pangkalan (Ti, Alai) - Sincin (Kapalo Hilalang)	Kawasan Perkotaan Palapa	Kota Padang	Memenuhi konektivitas melalui jalan tol, ruas Pangkalan (Ti, Alai) - Sincin (Kapalo Hilalang)	RC perlu disiapkan	125	Km	Rp 8.750.000.000	Swasta/KPBU	2025	2029
2	BM	Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas Lubuk Alung - Simp. Duku	Kawasan Perkotaan Palapa	Lubuk Alung	Pada tahun 2025, VCR pada jalan 110 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean)	Perlu Penyiapan RC	13,49	Km	Rp 20.652.608	APBN	2025	2027
3	BM	Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas Prof. Dr. Hamka	Kawasan Perkotaan Palapa	Ruas Prof. Dr. Hamka	Pada tahun 2025, VCR jalan 0,96 dengan LOS pada klasifikasi E (Volume lalu lintas mendekati kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan kadang meningkat)	Saat ini kondisi jalan sudah 4/2 D, perlu peningkatan perlu penyiapan RC	4,1	Km	Rp 6.276.923	APBN	2025	2026
4	BM	Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas Bts. Kota Padang	Kawasan Perkotaan Palapa	Ruas Jalan Bukit Putus - Bts. Kota Padang	Pada tahun 2025, VCR jalan 105 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean)	Perlu penyiapan RC dan ada kebutuhan penyiapan jalan yaitu dikelilingi hutan dan laut	22,46	Km	Rp 34.385.291	APBN	2025	2027
5	BM	Pembangunan Perlintasan KA Tabing	Kawasan Perkotaan Palapa	Tabing	Peningkatan simpang sebidang menjadi simpang tak sebidang	RC perlu disiapkan	1,15	Km	Rp 6.600.818	APBN	2025	2025
6	BM	Pembangunan Fly Over Duku - BIM	Kawasan Perkotaan Palapa	Padang Pariaman	Peningkatan jalur-jalur jalan ruas sebagai alternatif dari Padang menuju Padang Pariaman/	RC Lengkap	171	m	Rp 2.034.883	APBN	2025	2025

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
					Agam/ Pasaman/ Pasaman Barat							
7	BM	Relokasi jalan nasional ruas Sioban - Katiet	Daerah 3T Mentawai	ruas Sioban - Katiet	Relokasi	Perlu penentuan rencana lokasi alih trase dan penyiapan RC	15,82	Km	Rp 90.804.285	APBN	2025	2029
8	BM	Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Labuhan Balau - Sirilanggai	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Termasuk dalam Amanat RPJMN merupakan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	RC perlu disiapkan	9,06	Km	Rp 52.002.959	APBN	2024	2025
9	BM	Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Sigipokim - Sirilanggai	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Termasuk dalam Amanat RPJMN merupakan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	RC perlu disiapkan	11,61	Km	Rp 66.639.554	APBN	2025	2025
10	BM	Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Sirilanggai - Mallepet	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Termasuk dalam Amanat RPJMN merupakan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	RC perlu disiapkan	43,2	Km	Rp 247.961.131	APBN	2027	2029
11	BM	Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Mallepet - Mabukuk	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Termasuk dalam Amanat RPJMN merupakan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	RC perlu disiapkan	22,03	Km	Rp 126.448.697	APBN	2027	2029
12	BM	Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas SP, Aur Kuning - SP, Taluk	KSPN Bukittinggi	SP, Aur Kuning - SP, Taluk	Pada tahun 2029, VCR jalan 102 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean)	RC berupa FO padang luan nonaktif KAI (sudah ada FS, DED, Dokling dan lahan)	1,27	Km	Rp 1.944.315	APBN	2026	2026
13	BM	Peningkatan kinerja pelayanan jalan	KPPN Agam	BTS, KOTA PAYAKUMBUH - BASO	Pada tahun 2029, VCR jalan 102 dengan LOS pada klasifikasi F (Arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrean)	RC perlu disiapkan	15,13	Km	Rp 23.163.377	APBN	2026	2026
14	BM	Peningkatan kinerja pelayanan jalan ruas RHT Alimad Dahan	Non Kawasan	Payakumbuh	Pada tahun 2029, VCR jalan 036 dengan LOS pada klasifikasi E (Volume lalu lintas tidak stabil, keamanan tidak stabil, kecepatan kadang terhenti)	RC perlu disiapkan	4,94	Km	Rp 7.562.927	APBN	2027	2027
15	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (kA) Lubuk Alung - Sp. Duku (Lubuk Buaya)	Kawasan Perkotaan Palapa	Padang Pariaman		RC perlu disiapkan	1,318	Km	Rp 444.960.000	APBN	2025	2026

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

8.2.3 Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Permukiman

Rencana aksi merupakan program dan kegiatan hingga tahun 2029 dari daftar indikasi program yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Perkiraan anggaran pada program/kegiatan sektor permukiman sebesar Rp11.187.157.764,00. Rencana aksi ini terdiri dari penjabaran program dan turunan kebutuhan infrastruktur pada Sektor Permukiman.

Tabel 8.7 Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Permukiman

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kelasifikasi RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
1	CK	Pengembangan TPA Padang Pariaman	Kawasan Perkotaan Palapa	Padang Pariaman	Belum ada usulan pemerintah kabupaten	RC tidak ada	3,8	Ha	Rp 25.894.283	APBN	2025	2028
2	CK	Pembangunan TPST Kota Padang	Kawasan Perkotaan Palapa	Kota Padang	Revisi rencana induk persampahan FS basic desain Lelang desain dilaksanakan akhir tahun Rencana fisik 2024-2025	1. Rencana pembangunan fisik tahun 2024-2025 melalui dana insentif dari WSP 2. Saat ini review Rencana Induk Persampahan Kabupaten ada MOU dengan PT. Semen Padang	1	unit	Rp 150.000.000	APBN	2025	2029
3	CK	Pembangunan IPLT Pariaman	Kawasan Perkotaan Palapa	Pariaman	Pemenuhan pelayanan sanitasi perkotaan	1. DED IPLT Kota Pariaman disusun oleh RPIW Sumatera Tahun 2020, namun belum mendapatkan arahan dari Dit Sanitasi lanjut kegiatan ini. 2. RC IPLT Kota Pariaman sudah lengkap 3. Rencana pembangunan selesai tahun 2025 karena tahun 2024 fokus ke kegiatan	10168	m3/hari	Rp 14.826.266	APBN	2025	2028

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
						OPOR sedangkan IPLT Pariaman sifatnya adalah pembangunan baru.						
4	CK	Pembangunan SPAM Padang Pariaman	Kawasan Perkotaan Palapa	Padang Pariaman	Pemenuhan pelayanan air minum perkotaan	Usulan sudah dibuat oleh Dok. Rispam Prov. Sumatera Barat namun belum ada MOU antara Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman	1	unit	Rp 7.013.210	APBN	2025	2027
5	CK	Pembangunan TPST Mentawai	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Timbulan sampah 94.750 m3/tahun Belum ada TPST dan TPA di Kepulauan Mentawai Pengangkutan menggunakan dump truk dengan kapasitas 10 ton/hari Tidak ada idle capacity di Bukittinggi sebesar 37,18 L/detik dan Agam sebesar 47,50 L/detik (Pembangunan SPAM Regional Agam Bukittinggi)	RC perlu disiapkan	1	unit	Rp 150.000.000	APBN	2025	2029
6	CK	Pembangunan SPAM Regional Agam- Bukittinggi	KSPN Bukittinggi	Bukittinggi	Overload Sampah diangkut ke TPA Regional Agam Timbulan sampah 120 ton/hari sedangkan sampah yang terangkut 110,75 ton/hari Cakupan pelayanan 83,6% Akhir umur TPA pada 2015 Memiliki TPST Tabek Gedang Timbulan sampah 267,1 ton/hari Jumlah sampah tidak tertangani 224,5 ton/hari	Sudah ada FS, Dok. Rispam, DED yang dibuat oleh Dik. Air Minum Bukittinggi	180	ltr/detik	Rp 200.441.000	APBN	2025	2028
7	CK	Pembangunan TPST Bukittinggi	KSPN Bukittinggi	Bukittinggi	Belum ada TPST TPA Sungai Jariang Sampah terangkut 17,33 ton/hari Cakupan pelayanan 7,15% Tahun Pembangunan 2013-2015 Umur TPA sampai tahun 2029 (underload)	RC perlu disiapkan	1	unit	Rp 150.000.000	APBN	2025	2029
8	CK	Optimalisasi TPA Sungai Jariang	KPPN Agam	TPA Sungai Jariang	Sebagian Sampah Masuk ke TPA Regional Agam (Overload) Sampah Terangkut 24,87 ton/hari cakupannya pelayanan 9,31% Umur TPA sampai tahun	RC perlu disiapkan	5,5	Ha	Rp 37.478.568	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
9	CK	Peningkatan TPA menjadi TPST Aie Dingin	Non Kawasan	Kab Solok	2015 TPA Payakumbuh overload 1. Rencana pembangunan fisik TPST tahun 2024-2025 melalui dana loan dari WSP 2. Saat ini review Rencana Induk Persampahan 3. Sudah ada MOU dengan PT Semen Padang 1. Saat ini sedang proses pencairan pinjaman 2. Penataan TPA Regional melalui pendanaan Loan 2. Tahun 2024 proses menyiapkan perencanaan 3. Tahun 2025 proses	RC perlu disiapkan	1	unit	Rp 115.000.000	APBN	2025	2029
10	CK	Pembangunan TPST Regional Payakumbuh	Non Kawasan	Payakumbuh	1. Rencana pembangunan fisik TPST melalui pinjaman 2. DED IPB dan DED Sawahlunto Sumber Tahun 2020, namun belum mendapatkan arahan dari Dit Sanitasi terkait tindak lanjut kegiatan ini. 2. Diusulkan TA 2025	RC perlu disiapkan	1	unit	Rp 150.000.000	APBN	2025	2029
11	CK	Pembangunan IPLT Sawahlunto	Non Kawasan	Sawahlunto	1. Rencana pembangunan fisik TPST melalui pinjaman 2. DED IPB dan DED Sawahlunto Sumber Tahun 2020, namun belum mendapatkan arahan dari Dit Sanitasi terkait tindak lanjut kegiatan ini. 2. Diusulkan TA 2025	RC perlu disiapkan	35	m3/hari	Rp 5.103.455	APBN	2025	2029
12	CK	Pembangunan SPAM Regional Limapuluh Kota - Payakumbuh	Non Kawasan	Lima Puluh Kota - Payakumbuh	Sudah ada intake Air baku di Lima Puluh Kota berlebih sedangkan Kota Payakumbuh terdapat isu kekurangan air baku	1. Usulan sudah masuk Dink Rispam Prov. Sumatera Barat 2. DED disusun oleh PMCK TR Prov. Sumatera Barat 3. Kegiatan terhenti selama 5 tahun karena Bupati Kab. Lima Puluh Kota terdahulu tidak mau melakukan komitmen dengan Kota Payakumbuh saat ini. MOU tidak bisa diproses, namun dengan bergantinya Bupati yang baru kegiatan ini dibantu kembali dengan Pemda Prov. Sumatera	55,8	L/detik	Rp 1.128.465.832	APBN	2026	2029

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
						Barat 4. Rencana fisik belum ada informasi, namun Intake sudah dibangun oleh BWS Sumatera 5 sebelum MOU ditanda tangai.						
13	CK	Sistem Pengelolaan Perairan Skala Regional (Perluasan TPA)	Non Kawasan	Kab. Solok	- Umur TPA sampai dengan tahun 2023 - Sejak tahun 2015 - 2022 total sampah yang masuk adalah 12.700.000 m3 dari total kapasitas 17.196 m3 - Berdasarkan hasil evaluasi kebermanfaatan infrastruktur PUPR, Proyekti timbulun sampah sd tahun 2023 yang dapat ditangani 171.966 m3 (Goveribad)	RC perlu disiapkan	1	unit	Rp 38.000.000	APBN	2025	2029
14	CK	Pembangunan SPAM (Pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Kawasan Perkotaan Palapa	Padang	Kapasitas terpasang 1465 L/detik Kapasitas produksi 1500 L/detik	RC perlu disiapkan	3 unit (@ 520 L/detik)	Unit	Rp 233.524.039	APBN	2025	2029
15	CK	Perluasan SPAM (Pembangunan jaringan SR)	Kawasan Perkotaan Palapa	Padang	Jumlah SR eksisting 111848 SR dari PDAM Kota Padang dan ketercapaian air minum aman 4173%	RC perlu disiapkan	156197	SR	Rp 1.027.565.394	APBD	2025	2029
16	CK	Pembangunan SPAM (Pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Kawasan Perkotaan Palapa	Pariaman	Kapasitas terpasang 60 L/detik Kapasitas produksi 20 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 230 L/detik)	Unit	Rp 34.407.770	APBN	2025	2026
17	CK	Perluasan SPAM (Pembangunan jaringan SR)	Kawasan Perkotaan Palapa	Pariaman	Jumlah SR eksisting 1515 SR dari UTPD Kota Pariaman dan ketercapaian air minum aman 618%	RC perlu disiapkan	22980	SR	Rp 151.177.377	APBD	2025	2029
18	CK	Pembangunan SPAM (Pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Kawasan Perkotaan Palapa	Padang Pariaman	Kapasitas terpasang 825 L/detik Kapasitas produksi 578 L/detik	RC perlu disiapkan	2 unit (@ 391 L/detik)	Unit	Rp 116.986.418	APBN	2025	2029
19	CK	Perluasan SPAM (Pembangunan jaringan SR)	Kawasan Perkotaan Palapa	Padang Pariaman	Jumlah SR eksisting 31.628 SR dari PDAM Padang Pariaman dan ketercapaian air minum aman 28.79%	RC perlu disiapkan	78236	SR	Rp 514.687.261	APBD	2025	2029
20	CK	Pembangunan SPAM (Pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Kapasitas terpasang 58 L/detik Kapasitas produksi 10 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 250 L/detik)	Unit	Rp 37.395.750	APBN	2025	2026
21	CK	Perluasan SPAM (Pembangunan jaringan SR)	Daerah 3T Mentawai	Mentawai	Jumlah SR eksisting 2.138 SR dari PDAM Pariaman dan ketercapaian air minum aman 7.86%	RC perlu disiapkan	25071	SR	Rp 164.933.334	APBD	2025	2029
22	CK	Pembangunan SPAM (Pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	KSPN Bukittinggi	Bukittinggi	Kapasitas terpasang 825 L/detik Kapasitas produksi 578 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 206 L/detik)	Unit	Rp 30.817.394	APBN	2025	2026

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
23	CK	Perluasan SPAM (menambahan jaringan SR)	KSPN Bukittinggi	Bukittinggi	Jumlah SR eksisting 31.628 SR dari PDAM Padang Pariaman dan ketercapaian air minum aman 28,79% Kapasitas terpasang 410 L/detik	RC perlu disiapkan	20633	SR	Rp 135.737.285	APBD	2025	2029
24	CK	Pembangunan SPAM (mengembangkan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Pesisir Selatan	Jumlah SR eksisting 25.297 SR dari Kab Pesisir Selatan dan ketercapaian air minum aman 20,37% Kapasitas terpasang 360 L/detik	RC perlu disiapkan	2 unit (@ 496 L/detik)	Unit	Rp 74.201.104	APBN	2026	2027
25	CK	Perluasan SPAM (menambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Pesisir Selatan	Jumlah SR eksisting 18.115 SR dari PDAM Kab Solok dan ketercapaian air minum aman 18,22% Kapasitas terpasang 164 L/detik	RC perlu disiapkan	99270	SR	Rp 653.062.586	APBD	2025	2029
26	CK	Pembangunan SPAM (mengembangkan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Kab Solok	Jumlah SR eksisting 18.115 SR dari PDAM Kab Solok dan ketercapaian air minum aman 18,22% Kapasitas terpasang 164 L/detik	RC perlu disiapkan	2 unit (@ 496 L/detik)	Unit	Rp 121.623.987	APBN	2026	2027
27	CK	Perluasan SPAM (menambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Kab Solok	Jumlah SR eksisting 18.115 SR dari PDAM Kab Solok dan ketercapaian air minum aman 18,22% Kapasitas terpasang 164 L/detik	RC perlu disiapkan	81320	SR	Rp 534.975.818	APBD	2025	2029
28	CK	Pembangunan SPAM (mengembangkan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Kab Sijunjung	Jumlah SR eksisting 13.871 SR dari PDAM Kab Sijunjung dan ketercapaian air minum aman 20,21% Kapasitas terpasang 368 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 548 L/detik)	Unit	Rp 81.980.252	APBN	2026	2027
29	CK	Perluasan SPAM (menambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Kab Sijunjung	Jumlah SR eksisting 13.871 SR dari PDAM Kab Sijunjung dan ketercapaian air minum aman 20,21% Kapasitas terpasang 368 L/detik	RC perlu disiapkan	54763	SR	Rp 360.266.610	APBD	2025	2029
30	CK	Pembangunan SPAM (mengembangkan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Tanah Datar	Jumlah SR eksisting 19.378 SR dari PDAM Kab Tanah Datar dan ketercapaian air minum aman 21,73% Kapasitas terpasang 220 L/detik	RC perlu disiapkan	2 unit (@ 349 L/detik)	Unit	Rp 104.420.102	APBN	2026	2027
31	CK	Perluasan SPAM (menambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Tanah Datar	Jumlah SR eksisting 19.378 SR dari PDAM Kab Tanah Datar dan ketercapaian air minum aman 21,73% Kapasitas terpasang 220 L/detik	RC perlu disiapkan	69796	SR	Rp 459.163.455	APBD	2025	2029
32	CK	Pembangunan SPAM (mengembangkan IPA dan jaringan distribusi utama)	KPPN Agam	Agam	Jumlah SR eksisting 17.976 SR dari PDAM Kab Agam dan ketercapaian air minum aman 13,64% Kapasitas terpasang 168 L/detik	RC perlu disiapkan	2 unit (@ 569 L/detik)	Unit	Rp 170.243.662	APBN	2025	2027
33	CK	Perluasan SPAM (menambahan jaringan SR)	KPPN Agam	Agam	Jumlah SR eksisting 17.976 SR dari PDAM Kab Agam dan ketercapaian air minum aman 13,64% Kapasitas terpasang 168 L/detik	RC perlu disiapkan	113845	SR	Rp 748.946.409	APBD	2025	2029
34	CK	Pembangunan SPAM (mengembangkan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Lima Puluh Kota	Jumlah SR eksisting 16.697 SR dari PDAM Kab Lima Puluh Kota dan ketercapaian air minum aman 16% Kapasitas terpasang 289 L/detik	RC perlu disiapkan	2 unit (@ 438 L/detik)	Unit	Rp 131.198.323	APBN	2026	2027
35	CK	Perluasan SPAM (menambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Lima Puluh Kota	Jumlah SR eksisting 16.697 SR dari PDAM Kab Lima Puluh Kota dan ketercapaian air minum aman 16% Kapasitas terpasang 289 L/detik	RC perlu disiapkan	87684	SR	Rp 576.842.347	APBD	2025	2029
36	CK	Pembangunan SPAM (mengembangkan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Pasaman	Jumlah SR eksisting 18.908 SR dari PDAM Kab Pasaman dan ketercapaian air minum aman 13,64% Kapasitas terpasang 182 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 585 L/detik)	Unit	Rp 87.515.415	APBN	2026	2027
37	CK	Perluasan SPAM (menambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Pasaman	Jumlah SR eksisting 18.908 SR dari PDAM Kab Pasaman dan ketercapaian air minum aman 13,64% Kapasitas terpasang 182 L/detik	RC perlu disiapkan	58475	SR	Rp 384.686.559	APBD	2025	2029

No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
38	CK	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Solok Selatan	Kapasitas terpasang 270 L/detik Kapasitas produksi 168 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 183 L/detik)	Unit	Rp 20.644.662	APBN	2026	2027
39	CK	Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Solok Selatan	Jumlah SR eksisting 13,154 SR dari PDAM Kab Solok Selatan dan ketercapaian air minum aman 26,40%	RC perlu disiapkan	36664	SR	Rp 241.199.624	APBD	2025	2029
40	CK	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Dharmasraya	Kapasitas terpasang 135 L/detik Kapasitas produksi 74 L/detik	RC perlu disiapkan	2 unit (@ 379 L/detik)	Unit	Rp 113.246.443	APBN	2026	2027
41	CK	Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Dharmasraya	Jumlah SR eksisting 1.444 SR dari UPTD Kab Dharmasraya dan ketercapaian air minum aman 187%	RC perlu disiapkan	75.743	SR	Rp 498.286.687	APBD	2025	2029
42	CK	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Pasaman Barat	Kapasitas terpasang 240 L/detik Kapasitas produksi 22 L/detik	RC perlu disiapkan	2 unit (@ 504 L/detik)	Unit	Rp 180.715.592	APBN	2026	2027
43	CK	Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Pasaman Barat	Jumlah SR eksisting 11.027 SR dari PDAM Kab Pasaman Barat dan ketercapaian air minum aman 8,37%	RC perlu disiapkan	120788	SR	Rp 794.621.976	APBD	2025	2029
44	CK	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Kota Solok	Kapasitas terpasang 300 L/detik Kapasitas produksi 262 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 26,63 L/detik)	Unit	Rp 4.039.173	APBN	2026	2027
45	CK	Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Kota Solok	Jumlah SR eksisting 18.155 SR dari PDAM Kota Solok dan ketercapaian air minum aman 87,21%	RC perlu disiapkan	2663	SR	Rp 17.518.945	APBD	2025	2029
46	CK	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Sawahlunto	Kapasitas terpasang 190 L/detik Kapasitas produksi 90 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 85,35 L/detik)	Unit	Rp 12.715.915	APBN	2026	2027
47	CK	Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Sawahlunto	Jumlah SR eksisting 8.557 SR dari PDAM Kota Sawahlunto dan ketercapaian air minum aman 30,06%	RC perlu disiapkan	8535	SR	Rp 56.148.778	APBD	2025	2029
48	CK	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Padang Panjang	Kapasitas terpasang 226 L/detik Kapasitas produksi 181 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 58,70 L/detik)	Unit	Rp 8.826.341	APBN	2026	2027
49	CK	Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Padang Panjang	Jumlah SR eksisting 9.300 SR dari PDAM Kota Padang Panjang dan ketercapaian air minum aman 61,27%	RC perlu disiapkan	5880	SR	Rp 38.682.462	APBD	2025	2029
50	CK	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Non Kawasan	Payakumbuh	Kapasitas terpasang 448 L/detik Kapasitas produksi 370 L/detik	RC perlu disiapkan	1 unit (@ 114 L/detik)	Unit	Rp 17.054.286	APBN	2026	2027
51	CK	Perluasan SPAM (penambahan jaringan SR)	Non Kawasan	Payakumbuh	Jumlah SR eksisting 27.373 SR dari Perumda Kota Payakumbuh dan ketercapaian air minum aman 70,63%	RC perlu disiapkan	11381	SR	Rp 74.871.616	APBD	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023

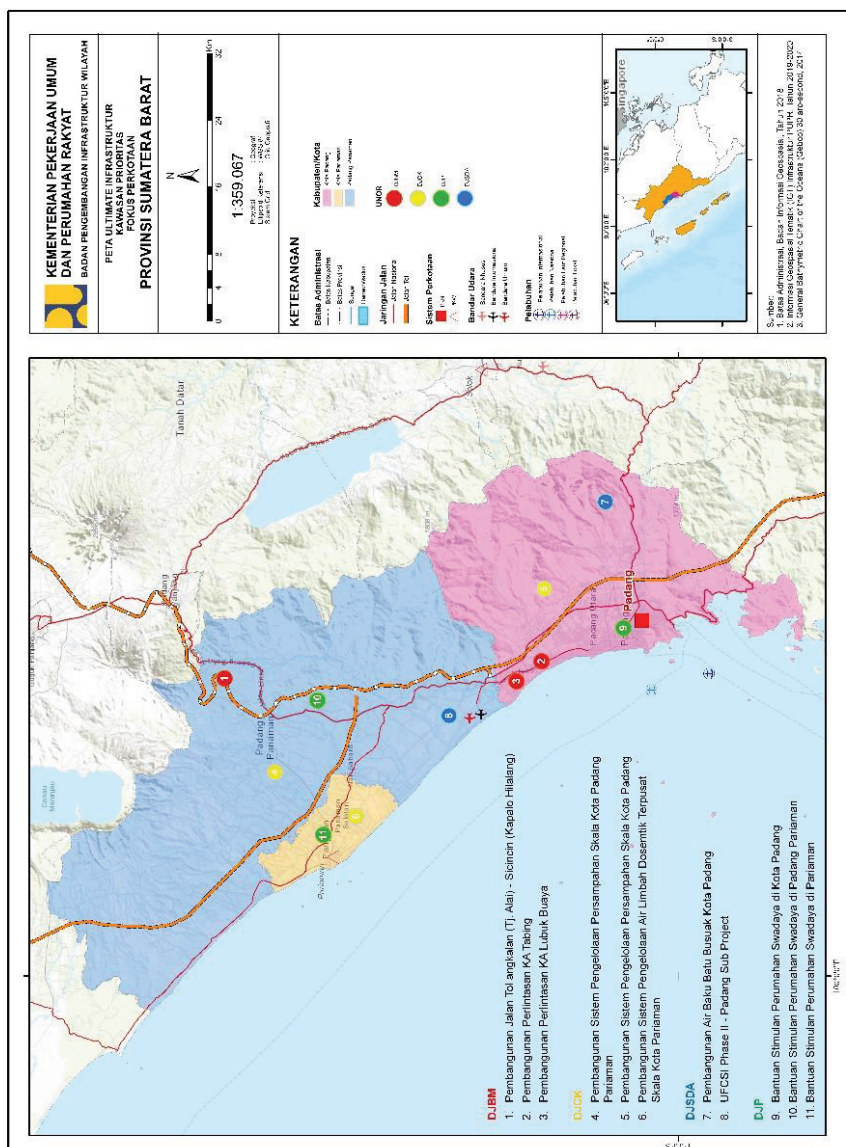
8.2.4 Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Perumahan

Rencana aksi merupakan program dan kegiatan hingga tahun 2029 dari daftar indikasi program yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Perkiraan anggaran pada program/kegiatan sektor perumahan sebesar Rp1.074.000.000,00. Rencana aksi ini terdiri dari penjabaran program dan turunan kebutuhan infrastruktur pada Sektor Perumahan.

Tabel 8.8 Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Infrastruktur Perumahan

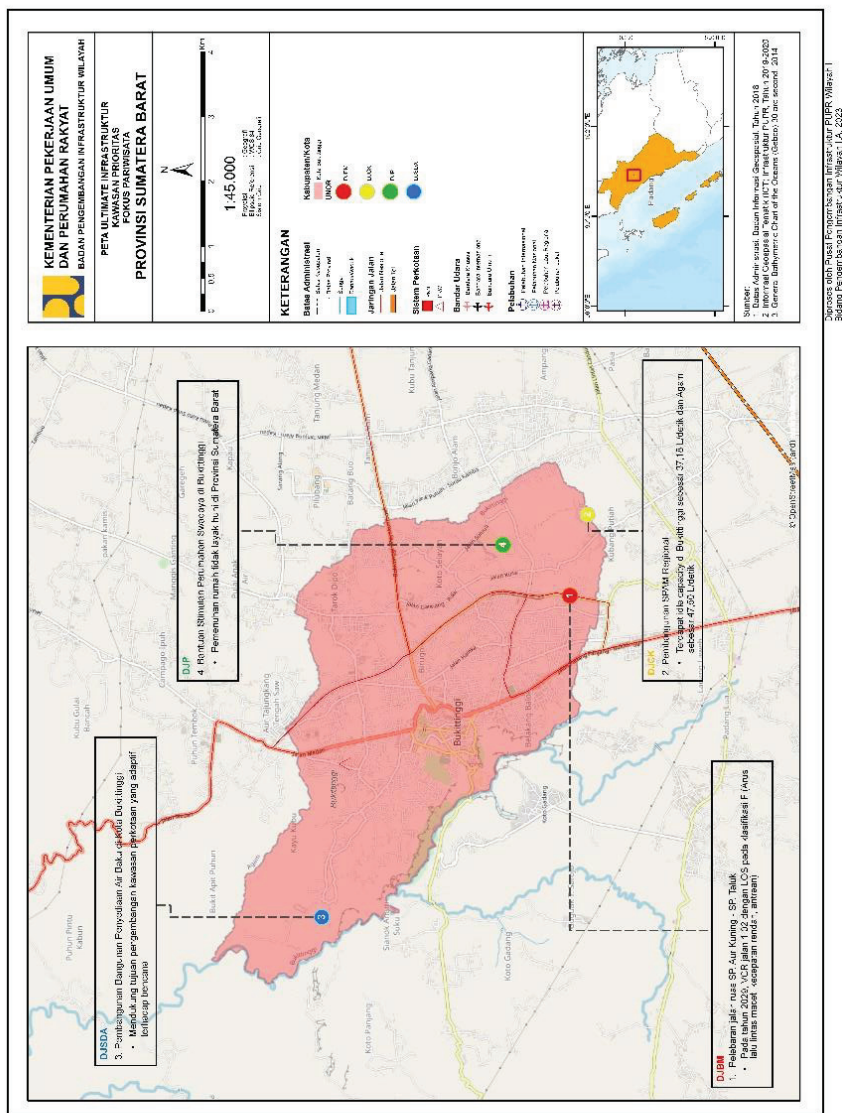
No	UNOR	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Pelaksanaan	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mulai	Selesai
1	PR	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	Pemenuhan rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat	RC perlu disiapkan	53.700	unit	Rp 1.074.000.000	APBN	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



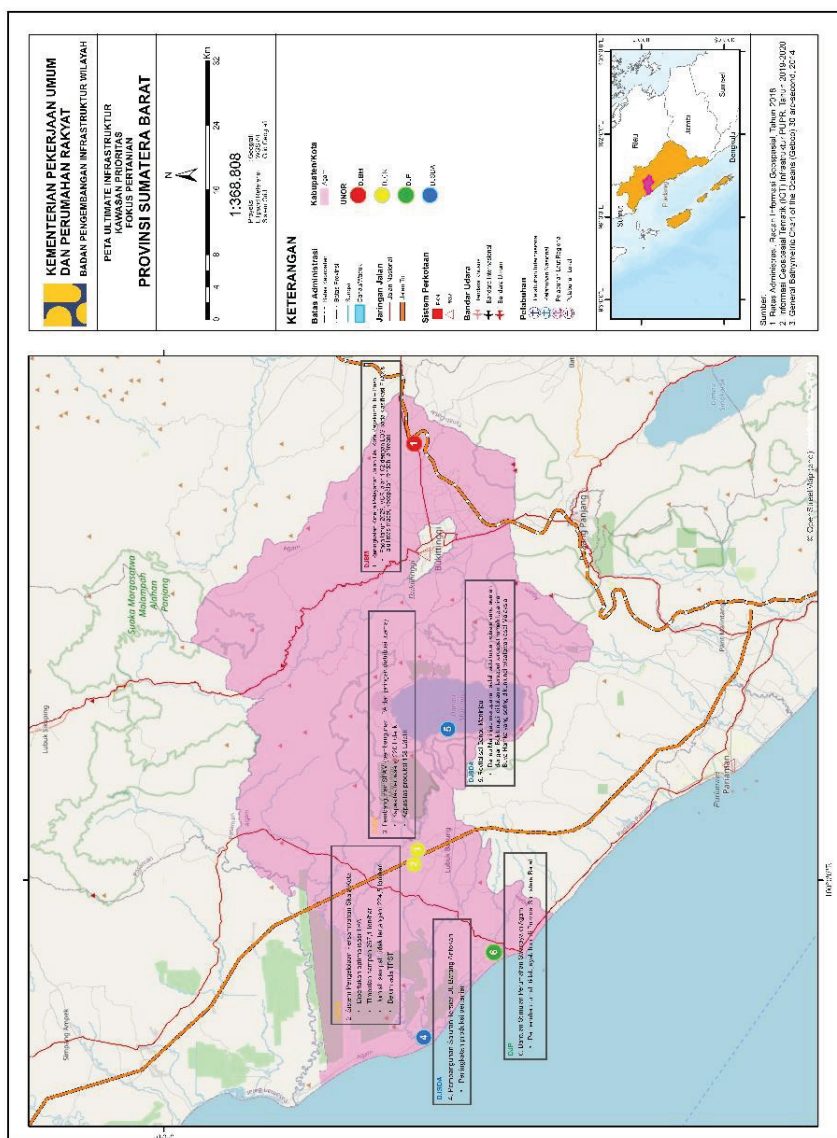
Gambar 8.5 Peta Ultimate Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan Palapa

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



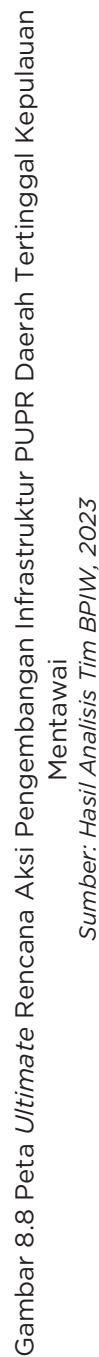
Gambar 8.6 Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR KSPN Bukittinggi

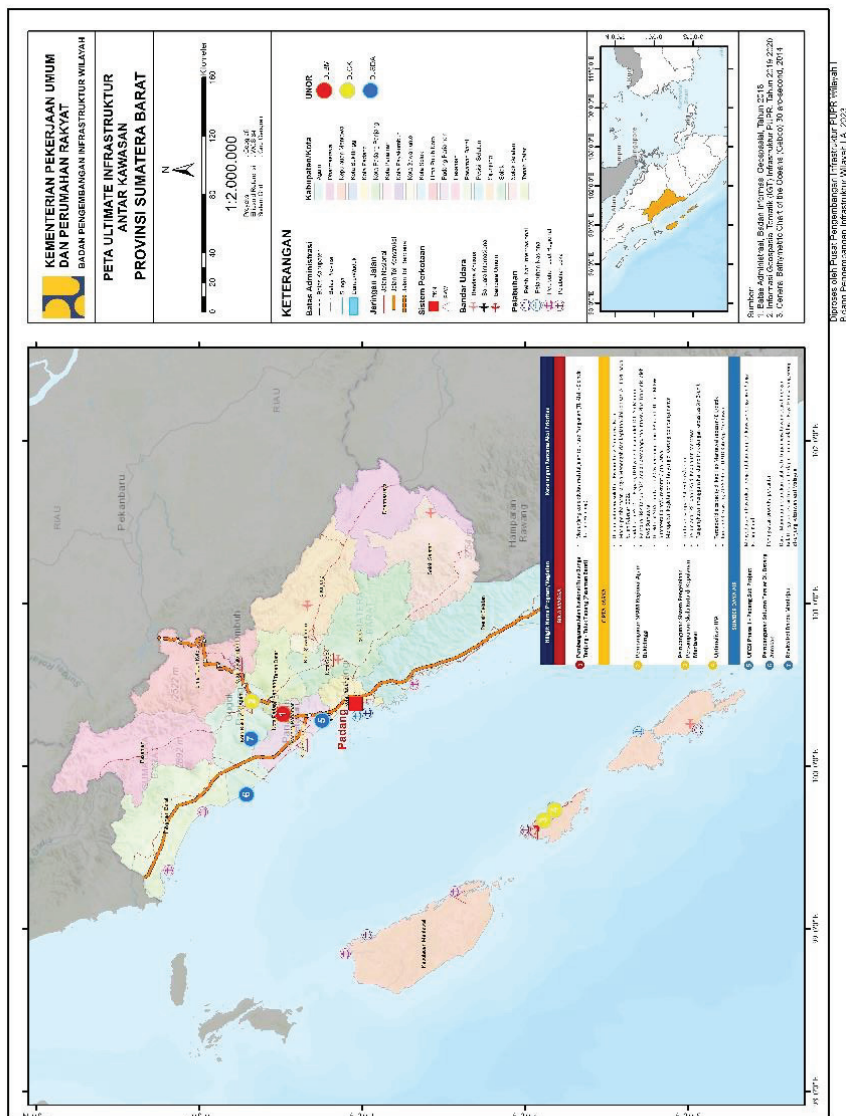
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



Gambar 8.7 Peta Ultimate Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR KPPN Agam

Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023





Gambar 8.9 Peta *Ultimate* Infrastruktur Antar Kawasan Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Hasil Analisis Tim BPIW, 2023



BAB 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW



9.1 Latar Belakang Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan dokumen Rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah dalam hal ini disebut dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam hal ini dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

9.2 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan *output* (infrastruktur terbangun), *outcome* (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), *benefit* (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), *impact* (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3 Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW
 - Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per tahun.
 - Pemantauan Lima (5) Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per 5 tahun.
2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW
 - Evaluasi Tahunan (*output* dan *outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.
 - Evaluasi Lima (5) Tahunan (*benefit*, *impact*, dan keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.

LAMPIRAN

Tabel 9.1 Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Kabupaten/Kota		Rencana Pelabuhan	2017	2022	2027	2037
Kep. Mentawai	1	Air Haji	PL	PL	PL	PL
	2	Bakai	PL	PL	PL	PL
	3	Labuhan Bajau	PR	PR	PR	PR
	4	Mabukkuk	PL	PL	PL	PL
	5	Pagai Selatan	PL	PL	PL	PL
	6	Sagitci	PL	PL	PL	PL
	7	Selat Bunga	PL	PL	PL	PL
	8	Simabuk	PL	PL	PL	PL
	9	Sinakak	PL	PL	PL	PL
	10	Subelen	PL	PL	PL	PL
	11	Tanopo	PL	PL	PL	PL
	12	Teluk Katurai	PL	PL	PL	PL
Kota Pariaman	13	Muara	PL	PL	PL	PL
Padang	14	Carocok Terusan	PL	PL	PL	PL
	15	Tiku	PL	PL	PL	PL
Padang Pariaman	16	Pariaman	PL	PL	PL	PL
	17	Tiram	PR	PR	PR	PR
Pasaman Barat	18	Sasak	PL	PL	PL	PL
Pesisir Selatan	19	Muara Air Haji	PL	PL	PL	PL
	20	Surantih	PL	PL	PL	PL

Tabel 9.2 Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Nama Pelabuhan Perikanan	Kabupaten/ Kota	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan, dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan			
		2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Bungus	Kota Padang	PPS	PPS	PPS	PPS
Muaro Anai	Kota Padang	PPI	PPI	PPI	PPI
Carocok Tarusan	Kab. Pesisir Selatan	PPP	PPP	PPP	PPN
Batu Kalang	Kab. Pesisir Selatan	CP	CP	PPI	PPI
Kambang	Kab. Pesisir Selatan	PPI	PPI	PPP	PPP
Surantih	Kab. Pesisir Selatan	PPI	PPI	PPI	PPI
Muaro Jambu	Kab. Pesisir Selatan	CP	CP	PPI	PPI
Muaro Gadang	Kab. Pesisir Selatan	CP	CP	PPI	PPI
Batang Kapas	Kab. Pesisir Selatan	CP	CP	PPI	PPI
Api-Api	Kab. Pesisir Selatan	CP	CP	PPI	PPI
Tiku	Kab. Agam	PPI	PPI	PPI	PPI
Muaro Putih	Kab. Agam	CP	CP	PPI	PPI
Air Bangis	Kab. Pasaman Barat	PPI	PPI	PPP	PPP
Sasak	Kab. Pasaman Barat	PPI	PPI	PPI	PPI
Pasir Sunur	Kota Pariaman	CP	CP	PPI	PPI
Anai Ketaping	Kab. Padang Pariaman	CP	CP	PPI	PPI
Ulakan Tapakis	Kab. Padang Pariaman	CP	CP	PPI	PPI
Gasam	Kab. Padang Pariaman	CP	CP	PPI	PPI
Pasir Baru	Kab. Padang Pariaman	PPI	PPI	PPI	PPI
Sikakap	Kab. Kepulauan Mentawai	PPI	PPI	PPP	PPP
Muara Siberut	Kab. Kepulauan Mentawai	CP	CP	PPI	PPI

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021.



www.pu.go.id